



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian.
- (2) Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan sebagai acuan penyusunan:

- a. rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
- b. rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Desember 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

 Ditandatangani
Secara Elektronik

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1100

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025–2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki fase transisi strategis menuju Indonesia Emas 2045 melalui periode pembangunan 2025-2029. Dalam konteks ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berperan sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional yang terus meningkatkan kualitas layanannya untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan periode pembangunan 2020-2024 dengan pencapaian yang signifikan. Selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur PU dilaksanakan secara masif dan komprehensif, berfokus pada lima sasaran strategis utama. Sasaran-sasaran ini mencakup (i) peningkatan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, (ii) pengembangan konektivitas jaringan jalan nasional, (iii) penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, (iv) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, serta (v) peningkatan tata kelola kementerian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Memasuki periode 2025-2029, Kementerian PU mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum serta memiliki Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) yang baru sebagaimana diatur dalam Perpres 170 tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum. Di dalam Perpres ini, Kementerian PU memiliki fungsi utama terkait sektor: sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi. Sektor-sektor tersebut diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan pada Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Misi tersebut, dengan nama Asta Cita, diakomodasi ke dalam RPJMN 2025-2029 menjadi 8 Prioritas Nasional (PN), meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perwujudan PN tersebut, Kementerian PU juga dihadapkan pada tantangan baru yang lebih kompleks, multidimensi, dan krusial dalam meletakkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks global, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi pada beberapa agenda internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Nationally Determined Contribution* (NDC), *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, serta *Paris Agreement* yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nation Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Komitmen ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi arah pembangunan sektor PU dalam jangka menengah.

1.1 Kondisi Umum

Dalam merumuskan strategi pembangunan infrastruktur periode 2025-2029, pemahaman komprehensif terhadap kondisi umum pembangunan nasional menjadi titik tolak yang krusial. Kondisi umum ini mencerminkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar empiris untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan.

Evaluasi kondisi umum ini dibangun melalui tiga perspektif strategis yang saling terkait. Pertama, tinjauan terhadap capaian pembangunan nasional secara makro yang memperlihatkan dinamika dan perkembangan Indonesia dalam konteks regional dan global. Kedua, analisis mendalam terhadap kinerja Kementerian PU periode 2020-2024 sebagai refleksi pembelajaran organisasional dan fondasi untuk perencanaan jangka menengah. Ketiga, pemetaan komprehensif capaian *output* utama di berbagai sektor infrastruktur yang menjadi indikator konkret kontribusi Kementerian PU terhadap pembangunan nasional.

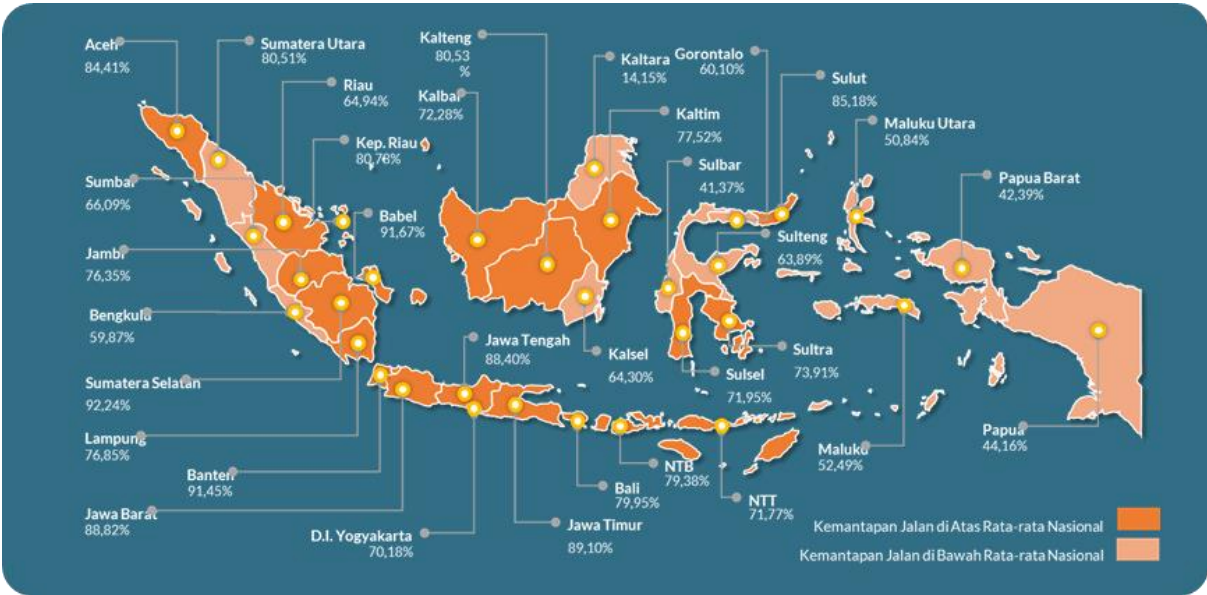
Ketiga perspektif ini tidak hanya memberikan gambaran retrospektif, tetapi juga menjadi basis analitis untuk mengantisipasi kompleksitas tantangan masa depan. Kondisi umum yang tergambar dari ketiga dimensi tersebut akan menjadi landasan strategis dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya periode 2025-2029. Dengan demikian, narasi kondisi umum ini berfungsi sebagai jembatan analitis yang menghubungkan pencapaian masa lalu dengan aspirasi pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional

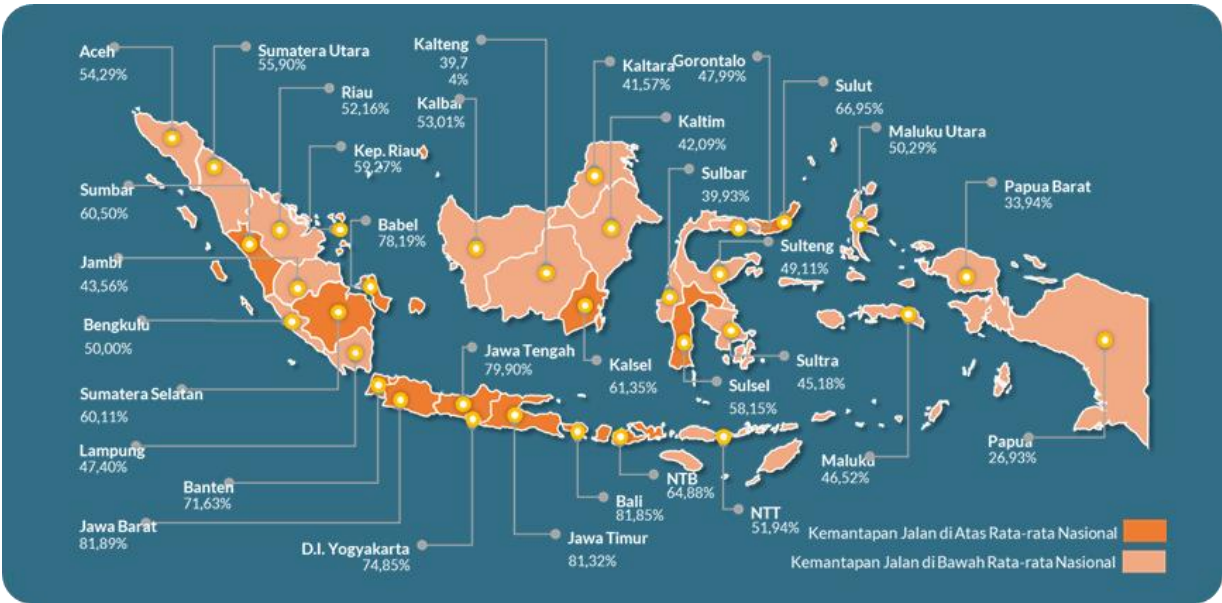
Dalam perjalanan transformasi pembangunan infrastruktur nasional, Indonesia telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan selama periode 2020-2024. Dari pembangunan bendungan strategis hingga pengembangan jaringan jalan baik tol maupun non tol, dari modernisasi sistem penyediaan air minum hingga penataan kawasan permukiman berkelanjutan, berbagai proyek infrastruktur telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, evaluasi



Gambar 1.2 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional

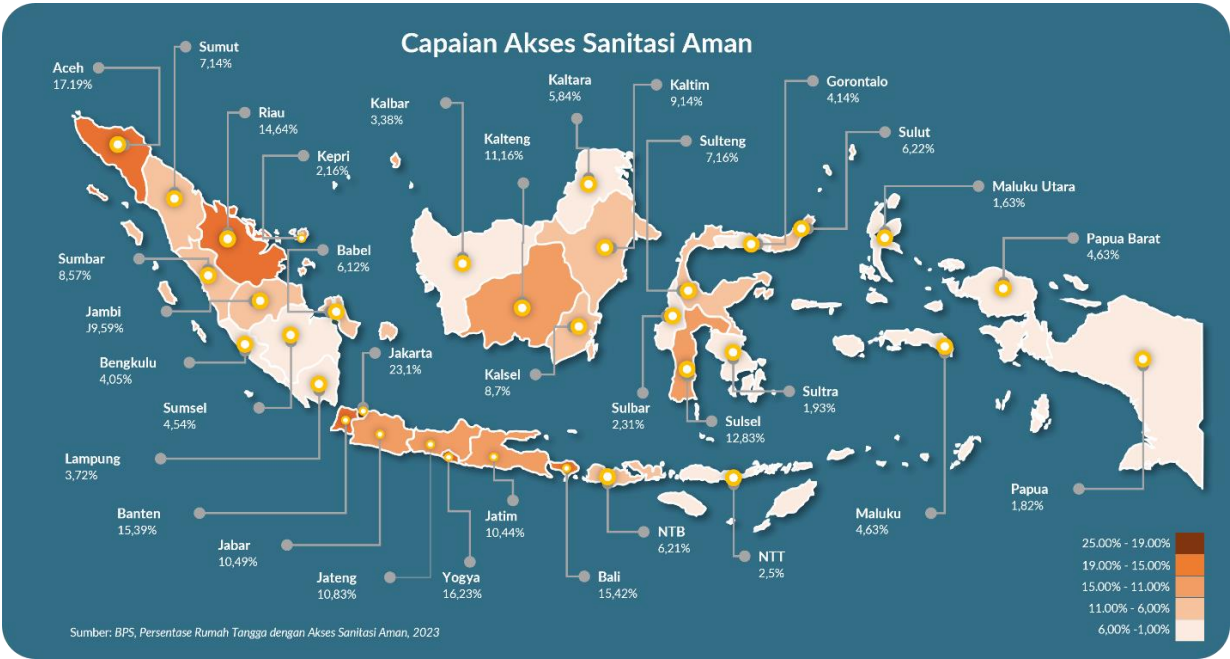


Gambar 1.3 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi



Gambar 1.4 Kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota

Kedua, kesenjangan infrastruktur konektivitas masih menjadi tantangan serius. Rasio jalan di Pulau Jawa dan Sumatera mencapai 3,3 kilometer per 100 kilometer persegi wilayah, sementara pulau-pulau lainnya hanya memiliki rasio 1,4 kilometer. Disparitas ini tercermin pula dalam kualitas jalan, yaitu sebesar 95,22% jalan nasional berada dalam kondisi mantap, namun persentase ini menurun signifikan pada jalan provinsi (71,33%) dan jalan kabupaten/kota (57,91%). Perbedaan tingkat layanan ini berdampak langsung pada efisiensi logistik dan pemerataan pembangunan ekonomi.



Gambar 1.5 Sebaran Persentase Akses Sanitasi Aman

Tabel 1.2 Perbandingan sebaran indikator terkait pengolahan air limbah antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan Pulau lainnya

Kondisi Infrastruktur	Jawa & Sumatera	Pulau Lainnya	Sumber
Jumlah IPALD Berbasis Institusi	28 unit	13 unit	Direktorat Sanitasi, 2024
Jumlah IPLT	189 unit	137 unit	Direktorat Sanitasi, 2025
Rata-rata Akses Sanitasi Layak	85,76 %	77,78 %	BPS, 2024
Rata-rata Akses Sanitasi Aman	10,89 %	6,08 %	BPS, 2024
Persentase Rumah Tangga Buang Air Besar Sembarangan Aman	2,74 %	5,44 %	BPS, 2024
Tingkat Prevalensi Stunting	17,47%	25,00%	Kementerian Kesehatan, 2024

Ketiga, ketersediaan infrastruktur sanitasi juga menunjukkan kesenjangan antar wilayah. Jawa-Sumatera memiliki ketersediaan infrastruktur sanitasi yang lebih lengkap serta akses terhadap sanitasi layak dan aman yang lebih luas. Kondisi ini berpengaruh terhadap masih tingginya praktik buang air besar sembarangan di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal, ketersediaan akses sanitasi merupakan bagian dari intervensi gizi sensitif dalam penanganan *stunting*. Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah domestik ini turut berkontribusi terhadap lebih tingginya tingkat prevalensi *stunting* di luar Jawa dan Sumatera.



Gambar 1.6 Sebaran Persentase Pengelolaan Sampah

Tabel 1.3 Perbandingan sebaran indikator terkait persampahan antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan Pulau lainnya

Indikator	Pulau Jawa & Sumatera	Pulau Lainnya	Sumber
Rasio TPA : TPST : TPS3R : Bank Sampah (unit)	352 : 22 : 1.599 : 13.890	244 : 19 : 305 : 2.651	Kementerian PU 2022 dan SIPSN KLHK 2022
Capaian Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	47,22%	46,75%	Susenas MKP 2022
Rasio Tingkat Pencemaran Air : Tanah : Udara (%)	16,18 : 1,77 : 6,63	10,73 : 2,23 : 8,21	BPS 2021

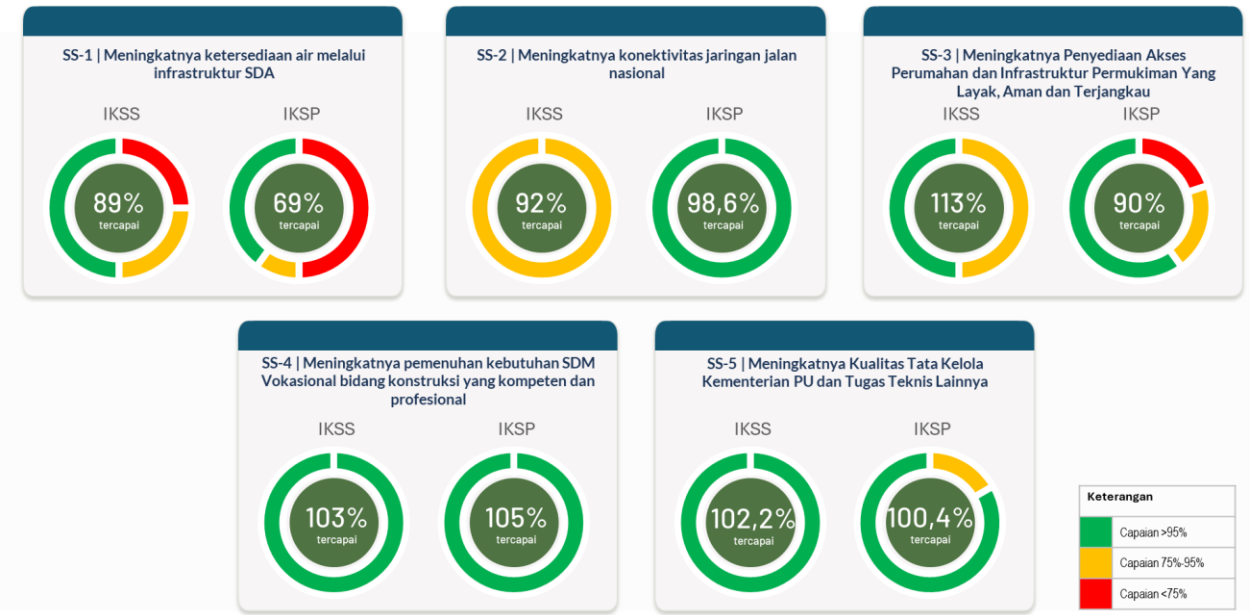
Keempat, pengelolaan sampah perkotaan dalam lingkup global, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dengan capaian sampah terkelola hanya 54,85%. Capaian ini tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di Asia seperti Singapura yang telah mencapai 90%. Meskipun Jawa-Sumatera memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang lebih banyak (352 TPA, 22 TPST, dan 13.890 Bank Sampah), capaian pengelolaan sampah (47,22%) di wilayah tersebut justru sedikit lebih rendah dibanding wilayah lainnya (46,75%).

Kesenjangan multidimensi ini memiliki implikasi serius terhadap berbagai aspek pembangunan nasional. Dari sisi ketahanan bencana, menurut *Aqueduct Global Flood Risk Country Rankings* tahun 2015, Indonesia mencatat 635.470 penduduk terdampak banjir setiap tahun, menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara. Dari perspektif ekonomi, disparitas waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau pada tahun 2024 antara Jawa (1,90 jam/100km) dan Sulawesi (2,30 jam/100km) mencerminkan inefisiensi logistik yang menghambat pertumbuhan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, dampak air tidak layak terhadap *stunting* di wilayah timur Indonesia (25,00%) lebih tinggi dibandingkan Jawa-Sumatera (17,47%).

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024

Dalam rangka mendukung visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Sasaran Strategis (SS) yang dituangkan di dalam dokumen Revisi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dengan capaian kinerja bervariasi. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di

tahun 2024 terhadap target Renstra 2020-2024, maka dilakukan perbandingan antara target Renstra dan realisasi tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.7 Capaian IKSS dan IKSP Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Pada SS-1, yakni meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang dapat menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. SS-1 ini berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Secara rata-rata keseluruhan Indikator, kinerja SS-1 adalah 96%, dengan rincian sebagai berikut:

- IKSS-1 Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di Wilayah Sungai kewenangan pusat (%) dengan target 79 dan realisasi 69,17 sehingga persentase kinerjanya sebesar 87,5%
- IKSS-2 Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai kewenangan pusat (%) dengan target 100 dan realisasi 63,64 sehingga persentase kinerjanya sebesar 63,64%
- IKSS-3 Kapasitas tampung per kapita (m³/kapita) dengan target 58,5 dan realisasi 59,59 sehingga persentase kinerjanya sebesar 101%
- IKSS-4 Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m³/tahun/ha) dengan target 22.680 dan realisasi 30.133 sehingga persentase kinerjanya sebesar 132%

Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja 2024 terhadap Target Renstra 2020-2024					
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
SS-1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air					
IKSS-1	Persentase Penyediaan Air Baku Untuk Air Bersih di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Pusat	%	79	69.17	87.56%
IKSS-2	Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di WS Kewenangan Pusat	%	100	63,64	63,64%
IKSS-3	Kapasitas Tampung per Kapita	m3/kapita	58,5	59,59	101,86%
IKSS-4	Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi	m3/tahun/ha	22,680	30,133	132,86%
SS-2 Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional					
IKSS-1	Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau	jam/100 km	1,9	2,14	88,79%
SS-3 Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau					

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
IKSS-1	Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman Yang Layak dan Aman Melalui Pendekatan <i>Smart Living</i>	%	98,57	91,61	92,94%
IKSS-2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	59,79	59,74	99,92%
SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional					
IKSS-1	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	%	3,4	4,87	143,24%
IKSS-2	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Kompeten dan Siap Kerja	%	90	94,96	105,51%
SS-5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya					
IKSS-1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	87,81	87,86	100,06%
IKSS-2	Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	%	100	163,47	163,47%
IKSS-3	Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	%	91	97	106,59%
IKSS-4	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	%	85	86,44	101,69%
IKSS-5	Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	%	82,5	88,35	107,09%
IKSS-6	Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	%	76	82,09	108,01%

Kemudian pada SS-2, Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang tergambar dalam satu IKSS, yakni IKSS-1 Waktu tempuh pada lintas utama (jam/100 km). SS-2 ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga. Capaian IKSS tersebut juga secara langsung menggambarkan capaian SS-2. Berdasarkan hasil evaluasi, dari target sebesar 1,9 terdapat capaian 2,14 sehingga diperoleh persentase kinerja sebesar 88,8%.

Selanjutnya pada SS-3, meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, capaiannya dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan. SS-3 memiliki dua IKSS, dengan perincian target, realisasi, dan persentase kinerja sebagai berikut:

- IKSS-1 Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%) dengan target 98,57 dan realisasi 91,61, sehingga persentase kinerjanya sebesar 92,9%
- IKSS-2 Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%) dengan target 59,48 dan realisasi 59,74, sehingga persentase kinerjanya sebesar 100,4%

Pada SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, terdapat 2 (dua) IKSS yang kontribusinya masing-masing dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perincian target, realisasi, dan persentase kinerja dari IKSS dimaksud sebagai berikut:

- IKSS-1 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%) dengan target 3,4 dan realisasi 4,87 sehingga persentase kinerjanya sebesar 143,22%

- IKSS-2 Persentase lulusan Pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja (%) dengan target 90 dan realisasi 94,96 sehingga persentase kinerjanya sebesar 105,51%

Pada SS-5 Meningkatnya kualitas tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya, terdapat 6 (enam) IKSS yang menggambarkan ketercapaian Sasaran ini. Perincian target, realisasi, dan persentase kinerja dari IKSS dimaksud sebagai berikut:

- IKSS-1 Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR (%) dengan target 87,81 dan realisasi 87,86 sehingga persentase kinerjanya sebesar 100,06%
- IKSS-1 Tingkat kualitas tata Kelola Kementerian PUPR (%) dengan target 87,81 dan realisasi 87,86 sehingga persentase kinerjanya sebesar 100,06%
- IKSS-2 Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%) dengan target 100 dan realisasi 163,47 sehingga persentase kinerjanya sebesar 163,47%
- IKSS-3 Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%) dengan target 91 dan realisasi 97 sehingga persentase kinerjanya sebesar 106,59%
- IKSS-4 Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR (%) dengan target 85 dan realisasi 86,44 sehingga persentase kinerjanya sebesar 101,69%
- IKSS-5 Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis (%) dengan target 82,5 dan realisasi 88,35 sehingga persentase kinerjanya sebesar 107,09%
- IKSS-6 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi (%) dengan target 76 dan realisasi 82,09 sehingga persentase kinerjanya sebesar 108,01%

Tabel 1.4 menyajikan perbandingan capaian tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024. Dari total 15 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), sebanyak 10 IKSS berhasil mencapai target, sementara 5 IKSS lainnya belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja IKSS yang sesuai atau melebihi target akan menjadi *baseline* untuk penetapan target kinerja tahun 2025 serta proyeksi target kinerja berikutnya. Sebaliknya, capaian kinerja IKSS yang berada di bawah target akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan target perencanaan kinerja tahun berikutnya dan jangka menengah ke depan.

Memasuki periode perencanaan 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi momentum strategis untuk melakukan transformasi fundamental dalam pendekatan pembangunan infrastruktur. Diperlukan reformulasi strategi, yang tidak sekadar melanjutkan capaian kuantitatif, tetapi secara mendasar mengubah paradigma pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Reorientasi dari pendekatan berbasis lokasi menjadi berbasis dampak
2. Penguatan integrasi antara pembangunan fisik dan pengembangan kapasitas
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan
5. Peningkatan partisipasi multipihak, termasuk badan usaha, akademisi, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan infrastruktur. Peningkatan partisipasi multi pihak, termasuk badan usaha, akademisi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur

Transformasi mendasar ini menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa perubahan sistemik dalam

pendekatan pembangunan infrastruktur, target-target pembangunan nasional akan sulit tercapai, dan kesenjangan antar wilayah berpotensi semakin melebar.

1.1.3 Capaian *Output* Utama Kementerian PU

Setelah menganalisis capaian pembangunan nasional secara makro dan kinerja strategis Kementerian PU periode 2020-2024, diperlukan pemahaman mendalam terhadap manifestasi konkret dari upaya pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. Capaian *output* utama merefleksikan kontribusi nyata Kementerian PU dalam mentransformasi arah kebijakan nasional menjadi aset infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

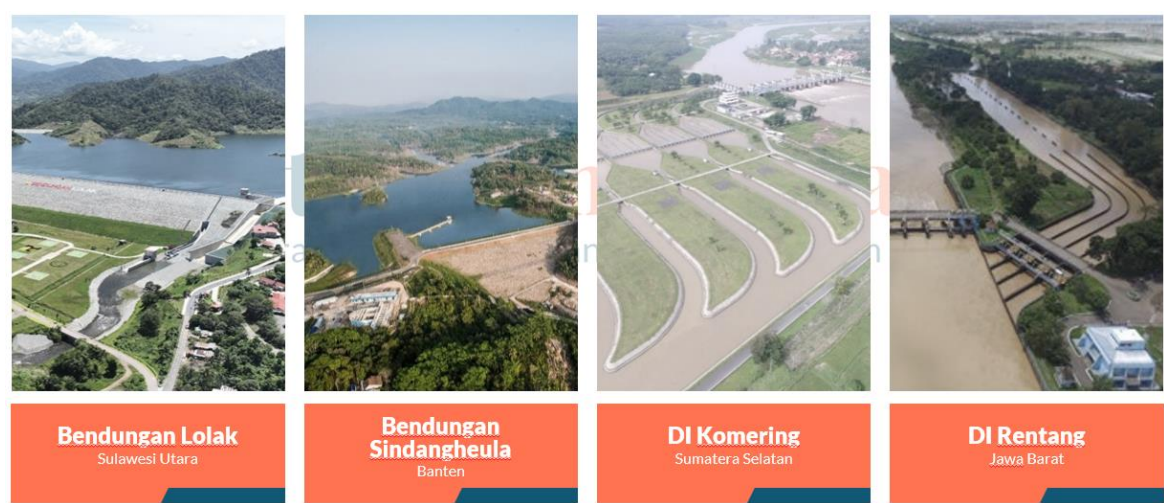
Tinjauan terhadap capaian *output* utama ini menggambarkan akumulasi investasi infrastruktur selama hampir satu dekade pembangunan. Lebih dari sekadar pencatatan kuantitatif, analisis ini mengungkap pola distribusi pembangunan, kualitas implementasi program, dan efektivitas alokasi sumber daya di berbagai sektor infrastruktur yang menjadi mandat Kementerian PU.

Capaian *output* utama ini memiliki signifikansi strategis sebagai *baseline assessment* untuk perencanaan periode 2025-2029. Selain menyediakan pembelajaran empiris dari implementasi program periode sebelumnya, analisis ini juga mengidentifikasi *gap* infrastruktur yang masih perlu ditutup, *best practices* yang dapat direplikasi, dan inovasi yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan efisiensi pembangunan di masa mendatang.

1.1.3.1 Sektor Sumber Daya Air

Selama periode 2015-2024, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur sumber daya air. Dalam pembangunan bendungan, Indonesia telah menyelesaikan 53 unit dari total rencana 61 bendungan atau menambah jumlah bendungan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dari semula 187 bendungan menjadi 240 bendungan (penambahan aset sebesar 22%). Beberapa bendungan yang telah selesai termasuk Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Lolak di Sulawesi Utara, Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, dan Tiu Suntuk di NTB. Sementara itu, beberapa bendungan masih dalam tahap konstruksi, seperti Temef di NTT, dan Way Apu di Maluku.

Infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman pantai yang telah dibangun pada periode 2015-2024 yaitu sepanjang 2.076,40 kilometer atau tercapai penambahan aset sebesar 16,12% untuk pengendalian daya rusak air. Proyek-proyek unggulan termasuk pengendalian banjir di Kota Jambi, Kali Bekasi, dan Sudetan Kali Ciliwung, serta pembangunan pengaman pantai di Jakarta dan Tanjung Lesung.



Gambar 1.8 *Showcase* Pembangunan Infrastruktur PU Sektor Sumber Daya Air

Sumber: Dokumentasi Kementerian PU, 2024.

Dalam pengembangan jaringan irigasi pada periode 2015-2024, pemerintah telah membangun 1.243 juta hektar daerah irigasi baru, atau penambahan luas sebesar 11,98%. Pembangunan daerah irigasi antara lain DI Slinga, DI Jambo Aye, dan DI Baliase, termasuk pembangunan bendung-bendung pendukung seperti Bendung Lereh dan Bendung Wanggar.

Untuk rehabilitasi jaringan irigasi, pada periode 2015-2024 capaian telah mencapai 4,61 juta hektar atau sebesar 86,33% dari jaringan irigasi yang memerlukan rehab (kondisi rusak berat dan sedang). Rehabilitasi telah dilakukan pada daerah irigasi penting antara lain DI Komering, DI Way Umpu, DI Way Rarem, dan DI Sampean Baru, termasuk jaringan irigasi untuk mendukung program *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

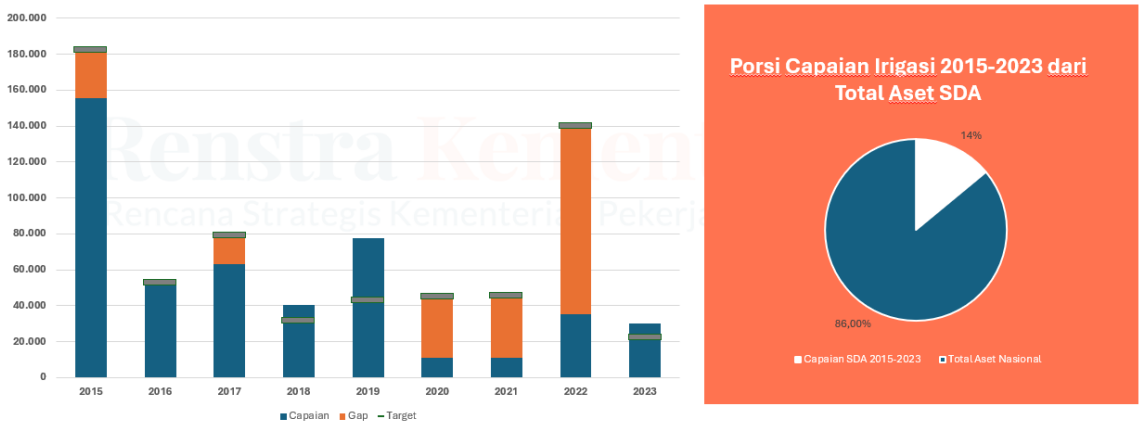
Di bidang penyediaan air baku periode 2015-2024, pembangunan sarana dan prasarana air baku telah meningkatkan kapasitas sebesar 46,76 m³/detik sehingga kapasitas air baku nasional menjadi 253,68 m³/detik atau penambahan aset sebesar 18,43%. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air baku yang sudah dilaksanakan antara lain air baku untuk Kawasan Industri Batang, air baku Jonggol-Klapanunggal, dan air baku *Intake* Sepaku.

Untuk penyimpanan air skala kecil pada periode 2015-2024, pemerintah telah membangun 1.391 unit embung, atau penambahan jumlah aset embung sebesar 31,82%. Embung yang telah selesai dibangun antara lain Embung Sriwijaya di Palembang, Embung Kandang Menjangan di Sukoharjo, dan Embung Anak Munting di NTT.

Pencapaian-pencapaian ini mencerminkan upaya komprehensif pemerintah dalam mengelola sumber daya air nasional dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) peningkatan kapasitas tampung air melalui bendungan dan embung; (2) perlindungan terhadap daya rusak air melalui infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai; serta (3) pengelolaan air produktif melalui jaringan irigasi dan penyediaan air baku.

Namun, terlihat bahwa sebagian besar infrastruktur masih berada di bawah 50% dari total aset nasional, menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan di masa depan. Pengecualian adalah rehabilitasi jaringan irigasi yang telah mencapai 52%, menandakan fokus pemerintah pada peningkatan infrastruktur irigasi yang sudah ada untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Peningkatan daerah layanan irigasi mendukung Swasembada Pangan



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU 2015-2023

Gambar 1.9 Capaian Peningkatan Daerah Layanan Irigasi (Ha) 2015-2024

Capaian peningkatan daerah layanan jaringan irigasi selama periode 2015-2024 tampak fluktuatif. Tahun 2015 menunjukkan capaian tertinggi, yaitu 155.382 hektar dari total target 182.017 hektar. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2016 menjadi 52.518 hektar. Tahun 2017 kembali menunjukkan peningkatan dengan capaian 63.223 hektar dari target 78.867,30 hektar. Namun, selanjutnya mengalami tren penurunan di tahun 2018.

Capaian kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sekitar 42,599 hektar, tetapi mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, kemungkinan terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan *refocusing* anggaran nasional. Tahun 2020 capaian yang diraih seluas 13.685 hektar sementara target seluas 45.000 hektar.

Tahun 2022 mencatat lonjakan capaian yang signifikan, mencapai sekitar 35.099 hektar dengan target sebesar 135.000 hektar. Pada tahun 2023, capaian menjadi sebesar 50.477 hektar dari target sekitar 50.000 hektar. Terakhir, capaian seluas 10.052 hektar dari target 10.000 hektar pada tahun 2024.

Analisis ini mengindikasikan beberapa hal penting: Pertama, adanya kesenjangan konsisten antara target dan capaian yang menunjukkan tantangan dalam implementasi program irigasi. Kedua, porsi capaian sebesar 14% dari total aset nasional mengindikasikan masih besarnya potensi pengembangan jaringan irigasi di masa depan. Ketiga, fluktuasi tahunan yang cukup ekstrem menunjukkan adanya faktor-faktor eksternal seperti *refocusing* anggaran (terutama selama pandemi) yang mempengaruhi konsistensi pembangunan infrastruktur irigasi.

1.1.3.2 Sektor Bina Marga

Terdapat empat kategori utama infrastruktur jalan dan jembatan dengan pencapaian signifikan yang mendukung konektivitas nasional. Dalam sektor jalan tol, Indonesia telah berhasil mengoperasikan 2.045 kilometer jalan tol. Capaian ini menunjukkan investasi signifikan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Beberapa proyek jalan tol unggulan yang telah diselesaikan meliputi Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), Manado-Bitung, Binjai-Langsa, Cibitung-Cilincing, dan Serpong-Balaraja. Pembangunan ini merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan sistem transportasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan jalan baru non-tol, telah dibangun sepanjang 5.771 kilometer jalan baru. Proyek-proyek strategis meliputi Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang melintasi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur; jalan perbatasan di Kalimantan Barat (Siding/Seluas-Sekayang/Entikong); jalan-jalan di pedalaman Kalimantan Timur (Long Pahangai-Long Boh dan Long Bagun-Tering); jalan penghubung daerah perbatasan (Rasau-Jasa-Bts. Negara); serta jalan lingkaran di beberapa kota seperti Manado *Outer Ring Road* III dan Lingkaran Kendari. Pembangunan ini menjadi krusial untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil dan mendukung pemerataan pembangunan.



Gambar 1.10 *Showcase* Pembangunan Infrastruktur PU Sektor Bina Marga
Sumber: Dokumentasi Kementerian PU, 2024

Dalam pembangunan jembatan, telah diselesaikan 119.603 meter jembatan. Proyek-proyek signifikan termasuk Jembatan Sei Wampu (Sumatera Utara), Ciloseh (Jawa Barat), Sei Alalak (Kalimantan Selatan), Kapuas I (Kalimantan Barat), Youtefa (Papua), dan Jembatan Kretek 2 (DIY). Pembangunan jembatan ini telah membuka akses baru dan memperkuat konektivitas antar pulau dan wilayah yang terpisah oleh sungai atau perairan.

Selain itu, 554 unit jembatan gantung telah dibangun di berbagai wilayah, termasuk Jembatan Gantung Kareho (Kalimantan Barat), Girpasang (Jawa Tengah), dan Manembonembo-Girian Bawah (Sulawesi Utara). Pembangunan jembatan gantung ini khususnya berperan penting dalam menyediakan akses transportasi bagi masyarakat di daerah terpencil.

Untuk mendukung sistem transportasi perkotaan dan mengatasi kemacetan, pemerintah juga telah membangun 25.980 meter jembatan *flyover* dan *underpass*. Proyek-proyek utama termasuk *Flyover* Kopo (Jawa Barat), *Flyover* Patih Galung dan Sekip Ujung (Sumatera Selatan), *Flyover* Aloha (Jawa Timur), *Underpass* Jatingaleh (Jawa Tengah), dan *Underpass* Simpang Tugu Ngurah Rai (Bali).

Secara keseluruhan, capaian pembangunan infrastruktur Bina Marga selama periode 2015-2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas nasional, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Meskipun pencapaian ini signifikan, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang perlu ditangani. Hal ini menunjukkan perlunya keberlanjutan investasi infrastruktur transportasi untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien.

1.1.3.3 Sektor Cipta Karya dan Prasarana Strategis

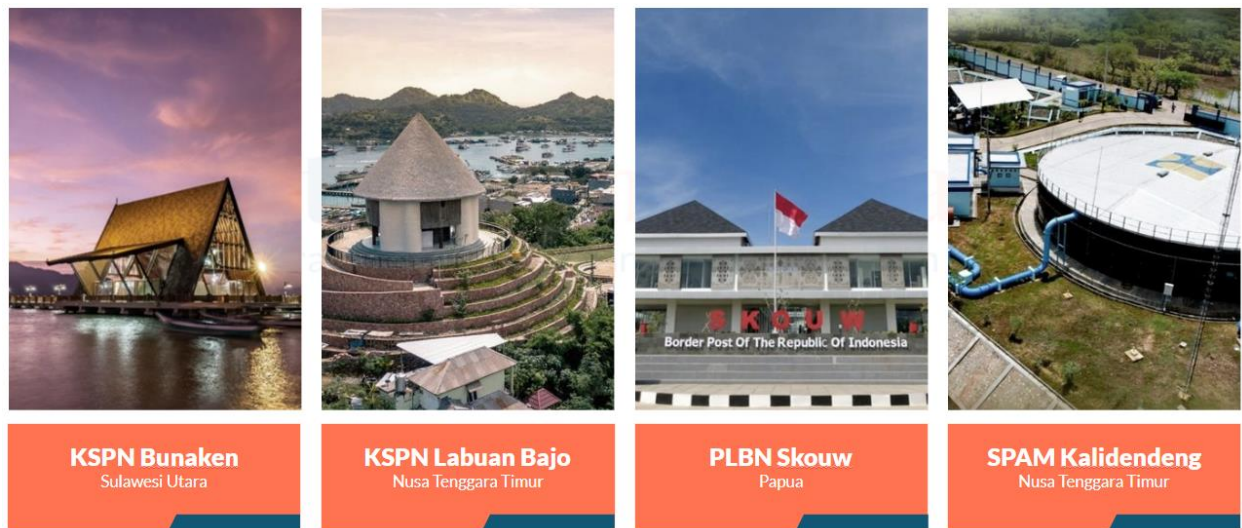
Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur permukiman untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menunjang aktivitas perekonomian kawasan. Pada sektor air minum, kapasitas SPAM telah bertambah sebesar 32.882 liter per detik dalam kurun waktu 2015–2024. Pembangunan SPAM yang telah direalisasikan antara lain tersebar di Provinsi Jawa Timur melalui SPAM Regional Umbulan, Provinsi Sumatera Utara melalui SPAM Regional Mebidang, Provinsi NTT melalui SPAM Way Messe II. Infrastruktur SPAM yang dibangun ini telah meningkatkan akses air minum layak dari 68,38% pada tahun 2014 menjadi 92,64% pada tahun 2024.

Pengelolaan sanitasi dan persampahan juga menunjukkan kemajuan dengan penambahan layanan yang menjangkau 13,2 juta kepala keluarga. Pembangunan TPA Regional di Piyungan, Mamitarang, dan Kebong Kongok NTB, serta instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) skala perkotaan di Kota Pekanbaru, Palembang, Jambi, dan Makassar menjadi bagian penting dalam sistem sanitasi dan persampahan nasional.

Kinerja pengembangan kawasan permukiman menunjukkan capaian yang signifikan. Pada tahun 2015-2024, Kementerian PU berhasil menata 39.733 hektar kawasan permukiman menjadi lingkungan yang lebih layak huni. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai program seperti Pamsimas dan TPS3R yang berbasis masyarakat, serta Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mengintegrasikan pendekatan komprehensif dalam penataan permukiman. Selain itu, telah dilakukan penataan pada 8 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia. Di wilayah perbatasan, telah dibangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dari 18 PLBN yang diamanatkan dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat hingga Skouw di Papua. PLBN ini berfungsi sebagai fasilitas perbatasan dan pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terluar.

Selain itu, dalam rangka mendukung perwujudan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern, mandiri, dan berdaulat sesuai dengan prioritas RPJMN 2020-2024, sektor bangunan gedung telah melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan untuk Kompleks Kawasan Istana Kepresidenan, Kompleks Kawasan Istana Wakil Presiden, Kompleks Bangunan Gedung Perkantoran Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, Otorita IKN, Kementerian PU, serta bangunan gedung dan kawasan peribadatan.

Pembangunan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan telah dilaksanakan untuk mendukung program-program prioritas. Pada periode 2020-2024, telah terlaksana pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 979.847,02 m² serta pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 100 kawasan.



Gambar 1.11 *Showcase* pembangunan infrastruktur PU sektor Cipta Karya
Sumber: Dokumentasi Kementerian PU, 2024

Selama periode 2020–2024, Kementerian PUPR telah membangun, merehabilitasi dan merenovasi 4.719 unit prasarana strategis terdiri dari prasarana dan sarana dasar dan menengah, Perguruan Tinggi, pasar, dan prasarana olah raga, antara lain Pembangunan Perguruan Tinggi GIK UGM dan UIII, rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo dan Pasar Induk Kota Batu, serta pembangunan fasilitas olahraga seperti *Indoor Multifunction Stadium*, Stadion, dan *Venue PON XXI Aceh-Sumut*.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur dasar permukiman Indonesia masih memerlukan upaya berkelanjutan dan berkesinambungan antar para pemangku kepentingan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan infrastruktur secara optimal. Namun, hasil yang dicapai selama 2015-2024 menjadi landasan untuk pembangunan permukiman yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.1.3.4 Dukungan Manajemen

Sasaran Strategis 5 (SS-5) yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya diimplementasikan melalui enam indikator kinerja yang masing-masing menjadi tanggung jawab unit organisasi berbeda. Pada tahun 2024, secara keseluruhan SS-5 menunjukkan capaian kinerja yang positif.

Indikator pertama, tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, mencapai realisasi sebesar 87,86% dari target 87,81%. Capaian ini menghasilkan kinerja sebesar 100,06% yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR sebesar 93,25% dari target 92,00%, dan capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PUPR sebesar 84,27% dari target 85,00%. Meski capaian RB belum memenuhi target, namun secara keseluruhan indikator ini masih mencapai target yang ditetapkan.

Indikator kedua tentang tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur menunjukkan capaian yang sangat memuaskan, yaitu sebesar 163,47% dari target 100%. Keberhasilan signifikan ini didukung oleh percepatan proses KPBU melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan, terpenuhinya target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan, serta peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam ekosistem investasi infrastruktur. Realisasi investasi mencapai Rp70,17 triliun dari target Rp36,57 triliun, yang terdiri dari 8 proyek KPBU di berbagai sektor.

Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur sebagai indikator ketiga juga menunjukkan capaian positif, yaitu 97% dari target 91% atau dengan kinerja sebesar 107%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas *Internal Audit Capability Model* yang meningkat dari level 3 ke level 4, adanya mitigasi risiko pada penugasan khusus, penguatan budaya sadar risiko, serta pemutakhiran NSPK bidang pengawasan intern.

Indikator keempat, indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR mencapai 86,44% dari target 85%, dengan kinerja sebesar 101,7%. Pencapaian ini didukung oleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup 10.707 orang ASN, pemenuhan standar kompetensi jabatan bagi 10.446 orang, serta pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP bagi 8.196 orang ASN. Metode pengembangan kompetensi yang beragam seperti *e-learning*, *coaching clinic*, dan *quick assessment* turut mendukung keberhasilan ini.

Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis sebagai indikator kelima mencapai 88,35% dari target 82,5% dengan kinerja 107,09%. Sejumlah 220 dari 249 kawasan strategis yang di antaranya meliputi Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri, Kawasan Bencana, Daerah Tertinggal, dan kawasan prioritas lainnya yang tersebar di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, disepakati bersama dalam Rakorbangwil 2020-2024. Kesepakatan bersama tersebut mempertimbangkan target nasional dan aspirasi dari kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam tahapan siklus pemrograman tahunan berikutnya, yaitu Konsultasi Regional (Konreg).

Indikator keenam yaitu tingkat keandalan sumber daya konstruksi mencapai 82,09% dari target 76%, menghasilkan kinerja sebesar 108,01%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (95,47%), tingkat dukungan rantai pasok konstruksi (113,48%), dan tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi (110,30%).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat variasi kinerja di antara keenam indikator. Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur menunjukkan peningkatan sangat signifikan dibandingkan tahun 2023. Persentase kualitas pengawasan intern dan tingkat keselarasan dukungan infrastruktur juga menunjukkan kinerja yang konsisten. Sementara tingkat kualitas tata kelola, indeks pengembangan kompetensi SDM, dan tingkat keandalan sumber daya konstruksi menunjukkan sedikit penurunan meskipun tetap memenuhi target.

Secara keseluruhan, capaian kinerja SS-5 menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah berhasil meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024.

1.2 Tantangan dan Potensi Permasalahan

Transisi Indonesia menuju negara maju menghadapi Kementerian Pekerjaan Umum pada dinamika permasalahan yang semakin kompleks. Periode 2025-2029 tidak hanya ditandai oleh *legacy issues* dari pembangunan sebelumnya, tetapi juga munculnya tantangan baru yang bersifat sistemik dan transformatif. Pemahaman mendalam terhadap spektrum tantangan ini menjadi prasyarat fundamental dalam merumuskan strategi antisipatif yang tepat sasaran.

Kompleksitas tantangan yang dihadapi dapat dipetakan melalui tiga lapis analisis yang saling berhubungan. Pertama, tantangan global yang menciptakan tekanan eksternal

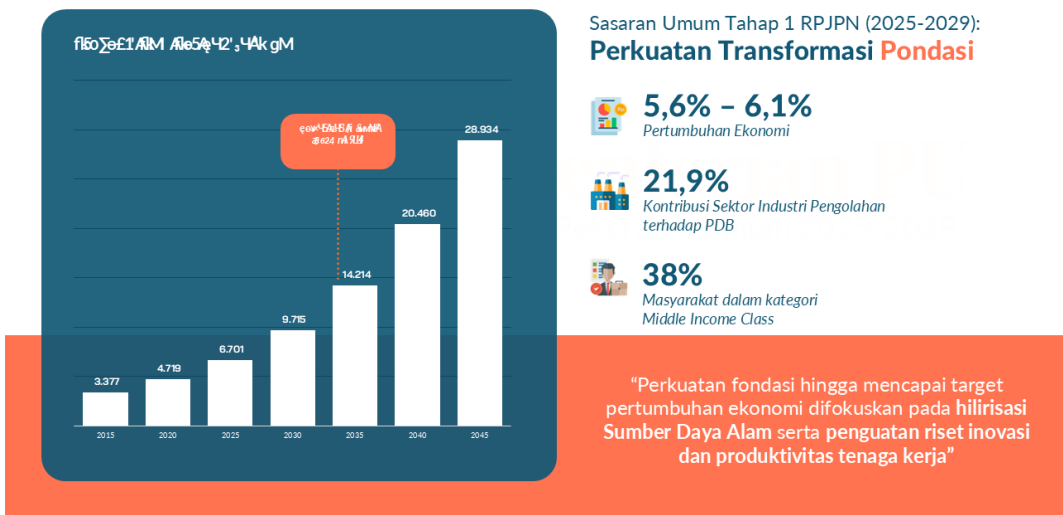
melalui megatren dunia, mulai dari perubahan iklim, revolusi teknologi, hingga dinamika geopolitik yang menuntut adaptasi struktural dalam penyelenggaraan infrastruktur. Kedua, tantangan spesifik dalam penyelenggaraan infrastruktur PU yang mencakup aspek teknis, finansial, regulasi, dan kelembagaan sebagai manifestasi dari kondisi internal yang harus diperbaiki. Ketiga, isu-isu sektoral konkret yang menjadi *bottleneck* operasional dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur di berbagai bidang.

Dimensi tantangan tersebut tidak beroperasi secara terpisah, melainkan membentuk jejaring permasalahan yang saling memengaruhi dan memperkuat dampaknya. Tantangan global menciptakan konteks makro yang mengubah paradigma pembangunan infrastruktur dari pendekatan konvensional menuju *sustainable* dan *resilient development*. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur menerjemahkan tekanan global tersebut ke dalam kebutuhan transformasi sistem, proses, dan kapabilitas institusional. Sementara itu, isu-isu pembangunan sektoral merefleksikan manifestasi konkret dari kedua tantangan sebelumnya dalam bentuk *gap* pelayanan, kesenjangan kualitas, dan defisit kapasitas yang harus segera diatasi.

Analisis terintegrasi dari ketiga lapis tantangan ini akan memberikan landasan komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan intervensi prioritas, sekaligus mengungkap potensi-potensi yang dapat dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pemetaan tantangan dan potensi permasalahan ini berfungsi sebagai *roadmap* strategis untuk mentransformasi tantangan menjadi peluang kemajuan yang berkelanjutan.

1.2.1 Tantangan dan Potensi Permasalahan Global

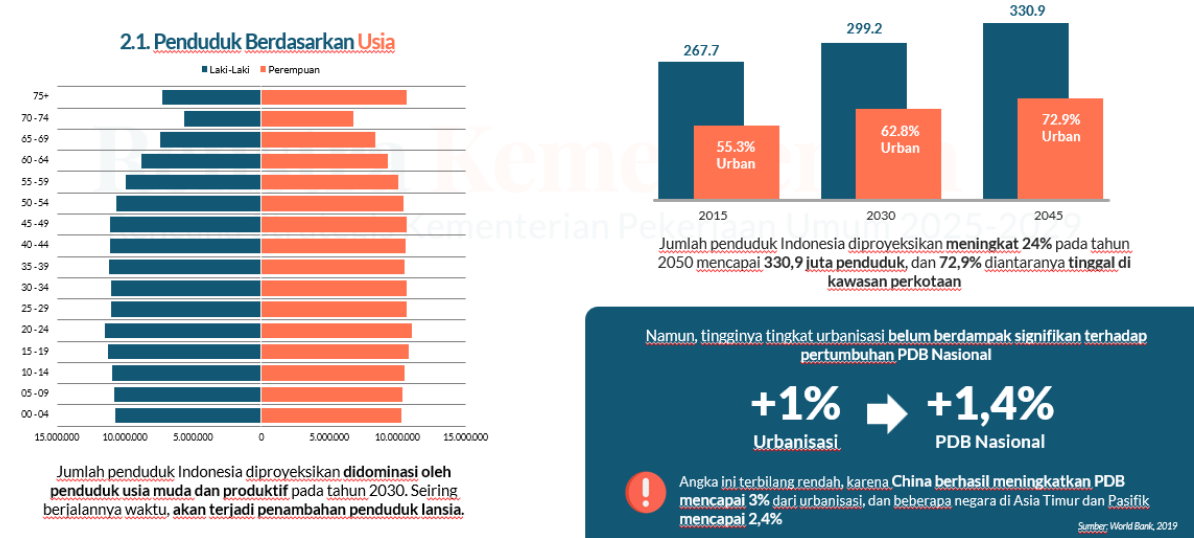
Indonesia saat ini berada pada titik kritis dalam perjalanan pembangunannya. Menuju visi Indonesia Emas 2045, negara ini menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang saling terkait dalam pembangunan infrastruktur. Kompleksitas ini tidak hanya mencerminkan dimensi teknis dan finansial, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan yang memerlukan pendekatan transformatif yang menyeluruh.



Gambar 1.12 Tantangan Ekonomi Indonesia
Sumber: RPJPN 2025-2045

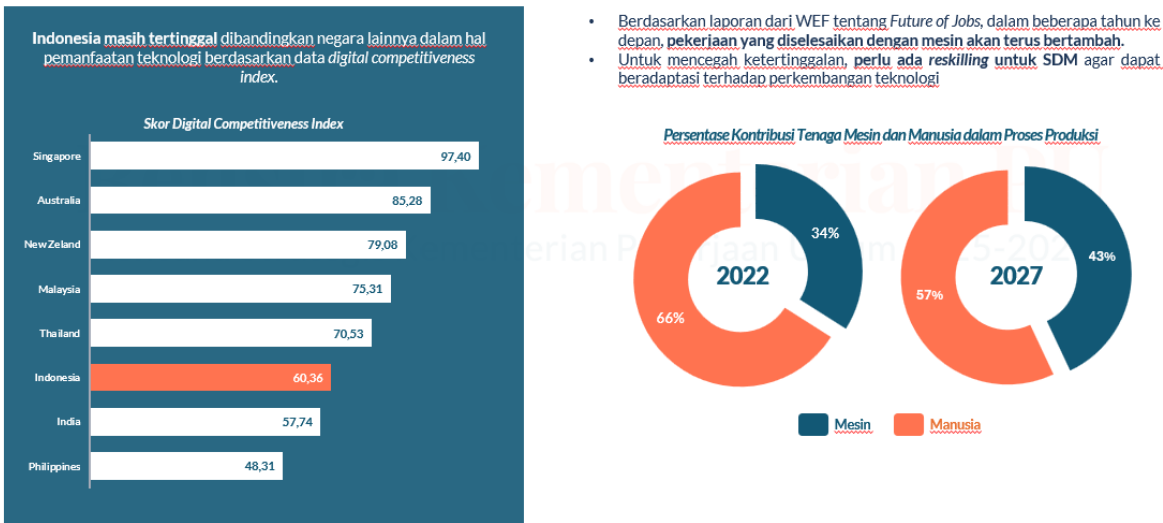
Tantangan pertama dan paling fundamental adalah upaya keluar dari *middle income trap*. Berdasarkan Gambar 1.12, proyeksi PDB per kapita menunjukkan perjalanan panjang dari USD 3.377 pada tahun 2015, diproyeksikan meningkat menjadi USD 6.701 (2025), USD 14.214 (2035), hingga mencapai USD 28.934 pada 2045. Untuk mempercepat transisi ini, RPJPN 2025-2029 menetapkan sasaran "Perkuatan Transformasi Fondasi" dengan tiga target ambisius: pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1%;

kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB sebesar 21,9%; dan 38% masyarakat dalam kategori *middle income class*. Tanpa pencapaian target ini, disparitas ekonomi antara Jawa-Sumatera dengan wilayah lainnya berpotensi mempengaruhi tingkat kesulitan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.



Gambar 1.13 Perbandingan Urbanisasi di Indonesia dengan Negara di Asia Timur dan Pasifik
Sumber: World Bank, 2019

Berdasarkan Gambar 1.13, tantangan kedua berupa dinamika urbanisasi di Indonesia yang belum produktif. Indonesia menghadapi fenomena urbanisasi masif, dengan proyeksi peningkatan populasi urban dari 55,3% (2015) menjadi 72,9% (2045), yang akan membawa total populasi mencapai 330,9 juta jiwa. Namun, produktivitas urbanisasi Indonesia masih sangat rendah – setiap kenaikan 1% tingkat urbanisasi hanya menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar 1,4%, tertinggal jauh dari China yang mencapai 3% dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,4%. Inefisiensi infrastruktur perkotaan ini dapat menjadi kendala serius bagi mobilitas barang dan jasa, serta menghambat upaya peningkatan daya saing nasional.

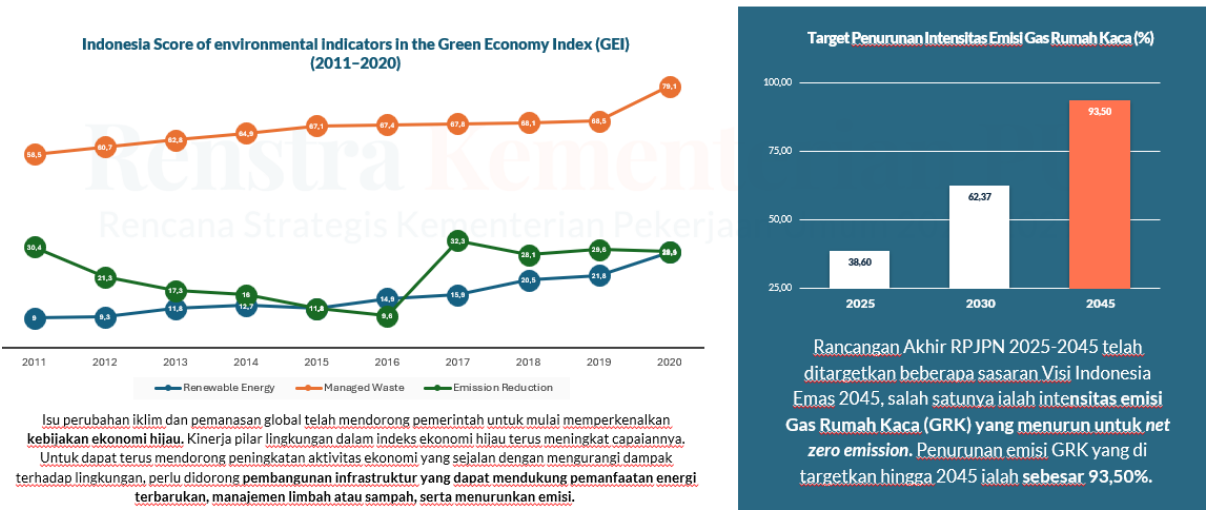


Gambar 1.14 Skor *Digital Competitiveness* serta Persentase Kontribusi Tenaga Mesin dan Manusia dalam Proses Produksi

Sumber: International Institute for Management Development (2023); World Economic Forum (2023).

Kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital menjadi tantangan ketiga yang semakin mendesak. Berdasarkan *digital competitiveness index*, Indonesia (60,36) masih tertinggal signifikan dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura (97,40), Malaysia (75,31), dan Thailand (70,53). Situasi ini diperparah dengan proyeksi *World Economic Forum* yang menunjukkan transformasi dramatis dalam komposisi tenaga

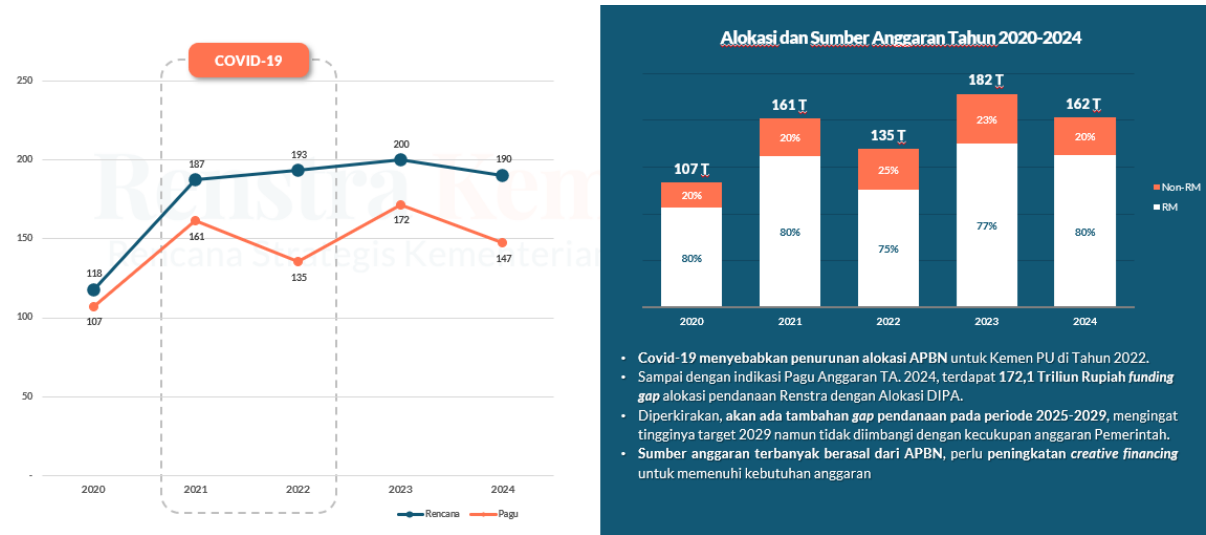
kerja. Ketimpangan akses teknologi antar kawasan berpotensi terjadinya disintegrasi dan meningkatkan potensi konflik horizontal.



Gambar 1.15 *Green Economy Index* (GEI) dan Target Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: Bappenas (2022); RPJPN 2025-2045 (2024).

Tantangan keempat berkaitan dengan urgensi adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan bencana. Meskipun *Green Economy Index* menunjukkan tren positif, degradasi kualitas lingkungan hidup diperparah oleh belum optimalnya layanan infrastruktur sanitasi dan pengelolaan persampahan telah menjadi ancaman sistemik bagi kesehatan masyarakat. Kapasitas mitigasi dan adaptasi daerah rawan bencana yang masih rendah berpotensi memperparah dampak bencana, menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang semakin besar.



Gambar 1.16 Tantangan Fiskal Pembangunan Infrastruktur PU

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PU 2020-2024

Tantangan kelima adalah keterbatasan fiskal yang semakin akut imbas dari pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari penurunan alokasi APBN untuk Kementerian PU di tahun 2022. Analisis sumber pendanaan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap APBN (80%), sementara *funding gap* mencapai 172,1 Triliun Rupiah. Keterbatasan ini berpotensi menghambat upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.



Gambar 1.17 Standar Kepemimpinan dan Pengendalian Risiko dalam Transformasi Tata Kelola
Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Terakhir, aspek kelembagaan memerlukan transformasi mendasar. RPJPN 2025-2045 menggariskan kebutuhan reformasi menuju kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas dan adaptif, serta pelayanan publik yang berkualitas. Tanpa transformasi kelembagaan yang efektif, upaya mengatasi berbagai tantangan infrastruktur akan terhambat. Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional.

Interaksi kompleks antar tantangan ini tidak hanya berpotensi menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045, namun memunculkan risiko sistemik yang mengancam ketahanan nasional sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan transformatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi kokoh Indonesia di masa depan.

1.2.2 Isu Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum di akhir tahun 2024 telah menorehkan sejumlah pencapaian di berbagai sektor, mulai dari sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman hingga pembinaan konstruksi. Capaian pada tahun 2024 yang merupakan tahun berakhirnya siklus perencanaan pembangunan nasional yang berarti berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025, menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di siklus perencanaan pembangunan nasional selanjutnya. Seperti disampaikan sebelumnya, pengaruh megatren global dan upaya antisipasinya akan menuntut negara di seluruh dunia untuk melakukan transformasi berskala besar, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat berkaitan satu sama lain, tidak terbatas pada sektor ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan. Upaya adaptif maupun preventif terhadap isu-isu global perlu dilakukan dan disesuaikan dalam alur proses bisnis Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kementerian Pekerjaan Umum memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, dan penyediaan prasarana strategis. Selain itu, Kementerian PU juga berperan dalam pembinaan konstruksi nasional, serta pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum. Kementerian PU diharuskan bergerak cepat dalam merespons isu global dan mewujudkan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Isu Sektor Sumber Daya Air

Peningkatan kebutuhan sumber daya air menjadi salah satu tantangan strategis dalam pembangunan nasional, terutama di tengah adanya tantangan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan ekspansi aktivitas ekonomi. Tekanan terhadap ketersediaan air menjadi semakin besar pada wilayah-wilayah yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan (2023), total kebutuhan air di Indonesia mencapai 11.254,79 m³/detik (tidak termasuk *baseflow* atau aliran pemeliharaan). Kebutuhan tertinggi terdapat di Pulau Jawa (3.024,60 m³/detik) dan Sumatera (3.195,56 m³/detik), sebagai implikasi konsentrasi jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian. Dibandingkan dengan ketersediaan airnya, Pulau Jawa masuk dalam klasifikasi neraca air defisit. Artinya tekanan terhadap ketersediaan air di Pulau Jawa memerlukan penanganan segera.

Di samping itu, kebutuhan air untuk mendukung ketahanan pangan, proses produksi sektor industri, dan kebutuhan domestik menuntut pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Tanpa upaya antisipasi yang memadai, kondisi ini berpotensi mendorong upaya ekstraksi air tanah yang signifikan sedangkan penggunaan air tanah secara tidak terkendali dapat berpengaruh pada penurunan muka tanah, degradasi lingkungan, serta penurunan daya dukung kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alih fungsi lahan akibat pergeseran aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk memperbesar tekanan terhadap sumber daya air. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perubahan tata guna lahan di Indonesia khususnya lahan hutan, turun sebanyak 3,2% selama periode 2011-2020. Pada tahun 2011 luas lahan hutan adalah 98,7 hektar, turun menjadi 95,5 hektar pada tahun 2020.

Perubahan dipengaruhi oleh alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan lainnya, seperti perkebunan dan permukiman. Contohnya tutupan lahan pada DAS Krukut yang 93,94% sudah didominasi oleh permukiman.

Berkurangnya kawasan resapan dan kerusakan ekosistem rawa meningkatkan risiko banjir, intrusi air asin, dan penurunan cadangan air tanah. Minimnya perlindungan terhadap daerah tangkapan air dan pengendalian lahan kritis memperparah defisit neraca air. Di sisi lain, intensitas bencana hidrometeorologi yang meningkat akibat perubahan iklim menuntut adaptasi infrastruktur dan sistem pengelolaan air. Tanpa intervensi sistemis, wilayah-wilayah berpotensi ekonomi tinggi akan semakin rentan terhadap krisis air, yang berimplikasi langsung pada menurunnya produktivitas dan kontribusi terhadap PDB nasional.

Ketahanan pangan nasional yang turut menjadi isu besar juga sangat bergantung pada kemampuan prasarana sumber daya air berupa sistem irigasi dalam menyediakan air secara andal dan efisien. Namun demikian, masih terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan fisik, sedimentasi, serta degradasi kapasitas akibat pemeliharaan yang belum optimal atau kejadian bencana. Akibatnya, produktivitas pertanian menjadi tidak optimal, khususnya pada daerah-daerah lumbung pangan yang sangat bergantung pada sistem irigasi yang andal.

Kemampuan penyediaan infrastruktur sumber daya air, utamanya dalam menambah kapasitas tampungan air juga masih sangat terbatas. Saat ini, sekitar 42% bangunan tampungan air terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencerminkan ketimpangan distribusi infrastruktur antarwilayah. Beberapa infrastruktur telah berumur tua dan mengalami penurunan fungsi. Terbatasnya kualitas tata kelola, kapasitas SDM pengelola SDA, serta masih minimnya adopsi teknologi modern menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur SDA. Sedangkan keterbatasan pembebasan lahan, termasuk potensi konflik terkait irisan lahan dengan kawasan

hutan dan pelepasan aset masyarakat, serta efisiensi dan *refocusing* anggaran berpengaruh pada terhambatnya proses konstruksi infrastruktur SDA. Permasalahan-permasalahan ini selanjutnya menyebabkan belum efektifnya pengelolaan sumber daya air di banyak wilayah.

Oleh karena itu, pembangunan sektor sumber daya air memerlukan transformasi menyeluruh yang turut meliputi kebijakan, kelembagaan, maupun pembiayaan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan infrastruktur sumber daya air diharapkan dapat menjamin keberlanjutan hidup masyarakat dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi secara stabil sehingga ketahanan air sebagai fondasi ketahanan nasional dapat dicapai secara berkelanjutan.

Isu Sektor Bina Marga

Infrastruktur jalan masih memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi jalan, baik yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat maupun daerah, masih menghadapi berbagai tantangan strategis, kendala teknis maupun permasalahan tata kelola yang perlu ditangani secara menyeluruh dan terintegrasi.

Salah satu isu mendasar adalah tingginya biaya logistik nasional, yang mencapai sekitar 13,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disebabkan oleh dominasi angkutan barang yang masih bertumpu pada jaringan jalan (80–85%) serta rendahnya efisiensi logistik akibat kondisi jalan yang belum optimal, keterbatasan konektivitas, dan ketidakseimbangan pengembangan antarwilayah.

Tingkat kecelakaan lalu lintas, terutama di jalan nasional dan jalan tol, masih tinggi. Fatalitas di jalan tol mencapai 0,30 kasus/km/tahun, sementara di jalan nasional 0,22 kasus/km/tahun lebih tinggi dibandingkan jalan daerah (0,15 kasus/km/tahun). Tingkat keselamatan jalan juga masih rendah, dengan hanya 57% jalan nasional yang memenuhi standar minimum 3-bintang yang mengikuti tata cara iRAP.

Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan salah satu penyebab permasalahan serius dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Indonesia. Kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kerusakan struktur jalan secara signifikan. Beban berlebih kendaraan mempercepat keausan lapisan perkerasan, memperlebar retakan, dan memicu terbentuknya lubang-lubang pada permukaan jalan. Akibatnya, usia layan jalan menjadi jauh lebih pendek dari yang direncanakan, dan biaya pemeliharaan serta rehabilitasi meningkat tajam.

Penanganan ODOL memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, pelaku industri logistik, hingga asosiasi pengusaha harus bersinergi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tegas dan berkeadilan. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten, dibarengi dengan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya muatan sesuai ketentuan demi menjaga keberlanjutan infrastruktur.

Di sisi lain, kesenjangan kualitas infrastruktur jalan di daerah masih menjadi tantangan serius yang dapat menghambat mobilitas masyarakat dan efisiensi logistik, pertumbuhan ekonomi lokal serta memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemanfaatan jalan yang tidak dalam kondisi prima untuk jangka waktu panjang akan menyebabkan biaya logistik yang lebih tinggi, menurunkan daya saing daerah serta keterlambatan distribusi hasil dan kebutuhan wilayah.

Pengembangan infrastruktur jalan perlu difokuskan untuk meningkatkan konektivitas simpul utama dan *hinterland*, efisiensi distribusi pada jalur utama logistik, dan penyediaan akses bagi simpul dan kawasan prioritas dalam RPJMN 2025-2029

(maupun mandat lainnya) agar secara sinergis menghasilkan kemanfaatan optimal bagi efisiensi distribusi dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, lemahnya infrastruktur konektivitas juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pinggiran pun semakin melebar dengan belum meratanya penyediaan jalan yang memicu permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Di sisi teknis, kondisi kemantapan jalan, khususnya jalan Daerah, belum memadai. Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 94%, sementara kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota masing-masing baru sekitar 70% dan 53%, yang masih di bawah target RPJMN 2025–2029 (98%, 76%, dan 66%). Akibatnya, konektivitas antarwilayah dan antar simpul logistik masih belum optimal.

Fakta bahwa tingkat kemantapan jalan daerah masih jauh berada di bawah jalan nasional menuntut adanya inovasi dan kolaborasi bersama dalam menjaga kondisi jalan daerah agar tetap dalam kondisi prima. Hal ini dapat digagas melalui berbagai skema dukungan penanganan jalan daerah, seperti diskresi Menteri PU, Inpres Jalan Daerah (IJD) dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah jalan daerah melalui pinjaman luar negeri dengan co-sharing dari APBD sesuai kapasitas fiskal, pendanaan inovatif penggunaan dana preservasi jalan, fasilitas pinjaman dari kementerian keuangan, dukungan dana sektor swasta melalui *bundling* program dan CSR untuk jalan dan jembatan daerah.

Selain itu, melalui kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan jalan daerah, diharapkan Pemerintah Daerah yang terbina dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan preservasi jalan daerah. Peningkatan efektivitas pembinaan jalan daerah akan didukung melalui penguatan kerangka kelembagaan pembina jalan Daerah di Direktorat Jenderal Bina Marga (baik penguatan organisasi di Tingkat Pusat maupun Balai) yang disertai dengan penyempurnaan pranata regulasi (NSPK) sesuai perkembangan. Perkembangan demografi dan laju urbanisasi yang tinggi merupakan dua fenomena yang dapat menjadi indikator kemajuan dan dinamika suatu daerah. Antisipasi di sektor konektivitas terhadap fenomena ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena akan ada peningkatan volume kendaraan yang jika tidak sebanding dengan sediaan jaringan, kapasitas dan kondisi jalan eksisting akan berpengaruh kepada mobilitas masyarakat dan logistik serta tingkat kemacetan dan keselamatan transportasi. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mengantisipasi arus urbanisasi yang tinggi harus dilakukan secara cepat dan tepat, dimana keterlambatan eksekusi dapat menyebabkan tekanan terhadap lingkungan berupa kerusakan ekosistem serta menutup kemungkinan penyebaran/perpindahan arus urbanisasi menuju daerah *rural*. Oleh karena itu, pada Renstra 2025-2029 ini akan diprioritaskan dukungan pembangunan jalan (i) untuk mengatasi pemasalahan kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan serta (ii) dalam upaya pemeratakan penyediaan aksesibilitas jalan ke daerah terpencil, tertinggal, terluar/ perbatasan, kepulauan (DTPK), yang keduanya dilakukan secara seimbang.

Isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) juga belum terintegrasi secara memadai dalam perencanaan dan desain infrastruktur jalan. Hal ini menyebabkan rendahnya akses kelompok rentan terhadap fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan inklusif. Belum semua proyek jalan mengadopsi prinsip-prinsip desain universal atau melibatkan partisipasi masyarakat rentan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pengarusutamaan GEDSI akan menjadi salah satu fokus dalam peningkatan keterpaduan lintas sektoral dalam penyelenggaraan jalan.

Perubahan iklim menambah kompleksitas tantangan pembangunan jalan. Ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan iklim ekstrem masih relatif rendah, dengan adanya jalan nasional yang masih berada di koridor risiko bencana tinggi (banjir, longsor, gempa bumi) dan belum tersusunnya kerangka mitigasi yang komprehensif. Saat ini integrasi isu climate *resilience* dalam sistem manajemen aset jalan dan dalam proses pengambilan keputusan teknis masih terbatas.

Diharapkan upaya peningkatan resiliensi jalan terhadap dampak perubahan iklim berbasis kepada konsep jalan yang berkelanjutan sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 yang tidak hanya berfokus kepada upaya penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur jalan, tetapi juga diintegrasikan dengan konsep *green road* untuk meminimalisir dampak lingkungan dari sektor jalan, serta mendukung terwujudnya jalan berkeselamatan (*road safety*) yang meminimumkan risiko kecelakaan dari faktor lingkungan jalan.

Permasalahan anggaran dan pembiayaan juga menjadi kendala krusial dalam meningkatkan kinerja pelayanan jalan. Keterbatasan anggaran menyebabkan banyak target output pembangunan dan preservasi jalan dalam Renstra sebelumnya (2020-2024) tidak tercapai. Kegiatan pembangunan jalan tol, flyover/underpass, serta preservasi jaringan jalan nasional terkendala karena *refocusing* anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan inovatif.

Upaya percepatan pembangunan jalan tol untuk mencapai target penurunan waktu tempuh pada koridor utama jaringan jalan nasional (dalam RPJMN 2025-2029 ditargetkan turun dari 1,9 jam/100 km menjadi 1,7 jam/100 km) masih banyak menemui kendala dari sisi pendanaan. Selama ini, bentuk dukungan pemerintah untuk mengurangi risiko investasi jalan tol umumnya diwujudkan melalui VGF (*Viability Gap Funding*), dalam bentuk dukungan konstruksi ataupun bentuk lainnya, yang porsinya relatif besar setiap tahunnya. Diversifikasi pembiayaan jalan tol perlu dilakukan untuk meminimalisir beban pemerintah diantaranya melalui pembiayaan dari sektor swasta maupun BUMN/Danantara.

Kelembagaan dan tata kelola di sektor jalan masih perlu diperkuat. Tantangan yang dihadapi antara lain keterlambatan pembebasan lahan, perencanaan teknis yang belum optimal, minimnya penggunaan *Value Engineering*, serta fragmentasi dalam pelaksanaan proyek. Hal ini berkontribusi pada tingginya *cost overrun* dalam pembangunan jalan dan jembatan (khususnya jalan tol). Peningkatan tata kelola akan difokuskan pada perbaikan proses bisnis dalam penyelenggaraan jalan, mulai dari tahap pengumpulan data, penyusunan program dan anggaran, penyiapan *readiness criteria*, penentuan *delivery system*, pengendalian mutu pelaksanaan, serta pengendalian fungsi dan manfaat jalan.

Isu Sektor Cipta Karya

Penyediaan infrastruktur cipta karya sebagai infrastruktur dasar permukiman memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia, peningkatan taraf kesehatan, penopang kelestarian sistem lingkungan alami, hingga penunjang pertumbuhan ekonomi. Upaya penyediaan infrastruktur dasar masih dihadapkan pada beberapa isu yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat dan degradasi lingkungan.

Kesenjangan akses dan kualitas layanan air minum masih menjadi isu utama, dengan disparitas yang tinggi antara perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini diindikasikan dengan cakupan layanan yang tidak merata karena sebagian wilayah belum terlayani oleh akses air minum aman dan jaringan perpipaan. Pada tahun 2024, cakupan layanan air minum perpipaan baru mencapai 30,12% (Verifikasi Capaian Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota Tahun 2024), sedangkan akses layak sanitasi mencapai

83,6%, termasuk akses aman sebesar 10,25% (Susenas BPS, 2024) dan akses air minum aman mencapai 20,49% (SKAM-RT, 2024). Banyak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengalami *idle capacity* karena jaringan perpipaan belum tersambung ke rumah. Selain itu, pelayanan air minum di Indonesia dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat kehilangan air atau *Non-Revenue Water* (NRW) yaitu 33,15% (Buku Kinerja BUMD Air Minum, 2024) yang menyebabkan inefisiensi layanan dan pemborosan sumber daya. Kondisi ini mempengaruhi kinerja PDAM sebagai operator pelayanan air minum. Dari 394 BUMD air minum, 136 PDAM di antaranya memiliki kinerja “kurang sehat” atau “sakit”. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan rendahnya kontribusi pendanaan alternatif dalam investasi infrastruktur air minum juga menjadi hambatan dalam mempercepat pencapaian target cakupan layanan. Oleh karena itu, perlu upaya strategis yaitu melakukan pembangunan dan optimalisasi SPAM melalui skema pembiayaan inovatif untuk mengakselerasi penyediaan infrastruktur air minum, penguatan kelembagaan dan tata kelola, pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengawasan kualitas, efisiensi operasional, dan deteksi kebocoran air.

Timbulan sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan persampahan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun aspek tata kelola. Secara nasional, masih banyak TPA yang beroperasi secara *open dumping*. Banyak pemerintah daerah belum memiliki kapasitas secara teknis dan finansial untuk membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan persampahan yang efektif. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber juga masih sangat rendah. Dampak dari sistem pengelolaan sampah yang buruk sangat luas yaitu menciptakan lingkungan permukiman yang kumuh dan tidak sehat, pencemaran udara, tanah, dan air, menyumbat saluran air dan meningkatkan risiko banjir dan menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit. Kondisi ini menciptakan lingkaran permasalahan yang kompleks mulai dari penurunan kesehatan masyarakat hingga menurunnya produktivitas.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur air limbah domestik, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terbatasnya akses sanitasi aman, antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya tingkat *idle capacity* dari IPLT atau SPALD-T terbangun, belum terberdayakannya potensi pendanaan masyarakat dan swasta, serta belum terpisahnya fungsi operator dan regulator dalam kelembagaan pada pemerintah daerah yang menyebabkan inefektivitas operasional infrastruktur.

Pada sektor bangunan gedung, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria, menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Bangunan Gedung. Penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum secara berjenjang melalui Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan di provinsi. Pembinaan dilaksanakan guna terwujudnya penerapan standar teknis bangunan gedung dalam penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung sampai dengan pembongkaran. Dalam pelaksanaannya, masih diperlukan penguatan pengawasan dan pengendalian agar penerapan standar teknis dapat diimplementasikan dengan baik di setiap daerah untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjiwa, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Selain itu, terdapat isu sinergitas dan keterpaduan infrastruktur keciptakarya yang belum optimal. Sebagaimana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya sesuai dengan Permen PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, keterpaduan pembangunan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan strategis nasional dan tertentu

serta prioritas nasional sebagai upaya dalam menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi penyediaan infrastruktur. Kawasan strategis memiliki nilai penting dalam pengembangan dan pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, keberlanjutan lingkungan, konektivitas dan infrastruktur, nilai sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan wilayah, serta keselarasan dengan peraturan tata ruang. Selanjutnya, untuk kawasan strategis tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria untuk menjadi prioritas pengembangan dengan karakteristik spesifik/tematik dalam rangka mengoptimalkan potensi lokal dan/atau mengatasi tantangan pembangunan.

Isu Sektor Prasarana Strategis

Beberapa isu utama dalam pembangunan prasarana strategis antara lain pertumbuhan jumlah penduduk yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan berbagai prasarana dan sarana, termasuk prasarana pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya. Letak posisi Indonesia yang secara geografis memiliki daerah rawan bencana alam dan terjadinya perubahan iklim juga menjadi isu strategis khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan prasarana dasar yang berketahanan iklim dan bencana, dan adanya potensi kerusakan sebagai akibat bencana alam.

Isu berikutnya yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi (9,03% tahun 2024) menjadi isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan prasarana strategis. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata, yang ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Di sisi lain kemiskinan juga bisa disebabkan antara lain oleh kurangnya Infrastruktur yang menghambat akses terhadap pasar, pendidikan, layanan atan, dan layanan penting lainnya. Masih banyaknya daerah tertinggal dan kapasitas fiskal yang belum merata juga menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti dalam penanganan prasarana strategis. Hingga saat ini masih terdapat 30 daerah tertinggal di Indonesia yang dinilai berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah. Sementara untuk kapasitas fiskal hingga saat ini dari 38 provinsi masih terdapat 3 provinsi dengan kapasitas fiskal sangat rendah dan 16 provinsi dengan kapasitas fiskal rendah. Hal in tentu berpengaruh terhadap kemampuan daerah di dalam pembangunan prasarana strategis. Padahal sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan prasarana strategis menjadi kewenangan pemerintah daerah. Prasarana strategis yang dibangun umumnya tidak berdiri sendiri sebagai urusan ke-PU-an, melainkan merupakan lingkup pekerjaan prasarana sektoral yang mendukung pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya, dimana dalam pelaksanaan dan operasionalnya terdapat tanggung jawab dan kontribusi kementerian dan lembaga lintas sektor. Berkaitan dengan hal tersebut, selain pendekatan teknokratik, pengembangan dan pembangunan prasarana strategis di daerah membutuhkan pendekatan kolaboratif. Aspek koordinasi dan kolaborasi dengan mitra instansi dan kelembagaan di sektor terkait menjadi suatu tahapan penting yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai target pembangunan, kriteria dan standar prasarana, alur penanganan dan kebutuhan lainnya yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, pengembangan prasarana strategis dapat dilaksanakan secara lebih efisien, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Isu lainnya yaitu terkait dengan kondisi prasarana strategis saat ini yang menjadi permasalahan pokok yang harus diselesaikan pada periode 2025 - 2029. Pada prasarana pendidikan di tingkat SD masih terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 10,52%, di SMP 6,63%; di SMA 6,71%; dan di SMK 2,96 %, padahal

kondisi ruang kelas berpengaruh langsung terhadap efektivitas belajar siswa. Sehingga upaya-upaya perbaikan terhadap kondisi ruang kelas mesti difokuskan agar dapat tercapai keberhasilan pembelajaran yang efektif. Di sisi lain angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, pada jenjang SD sebanyak 0,11%, SMP 0,82% dan SMA/SMK 1,02% . Penyebab tingginya putus sekolah ini di antaranya adalah masalah ekonomi dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka untuk belajar.

Untuk prasarana perekonomian berupa pasar rakyat masih banyak yang belum memenuhi kriteria Peraturan Menteri Perdagangan, di Pulau Sumatera dan Sulawesi masih terdapat 25,14%; di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 43,65% dan di Maluku dan Papua 67,40%. Pasar rakyat memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia karena merupakan ruang hidup bagi jutaan penduduk yang melakukan transaksi jual beli, dan oleh karenanya diperlukan upaya-upaya agar pasar rakyat memiliki kualitas yang lebih baik.

Di bidang pelayanan kesehatan, khususnya kondisi Rumah Sakit (RS), hingga saat ini masih terdapat RS kelas D sebanyak 871 unit atau 27,43% dari jumlah total RS di Indonesia. Kelas D merupakan kelas terendah yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar, seperti pelayanan medik umum, hanya beberapa pelayanan spesialis dasar dan memiliki paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur. Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kelas RS. Di bidang Olahraga, dalam rangka peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional maupun internasional diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah diamanatkan Keterlibatan Kementerian PU sebagai penanggung jawab atas pembangunan Indonesia *Elite Athlete* dan Indonesia *Para Athlete Training Center* kelas dunia, pembangunan (Mayor) *Youth Sports Center* kelas dunia, dan renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda serta terlibat sebagai penunjang pada beberapa kegiatan/ *event* olahraga.

Di bidang prasarana peribadatan hingga tahun 2023 terdapat 397.261 rumah ibadah dari berbagai agama di Indonesia, namun tidak seluruhnya dalam kondisi yang baik. Prasarana peribadatan memegang peranan penting di dalam menjaga kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki prasarana peribadatan agar layak sebagai tempat ibadah.

Di bidang sosial budaya, khususnya dalam pelestarian warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural hertitade*) yang melimpah yang menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa telah diamanatkan di dalam RPJMN 2025 – 2029, dimana Kementerian PU turut berperan di dalam menjaga kondisi bangunan warisan budaya, khususnya warisan budaya kebendaan.

Isu Sektor Penyelenggaraan Konstruksi

Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur, maka dibutuhkan dukungan berbagai komponen, salah satunya adalah proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Proses PBJ yang transparan dan akuntabel akan mendorong penggunaan material peralatan konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Pemilihan penyedia jasa yang kompeten dan berpengalaman akan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sejumlah isu strategis di sektor penyelenggaraan konstruksi

yang perlu ditangani, khususnya terkait tata Kelola PBJ yakni berbedanya pemahaman SOP yang dapat menjadi pemicu permasalahan dalam proses PBJ; minimnya agenda sosialisasi dengan pakar hukum yang juga memiliki pemahaman dan pengalaman mengenai penguatan integritas dan mitigasi risiko hukum PBJ. Selain itu terdapat isu dalam pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi, yaitu masih ada provinsi yang belum memiliki organisasi perangkat daerah sub urusan jasa konstruksi, isu ini penting karena banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasannya dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi di daerah, sehingga perlu peran khusus dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) untuk diikutsertakan dalam melakukan pendampingan OPD yang belum terbentuk Sub-Urusan jasa konstruksinya dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengawal target *outcome* sub Urusan Jasa Konstruksi 2025 2029 ke depan.

Selain itu, pengelolaan material peralatan konstruksi juga belum masih dapat ditingkatkan secara maksimal. Dukungan sistem rantai pasok jasa konstruksi dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kompleksitas pengelolaan rantai pasok jasa konstruksi khususnya terhadap pengelolaan sumber daya konstruksi berupa material dan peralatan konstruksi (MPK) yang dihadapkan pada ketidakpastian pasokan, permintaan, dan informasi (*uncertainty of supply, demand, and information*) dan kewenangan pengelolaannya lintas K/L/D/I. Perlu pendekatan komprehensif melalui suatu manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*) yang merupakan suatu usaha koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memadukan aktivitas penciptaan produk dalam suatu rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pengguna dalam rangka mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi semua pihak berbasis sistem informasi.

Di sisi lain, ketersediaan dan pemutakhiran data material dan peralatan konstruksi perlu didorong, hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa. Rendahnya pencatatan di SIMPK karena Balai Teknis di Kementerian PU belum melakukan pencatatan peralatan konstruksi yang dimiliki ke dalam SIMPK, hal ini berkorelasi dengan penyedia jasa konstruksi (kontraktor, subkontraktor, produsen material) belum terinformasi mengenai regulasi terkait pencatatan SDMPK sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta tercatat dalam SIMPK.

Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah hal yang diwajibkan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan hal ini juga diperkuat dengan komitmen dari seluruh *stakeholders*, sehingga menjadi hal yang mutlak bagi pemerintah dan penyedia jasa untuk memahami terkait P3DN. Kurangnya pemahaman terkait penerapan P3DN di khususnya mengenai tata cara perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi dapat menghambat ketercapaian pemanfaatan TKDN itu sendiri, perlu penjelasan secara detail yang diwujudkan dalam bentuk simulasi perhitungan TKDN guna meningkatkan pemahaman terkait mekanisme perizinan penggunaan barang impor dan/atau TKA sehingga diperlukan pendampingan kepada pengampu kepentingan agar dapat mengidentifikasi dan mengurus perizinan penggunaan barang impor dan/atau TKA pada paket pekerjaan konstruksi yang mereka kerjakan.

Isu Dukungan Non-Teknis

Dukungan manajemen dalam perwujudan infrastruktur PU memiliki peran penting. Kegiatan dukungan manajemen meliputi perencanaan, pemrograman, pengawasan, pembiayaan, dan operasionalisasi. Berdasarkan capaian indikator dukungan non-teknis dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kinerja yang memuaskan/optimal karena rata-rata ketercapaiannya melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, program dan kegiatan yang direncanakan tetap dapat direalisasikan salah satunya melalui dukungan non-teknis yang baik. Namun dengan semakin bertambahnya program/kegiatan yang diampu oleh Kementerian PU untuk perencanaan mendatang, kesediaan anggaran/pembiayaan yang bervariasi menjadi kunci untuk optimalisasi implementasi rencana.

Meskipun dukungan teknis telah menunjukkan performa yang baik, beberapa isu yang masih menjadi tantangan dalam perencanaan lima tahun ke depan di antaranya meliputi belum seragamnya struktur kegiatan, *output*, dan metode perhitungan kinerja dukungan manajemen di setiap Unit Koordinator yang berpengaruh pada tidak meratanya distribusi pembagian kewenangan setiap Unit Koordinator dalam mendukung program teknisnya masing-masing. Sehingga masih diperlukan optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan pemrograman antar unit koordinator serta perencanaan dan pemrograman yang berbasis dengan arahan kewilayahan sehingga program/kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan dan mengoptimalkan pengembangan wilayahnya.

Isu selanjutnya yaitu belum adanya koordinator untuk kegiatan kepatuhan intern, dan manajemen risiko (KIMR), sehingga belum ada ketersediaan *guidelines* yang dijadikan rujukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, penyusunan atau pengembangan *pipeline* KPBU yang memakan waktu cukup lama berdampak pada proses pembiayaan program/kegiatan teknis yang menjadi lama.

Di sisi lain, tantangan pembangunan infrastruktur juga dihadapkan dengan kesetaraan akses dan kualitas layanan bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok rentan. Terdapat 62 kabupaten yang termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dalam Perpres Nomor 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Di banyak wilayah 3T, keterbatasan akses air minum dan sanitasi, jalan dan transportasi, prasarana pendidikan yang belum inklusif, serta pengelolaan sumber daya air yang belum sepenuhnya adil, masih menjadi persoalan. Ketimpangan layanan infrastruktur ini berdampak lebih berat pada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Adapun data dari hasil *Long Form SP2000* menunjukkan prevalensi disabilitas sebesar 1,43%, sementara data BPS pada tahun 2024 mencatat bahwa 1 dari 10 penduduk Indonesia merupakan lansia, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini menegaskan pentingnya dukungan penyediaan infrastruktur kepada kelompok masyarakat rentan sebagai bagian dari strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan PUG agar semua kelompok masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara adil. Disparitas terhadap hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dengan meningkatnya jumlah penduduk terdampak, menurunnya kualitas hidup, serta melemahnya daya saing daerah 3T.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN

2.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai instansi penyelenggara urusan pekerjaan umum di tingkat nasional, secara aktif berkomitmen untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan infrastruktur yang unggul dan berkualitas. Ke depannya, Kementerian PU diharapkan untuk secara konsisten melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Infrastruktur yang andal merujuk pada makna infrastruktur yang berkualitas tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi risiko, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Sementara itu, infrastruktur yang berkelanjutan mengacu pada penyelenggaraan infrastruktur yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, yaitu ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana, inklusif secara sosial, dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan nasional serta berorientasi panjang dalam menjangkau visi besar Indonesia Emas 2045. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap arah pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi, penguatan ketahanan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup, melalui penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai *enabler*: pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

2.2 Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Visi pembangunan jangka menengah nasional dicapai melalui 8 (delapan) Asta Cita Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yang selanjutnya diimplementasikan menjadi 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

2.3 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 7 (tujuh) tujuan pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional;
2. Memperkuat kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Memperkuat akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;
5. Meningkatkan pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
7. Memperkuat peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan tersebut, telah disusun indikator tujuan yang terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Berikut adalah Indikator Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 beserta dengan target tahunannya.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum

Tagging Tujuan	Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1	Persentase capaian ketahanan air nasional	70%	70%	70%	75%	75%
Tujuan 2	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	84%	85,5%	87%	88,5%	90%
Tujuan 3	Persentase capaian kinerja layanan infrastruktur dasar permukiman	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 4	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional	15,12%	30,07%	45,72%	54,36%	63,92%
Tujuan 5	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 6	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	80%	85%	87,5%	90%	92,5%
Tujuan 7	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	44,35%	44,58%	44,86%	45,21%	45,60%
	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan	44,81	45,01	45,21	45,41	45,61
	Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	7,47%	7,64%	7,8%	7,97%	8,13%
	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	48,66	48,96	49,26	49,56	49,86

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai wujud kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini berperan sebagai ukuran dampak (*outcome*) dari intervensi penyelenggaraan infrastruktur, serta menjadi representasi atas

kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dalam memenuhi mandat pembangunan nasional. Berikut adalah penyelarasan antara tujuan dan SS Kementerian PU.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan	Kode Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya ketahanan air nasional	SS-01	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	SS-02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
Menguatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	SS-03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas	SS-04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU
Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	SS-05	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	SS-06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya
Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	SS-07	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan

Setiap Sasaran Strategis telah disusun dengan mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Risiko Sasaran Strategis merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko SS Kementerian PU.

Tabel 2.3 Identifikasi Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
1	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Ketersediaan air belum sesuai dengan kebutuhan	DJSDA
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan (non tol dan tol) masih belum efektif dan efisien dalam mengurangi kemacetan dan peningkatan waktu tempuh Manajemen aset, Perencanaan, dan Pemrograman masih belum optimal dan terintegrasi Tata kelola pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat jalan yang belum optimal Preservasi jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan dan jembatan	DJBM
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	Pengembangan sistem infrastruktur dasar permukiman yang tidak terintegrasi antara hulu dan hilir Pemanfaatan aset infrastruktur oleh pengelola belum optimal	DJCK

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Unor
4	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Penanganan bersifat direktif dan dinamis dapat mengakibatkan pemrograman dan pelaksanaan yang tidak tepat sasaran	DJPS
		Ketidaksinkronan koordinasi antar <i>stakeholders</i> dalam mewujudkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebijakan dan kebutuhan program	
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Ketidaksesuaian kompetensi lulusan vokasi dengan kebutuhan industri konstruksi	DJBK
		Keterbatasan dukungan anggaran dan pembiayaan untuk pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi	
		Keterbatasan kompetensi dan kapasitas dosen pengajar di Politeknik PU	BPSPDM
		Kurikulum modul pembelajaran di Politeknik PU tidak memenuhi standar kompetensi Nasional Indonesia	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	Serapan alokasi anggaran di bawah target rencana	SETJEN dan Unit Organisasi Lainnya
		Pelaksanaan anggaran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan (temuan berulang)	
		Rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti secara akurat dan tepat waktu	
		Terdapat aset kementerian PU yang tidak termanfaatkan/dikuasai pihak lain	
		Terdapat gugatan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas ke- PU-an di Kementerian PU/ Unit Organisasi Kementerian PU	DJPI
		Layanan kepegawaian yang tidak transparan dan tidak akuntabel	
		Belum ada kriteria proyek KPBU untuk setiap sektor di Kementerian PU	ITJEN
		Koordinasi penanganan pengaduan umum di Itjen yang belum optimal	
		Sosialisasi dan peningkatan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai dan unit pengelola risiko di setiap Unor belum optimal	BPIW
		Infrastruktur PU tidak dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan wilayah	
7	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	Infrastruktur PU tidak mampu meningkatkan ekonomi kawasan perkotaan	BPIW

Indikasi Risiko SS-1 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air

Swasembada pangan sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup dan merata untuk keperluan irigasi lahan pertanian. Jika pengelolaan sumber daya air pada sistem irigasi tidak optimal, maka distribusi air ke lahan pertanian menjadi tidak seimbang: ada daerah yang kelebihan (banjir) dan ada yang kekurangan (kekeringan). Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pertanian, menghambat target swasembada pangan, serta meningkatkan ketergantungan impor. Dukungan serta kontribusi yang

besar diperlukan dari berbagai pihak untuk dapat memenuhi pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya air yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2019, yaitu "Mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ketahanan air juga menyangkut penyediaan air baku yang aman. Jika tidak ada pengelolaan berkelanjutan, maka kualitas dan kuantitas air baku akan menurun (tercemar limbah, intrusi air laut, serta menipisnya cadangan air tanah). Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta memperbesar biaya penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi ini jelas menghambat pencapaian swasembada air.

Indikasi Risiko SS-2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan

Terdapat sejumlah risiko dalam mencapai target waktu tempuh pada lintas utama dan koridor jalan nasional yang menjadi indikator kinerja dari SS-2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan. Secara umum risiko tersebut berasal dari adanya berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam 5 tahun ke depan.

Tidak tercapainya target pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan (tol dan non tol) secara signifikan akan mempengaruhi pencapaian target penurunan waktu tempuh pada koridor utama jalan nasional, khususnya pada lintas utama jalan nasional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Penanganan risiko ini akan dilakukan antara lain melalui upaya pemenuhan *readiness criteria* (Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan, Perizinan, dan Pengadaan Tanah) untuk pembangunan jalan dan jembatan (tol dan non tol) secara tepat waktu dan tepat mutu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan konstruksi. Permasalahan lainnya adalah adanya potensi keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan, hal ini akan ditangani dengan (i) menyusun prioritas pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan tingkat kesiapan, kemanfaatan, dan yang terpenting sesuai dengan arahan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, serta (ii) mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan kreatif (non-APBN, di antaranya CSR, filantropi, KPBU-AP, dsb.).

Adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan fokus pendanaan ke program Prioritas Presiden menyebabkan meningkatnya ketidakpastian terhadap pemenuhan kebutuhan pendanaan preservasi sesuai kebutuhan dalam mencapai target kemantapan (tingkat kondisi) jalan nasional yang menjadi komponen penting dari tingkat pelayanan jalan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, akan dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan integrasi *database* jalan, jembatan, dan lereng (termasuk *database* jalan Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai basis data yang lengkap, *update*, dan komprehensif sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Menyusun prioritas pelaksanaan preservasi jalan sesuai dengan tingkat kemanfaatan dan dukungannya terhadap prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Selain itu untuk memastikan pelaksanaan preservasi jalan dilaksanakan secara optimal akan dilakukan inovasi dalam *delivery system* pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan dengan penyempurnaan metode pengadaan melalui mekanisme swakelola, kontraktual, maupun kontrak layanan (*long segment*). Selanjutnya, untuk menambah kecukupan pendanaan akan dilakukan juga inovasi pada pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif untuk preservasi jalan, di antaranya melalui KPBU (saat ini sudah diterapkan KPBU-AP secara terbatas), penggunaan PHLN, dukungan swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*), ataupun bentuk inovasi pembiayaan lainnya.

Kurang optimalnya pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat jalan, termasuk di dalamnya penanganan ODOL (*Over Dimension Over Load*) dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA), berdampak pada inefisiensi tingkat pelayanan dan kondisi prasarana jalan. Penanganan masalah ini memerlukan *roadmap* (peta jalan) terstruktur serta dukungan *stakeholders* (K/L terkait, Pemda, dan masyarakat) dalam penegakan aturan pemanfaatan jalan. Selain itu, agar manfaat jalan maksimal dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi terkait, maka akan dilakukan upaya untuk meningkatkan integrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan serta pengoperasian jalan terhadap sektor terkait, khususnya sektor unggulan di masing-masing wilayah.

Saat ini, ketimpangan kondisi kemandapan jalan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan Jalan Nasional masih sangat tinggi. Dalam RPJMN 2025-2029 ditargetkan peningkatan kemandapan jalan Provinsi dari 70% menjadi 76%, Jalan Kabupaten dari 53% menjadi 66%, Jalan Kota dari 81% menjadi 85%. Pencapaian target kemandapan jalan daerah tersebut sangat penting bagi peningkatan kinerja sistem jaringan jalan secara keseluruhan dan kemanfaatannya bagi berbagai sektor pembangunan. Untuk memitigasi potensi tidak tercapainya target kemandapan jalan daerah akan dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanganan jalan Daerah melalui skema IJD (Inpres Jalan Daerah), PHJD (Pinjaman dan Hibah Jalan Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan skema lainnya yang memungkinkan. Selain itu, untuk dapat menyusun kebijakan intervensi yang tepat, akan dilakukan upaya penguatan sistem *database* jalan daerah terutama melalui pengembangan web based-PKRMS yang dikelola Pusat sesuai amanat UU No 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Dan secara umum akan dilakukan peningkatan efektivitas pembinaan penyelenggaraan jalan daerah khususnya melalui penguatan kelembagaan Pembinaan Jalan Daerah (khususnya peningkatan peran Balai dan Unit Pembina Jalan Daerah di Pusat), pelengkapan/*update* NSPK jalan daerah, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan secara lebih intensif.

Indikasi Risiko SS-3 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan

Pengembangan sistem infrastruktur dasar permukiman berpotensi menghadapi risiko tidak terintegrasinya pembangunan antara hulu dan hilir. Risiko ini muncul ketika pembangunan infrastruktur utama, seperti instalasi pengolahan air minum (IPA) atau air limbah (IPLT) tidak diikuti dengan penyediaan jaringan distribusi dan layanan di tingkat pengguna. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, pelayanan infrastruktur menjadi tidak efisien, tidak dimanfaatkan secara maksimal, dan menimbulkan infrastruktur *idle* yang akan membebani biaya pemeliharaan.

Risiko lainnya adalah infrastruktur yang telah terbangun berpotensi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pengelola. Banyak unit pengelola, baik pemerintah daerah, BUMD, lembaga, maupun kelompok masyarakat belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga aset infrastruktur yang telah dibangun tidak dapat dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan pendanaan pengelola, khususnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan, serta lemahnya regulasi dan kelembagaan terutama terkait kejelasan penanggung jawab atas pengelolaan. Akibatnya, banyak infrastruktur yang berpotensi tidak optimal dimanfaatkan (*idle*) atau mengalami penurunan kualitas lebih cepat dari umur rencana.

Indikasi risiko ini tentunya akan mengurangi efektivitas investasi pembangunan yang telah dikeluarkan dan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Untuk itu, beberapa indikasi perlakuan risiko telah diidentifikasi. Pertama, pembangunan

infrastruktur dasar permukiman perlu didorong berbasis pengembangan kawasan strategis. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keterpaduan antara hulu dan hilir, meningkatkan nilai dan daya saing kawasan, serta menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan. Kedua, penetapan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Air Limbah Domestik menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses layanan dasar sekaligus memberikan kepastian arah pembangunan lintas sektor. Ketiga, pembentukan badan regulator air minum dan sanitasi menjadi kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, sehingga pemanfaatan aset infrastruktur dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Indikasi Risiko SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas

Pemenuhan prasarana strategis sangat erat hubungannya dengan sejumlah *stakeholders* seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Kebudayaan, hal ini disebabkan penyusunan regulasi, standar teknis dan kebutuhan prasarana tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi langsung dari *stakeholders* terkait. Oleh karena itu, lemahnya koordinasi antar *stakeholders* dapat menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat berdampak pada perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, standar teknis dan kualitas yang tidak terpenuhi serta rentan akan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan.

Pelaksanaan prasarana strategis yang bersifat direktif dan dinamis berisiko terhadap ketidakpastian dalam penanganan, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai alokasi penganggaran. Risiko lainnya juga terdapat pada tahap pasca konstruksi di mana komitmen Pemda sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pengelolaan infrastruktur terbangun. Keterbatasan anggaran operasional yang dimiliki Pemda juga mengakibatkan pengelolaan infrastruktur terbangun tidak terlaksana secara optimal.

Indikasi Risiko SS-5 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional sangat ditentukan oleh kualitas pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi. Dalam upaya mencapai pemenuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional tersebut, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini.

Risiko utama yang diidentifikasi adalah adanya ketidaksesuaian kompetensi lulusan vokasional dengan kebutuhan industri konstruksi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan kebutuhan industri yang dinamis seringkali tidak diimbangi dengan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran di lembaga vokasi. Apabila tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan sehingga mengurangi daya saing dan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, indikasi perlakuan risiko yang diidentifikasi yaitu melalui strategi *link and match* kurikulum dengan industri konstruksi yang pada pelaksanaannya dilakukan upaya pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri konstruksi, serta memastikan upaya tersebut dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.

Risiko lainnya adalah keterbatasan dukungan anggaran dan pembiayaan untuk pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi. Risiko ini berpotensi membatasi ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk pelatihan, penyediaan bahan praktik, maupun proses sertifikasi. Apabila tidak diantisipasi, maka kualitas pembinaan dan pengembangan SDM vokasional akan terhambat. Untuk meminimalkan dampak risiko tersebut, dilakukan strategi diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk dunia usaha/industri, serta memaksimalkan pemanfaatan fasilitas pelatihan yang ada di unit pelaksana teknis maupun wilayah setempat. Dengan demikian, ketersediaan sarana pembinaan dapat tetap terjamin meskipun dukungan anggaran terbatas.

Adapun pengembangan kompetensi ASN PU yang belum terintegrasi dengan manajemen talenta menjadi risiko yang harus dipertimbangkan karena akan memicu ketidaksesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan jabatan serta akan banyak program pengembangan ASN yang dilakukan secara generik dan administratif, bukan berdasarkan kebutuhan spesifik jabatan teknis.

Indikasi Risiko SS-6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas tata kelola Kementerian PU diproyeksikan terdapat beberapa potensi risiko. Pada perencanaan anggaran potensi risiko yaitu serapan alokasi anggaran di bawah target rencana yang disebabkan adanya perubahan kebijakan sehingga memberikan dampak pembangunan/pemeliharaan proyek prioritas tidak dapat terlaksana dan *output* tidak tercapai sehingga rencana tindak pengendaliannya dengan melakukan penelaahan atas rencana belanja.

Pada pelaksanaan anggaran, identifikasi risiko adanya pelaksanaan anggaran tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan (temuan berulang) dikarenakan adanya keterbatasan jumlah, kompetensi dan kualitas SDM keuangan yang akan berdampak pada reputasi tata kelola keuangan Kementerian PU melemah, maka perlu rencana tindak pengendalian berupa menyusun perbaikan pengendalian dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Selain itu, keterbatasan jumlah, kompetensi dan kualitas SDM keuangan dapat menimbulkan indikasi risiko rekomendasi temuan tidak ditindaklanjuti secara akurat dan tepat waktu sehingga dapat berdampak pada reputasi tata kelola keuangan Kementerian PU melemah maka perlu rencana tindak pengendalian berupa meningkatkan kualitas pengawasan berjenjang.

Pada pengelolaan barang milik negara terindikasi risiko aset Kementerian PU yang kurang termanfaatkan/dikuasai pihak lain dikarenakan kurangnya koordinasi antar unit baik dalam rangka pemanfaatan maupun pengamanan serta keterbatasan SDM dibanding dengan jumlah aset dan lokasi yang tersebar sehingga berdampak pada munculnya temuan berulang atas aset maka perlu rencana tindak pengendalian berupa meningkatkan pengendalian dalam rangka pengamanan serta menyusun skema pemanfaatan aset.

Pada pelaksanaan hukum potensi risikonya yaitu terdapat gugatan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas ke-PU-an di Kementerian PU/Unit Organisasi Kementerian PU yang disebabkan keterbatasan keuangan dan SDM dalam permasalahan hukum sehingga akan berdampak pada reputasi Kementerian PU yang menurun, maka rencana tindak pengendaliannya melakukan pendampingan dan pengawasan atas tindakan hukum yang akan dilakukan oleh personil.

Pada kepegawaian, indikasi risiko yang muncul yaitu layanan kepegawaian yang tidak transparan dan tidak akuntabel yang disebabkan belum sepenuhnya

mengimplementasikan proses otomasi pada layanan kepegawaian serta belum ada pedoman (SOP) yang jelas dan e-HRM belum sepenuhnya menyediakan *tracking* layanan sehingga akan berdampak pada durasi proses layanan kepegawaian yang memakan waktu lama serta munculnya ketidakpuasan pegawai Kementerian PU terhadap proses administrasi kepegawaian dan turunnya tingkat kepercayaan pegawai sehingga perlu rencana tindak pengendalian berupa SOP otomasi layanan kepegawaian dan otomasi penyelenggaraan layanan kepegawaian melalui e-HRM yang terintegrasi dengan SIASN.

Indikasi risiko “Belum ada kriteria proyek KPBU untuk setiap sektor di Kementerian Pekerjaan Umum” menunjukkan adanya celah kebijakan dan tata kelola yang dapat menghambat percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiadaan kriteria yang jelas untuk masing-masing sektor—seperti bina marga, sumber daya air, dan cipta karya—menyebabkan proses identifikasi, penyiapan, hingga transaksi proyek berpotensi berjalan tidak seragam. Hal ini berdampak pada ketidakpastian bagi pihak swasta maupun investor, karena tidak ada standar yang menjadi acuan dalam menilai kelayakan proyek KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) memegang peran strategis sebagai pengampu utama pembiayaan infrastruktur berbasis KPBU secara nasional, sekaligus sebagai motor koordinasi lintas sektor. Sebagai penanggung jawab, DJPI harus memastikan bahwa proyek-proyek KPBU yang diinisiasi di lingkungan Kementerian PU memiliki kriteria yang terukur, transparan, dan sesuai standar praktik internasional. Tanpa adanya kriteria sektor yang baku, DJPI menghadapi risiko kebijakan, karena proses seleksi proyek dapat dipandang tidak konsisten serta menyulitkan integrasi dengan kementerian/lembaga lain maupun calon investor.

Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah dimaksudkan agar investasi infrastruktur mampu memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan dan secara agregat dapat meningkatkan sinergi, spesialisasi, komplementaritas, aglomerasi dan skala ekonomi, sehingga dapat mendorong pengembangan kawasan yang berdaya saing tinggi. Dalam konteks pengembangan wilayah, kolaborasi melalui sinergi antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan merupakan kunci bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu pada konteks perencanaan yang selaras, sinkronisasi pemrograman pembangunan infrastruktur, serta pada pelaksanaan pembangunan dilakukan evaluasi program hingga evaluasi kebermanfaatan infrastruktur.

Indikasi Risiko SS-7 Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PU di Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan

Terdapat sejumlah risiko yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan di mana salah satu targetnya adalah peningkatan PDRB Perkotaan dan indeks kota berkelanjutan, yaitu karena beberapa infrastruktur PU cenderung penting secara fungsional namun tidak langsung berdampak pada peningkatan PDRB, hal ini disebabkan tidak ada *output* ekonomi secara langsung atau kontribusi tidak tercermin eksplisit dalam statistik makro ekonomi.

Di sisi lain, banyak kota metropolitan yang berkembang dan bergantung pada investasi dan konsumsi dari luar wilayahnya, pembangunan infrastruktur PU sendiri mungkin kurang mampu mengimbangi atau investasi, urbanisasi dan mobilitas eksternal, yang dengan kata lain masih perlu kolaborasi dengan banyak infrastruktur dari sektor di luar PU, dan ketidakselarasan perencanaan infrastruktur dapat menjadi *bottleneck* jika bersinggungan dengan kepentingan sektor lain.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian setiap SS dapat diukur secara objektif, akuntabel, dan konsisten, disusun pula Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS dirumuskan dengan merujuk pada kontribusi Kementerian PU dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kode	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKSS-01.01	Indeks ketahanan air nasional	Nilai	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75
IKSS-02.01	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	Jam/100km	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70
IKSS-02.02	Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	Jam/100km	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00
IKSS-03.01	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	%	65,78 – 67,10	71,00 – 75,52	73,92 – 85,41	76,39 – 92,24	79,07 – 100
IKSS-04.01	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	41,77	53,21	73,04	85,52	100
IKSS-05.01	Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Bersertifikat	%	22,12	33,92	35,60	37,36	39,19
IKSS-05.02	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja	%	77,50	78,50	79,50	80,50	81,50
IKSS-06.01	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	%	91,14	91,38	91,63	91,88	92,13
IKSS-06.02	Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90
IKSS-06.03	Tingkat keterpaduan infrastruktur PU	%	75,94	76,72	77,50	78,28	79,05
IKSS-06.04	Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi	%	70,85	73,35	76,85	79,59	82,01
IKSS-06.05	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100
IKSS-06.06	Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU	%	80,15	81,50	84,00	85,92	87,82
IKSS-07.01	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	40,93	41,14	41,40	41,72	42,09
IKSS-07.02	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	Skor	46,16	46,46	46,76	47,06	47,36
IKSS-07.03	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,42	3,44	3,46	3,49	3,52
IKSS-07.04	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	Skor	43,04	43,34	43,64	43,94	44,24

Kode	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKSS-07.05	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	3,89	3,92	3,95	3,98	4,01
IKSS-07.06	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	Skor	50,11	50,41	50,71	51,01	51,31
IKSS-07.07	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,57	3,72	3,85	3,99	4,12
IKSS-07.08	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	Skor	47,50	47,80	48,10	48,40	48,70

Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian PU mengusung sasaran utama “PU608” di mana Kementerian PU berperan sebagai *enabler* pertumbuhan ekonomi yang membantu investasi sektor produktif seperti industri dan pariwisata lebih efisien.

- 6 (enam), dimaknai efisiensi investasi dengan target nilai *Incremental Capital Investment Output* (ICOR) kurang dari 6, dicapai melalui strategi:
 - 1) Optimalisasi biaya melalui manajemen proyek yang efektif dan efisien untuk mewujudkan proyek infrastruktur dengan *life cycle* yang tepat serta memiliki kualitas dan kapasitas yang sesuai perencanaan;
 - 2) Optimalisasi aset untuk menghasilkan *output* maksimal serta meminimalkan risiko kerusakan *idle* infrastruktur sehingga mendukung efisiensi biaya pemeliharaan dan pembangunan baru; serta
 - 3) Investasi infrastruktur yang efisien, terencana, dan fokus pada sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan *incremental cost* yang efisien.
- 0 (nol), bermakna menuju pengentasan kemiskinan 0%, dicapai melalui strategi:
 - 1) percepatan akses infrastruktur dasar secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi melalui peningkatan akses air minum, sanitasi dan persampahan, serta pembangunan dan rehabilitasi prasarana strategis; serta
 - 2) penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pada proyek-proyek PU dan kegiatan padat karya infrastruktur, yang didukung dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
- 8 (delapan), mendorong pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, dicapai melalui strategi:
 - 1) penguatan dukungan infrastruktur di kawasan prioritas guna menghasilkan dampak pengganda yang signifikan bagi perekonomian;
 - 2) perwujudan swasembada pangan melalui penyediaan dan efisiensi pemanfaatan jaringan irigasi dengan sumber air berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian; serta
 - 3) peningkatan konektivitas jalan mantap dalam rangka memicu pertumbuhan Multi sektor, memastikan kelancaran distribusi logistik, dan membuka keterisolasian pada daerah tertinggal dan perbatasan.

2.4.1 Target *Outcome* Utama Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa target-target kegiatan utama Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan progresivitas yang terukur dengan peningkatan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029.

2.4.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (DJSDA)

Pengelolaan sumber daya air memiliki beberapa indikator kunci. Target kapasitas tampung air mencapai 63,54 m³ per kapita pada tahun 2029, dengan peningkatan bertahap dari 59,59 m³/kapita di tahun 2024. Untuk efisiensi pemanfaatan air irigasi, target akhir adalah 0,43 USD/m³ pada 2029, menunjukkan peningkatan efisiensi dari 0,31 USD/m³ pada *baseline* 2024. Selain itu, persentase luas baku sawah fungsional terus ditingkatkan hingga mencapai 62,37% pada 2029, serta rasio luas jaringan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk mencapai 16,57% pada akhir periode.

2.4.1.2 Penyelenggaraan Jaringan Jalan dan Jembatan (DJBM)

Penyelenggaraan jalan dan jembatan dilakukan dengan menjaga kemantapan pada jalan non tol sepanjang 47.603 km dan jalan tol sepanjang 2.460 km, dan pengembangan jaringan jalan dalam rangka menargetkan efisiensi waktu tempuh 1,7 jam per 100 km untuk lintas utama jaringan jalan nasional pada akhir tahun 2029. Untuk jaringan jalan nasional secara keseluruhan, target waktu tempuh ditetapkan pada 2,00 jam per 100 km pada akhir periode.

2.4.1.3 Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman (DJCK)

Pada periode 2025-2029, peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman diarahkan pada pencapaian empat target utama, yaitu persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman yang ditargetkan meningkat menjadi 30% pada 2029, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman yang ditargetkan mengalami peningkatan signifikan menjadi 43% pada 2029, penanganan timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah yang ditargetkan meningkat dari 15% pada tahun 2022 menjadi 38% pada 2029, serta jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan dapat dipertahankan sebanyak 514 kabupaten/kota hingga 2029. Keempat target tersebut merupakan target RPJMN yang menjadi target nasional sehingga memerlukan kontribusi multipihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat).

2.4.1.4 Peningkatan Penyediaan Prasarana Strategis (DJPS)

Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya ditargetkan mencapai 100% pada Tahun 2029 sesuai dengan penugasan kepada Kementerian PU. Persentase ini meningkat dari nilai *baseline* 29,75% pada Tahun 2025. Demikian pula untuk persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga dan sosial budaya yang ditingkatkan, dengan target akhir 100% pada Tahun 2029 dari *baseline* 31,32% pada Tahun 2025.

2.4.1.5 Peningkatan Kontribusi Ekonomi Perkotaan Secara Berkelanjutan (BPIW)

Fokus pada pengembangan kawasan metropolitan melalui beberapa indikator. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional ditargetkan mencapai 45,60% pada 2029. Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk rata-rata metropolitan ditargetkan mencapai 45,61 pada akhir periode. Selain itu, proporsi kontribusi PDRB perkotaan non-wilayah metropolitan terhadap PDRB nasional ditargetkan meningkat menjadi 8,13% pada 2029, sementara skor IKB rata-rata perkotaan non-wilayah metropolitan ditargetkan mencapai 49,86 pada periode yang sama.

Target-target tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 2.5 Target Outcome Kementerian Pekerjaan Umum

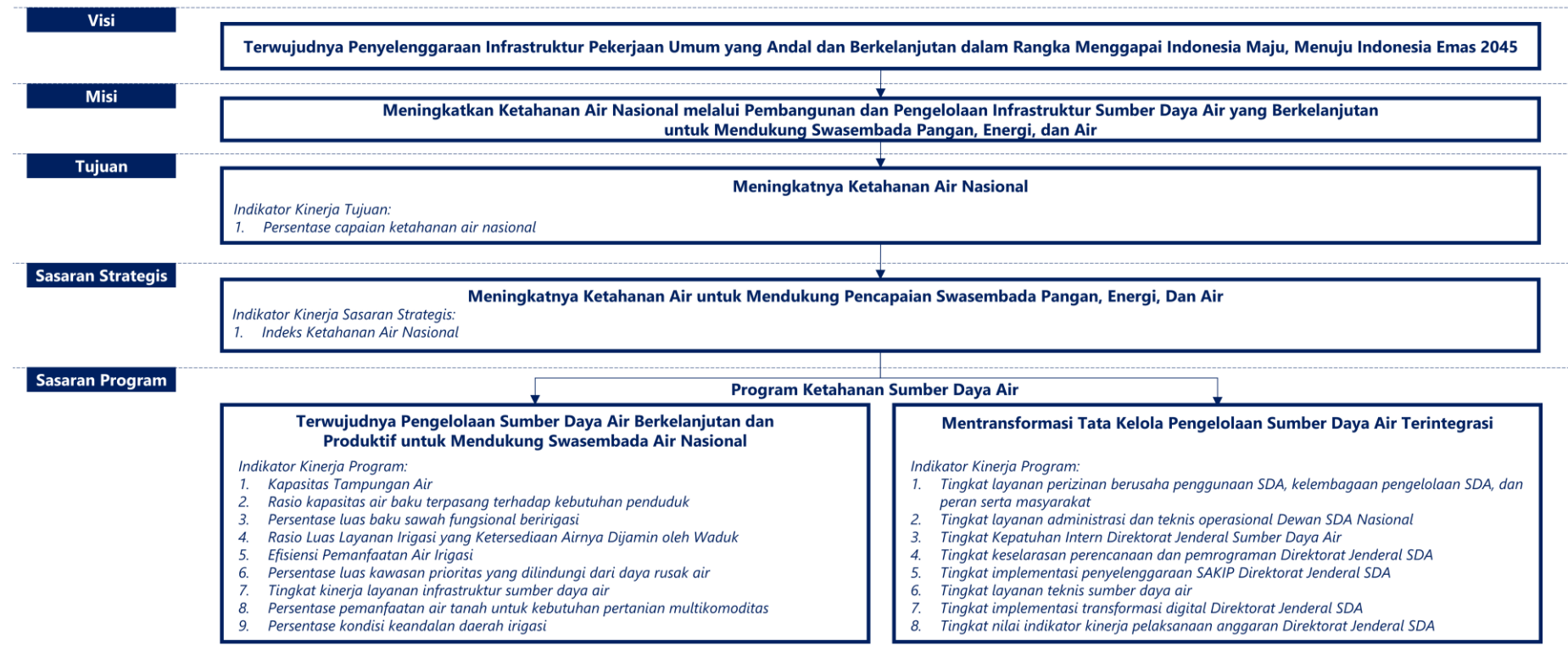
Outcome	UNOR	Satuan	2024 (base line)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas tampungan air	DJSDA	m ³ /kapita	59,59	59,31	59,39	59,08	59,90	63,54
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	DJSDA	%	53,34	53,01	53,16	55,09	56,47	56,18
Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi	DJSDA	%	61,55	61,61	61,73	61,92	62,14	62,37
Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	DJSDA	%	15,60	15,60	15,83	16,07	16,34	16,57
Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	DJSDA	USD/m ³	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,43
Persentase Luas Kawasan Prioritas yang Dilindungi dari Daya Rusak Air	DJSDA	%	0	12	32	61	83	100
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	DJSDA	%	0	2	8	27	45	62
Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	DJBM	Jam/100 km	1,90	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70
Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	DJBM	Jam/100 km	2,20	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00
Persentase RT dengan akses air minum aman	DJCK	%	11,80 (2020)	33	36	38	40	43
Persentase RT dengan sanitasi (akses air limbah domestik) aman	DJCK	%	10,21 (2023)	12,5	17	21	26	30
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DJCK	%	15 (2022)	24	28	31	34	38
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Pemenuhan Standar Keandalan Bangunan	DJCK	Kab / Kota	514	514	514	514	514	514
Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya	DJPS	%	0	29,75	44,44	64,47	81,66	100
Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang kualitasnya ditingkatkan	DJPS	%	0	31,32	43,70	71,38	83,96	100
Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	BPIW & DJCK	%	44,13 (2022)	44,35	44,58	44,86	45,21	45,60
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata wilayah metropolitan	BPIW & DJCK	Skor	44,61 (2023)	44,81	45,01	45,21	45,41	45,61
Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan non-wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	BPIW & DJCK	%	6,97 (2022)	7,47	7,64	7,80	7,97	8,13

Outcome	UNOR	Satuan	2024 (base line)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Perkotaan non-wilayah metropolitan	BPIW & DJCK	Skor	48,36 (2023)	48,66	48,96	49,26	49,56	49,86

2.4.2 *Cascading* Kinerja Program Kementerian Pekerjaan Umum

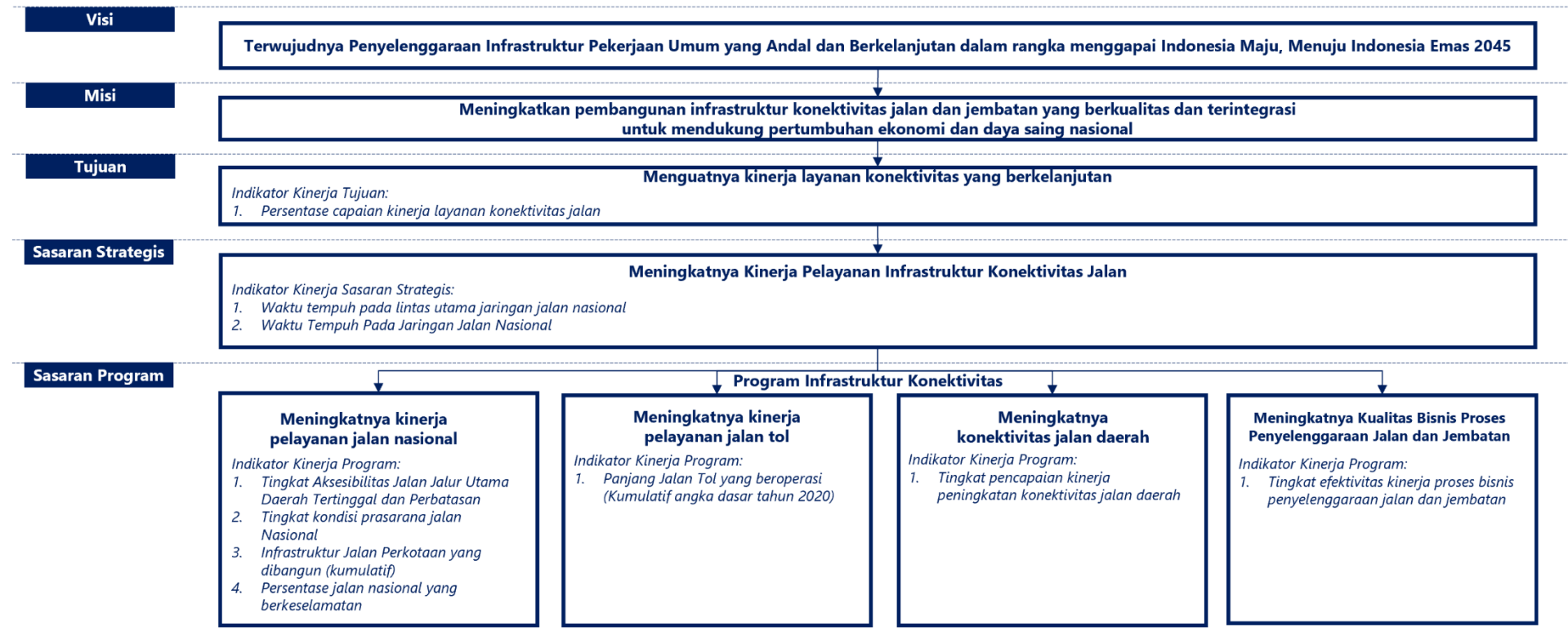
Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan target *outcome* Kementerian Pekerjaan Umum, dihasilkan *cascading* struktur kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam mencapai pembangunan nasional yang tercantum di RPJMN 2025-2029. Dalam *cascading* ini, dijelaskan bagaimana program yang dilakukan Kementerian PU berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian PU, dengan rincian sebagai berikut:

2.4.2.1 Cascading Kinerja Program Ketahanan Sumber Daya Air



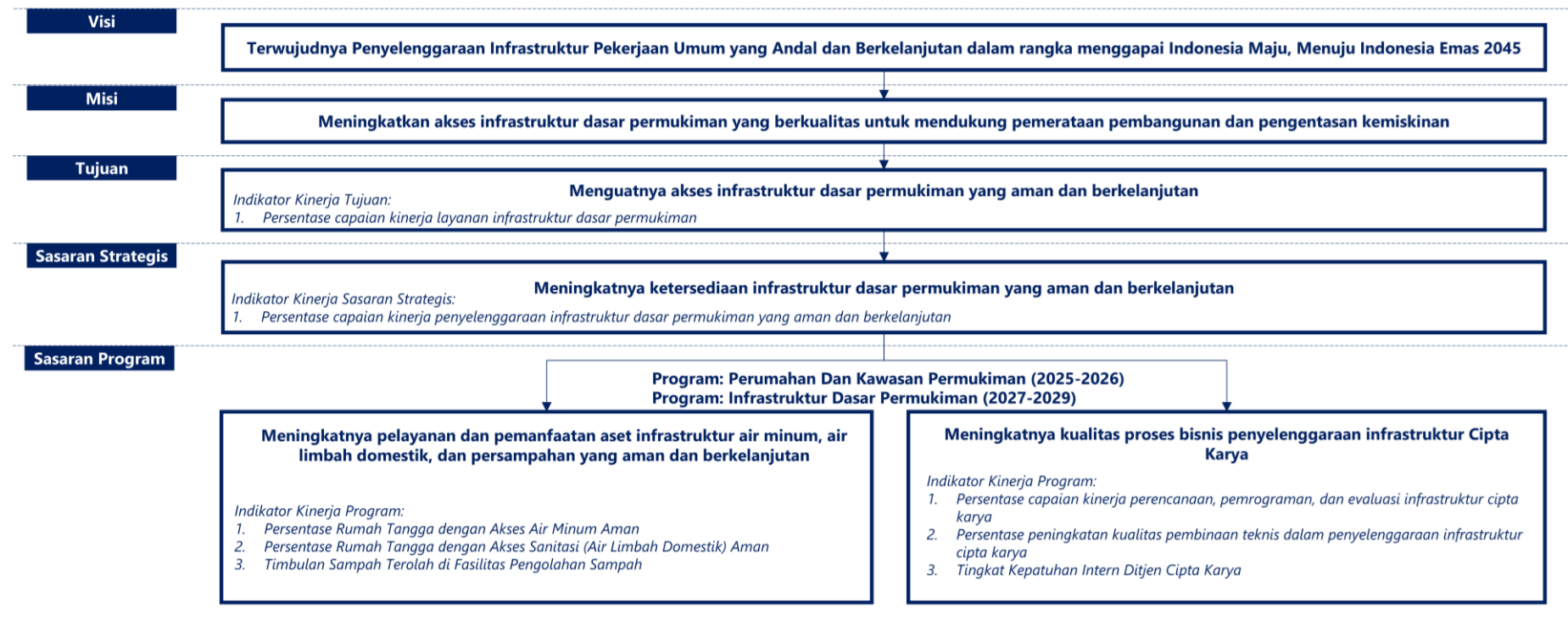
Sasaran strategis “Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air”, yang dinilai melalui indikator *persentase capaian ketahanan air nasional* dicapai melalui: 1) pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif; dan 2) transformasi tata kelola pengelolaan daya air terintegrasi.

2.4.2.2 Cascading Kinerja Program Infrastruktur Konektivitas



Sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan”, yang dinilai melalui indikator *waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional dan jaringan jalan nasional* dicapai melalui: 1) peningkatan kinerja pelayanan jalan nasional; 2) peningkatan kinerja pelayanan jalan tol; 3) peningkatan konektivitas jalan daerah; dan 4) peningkatan kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan.

2.4.2.3 Cascading Kinerja Program Infrastruktur Dasar Permukiman



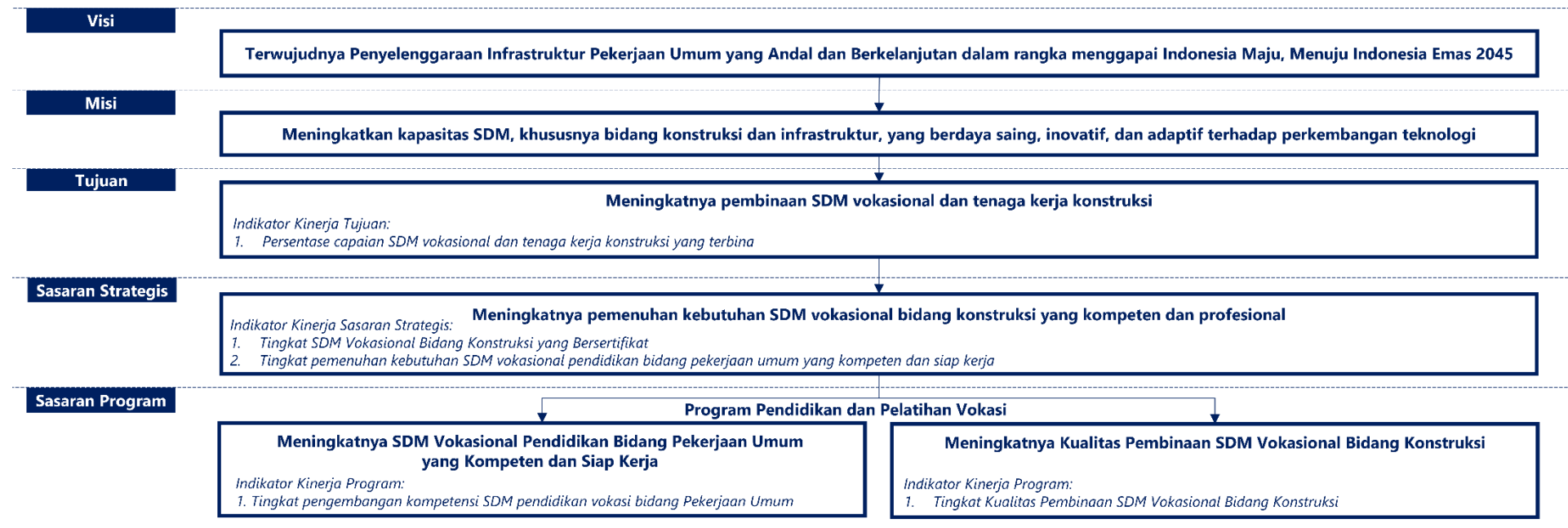
Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan” yang dinilai melalui indikator *Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan* dicapai melalui: 1) peningkatan pelayanan dan pemanfaatan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang aman dan berkelanjutan; dan 2) peningkatan kualitas proses bisnis penyelenggaraan infrastruktur Cipta Karya.

2.4.2.4 Cascading Kinerja Program Prasarana Strategis



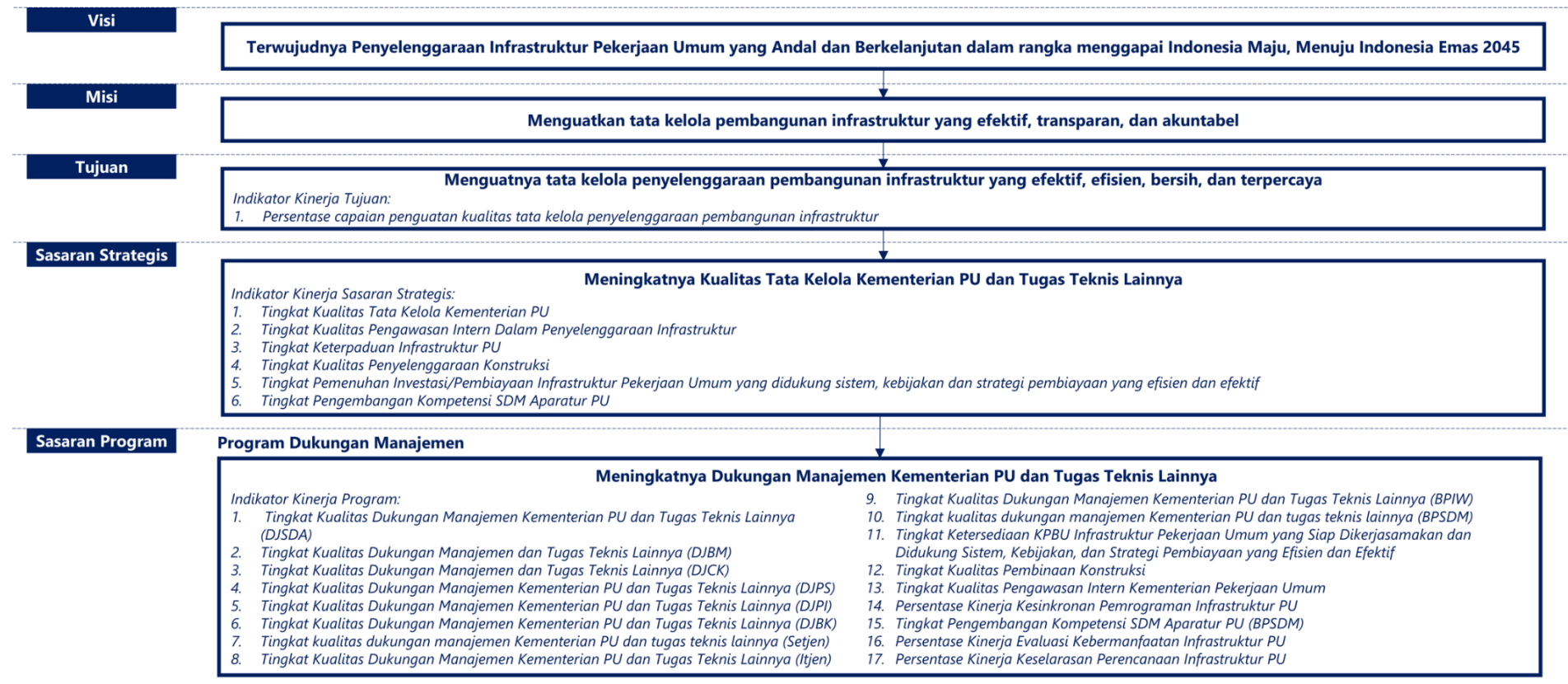
Sasaran strategis “Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasaran yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas” yang dinilai melalui indikator *persentase kontribusi pemenuhan sarana prasaran yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU* dicapai melalui: 1) peningkatan keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU.

2.4.2.5 Cascading Kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



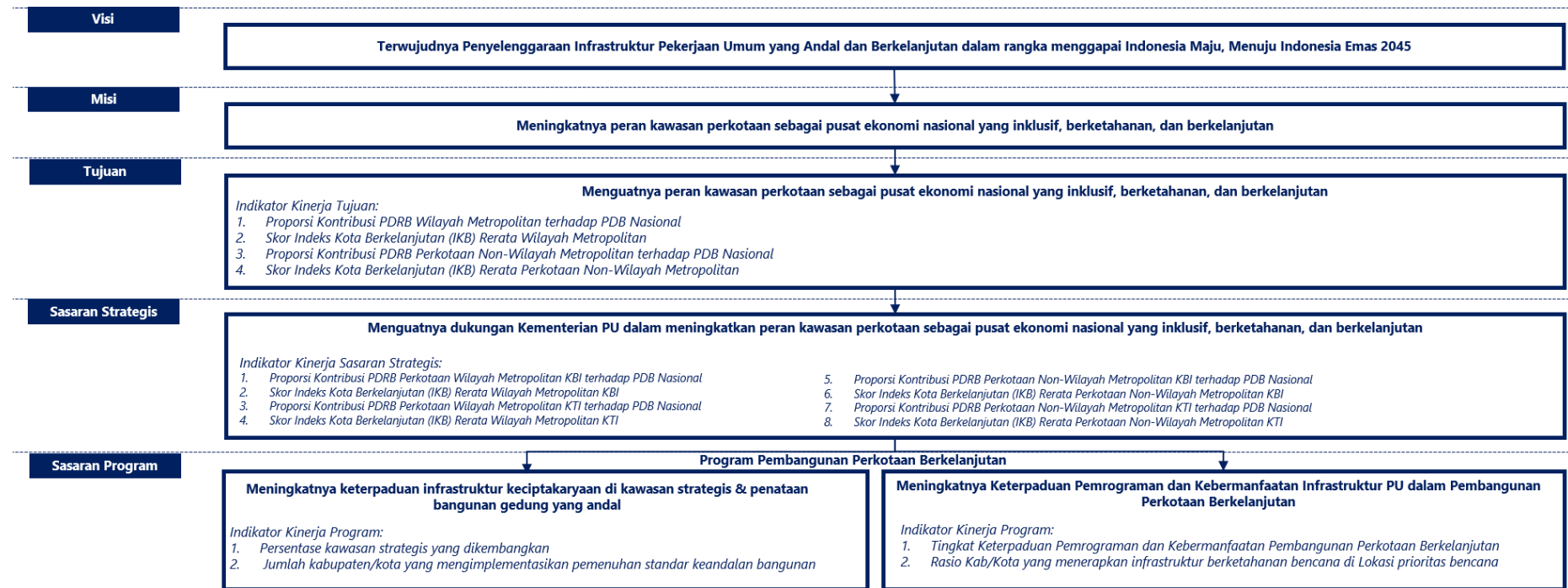
Sasaran strategis “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” yang dinilai melalui indikator 1) *Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang bersertifikat* dan 2) *Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja* dicapai melalui: 1) peningkatan kualitas pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi, dan 2) peningkatan SDM vokasional pendidikan bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja.

2.4.2.6 Cascading Kinerja Program Dukungan Manajemen



Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya” yang dinilai melalui indikator 1) Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU, 2) Tingkat kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur, 3) Tingkat keterpaduan infrastruktur PU, 4) Tingkat kualitas penyelenggaraan konstruksi, 5) Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif, serta 6) Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU, dicapai melalui peningkatan dukungan manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya

2.4.2.7 Cascading Kinerja Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan



Sasaran strategis “*Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan*” yang dinilai melalui 8 indikator dicapai melalui: 1) Peningkatan keterpaduan infrastruktur keciptakaryaan di kawasan strategis & penataan bangunan gedung yang andal dan 2) Peningkatan keterpaduan pemrograman dan kebermanfaatan infrastruktur PU dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional merupakan sintesa substansi dari RPJMN 2025-2029 yang berkaitan dengan infrastruktur Pekerjaan Umum, meliputi infrastruktur sumber daya air, konektivitas jalan, infrastruktur dasar permukiman (air minum, sanitasi, persampahan, bangunan gedung, dan pengembangan kawasan strategis), serta prasarana strategis (pendidikan, perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya). Secara tematik, Kementerian PU memiliki tugas sebagai koordinator di pembangunan perkotaan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi nasional di dalam RPJMN 2025-2029 ini akan diukur dalam struktur kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Struktur Kinerja RPJMN 2025-2029

Struktur Kinerja RPJMN 2025-2029	Keterangan	Jumlah Indikator yang dikoordinir/diampu Kementerian PU
Sasaran Pembangunan Nasional (SPN) – Indikator SPN	- Merupakan target utama pembangunan nasional yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun (2025-2029) - Indikator SPN adalah ukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan - Bersifat strategis dan mencerminkan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024	Tidak ada
Prioritas Nasional (PN) – Indikator PN	- Adalah fokus-fokus utama pembangunan yang diprioritaskan pemerintah - Setiap prioritas nasional memiliki kementerian/lembaga koordinator dan pengampu - Indikator PN mengukur pencapaian setiap prioritas nasional yang ditetapkan	Tidak ada
Program Prioritas (PP) – Indikator PP	- Merupakan program-program spesifik yang mendukung pencapaian prioritas nasional - Dapat bersifat lintas kementerian/lembaga atau kewilayahan - Indikator PP mengukur efektivitas program-program prioritas yang dilaksanakan	Koordinator 13 Indikator
Kegiatan Prioritas (KP) – Indikator KP	- Adalah kegiatan-kegiatan operasional yang mendukung program prioritas - Lebih teknis dan detail dibanding program prioritas - Indikator KP mengukur pencapaian kegiatan-kegiatan prioritas	Pengampu 65 Indikator
Proyek Prioritas (ProP)	- Merupakan proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak signifikan - Biasanya bersifat multiyear dan membutuhkan koordinasi lintas sektor - Termasuk proyek infrastruktur besar, transformasi digital, atau program strategis lainnya	Tidak disebutkan secara eksplisit

Struktur ini menunjukkan hierarki perencanaan dari level makro (Sasaran Pembangunan Nasional) hingga level mikro (Proyek Prioritas), dengan setiap level memiliki indikator kinerja yang terukur untuk memastikan akuntabilitas dan pencapaian target pembangunan nasional.

3.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029

Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target tahun 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.2 Target Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran Pembangunan Nasional	Tahun		
	2024	2025	2029
Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju			
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3	8
GNI per Kapita (USD)	4.870 (2023)	5.410	8.000
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,9 (2022)	8,1	9,1
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	18,67 (2023)	20,8	21,9
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat			
Global Power Indeks	34 (2023)	33	29
Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			
Tingkat Kemiskinan turun (%)	9,03	7,0 - 8	4,5 - 5,0 Kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) < 0,5 % (2026)
Rasio Gini (%)	0,379	0,378 – 0,382	0,372 – 0,375
Kontribusi PDRB KTI (%)	20,9 (2023)	21,4	22,4
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat			
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54 (2020)	0,56	0,59
Intensitas Emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>			
Penurunan intensitas emisi GRK (%)	34,09 (2022)	35,53	45,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023)	76,49	77,20

Sumber: RPJMN 2025-2029

3.1.2 Proyek Strategis dan Program Hasil Terbaik Cepat (Quickwins)

Proyek strategis dalam RPJMN 2025-2029 terdiri dari Proyek Strategis Nasional dan PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) yang didesain sebagai langkah konkret dalam pencapaian pembangunan nasional. Program Hasil Terbaik Cepat (*Quickwins*) dirumuskan untuk mampu mengatasi berbagai isu dan tantangan secara cepat dan tepat dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Program-program ini dirancang untuk segera memberi dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu singkat, terutama untuk mengatasi masalah yang mendesak.



Gambar 3. 1 Pembangunan Hasil Terbaik Cepat Nasional
Sumber: RPJMN 2025-2029

Berdasarkan 8 PHTC Presiden yang dirumuskan dalam RPJMN 2025-2029, berikut adalah PHTC yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU pada periode 2025-2029. Dari 8 PHTC yang dirumuskan, 5 PHTC yang berkaitan langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 3.3 Pembangunan Hasil Terbaik Cepat yang Didukung Kementerian PU

No.	PHTC	Dukungan Kementerian PU
1	PHTC 1 “Memberi makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita”	1. Penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum, serta penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman 3. Penyediaan infrastruktur transportasi, pengelolaan limbah dan sampah 4. Penyediaan dapur untuk makan bergizi
2	PHTC 2 “Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten/ kota”	Mendukung penyediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) yang berkualitas
3	PHTC 3 “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional”	1. Penyiapan kawasan pertanian dan infrastruktur pendukung KSPP 2. Penyiapan sarana pengembangan KSPP 3. Dukungan cetak sawah (ekstensifikasi)
4	PHTC 4 “Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas”	1. Menyediakan sarana dan prasarana utama Pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman 2. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
5	PHTC 7 “Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Penyediaan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan 2. Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan 3. Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perdesaan 4. Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

(Sumber: RPJMN 2025-2029 (diolah), 2025)

Proyek Strategis Nasional berupa proyek atau program yang bersifat strategis, terukur dan berdampak signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk PHTC. Proyek Strategis Nasional ditetapkan setiap tahun berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan, kesiapan proyek, ketersediaan anggaran serta persetujuan presiden. Dalam RPJMN 2025-2029 termuat 77 Proyek Strategis Nasional baik yang merupakan proyek baru maupun *carry over*. Dan untuk indikasi PSN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU terdapat 18 macam proyek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4 Kegiatan dan Proyek Prioritas

No.	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
1	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
2	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
3	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
4	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate
5	Layanan Irigasi Lumbung Pangan Nasional
6	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa

No.	Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
7	Bendungan Way Apu
8	Bendungan Jragung
9	Bendungan Mbay
10	Bendungan Bulango Ulu
11	SPAM Regional Wosokusas
12	SPAM Regional Benteng – Kobema
13	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
14	Jalan Tol Serang – Panimbang
15	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi
16	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
17	Jakarta <i>Sewerage System</i>
18	Pengembangan KEK dan KI

Sumber: RPJMN 2025-2029 (diolah), 2025

3.1.3 Arahkan Nasional untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2025-2029, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu indikator berpengaruh dalam penguatan fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian yang telah diraih seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi guna memperlancar arus barang dan orang antarwilayah serta peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, harus selalu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Di samping itu, beberapa aspek yang masih perlu diperkuat bersama para *stakeholders* juga masih menjadi tantangan di tingkat nasional, seperti pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun serta pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa fokus akan keberlanjutan peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas perlu didorong bersama guna pemanfaatan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri.

Pembangunan Infrastruktur yang unggul dan persisten harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur berlandaskan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut juga perlu dihadapkan dengan kapasitas ruang fiskal, di mana terintegrasinya sistem pendanaan atau pembiayaan terpadu dapat menjadi solusi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Dokumen RPJMN 2025-2029 menjelaskan sejumlah batasan yang perlu menjadi acuan dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum yang adil dan ekstensif, seperti lokasi kawasan lindung baik di darat dan perairan, tutupan hutan primer, habitat flora & fauna, perubahan iklim serta potensi kebencanaan. Batasan ini erat hubungannya dengan proses perencanaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang harus memperhatikan kesesuaian dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, di mana perencanaan yang tepat akan berdampak pada pemanfaatan ruang fiskal negara secara optimal, hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi

negara maju. Kebutuhan pendanaan akan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum menuntut tingginya akurasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur demi terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum yang andal, operatif, paripurna dan membawa kebermanfaatan secara langsung dan luas bagi masyarakat.

3.1.3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Pembangunan perkotaan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional periode 2025-2029. Perkotaan termasuk di dalam pemenuhan Prioritas Nasional (PN) 6 "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Perwujudan target terkait pertumbuhan serta pemerataan ekonomi digambarkan dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan, yang pada level KP dibagi menjadi Kawasan Timur dan Barat Indonesia (KTI dan KBI). Selain itu, pembangunan perkotaan di Indonesia diarahkan untuk memenuhi kaedah-kaedah berkelanjutan yang digambarkan melalui indikator Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) pada struktur pembagian kewilayahan seperti indikator PDRB, yakni Metropolitan dan Perkotaan Non-Metropolitan yang berada di KTI dan KBI. IKB ini meliputi faktor sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan. Nomenklatur indikator ini menggambarkan arah kebijakan serta strategi pembangunan nasional di wilayah perkotaan yang tidak hanya fokus pada peningkatan dan pemerataan ekonomi, tetapi juga memperhatikan strategi pencapaiannya yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung capaian indikator Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan tersebut antara lain dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis. Selain itu, pembangunan perkotaan harus juga didukung infrastruktur yang berketahanan dan andal terhadap bencana. Hal ini didorong melalui diakomodirnya indikator pada Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana di dalam Program Prioritas (PP) Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna, yang menjadi bagian dari PN 8 dengan indikator Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana. Fokus lokasi prioritas untuk penerapan infrastruktur berketahanan bencana adalah wilayah dengan risiko bencana tinggi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami (terkait dengan fenomena *Megathrust* dan Sesar aktif).

Tabel 3.5 Target indikator PP dan KP Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
06.04	PP	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	BPIW & DJCK	Persen	44,13 (2022)	44.35	45.60
06.04	PP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	BPIW & DJCK	Skor	44,61 (2023)	44.81	45.61
06.04	PP	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	BPIW & DJCK	Persen	6,97 (2022)	7.47	8.13
06.04	PP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	BPIW & DJCK	Skor	48,36 (2023)	48.66	49.86
06.04.01	KP	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	BPIW & DJCK	Persen	40,75 (2022)	40.93	42.09

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
06.04.01	KP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	BPIW & DJCK	Skor	45,86 (2023)	46.16	47.36
06.04.01	KP	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	BPIW & DJCK	Persen	3,38 (2022)	3.42	3.52
06.04.01	KP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	BPIW & DJCK	Skor	42,74 (2023)	43.04	44.24
06.04.02	KP	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	BPIW & DJCK	Persen	3,83 (2022)	3.89	4.01
06.04.02	KP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	BPIW & DJCK	Skor	49,81 (2023)	50.11	51.31
06.04.02	KP	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	BPIW & DJCK	Persen	3,15 (2022)	3.57	4.12
06.04.02	KP	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	BPIW & DJCK	Skor	47,20 (2023)	47.50	48.70
08.04.05	KP	Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	BPIW	%	-	19	100

3.1.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk sejalan dengan Prioritas Nasional 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” dengan satu sasaran utama yang ketercapaiannya sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum di bidang Sumber Daya Air, yakni Sasaran 4: Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dimana dibawahnya terdapat dua indikator sasaran yang erat dengan tugas dan fungsi Kementerian PU dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu Indeks Ketahanan Air Nasional dan Kapasitas tampungan air.

Tabel 3.6 Target indikator PP dan KP Sektor Sumber Daya Air

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
2.12	PP	Kapasitas Tampungan Air	DJSDA	m3/kapita	59,59	59,31	63,54
02.12	PP	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	DJSDA	persen	53,34	53,01	56,18
02.12	PP	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	DJSDA	persen	61,55	61,61	62,37
02.12	PP	Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	DJSDA	persen	15,6	15,6	16,57
02.12	PP	Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	DJSDA	USD/m3	0,31	0,34	0,43
02.12	PP	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	DJSDA	Persen	0	12	100
02.12.01	KP	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	DJSDA	Unit (kumulatif)	1.563	1.563	4.213
02.12.01	KP	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	DJSDA	Unit (kumulatif)	47 (2015-2024)	1	16
02.12.01	KP	Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	DJSDA	Unit (kumulatif)	1.391 (2015 – 2024)	13	226
02.12.01	KP	Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	DJSDA	Unit (kumulatif)	19	20	50
02.12.01	KP	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	DJSDA	Unit (kumulatif)	2	10	25
02.12.02	KP	Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	DJSDA	persen	35	35	45
02.12.02	KP	Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	DJSDA	Wilayah Sungai	50	50	50
02.12.02	KP	Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	DJSDA	m3/detik (kumulatif)	75,03	78,78	93,79
02.12.02	KP	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	DJSDA	m3/detik (kumulatif)	46,7 (2015-2024)	0,37	19,12
02.12.02	KP	Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	DJSDA	m3/detik (kumulatif)	1,44	0,84	5,53
02.12.02	KP	Luas layanan irigasi yang dikelola	DJSDA	ha (kumulatif)	3.142.532	3.142.532	3.229.532

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
02.12.02	KP	Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	DJSDA	ha (kumulatif)	134.118 (2020-2024)	10.000	180.000
02.12.02	KP	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	DJSDA	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020-2024)	75.864	1.200.000
02.12.02	KP	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	DJSDA	milyar m3	58,32	55,40	45,13
02.12.03	KP	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	DJSDA	persen	36	38	47

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
02.12.03	KP	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	DJSDA	Hektare (kumulatif)	37.754 (2020-2024)	3600	27000
02.12.03	KP	Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	DJSDA	Unit (Kumulatif)	549	549	697
02.12.03	KP	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	DJSDA	Km (kumulatif)	1.784	1.784	2.222
02.12.03	KP	Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	DJSDA	Juta m3	1,57	0,35	4,3
02.12.03	KP	Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	DJSDA	Kawasan (kumulatif)	(indikator baru)	0	16
02.12.03	KP	Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	DJSDA	Wilayah Sungai (Kumulatif)	(indikator baru)	19	26
02.12.09	KP	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	DJSDA	Hektare (kumulatif)	3.577 (2020-2024)	200	5.000

Pengentasan sasaran ini tidak terlepas dari isu-isu mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di sektor sumber daya air, diantaranya permasalahan terkait penurunan kualitas dan kuantitas mata air, kebutuhan air pada tahun 2045 yang diproyeksikan akan meningkat sekitar 31% dari kebutuhan air pada tahun 2020 dan kapasitas tamping air per kapita Indonesia yang berada dibawah negara-negara dengan varibilitas musim serupa.

Lebih lanjut, intervensi dalam mendukung arah kebijakan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air untuk mencapai sasaran PN 2 adalah memaksimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan swasembada air melalui pengintegrasian dari hulu ke hilir dengan konsep *source to sea* melalui penyelamatan mata air kritis, konservasi dan pengelolaan air tanah, pembangunan dan pengelolaan tampungan air, penyediaan pasokan air berkelanjutan melalui *smart water management* dan *prinsip water accounting* untuk menjaga neraca air di tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis, optimalisasi pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun, pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan non struktural serta penerapan konsep solusi berbasis alam (*nature-based solution*) pada beberapa wilayah sungai, revitalisasi sungai, dan percepatan *giant sea wall* untuk pengaman terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan. Selain mendukung ketercapaian sasaran dari PN 2, kegiatan pengelolaan risiko daya rusak air juga secara tidak langsung mendukung ketercapaian sasaran dari PN 8, yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur pada Kegiatan Prioritas 05 Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana.

Upaya tersebut perlu didukung melalui transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/ retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling environment* lainnya.

Langkah-langkah ini diwujudkan melalui penerapan pendekatan pengelolaan peningkatan nilai kawasan (*Land Value Capture*), program percepatan Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum di sektor Sumber Daya Air dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta masyarakat. Dalam rangka mencapai swasembada air tersebut beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yaitu (a) pembangunan dan pengelolaan tampungan air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, (d) konservasi sumber daya air, (e) penguatan peran masyarakat, serta (f) Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa.

3.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Kebijakan dalam penyelenggaraan jalan diarahkan untuk sejalan dengan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di Sentra Produksi melalui peran aktif koperasi, dimana terdapat salah satu sasaran utama yang ketercapaiannya sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum, yakni Sasaran 1: Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu indikator penunjang keberhasilan Program Prioritas (PP): Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, yang erat dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga adalah "Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional", di mana ditargetkan pada tahun 2029 untuk mencapai angka 1,7 jam per 100 km.

Tabel 3.7 Target indikator PP dan KP Sektor Konektivitas Jalan

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03.01.01	PP	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	DJBM	Jam/100 Km	1,90	1,90	1,70
03.01.01.01	KP	Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan	DJBM	Km/100 Km2	2,70	2,60	2,84
03.01.01.02	KP	Panjang Jalan Tol yang beroperasi (Kumulatif)	DJBM	Km (kumulatif)	751 (2023)	994	5134
03.01.01.03	KP	Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	DJBM	%	92/70/53 /81	94/71/56 /82	98/76/66 /85
03.01.06.04	KP	Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun (kumulatif)	DJBM	Km (kumulatif)	34,50 (2023)	54,50 (2020 - 2025)	155 (2020 - 2029)

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari isu-isu mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di sektor penyelenggaraan jalan, di antaranya adalah kondisi saat ini yang menyatakan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional di Indonesia (1,90 jam/100 Km) relatif lebih tinggi dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya seperti di Malaysia (1,09 jam/100 Km), Thailand (1,3 jam/100 Km) dan Vietnam (1,96 jam/100 Km), selain itu

masih tingginya kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, masih belum optimalnya tata kelola jalan daerah yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, di mana dari total panjang jalan di seluruh Indonesia sebesar 504.672 Km, sebesar 28% mengalami kerusakan, di mana 77% di antaranya merupakan jalan daerah.

Di sisi lain, adanya kebutuhan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan, di mana penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum seperti jalan nasional, jembatan dan yang terencana dengan presisi dapat menjadi solusi akan kebutuhan tersebut. Selain itu adanya akses konektivitas yang mantap dapat menjadi salah satu faktor pemicu tumbuhnya kegiatan ekonomi serta mendorong investasi pada sektor sosial, ekonomi dan lingkungan, di mana hal ini sangat berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah intervensi yang dapat diperhatikan dalam mendukung arah kebijakan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum bidang konektivitas untuk mencapai sasaran PN 3 adalah memaksimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan konektivitas yang mendukung upaya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan kualitas akses terhadap simpul-simpul transportasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas tersebut dapat dicapai salah satunya melalui menjaga tingkat kualitas akses masyarakat terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara guna peningkatan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang, jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan. Selain itu penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung pengembangan jaringan pelabuhan dan bandara terpadu sebagai outlet ekonomi serta angkutan umum massal perkotaan, penguatan kehandalan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan transportasi darat serta pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja infrastruktur Pekerjaan Umum bidang Konektivitas juga perlu dilaksanakan guna mencapai indikator penunjang keberhasilan Program Prioritas, dimana intervensi-intervensi tersebut dapat menjadi langkah yang tepat, tidak hanya dalam memangkas waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional dan pada jaringan jalan nasional secara keseluruhan, namun juga peningkatan ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan penyelenggaraan jalan juga diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Penyelenggaraan jalan dan jembatan akan mendukung ketersediaan akses yang handal menuju ke kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus terutama yang merupakan kawasan prioritas pada RPJMN 2025-2029. Melalui penyediaan akses menuju kawasan prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional terutama yang akan didistribusikan melalui outlet atau simpul-simpul transportasi.

Di samping itu, upaya tersebut perlu didukung melalui transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling environment* lainnya.

3.1.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Permukiman

Kebijakan dalam penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman diarahkan untuk sejalan dengan Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6. Untuk PN2, terdapat satu sasaran utama yang ketercapaiannya sangat dipengaruhi oleh dukungan Kementerian PU di bidang infrastruktur dasar permukiman, yakni Sasaran 4: Meningkatkan

kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan *Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)*, dengan dua indikator prioritas pembangunan yang diampu Ditjen Cipta Karya sesuai tugas dan fungsinya, yaitu rumah tangga dengan akses air minum aman dan rumah tangga dengan akses sanitasi aman. Pada PN2 terdapat juga Sasaran 6: Terwujudnya transformasi ekonomi hijau, yang salah satu indikator kegiatan prioritasnya adalah timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Dalam merumuskan kebijakan di sektor infrastruktur dasar permukiman, terdapat beberapa isu-isu mendasar yang harus menjadi pertimbangan yaitu: kapasitas SPAM menganggur (*idle capacity*) dan NRW masih tinggi, rendahnya kinerja BUMD air minum (34,5% BUMD berkinerja sakit dan kurang sehat), sekitar 80% dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik, namun hanya 25% kabupaten/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik. Pada tahun 2023, hanya 10,25% pada 2024 rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman dan masih terdapat 203 kabupaten/kota yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan 483 kabupaten/kota yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang dikelola oleh institusi. Terkait pengolahan sampah, beberapa tantangan yang ada antara lain: produksi sampah domestik nasional yang diproyeksikan akan meningkat mencapai 67,8 juta ton per tahun di 2029 dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampah tahun 2029 (skenario *business as usual*), serta kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh pada 2028 atau bahkan lebih cepat. Diperlukan penuntasan layanan dasar wajib persampahan mengingat saat ini pengumpulan sampah baru menjangkau 35% rumah tangga. Hanya 20% rumah tangga yang sudah mempunyai tempat sampah tertutup dan sekitar 6% rumah tangga yang telah melakukan pemilahan dan mendapatkan layanan persampahan. Selain itu, diperlukan transformasi pengelolaan TPA dari *open dumping* ke *sanitary landfill*, mengingat saat ini 40% TPA masih beroperasi dengan sistem *open dumping* dan menyebabkan kebocoran sampah ke laut.

Tabel 3.8 Target indikator PP dan KP Sektor Infrastruktur Dasar Permukiman

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
02.12	PP	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	DJCK	%	11,80 (2020)	33	43
02.12	PP	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	DJCK	%	10,21 (2023)	12,5	30
02.12.05	KP	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	DJCK	persen	24 (2020)	39,20	51,36
02.12.05	KP	Kapasitas SPAM Terbangun	DJCK	Liter/detik	281.045	281.797	287.500
02.12.05	KP	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	DJCK	persen	19,76 (2023)	28.2	40.2
02.12.05	KP	Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM	DJCK	persen	33 (2023)	32	25
02.12.06	KP	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	DJCK	kab/kota	196	218	514

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
02.12.06	KP	Kapasitas IPAL yang terbangun	DJCK	Sambungan Rumah	700.000 (2024)	730.000	1.700.000
02.12.06	KP	Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	DJCK	persen	9,35 (2023)	10	25
02.12.06	KP	<i>Idle Capacity</i> IPLT	DJCK	persen	74 (2024)	70	30
02.12.06	KP	<i>Idle Capacity</i> IPAL	DJCK	persen	65 (2023)	64	60
02.12.06	KP	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan LLTT	DJCK	kab/kota	19 (2023)	30	70
02.12.07	KP	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM	DJCK	Provinsi dan Kab/Kota	15 Provinsi dan 103 Kab/Kota	18 Provinsi dan 178 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota
02.12.07	KP	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	DJCK	Provinsi dan Kab/Kota	21 Provinsi dan 505 Kab/Kota	23 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota
02.12.07	KP	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	DJCK	Provinsi dan Kab/Kota	278 (2023)	317	514
02.12.07	KP	Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	DJCK	BUMD air minum	121	176	394
02.12.07	KP	BUMD Air Minum Berkinerja Sehat	DJCK	%	65,39 (2023)	74	100
02.12.07	KP	Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik	DJCK	BUMD Air Minum	5 (2023)	7	20
02.12.07	KP	Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	DJCK	NSPK	0	2	9
02.12.07	KP	Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	DJCK	NSPK	0	1	15
02.12.08	KP	Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi	DJCK	Proyek	0 (2023)	0	4

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang Air Minum (kumulatif)					
02.12.08	KP	Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan Air limbah domestik (kumulatif)	DJCK	Proyek	0 (2023)	0	5
02.12.09	KP	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	DJCK	Kabupaten/kota (kumulatif)	32	32	43
02.18.02	KP	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	DJCK	%	15% (13 terdaur ulang) (2022)	24% (16 terdaur ulang)	38% (20 terdaur ulang)
02.18.02	KP	TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	DJCK	unit	(indikator baru)	0	11 (kumulatif)
06.06.04	KP	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	DJCK	Kab/Kota	514	514	514
06.07.01	KP	Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	DJCK	Persen	18,9 (2023)	22	30
06.07.01	KP	Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	DJCK	Persen	4,77	6	12
06.06.04	KP	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	DJCK	Kabupaten/Kota	514	514	514

Untuk Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dimana terdapat satu sasaran utama yang ketercapaiannya sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum di bidang infrastruktur dasar permukiman, yakni Sasaran 3: mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketercapaian sasaran ini tidak terlepas dari isu yang harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Selain itu, infrastruktur dasar permukiman juga berperan penting dalam mendukung

pembangunan perkotaan berkelanjutan, yang menjadi salah satu sasaran dalam penyelenggaraan kawasan strategis.

Prioritas Nasional 6 juga mengamanatkan intervensi di bidang infrastruktur dasar permukiman, khususnya penyelenggaraan bangunan gedung melalui dukungan terhadap pencapaian Program Prioritas (PP) Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman, Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Ekosistem Perumahan dengan sasaran 'Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan' dengan pencapaian indikator 'Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan'. Pencapaian indikator tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung kepada pemerintah daerah guna mendorong penerapan standar keandalan bangunan melalui penyelenggaraan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lebih lanjut, intervensi dalam mendukung arah kebijakan pengembangan infrastruktur dasar permukiman untuk mencapai sasaran PN 2 adalah memaksimalkan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan swasembada air melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung melalui transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling environment* lainnya. Dalam rangka mencapai swasembada air tersebut beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yaitu (a) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (b) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *Citywide Inclusive Sanitation* (c) penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi. Selain itu, untuk mendukung reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang juga tercantum pada PN 2, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur persampahan, tetapi juga berperan dalam melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, fasilitasi pemanfaatan kerja sama dengan pihak swasta, peningkatan kepedulian dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah, pembinaan teknis sumber daya manusia operator persampahan, serta penyempurnaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang persampahan.

Selain mendukung PN 2 dan PN 6, infrastruktur dasar permukiman juga mendukung PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, serta PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, melalui pengembangan dan pembangunan kawasan strategis. Dukungan terhadap PN 3 dilakukan melalui pengembangan kawasan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, diantaranya pada Destinasi Pariwisata Prioritas, dan dukungan terhadap PN 5 dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan pada kawasan pendukung Kawasan Industri/KEK prioritas.

3.1.3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Kebijakan dalam pembangunan prasarana strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional (PN) 4 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda

(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; PN 5 - Melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri; PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; dan PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 4 pada pembangunan pendidikan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang semakin merata yang dilakukan melalui penyediaan prasarana pendidikan berkualitas pada jenjang SD/MI hingga SMA/MA serta perguruan tinggi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SPN). Pencapaian sasaran PN4 ini juga didukung oleh Inpres 07 Tahun 2025 yang mengamanatkan Kementerian PU dalam melakukan pembangunan prasarana program revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dibawah pembinaan Kementerian Agama, Inpres 08 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana Kementerian PU khususnya Direktorat Prasarana Strategis mendapatkan amanat dalam mendukung program Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui penyiapan sarana dan prasarana strategis. Selain itu Direktorat Jenderal Prasarana Strategis juga ikut mendukung terlaksananya kegiatan prioritas makan bergizi di sekolah melalui penyediaan dapur untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi dimana dukungan ini telah dituangkan dalam MoU antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional tentang Sinergitas Dukungan Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada pembangunan kesehatan ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas yang dilakukan melalui penyediaan prasarana Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten/ kota. Selanjutnya untuk pembangunan olahraga ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional yang dilakukan melalui penyediaan prasarana olahraga yang berstandar kelas dunia sebagai mana yang diamanatkan dalam Perpres DBON Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dimana Kementerian PU bertanggung jawab terhadap 3 indikator penanganan yaitu pembangunan Indonesia *Elite Athlete* dan Indonesia *Para Athlete Training Center* kelas dunia, pembangunan (Mayor) *Youth Sports Center* kelas dunia, dan renovasi (Minor) sentra nasional pembinaan atlet talenta muda serta juga terlibat sebagai penunjang pada beberapa kegiatan/event olahraga.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 5 ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan domestik dalam rangka peningkatan nilai pembelian perdagangan dan peningkatan perdagangan besar dan eceran yang dilakukan melalui penyediaan prasarana pasar rakyat berkualitas memenuhi standar nasional. Penanganan pasar rakyat ini difokuskan pada beberapa kriteria seperti berada di daerah yang tergolong dalam miskin dan miskin ekstrim, berada didaerah 3TP, daerah dengan indeks pembangunan infrastruktur rendah, memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional/regional, dan tidak dalam status sengketa/masalah hukum.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 6 ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Ibukota Nusantara dengan fokus pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penyediaan prasarana strategis yang memenuhi kebutuhan sebagai ibu kota negara.

Dukungan bagi pencapaian sasaran PN 8 ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kerukunan antar umat beragama dan layanan keagamaan yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar. Dukungan juga diberikan untuk memberikan kontribusi pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang dilakukan melalui pelestarian dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan.

3.1.3.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Arah kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan nasional tercermin melalui prioritas pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang berbasis inovasi dan kolaborasi strategis. Keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah dalam konteks pembangunan berkelanjutan menuntut solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan, adaptasi perubahan iklim, serta pencapaian target net-zero emission yang memerlukan dukungan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan.

Kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur membutuhkan kolaborasi sinergis antara sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang andal dan inklusif. Untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan kerangka kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum diarahkan pada:

- a. Pengembangan dan perluasan sumber pendanaan serta pembiayaan infrastruktur, baik konvensional maupun syariah;
- b. Optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan jangka panjang untuk penyediaan layanan infrastruktur;
- c. Mengembangkan serta memaksimalkan model kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
- d. Mengembangkan model bauran pembiayaan (*blended finance*) yang optimal untuk penyediaan layanan infrastruktur;
- e. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development dalam mendorong percepatan ketersediaan layanan infrastruktur; dan
- f. Penguatan tata kelola dan kemitraan strategis dalam penyediaan layanan infrastruktur.

Tabel 3.9 Target indikator PP dan KP Sektor Pembiayaan Infrastruktur

Kode	Level	Nomenklatur Indikator	Unor Pengampu	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
02.12.08	KP	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	DJPI	Proyek	8	10	13
02.12.08	KP	Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	DJPI	Proyek	0 (2023)	0	2

Dukungan pembiayaan melalui investasi swasta dan penugasan kepada BUMN dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur maupun proyek prioritas pemerintah lainnya. Pendanaan ini disalurkan melalui berbagai skema, seperti investasi langsung, kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), akuisisi, skema *spending to invest*, dan/atau penugasan pemerintah. Investasi BUMN dalam infrastruktur sosial dan ekonomi juga perlu diselaraskan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional. Sementara itu, pendanaan dari masyarakat diarahkan untuk

mendukung penyediaan layanan dasar dan infrastruktur sosial, serta dikembangkan lebih lanjut guna membiayai infrastruktur ekonomi melalui integrasi dengan berbagai sumber pendanaan lainnya.

Intervensi/strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kapasitas pendanaan maupun pembiayaan di sektor infrastruktur pekerjaan umum meliputi:

- Pengembangan dan perluasan sumber pendanaan serta pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, melalui strategi: (i) pengembangan dan pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan syariah seperti wakaf produktif dan *infaq linked sukuk* untuk infrastruktur, (ii) optimalisasi nilai finansial dan ekonomi aset infrastruktur seperti Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) melalui model pengelolaan dana abadi (*endowment fund*);
- Optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan dan pembiayaan jangka panjang untuk penyediaan layanan infrastruktur, melalui strategi: (i) pemanfaatan surat berharga atau sukuk negara untuk membiayai proyek infrastruktur;
- Mengembangkan serta memaksimalkan model kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, melalui strategi: (i) pengembangan mekanisme pengadaan layanan infrastruktur (*delivery mechanism*), di antaranya seperti Kontrak Berbasis Kinerja (KBK), Kerja Sama Pemanfaatan Aset (KSP), Sewa/Leasing, dan lainnya, (ii) pengembangan model non-farebox revenue dan model tarif kreatif lainnya.
- Mengembangkan model bauran pembiayaan (*blended finance*) yang optimal untuk penyediaan layanan infrastruktur, melalui strategi: (i) meningkatkan kapasitas dukungan konstruksi guna meningkatkan kelayakan proyek KPBU, dan (ii) memobilisasi sumber pendanaan dan pembiayaan, seperti hibah, *project finance loan*, untuk mendukung percepatan ketersediaan layanan infrastruktur;
- Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *agent of development* dalam mendorong percepatan ketersediaan layanan infrastruktur, melalui strategi: (i) implementasi model bisnis BUMN yang terintegrasi dengan Rantai Nilai (*Value Chain*) infrastruktur, dan (ii) penetrasi pasar infrastruktur baru melalui model bisnis inovatif BUMN ; dan
- Penguatan tata kelola dan kemitraan strategis infrastruktur, melalui strategi: (i) transformasi dan perbaikan sistem penyelenggaraan investasi infrastruktur, dan (ii) pengembangan atau penguatan kelembagaan pendukung pembiayaan infrastruktur, seperti Badan Layanan Umum (BLU), dan Nadzir Institusi.

Selanjutnya, strategi tersebut perlu didukung dengan perbaikan tata kelola investasi infrastruktur secara berkelanjutan. Beberapa isu yang masih perlu dituntaskan di antaranya terkait regulasi, di mana masih terdapat peraturan yang rumit dan tidak konsisten. Selain itu, masih terdapat kurang jelasnya peran dan tanggung jawab disektor pemerintahan mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi audit, dan alokasi sumber daya. Kemudian, alokasi pendanaan publik yang kurang tepat dan tidak efisien mengakibatkan dana publik tidak selalu diarahkan pada proyek yang menawarkan manfaat ekonomi sosial.

3.1.3.7 Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam RPJMN 2025-2029, sektor konstruksi diidentifikasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kementerian PU memiliki peran strategis dalam memastikan pengoptimalan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada proyek konstruksi. Dampak sosial dan ekonomi dalam prioritas penggunaan PDN dalam pengadaan jasa konstruksi diharapkan dapat memberikan dampak positif meningkatkan daya saing industri

domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan dengan melibatkan lebih banyak tenaga lokal dalam proyek konstruksi pemerintah, memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor barang dan jasa konstruksi.

Intervensi kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 terkait pengadaan barang dan jasa menekankan penggunaan produk dalam negeri sesuai Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 mengamanatkan agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk dalam negeri, kemudian digitalisasi dan transparan dalam proses pengadaan salah satunya melalui implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog Nasional. Kemudian pada RPJMN 2025-2029 juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam sektor konstruksi.

Untuk mewujudkan kebijakan ini, Kementerian PU memiliki peran kunci dalam menyusun dan menetapkan kebijakan teknis yang mendukung penggunaan PDN dalam setiap tahapan pengadaan konstruksi, menyediakan pelatihan dan pendampingan agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif dalam proses pengadaan, dan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan target penggunaan PDN dan peningkatan kualitas proyek konstruksi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, Kementerian PU dapat memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam sektor konstruksi tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan nasional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.4 Arah Kewilayahan pada RPJMN 2025-2029

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, sebagai tahap fondasi Indonesia Emas 2045, diimplementasikan melalui kerangka pembangunan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan berperan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan nasional, karena kristalisasi hasil pembangunan di tingkat wilayah merupakan penentu utama tercapainya keberhasilan nasional secara holistik. Pendekatan kewilayahan tersebut menempatkan pembangunan wilayah tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan pembangunan guna mengatasi ketimpangan antarwilayah. Setiap wilayah diarahkan pengembangannya secara spesifik dan kontekstual dengan mempertimbangkan berbagai potensi unggulan dan permasalahan struktural, kebutuhan lokal yang beragam, serta karakteristik kewilayahan masing-masing guna memastikan tercapainya pembangunan wilayah yang inklusif dan adaptif.

Pada Dokumen RPJMN 2025-2029, Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehingga pada RPJMN 2025-2029 telah disampaikan tema pengembangan wilayah dan sasaran pembangunan wilayah untuk setiap pulau di Indonesia sebagai arahan agar upaya pengembangan/pembangunan dapat terintegrasi dan komprehensif saling mendukung. Rincian tema pembangunan dari setiap wilayah dapat ditinjau pada peta berikut ini.



Gambar 3. 2 Tema Pengembangan Wilayah 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029.

Dengan tema arahan yang telah ditetapkan sebagai strategi pembangunan nasional diharapkan mampu mencapai target pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Sasaran Pembangunan Wilayah per Pulau 2025-2029

No	Pulau	Sasaran									
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Kontribusi PDRB (%)		PDRB per Kapita (Rp Juta)		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Tingkat Kemiskinan (%)	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029	2025	2029	2025	2029
1.	Sumatera	6,3	7,2	22,1	22,5	85,0	124,4	4,48-4,73	3,82-4,42	7,49-8,49	4,24-5,24
2.	Jawa	6,9	7,9	56,5	55,1	85,4	122,4	5,09-5,62	4,51-5,27	6,68-7,68	3,79-4,79
3.	Kalimantan	7,3	8,2	8,6	9,0	114,7	167,5	4,23-4,58	3,45-4,25	4,24-5,24	2,53-3,52
4.	Bali – Nustra	7,4	8,4	2,8	2,9	42,3	62,6	2,20-2,72	1,86-2,53	10,35-11,35	7,02-8,02
5.	Sulawesi	8,6	9,9	7,3	7,8	83,1	128,5	3,32-3,72	2,86-3,47	8,34-9,34	4,63-5,63
6.	Maluku	9,8	11,1	0,7	0,8	52,5	84,6	4,82-5,18	4,13-4,75	9,40-10,40	5,12-6,12
7.	Papua	6,8	7,7	1,9	1,9	77,2	111,7	3,20-3,59	2,82-3,20	21,58-22,58	14,30-15,30

Sumber: RPJMN 2025-2029.

Prioritas intervensi dalam pendekatan pembangunan kewilayahan jangka menengah 2025-2029 utamanya diarahkan melalui upaya pemerataan dengan pembangunan daerah afirmasi dan perdesaan serta percepatan pembangunan otonomi khusus Papua, upaya pertumbuhan melalui pengembangan pusat-pusat aktivitas pertumbuhan ekonomi, serta upaya pengendalian melalui pengelolaan kawasan konservasi dan rawan bencana.

Tabel 3.11 Prioritas Intervensi Pembangunan Kewilayahan 2025-2029

Upaya Pembangunan Wilayah	Intervensi Utama per Karakter Wilayah
Pembangunan Daerah Afirmasi dan Perdesaan	Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan, melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas.
	Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama.
	Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
	Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, seta penataan kawasan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.
	Percepatan pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua: – Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat; – Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan Pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama; – Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing.
Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Pengelolaan urbanisasi melalui penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan utamanya melalui percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan komunikasi yang memadai, serta pembentukan kelembagaan yang adaptif.
	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dilakukan dengan fokus pada pengembangan pusat pertumbuhan baru serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting melalui pengembangan potensi keunggulan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penyediaan SDM berkualitas, serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.
	Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan <i>carry over</i> PSN selanjutnya serta penguatan kerja sama pengelolaan PSN.
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi <i>Triple Planetary Crisis</i> dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.
	Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna melalui sarana dan prasarana publik berketahanan bencana.

Sumber: RPJMN 2025-2029, 2025

Dalam kerangka intervensi pembangunan wilayah, pengembangan infrastruktur memegang peran krusial sebagai fondasi percepatan transformasi wilayah. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu ekosistem pendukung percepatan pembangunan yang berfungsi sebagai *enabler* pertumbuhan ekonomi dan sosial, yang turut mendukung ketahanan wilayah dan memperkuat daya saing antar wilayah. Komponen ekosistem infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan wilayah mencakup infrastruktur sektoral di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain:

1. Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air;
2. Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar;
3. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi, serta reformasi pengelolaan sampah terintegrasi; dan
4. Pembangunan sekolah unggul.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum

Subbab ini menjelaskan tentang arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan selama 5 tahun mendatang dalam mencapai visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum yang mendukung pencapaian pembangunan nasional.

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor

Bagian ini membahas arah kebijakan dan strategi dalam lingkup pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum secara komprehensif antar lintas sektor dalam suatu wilayah serta arah dan kebijakan dalam pengintegrasian pengarusutamaan dalam setiap proses pembangunan/pengembangan infrastruktur pekerjaan umum.

3.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Sesuai amanat UU SPPN No. 25 Tahun 2024, Renstra PU 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMN 2025-2029 bidang ke-PU-an mengadopsi *highlight* intervensi kewilayahan yang diarahkan dalam RPJMN sebagai indikasi intervensi kewilayahan pembangunan jangka menengah Kementerian PU. *Highlight* intervensi kewilayahan dalam RPJMN tersebut telah dijabarkan secara operasional untuk setiap kawasan prioritas di seluruh provinsi di Indonesia. Kawasan prioritas dalam Renstra PU 2025-2029 juga mengacu pada kawasan yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tema pengembangan yang meliputi kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan, air, dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi/rawan bencana.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi dari kawasan tersebut yang memiliki terkait lingkup penanganan intervensi terkait pekerjaan umum untuk dicantumkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029.

Berikut hasil identifikasi untuk kawasan/lokasi prioritas di wilayah Indonesia yang selanjutnya diidentifikasi arahan pengembangan kewilayahannya dengan penjabaran sebagai berikut:

Wilayah Sumatera

Sumatera diarahkan untuk menjadi “*Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan*” dalam RPJMN 2024-2029. Tema pengembangan sejalan dengan potensi wilayah Sumatera yang sektor perekonomiannya bertumpu pada komoditas primer. Hal ini didukung dengan posisi geografis Sumatera yang berada di jalur utama *global maritime trade route* Selat Malaka yang dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan perdagangan dan mobilisasi logistik nasional dan internasional. Kontribusi tinggi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perkembangan wilayah Sumatera belum dioptimalkan karena diversifikasi industri yang tidak maksimal. Tidak meratanya infrastruktur dasar dan pendukung industri menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Perlunya peningkatan konektivitas antardaerah dan antarpulau untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan memperkuat rantai industri di Sumatera. Pengolahan komoditas primer yang belum optimal dan eksploitatif, menyebabkan kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan, abrasi dan penurunan luas lahan pertanian pangan. Dengan arahan untuk mewujudkan ekosistem bioindustri Sumatera diharapkan menjadi pendekatan pengembangan yang tepat dalam mewujudkan perekonomian wilayah berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Sumatera terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Deskripsi dan Indikasi Highlight Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Sumatera

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan	Mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan melalui pembangunan/pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik) dengan uraian sebagai berikut: Kota Pariwisata (Tanjungpinang, Tanjungpandan, Bukittinggi); Kota Industri, dan Kota Perdagangan (Bandar Lampung, Bengkulu). Pengembangan Kawasan Industri Arun-Lhokseumawe diwujudkan dalam bentuk pengembangan KEK dengan sektor industri prioritas meliputi: hilirisasi kelapa sawit; hilirisasi kelapa; makanan dan minuman; kimia; kosmetik dan farmasi; industri energi; dan <i>green hydrogen</i>. Pengembangan Kawasan Industri Kualatanjung- Sei Mangkei diwujudkan dalam bentuk koridor industri dengan sektor prioritas meliputi: hilirisasi sawit; hilirisasi kelapa; makanan dan minuman; kimia; kosmetik dan farmasi; bauksit; mesing dan perlengkapan; dan logam, besi, & baja. Pengembangan kawasan pariwisata melalui perwujudan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan peningkatan 6A pariwisata dan <i>urban renewal</i>. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Indikasi highlight intervensi yang dilakukan: – Kawasan Perkotaan • Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan • Pemenuhan layanan dasar air minum dan penanganan limbah WM Medan • Pemenuhan layanan dasar air minum, air limbah, dan RTH • Pengembangan SPAM regional, SPAL regional, dan TPST regional • Peningkatan ketangguhan banjir (NBS, SIH3, dan FWS) • Penataan kawasan

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
26)	Kawasan Perkotaan Muaraenim & Kawasan Pengembangan Industri Tanjungenim	WM Palembang • Pemenuhan layanan dasar air minum, air limbah, dan RTH • Penataan kawasan strategis perkotaan • Pengembangan TOD dan Urban renewal • Pembangunan jalan lingkar, jalan tol, flyover/underpass • Peningkatan ketangguhan banjir • Pengembangan SPAM regional, SPAL regional, dan TPST regional • Pengembangan kawasan transmigrasi dan koridor industri
27)	Kawasan Perkotaan Lubuklinggau	
28)	Kawasan Perkotaan Baturaja	
29)	Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulaubai	
30)	Kawasan Perkotaan Manna	
31)	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung	
32)	Kawasan Perkotaan Kotabumi	
33)	Kawasan Perkotaan Menggala	
34)	Kawasan Perkotaan Liwa	
35)	Kawasan Perkotaan Pangkalpinang	
36)	Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat	
37)	Kawasan Perkotaan Tanjungpandan	
38)	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Belitung	
39)	KEK Tanjung Kelayang	
40)	Kawasan Perkotaan Batam & KPBPB Batam	
41)	Kawasan Perkotaan Tanjungpinang & KPBPB Bintan	
42)	Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun & KPBPB Karimun	
		Kawasan Perkotaan Bengkulu • Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema • Pembangunan TPST Regional Bengkulu-Seluma-Bengkulu Tengah • Preservasi jalan ruas Bengkulu-Tais, dan Bengkulu-Mukomuko
		Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pengembangan koridor industri Pekanbaru-Dumai • Pengembangan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar • Pembangunan TPST Regional Pekanbaru-Kampar-Pelalawan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (menghubungkan Tol Pekanbaru-Dumai, Tol Pekanbaru-Padang, dan Tol Pekanbaru-Rengat) • Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan Waterfront Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, Revitalisasi Kawasan Purbakal Situs Percandian Muaratakus, serta Urban Renewal Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak) • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang dan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat-Jambi • Preservasi jalan ruas Pekanbaru-Teluk Kuantan
		– Kawasan Industri Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe • Preservasi jalan • Pemenuhan layanan dasar air minum, air limbah, dan RTH
		Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung - Simangkei • Pengembangan SPAM regional

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• Pengembangan SPAM Kualatanjung-Inderapura dan SPAM Sei Mangkei Perdagangan
		– Kawasan Pariwisata • Peningkatan 6A Pariwisata khususnya untuk mendukung amenitas seperti infrastruktur permukiman (air minum, limbah, dan sampah) dan aksesibilitas • Pengembangan kawasan wisata di DPP Danau Toba • Pembangunan jalan tol dan preservasi di DPP Danau Toba • Urban Renewal dan pembangunan Pasar Wisata Terintegrasi Pusat Seni dan Kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padangpanjang • Urban Renewal di Tanjungpandan, KEK Tanjung Kelayang, Gantung. dan Manggar
2	Kawasan Komoditas Unggulan	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang meliputi sawit, karet, Kopi DT Gayo, Kelapa Rokan serta ekonomi biru. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa
	1) Sawit dan Karet Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam) 2) Kopi DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah) 3) Sawit dan Karet Pesisir Timur Laut Aceh (Kab. Aceh Timur dan Kab. Aceh Tamiang) 4) Ekonomi Biru Asahan - Tanjungbalai (Kota Tanjungbalai, Kab. Asahan) 5) Sawit, Karet, Kelapa Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas (Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padanglawas, Kab. Padanglawas Utara) 6) Ekonomi Biru Nias Utara (Kab. Nias Utara) 7) Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat 8) Sawit, Karet, Kelapa Rokan-Siak-Kampar-Indragiri 9) Ekonomi Biru Rokan Hilir 10) Ekonomi Biru Indragiri Hilir 11) Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi 12) Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kopi Utara Bengkulu (Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang)	

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	13) Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)	
	14) Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa Lampung Barat-Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)	
	15) Ekonomi Biru Natuna-Anambas	
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	
	1) Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh (Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang)	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan (KSP) di setiap provinsi di Sumatera dilakukan melalui peningkatan produktifitas komoditas unggulan/potensial dari masing-masing lokus baik tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selanjutnya, dilakukan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta peningkatan pengelolaan tampungan air dalam mewujudkan penyediaan air yang berkelanjutan.
	2) Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh (Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Barat Daya)	
	3) Swasembada Air dan Energi DT Gayo (Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah)	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
	4) Swasembada Pangan Sumatera Timur (Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu)	Aceh • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain D.I. Alue Ubay, D.I. Krueng Pase, D.I. Jambo Aye, D.I. Krueng Tiro, D.I. Krueng Aceh, D.I. Krueng Jreu • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Pasee-Peusangan dan WS Jambo Ayea • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air sungai dan danau, terutama pada Danau Laut Tawar dan DAS Peusangana • Revitalisasi Danau Laut Tawara
	5) Swasembada Pangan, Air dan Energi Bukit Barisan Utara (Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Karo)	
	6) Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis (Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal)	
	7) Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau (Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung)	
	8) Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat)	
	9) Swasembada Pangan dan Air Indragiri (Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuantan Singingi)	Sumatera Selatan • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I.R. Air Saleh, D.I.R. Delta Air Sugihan, D.I.R. Delta Upang, D.I.R. Karangagung Tengah, D.I.R. Pulaurimau, D.I.R. Telang I dan II, D.I.R. Ogan Keramasan, D.I.R. Sugihan Kanan, D.I.R. Sungai Lumpur, D.I. Way Komering • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
	10) Kawasan Swasembada Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur	
	11) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kota Sungaipenuh)	

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight Intervensi</i>
12)	Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari (Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muarojambi, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat)	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Kelingi Tugumulyo, D.I. Air Lakitan, D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan, D.I. Lintang Kiri, D.I. Muara Riben
13)	Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
14)	Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kota Pagar Alam)	Sumatera Utara - Pengembangan KSPP Sumatera Utara - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan
15)	Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)	Jambi - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I.R. Parit Pudin, D.I.R. Pematang Lumut - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Pembangunan Jembatan Sungai Rambut - Revitalisasi Danau Kerinci - Pembangunan Bendungan Merangin
16)	Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Sei Batang Sangkir dan D.I. Sei Siulak Deras - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
17)	Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu (Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang)	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Sei Batang Sangkir dan D.I. Sei Siulak Deras - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
18)	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	Riau - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain D.I. Kelayang, D.I.R. Kuala Keritang, D.I.R. Kuala Sebatu, D.I.R. Pengalihan Keritang, dan D.I. Simandolak-Pangean - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
19)	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulangbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain D.I. Kelayang, D.I.R. Kuala Keritang, D.I.R. Kuala Sebatu, D.I.R. Pengalihan Keritang, dan D.I. Simandolak-Pangean - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
20)	Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan	Bengkulu - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Air Lais Kuro Tidur, D. I. Air Manjuto, D. I. Air Seluma, D. I. Air Nipis Seginim - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		Lampung - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawa Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I.R. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Atas - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Way Sekampung, D.I. Way Seputih, D.I. Jabung, D.I. Way Curup, D.I. Way Jepara, D.I. Bumiagung, D.I. Way Tulungmas, D.I. Way Tebu Sistem Kepulauan Bangka Belitung: - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Jeriji - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang (Kab. Bangka Selatan)
4	Kawasan Afirmasi 1) Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) 2) Kep. Nias (Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli) (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) 3) Kep. Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) 4) Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) 5) Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) 6) Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) 7) Kepulauan Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) 8) Kepulauan Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan)	Pengembangan kawasan afirmasi dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan, dengan rincian sebagai berikut: - Kepulauan Lingga: pertambangan (bauksit), perikanan, dan perkebunan (kelapa) - Kepulauan Nias: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pisang) - Kepulauan Mentawai: perkebunan (kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan - Kepulauan Bengkalis: perkebunan (sagu dan kelapa) dan perikanan - Pesisir Barat Lampung: perkebunan (kopi) dan pariwisata Bahari - Kepulauan Natuna-Anambas: perikanan dan pariwisata Bahari - Simeulue: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala) - Pulau Enggano: perkebunan (kelapa) dan perikanan Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: - Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi) - Peningkatan aksesibilitas desa (pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan)

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
5	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	
	1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Tsunami di Bengkulu	Penguatan ketangguhan kawasan rawan bencana melalui pengelolaan risiko bencana gempa bumi maupun tsunami
	2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung	
		Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
		• Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik

Wilayah Jawa

Wilayah Jawa dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk menjadi “*Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan*”. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan Pulau Jawa namun tingkat pelayanan kawasan perkotaan dan metropolitan di Jawa masih inefisien ditinjau dari rendahnya capaian *Metropolitan Performance Index* (MPI) Pulau Jawa. Meskipun dengan kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur fisik dan sosial yang tersedia masih belum terintegrasi dan merata sehingga menghambat hilirisasi dan diversifikasi ekonomi yang berdampak pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang tinggi. Indikasi kesenjangan dapat dilihat salah satunya dari tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih rendah. Kesenjangan ini perlu diatasi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Tingginya konsentrasi penduduk dan intensitas pembangunan di wilayah Jawa, yang berlokasi di jalur cincin api (*ring of fire*) dan zona pertemuan dua lempang tektonik, menjadikannya sebagai kawasan dengan kerentanan tinggi mengingat tingginya resiko bencana gempa dan tsunami. Di samping itu, alih fungsi lahan yang masif mengakibatkan tingginya resiko penurunan air muka tanah dan banjir, utamanya di area perkotaan.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Jawa terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.13 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Jawa

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan	
	1) Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta	Untuk mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan dilakukan melalui pembangunan/pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik).
	2) Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism (North)	
	3) Jakarta-Tangerang International Business Corridor dan Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South)	Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Jawa diwujudkan dalam bentuk koridor industri dengan sektor prioritas yang berbeda untuk setiap lokasinya.
	4) WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung	
	5) Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)	Pengembangan kawasan pariwisata melalui perwujudan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan peningkatan 6A pariwisata dan <i>urban renewal</i> . Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
	6) Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
	7) Kawasan Perkotaan Tasikmalaya	Kawasan Perkotaan:
	8) Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati	• Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan • Pemenuhan layanan dasar air minum • Pemenuhan layanan dasar penanganan limbah
	9) Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya	WM Jakarta
	10) Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar	• Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Selabenda • Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) • Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami • Pengembangan SPAM Depok • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Depok • Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6
	11) Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng	WM Bandung:
	12) Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap	• Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung • Pembangunan TPST Regional Bandung Raya • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung • Pembangunan SPAM Regional Bandung • Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya
	13) Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang	WM Semarang:
	14) Kawasan Perkotaan Purwokerto	• Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak • Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban • Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak
	15) Kawasan Perkotaan Rembang	
	16) Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo	
	17) WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus	
	18) Kawasan Perkotaan Yogyakarta	

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight Intervensi</i>
19)	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta	• Pengembangan SPAL Regional WM Semarang • Pembangunan SPAM Regional Semarang
20)	Kawasan Aerotropolis YIA	• Pembangunan Tanggul Pantai/Laut Kendal-Semarang-Demak dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang-Demak
21)	WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan	• <i>Urban renewal</i> Kota Tua Semarang • Pembangunan Bendungan Bodri
22)	Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi	WM Surabaya: • Pembangunan Jalan Tol Surabaya East Ring Road (Bandara Juanda-Kenjeran) • Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban • Pengembangan TPST Regional Surabaya Raya • Pengembangan SPAL Regional WM Surabaya • Pembangunan SPAM Regional Surabaya dan peningkatan SPAM Mojolagres • <i>Urban renewal</i> Kota Tua Surabaya • Pengembangan TPST Regional Pasuruan-Probolinggo • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Keraton Majapahit Trowulan
23)	Kawasan Perkotaan Kediri	
24)	Kawasan Perkotaan Madiun	
25)	Kawasan Perkotaan Sumenep	
26)	Kawasan Perkotaan Jember	
27)	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	
28)	Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang: • Pembangunan TPST Regional Serang-Cilegon • Pelebatan Jalan Merak-Batas Kota Cilegon
29)	Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang	
30)	Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (bagian dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)	Kawasan Perkotaan Tangerang Raya: • Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya Kawasan Perkotaan Yogyakarta: • Pembangunan TPST Regional Yogyakarta • Pengembangan SPAM Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta • Pengembangan SPAL Regional Kawasan Perkotaan Yogyakarta • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Klaten-Kartasura • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Magelang-Bawen Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi: • Penyusunan materplan penataan kawasan perkotaan • Pemenuhan layanan dasar air minum dan penanganan limbah • Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi • Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur-Ciranjang-Padalarang • Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road • Pembangunan Jalan Puncak II • Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi • Pengembangan SPAM Bogor Raya • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bogor Kawasan Perkotaan Cirebon:

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya • Pembangunan SPAM Regional Cirebon Raya
		Kawasan Perkotaaan Tasikmalaya: • Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya • Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya-Ciamis
		Kawasan Perkotaan Cilacap: • Pengembangan SPAM Perkotaan Cilacap • Preservasi jalan ruas Cilacap-Kebumen-Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah)
		Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang: • Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang • Pengembangan SPAM Regional Pekalongan-Batang • Pengembangan KIT Batang termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan serta sistem penyediaan air baku dan air minum
		Kawasan Perkotaan Purwokerto: • Pengembangan SPAM Perkotaan Purwokerto
		Kawasan Perkotaan Rembang: • Pengembangan SPAM Perkotaan Rembang • Preservasi jalan ruas Rembang-Blora • Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban
		Kawasan Perkotaan Surakarta: • Pembangunan TPST Regional Solo-Karanganyar-Boyolali-Sukoharjo
		Kawasan Perkotaan Jember: • Pembangunan TPST Regional Jember • Pengembangan SPAM Regional Jember • Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso-Situbondo, dan Jember-Lumajang
		Kawasan Perkotaan Kediri: • Pembangunan TPST Regional Kediri • Pengembangan SPAM Regional Kediri • Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Kediri • Preservasi jalan ruas Kediri-Tulungagung-Trenggalek dan Kediri-Tulungagung-Blitar
		Kawasan Perkotaan Madiun: • Pembangunan TPST Regional Madiun • Pengembangan SPAM Regional Madiun • Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan
		Kawasan Perkotaan Malang-Batu: • Pembangunan TPST Regional Malang • Pengembangan SPAM Regional Mlaang

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight Intervensi</i>
		• Pengembangan SPAL Regional Kawasan Perkotaan Malang • Preservasi jalan ruas Malang-Batu dan Malang-Bromo Kawasan Perkotaan Sumenep: • Pengembangan SPAM Perkotaan Sumenep
		Kawasan Industri • Pengembangan TPST Regional • Pembangunan SPAM Regional • Pengembangan SPAL Regional Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang: • Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang): • Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati: • Pembangunan TPST dan SPAM Regional Cirebon Raya Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung: • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung • Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang: • Preservasi jalan ruas Malang-Batu dan Malang-Bromo Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan: • Pembangunan Jalan Tol Surabaya East Ring Road (Bandara Juanda-Kenjeran) • Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban
		Kawasan Pariwisata • Peningkatan 6A Pariwisata khususnya untuk mendukung amenities seperti infrastruktur permukiman (air minum, limbah, dan sampah) dan aksesibilitas Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan-Tanjung Lesung: • Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan, Panimbang-Tanjunglesung, dan Panimbang-Sumur-Ujungkulon (via pesisir) • Pembangunan Jalan Tol Serang-Rangkasbitung-Panimbang Kawasan Aerotropolis YIA: • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Kulonprogo (YIA) Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta:

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight Intervensi</i>
		• <i>Urban Renewal</i> Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta-Bantul-Parangtritis, Yogyakarta-Kaliurang, Yogyakarta-Wonosari-Semanu-Pracimantoro
		<i>Jakarta-Tangerang International Business Corridor dan Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South):</i> • Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol-Sunter-Kelapagading • Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan • Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya • Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 5
		<i>Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism (North):</i> • Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta (Penyelesaian NCICD Fase A Kewenangan Pemerintah Pusat) • Pembangunan Jalan Tol Harbour Toll Road II • Revitalisasi Kota Tua Jakarta dan Heritage Port Sunda Kelapa • Pembangunan Waduk Lepas Pantai Muara Cisadane • Penyediaan SPAM perpipaan pada kawasan permukiman di sepanjang pesisir utara Kawasan Aglomerasi Jakarta • Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 2, 5, dan 8
		Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya: • Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Garut-Tasikmalaya • <i>Urban revewal</i> pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey • Preservasi jalan ruas Bandung-Lembang-Tangkubanparahu, Soreang-Ciwidey-Rancaupas-Rancabali, Ciwidey-Pangalengan
		Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur: • <i>Urban renewal</i> pada kota-kota wisata, antara lain: Bogor dan Sukabumi
		Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar: • Pengembangan SPAM Regional Wosusokas • Pembangunan Jalan Tol Kartasura-Klaten-Yogyakarta • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Surakarta • Urban renewal Kota Tua Surakarta dan Revitalisasi Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegara • Preservasi jalan ruas Solo-Sangiran, Solo-Tawangmangu
		Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng: • <i>Urban renewal</i> Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung • Pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta • Preservasi jalan ruas Borobudur-Wonosobo-Banjarnegara-Purbalingga-Purwokerto

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• preservasi jalan ruas Wonosobo-Parakan-Temagngung-Secang • preservasi jalan ruas Parakan-Ngadirejo-Weleri • preservasi jalan ruas Wonosobo-Tambi-Percandian Dieng • preservasi jalan ruas Ngadirejo-Sikatok-Tambi Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi: • <i>Urban renewal</i> Kota Wisata Baru • Revitalisasi Museum PETA Blitar
2	Kawasan Komoditas Unggulan	
	1) Cirebon-Majalengka (Tebu) 2) Indramayu-Cirebon (Ekonomi Biru) 3) Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pati-Rembang 4) Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng (Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Sragen) 5) Ekonomi Biru Pacitan-Trenggalek-Tulungagung 6) Ekonomi Biru Banyuwangi 7) Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo) 8) Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda (Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo) 9) Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu (Kab. Ngawi, Kab. Magetan)	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang meliputi tebu,dan ekonomi biru Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	
	1) Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab.Bandung,Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) 2) Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy, Ciwulan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran) 3) Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi)	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan (KSP) di setiap provinsi dilakukan melalui peningkatan produktifitas komoditas unggulan/potensial dari masing-masing lokus baik tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selanjutnya, dilakukan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta peningkatan pengelolaan tampungan air dalam mewujudkan penyediaan air yang berkelanjutan. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i> • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
4)	Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal (Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang)	- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi: peningkatan infrastruktur konektivitas dan digital bagi petani - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, yaitu D.I. Cisadane, D.I. Ciujung, D.I. Cidurian, D.I. Jatiluhur, D.I. Rentang, D.I. Cihea, D.I. Cikeusik, D.I. Seuseupan, D.I. Cipanas II, D.I. Cipancuh, D.I. Cileuleuy, dan D.I. Leuwinangka, D.I. Cikunten, D.I. Cikunten II, D.I. Manganti, D.I. Bantarheulang, D.I. Lakhok Utara, D.I. Cipamingkis, D.I. Ciletuh, D.I. Waduk Malahayu, D.I. Kumisik, D.I. Pemali Bawah, D.I. Cacaban, D.I. Ciper, D.I. Gung, D.I. Sungapan, D.I. Comal, D.I. Kupang Krompeng, D.I. Sragi, D.I. Kaliwadas, D.I. Glapan, D.I. Sedadi, D.I. Klambu, D.I. Jragung, D.I. Dumpil, D.I. Sidorejo, D.I. Gemblong, D.I. Gunungrowo, D.I. Banjarcahyana, D.I. Singomerto, D.I. Serayu, D.I. Wadaslintang, D.I. Sempor, D.I. Tajum, D.I. Colo, D.I. Asin Bawah, D.I. Bengawan Jero, D.I. Gondang, D.I. Prijetan, D.I. Sim, D.I. Waduk Pondok, D.I. Jejeruk, D.I. Sungkur, D.I. Beron, D.I. Pacal, D.I. Delta Brantas, D.I. Is Kedung Kandang, D.I. Menturus, D.I. Mrican, D.I. Padi Pomahan, D.I. Is Molek, D.I. Waduk Bening, D.I. Bondoyudo, D.I. Sampean Baru, D.I. Baru, D.I. Setail, D.I. Porolinggo, D.I. Setail Teknik, D.I. Bedadung, D.I. Pondok Waluh, D.I. Talang, D.I. Jatiroto, D.I. Pekalen, D.I. Banyuputih, dan D.I. Sampean - Pembangunan Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey, Bendungan Kedunglangga, Bendungan Dolog, Bendungan Karangnongko, Bendungan Cabean, Bendungan Bener, dan Bendungan Bagong. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas - Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur - Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban-Rembang - Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi - Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babad-Lamongan-Gresik dan Tuban-Babad - Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan kapasitas SPAM Umbulan
5)	Swasembada Pangan, Air dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana(Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Grobogan)	
6)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo (Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri)	
7)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo)	
8)	Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak (Kab. Sleman, Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul)	
9)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo (Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kab. Lamongan)	
10)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas (Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo)	
11)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi)	
12)	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten (Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)	
4	Kawasan Afirmasi	
1)	Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) (Pemerataan Pembangunan)	Pengembangan kawasan afirmasi dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan.

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	2) Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum. dan sanitasi) • Peningkatan aksesibilitas desa (pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan)
	3) Pegunungan Sewu (Kab. Gunungkidul) (Pemerataan Pembangunan)	
	4) Madura dan Kepulauan (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep)	
	5) Pegunungan Sewu (Kab. Pacitan dan Kab. Trenggalek) (Pemerataan Pembangunan)	
	6) Banten Selatan (pesisir selatan Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang) (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)	
5	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	
	1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	Penguatan ketangguhan kawasan rawan bencana melalui pengelolaan risiko bencana gempa bumi maupun tsunami
	2) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di DIY	
	3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jatim	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
	4) Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten	

Wilayah Bali Nusa Tenggara

Wilayah Bali–Nusa Tenggara diarahkan untuk menjadi “*Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional*” dalam RPJMN 2025–2029. Bali–Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan destinasi dan atraksi pariwisata yang beragam meliputi daya tarik alam, kebudayaan tradisi lokal, dan ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulannya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam konstelasi pariwisata Bali–Lombok–Labuan Bajo, tarikan aktivitas pariwisata Bali sangat tinggi sehingga mengalami *tourism spillover* yang dapat dimanfaatkan oleh NTB dan NTT.

Bali merupakan salah satu daerah dengan indeks *quality tourism* tertinggi di tingkat nasional sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki capaian indeks *quality tourism* yang rendah sehingga hal ini menjadi indikasi belum optimalnya sektor kepariwisataan Bali Nusa–Tenggara baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanan wisata. Sektor pariwisata berpotensi untuk memperluas diversifikasi ekonomi wilayah akan tetapi diversifikasi ekonomi wilayah Nusa Tenggara masih belum optimal. Tidak meratanya dukungan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi menghambat konektivitas antarwilayah dan antarpulau berdampak pada kesenjangan intensitas kegiatan ekonomi di kabupaten/kota tertentu dan sulitnya akses terhadap destinasi pariwisata. Selain itu, rendahnya akses air minum dan sanitasi layak juga menjadi persoalan kebutuhan dasar yang perlu ditangani agar dapat memenuhi *demand* masyarakat setempat serta wisatawan.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Bali – Nusa Tenggara

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan	Mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan melalui pembangunan/pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik). Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: Kawasan Perkotaan WM Denpasar • Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pembangunan TPST Regional Sarbagita • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Toi Mengwi-Singapadu-Sanur-Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Toi Mengwi-Canggu Non-Wilayah Metropolitan • Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • pembangunan dan peningkatan SPAM, SPALD-T skala regional/kota/permukiman/kawasan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional/ kota/ kawasan Kawasan Industri • Pengembangan SPAM pada kawasan Negara-Pengembangan-Candikusuma • Pengembangan SPAL dan TPST pendukung aktivitas industri • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana air bersih Kawasan Pariwisata • Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu-Ubud-Gianyar-Bangli-Kintamani-Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara-Singaraja • Pembangunan jalan akses simpul transportasi • Pembangunan pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota • Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala kota dan berbasis 3R • pembangunan jalan akses simpul transportasi, jalan strategis termasuk Jalan Lintas Utara (Labuan Bajo-Terang-Kedindi) dan jalan daerah • Pembangunan SPAM dan revitalisasi pasar rakyat di DPP Labuan Bajo
2	Kawasan Komoditas Unggulan 1) Ekonomi Biru Jembrana 2) Anggur Buleleng 3) Kopi Bangli-Buleleng 4) Sentra Akuakultur - Komoditas Udang Kabupaten Sumbawa 5) Sentra Akuakultur - Komoditas Udang Kabupaten Bima 6) Sentra Akuakultur - Komoditas Udang Kabupaten Lombok Timur 7) Sentra Akuakultur - Komoditas Udang Kabupaten Sumbawa Barat 8) Sentra Akuakultur - Komoditas Udang Kabupaten Lombok Utara 9) Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Kupang dan Kota Kupang 10) Sentra Industri Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Sumba Timur 11) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Kupang 12) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Sumba Timur 13) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Rote Ndao 14) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Sabu Raijua 15) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Alor 16) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Flores Timur 17) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam Kab. Nagekeo 18) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam Kab. Sabu Raijua 19) Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam Kab. Kupang 20) Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam Kab. Nagekeo 21) Sentra Industri Berbasis Komoditas Garam Kab. Sabu Raijua	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang meliputi anggur, kopi ekonomi, rumput laut, dan garam. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Jembrana • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan anggur • Penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambak udang dengan prioritas tambak tradisional plus • Pembangunan jalan termasuk jalan akses Pelabuhan Maritaing (Erana-Maritaing) • Pembangunan jalan strategis dan daerah

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	22) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam Kab. Ende 23) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam Kab. Kupang 24) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Garam Kab. Sumba Timur	
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi 1) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida (Kab. Badung, Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem, Kab. Klungkung) 2) Kawasan Pangan Lokal Kab. Sumbawa 3) Kawasan Pangan Lokal Kab. Lombok Timur 4) Kawasan Pangan Lokal Kab. Dompu 5) Kawasan Pangan Lokal Kab. Bima 6) Kab. Kupang: potensial air, potensial energi 7) Kab. Lembata: potensial pangan 8) Kab. Nagekeo: potensial air 9) Kab. Sikka: potensial pangan 10) Kab. Sumba Tengah: KSPP 11) Kab. Timor Tengah Selatan: potensial pangan 12) Kab. Belu: KSPP, potensial 13) Kab. Manggarai Barat: Potensial pangan 14) Kab. Manggarai Timur: Potensial pangan 15) Kab. Manggarai: Potensial pangan, potensial energi	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan (KSP) di setiap provinsi dilakukan melalui peningkatan produktifitas komoditas unggulan/potensial dari masing-masing lokus baik tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selanjutnya, dilakukan pengembangan berdasarkan potensi masing-masing kawasan dalam mewujudkan swasembada pangan, air, maupun energi. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Rehabilitasi dan Peningkatan D.I. Tukad Ayung, D.I. Tukad Penet, D.i. Tukad Unda, D.I. Tukad Saba, D.I. Tukad Oos, D. I. Tukad Pekerisan, D. I. Tukad Petanu, D. I. Tukad Yeh Hoo • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit (potensial energi) • Peningkatan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal • Pembangunan Bendungan Mbay, Bendungan Manikin, Bendungan Welikis • Peningkatan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP termasuk jalan akses KSPP Sumba Tengah (Mamboro-Tana Ringu)
4	Kawasan Afirmasi 1) Nusapenida (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan) 2) Daerah Tertinggal Kab. Sabu Raijua 3) Daerah Tertinggal Kab. Sumba Barat Daya 4) Daerah Tertinggal Kab. Sumba Tengah 5) Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung PKSN Kalabahi, Kec. Pantai Timur - Kab. Alor 6) Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amararsi Timur - Kab. Kupang 7) Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Kobalima Timur - Kab. Malaka	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) melalui kawasan unggulan berbasis potensi lokasi (pariwisata, pertanian, dan sebagainya) serta diversifikasi ekonomi lokal. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan yang disertai dengan pemenuhan layanan kebutuhan dasar. Pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik Pengembangan kawasan afirmasi dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi <i>high value</i> unggulan.

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
8)	Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Kodi Balaghar - Kab. Sumba Barat Daya	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan/preservasi jalan lingkar dan Trans Nusapenida • Peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase dan sistem pengelolaan persampahan berbasis 3R • Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan • Pembangunan/pengembangan jalan non-status dan jembatan
9)	Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Lamboya, Lamboya Baraat - Kab. Sumba Barat	
10)	Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Landu Leko, Rote Timur, Panntai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse - Kab. Rote Ndao	
11)	Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu - Kab. Sumba Timur	
12)	Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin - Kab. Timor Tengah Selatan	
13)	Kawasan perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Menhara, Raijua - Kab. Sabu Raijua	
14)	Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung PKSN Atambua, Kec. Lasialat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi - Kab. Belu	
15)	Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung PKSN Kefamenanu, Kec. Biboki Moenleu, Naibenu, Mutis, Musi - Kab. Timor Tengah Utara	
16)	Kawasan Perdesaan Prioritas Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa - Kab. Ngada	
17)	KT Kobalima Timur - Kab. Malaka	
18)	KT Ponu - Kab. Timor Tengah Utara	
19)	KT Tasifeto - Mandeu - Kab. Belu	
5	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	Penguatan ketangguhan kawasan rawan bencana melalui pengelolaan risiko bencana gempa bumi. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman <i>megathrust</i> dan tsunami di Kawasan Perkotaan WM Denpasar • Peningkatan sarana pengelolaan kawasan di kawasan konservasi
1)	Kawasan Rawan Bencana Tsunami Bali	
2)	Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat	
3)	Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara	

Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjadi "*Superhub Ekonomi Nusantara*" dalam RPJMN 2025-2029 yang diharapkan mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk kegiatan hilirisasi (peningkatan nilai tambah) serta penciptaan sektor-sektor ekonomi baru yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi wilayah Kalimantan relatif lebih aman untuk dibangun dan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan karena risiko bencana yang rendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Namun belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas berdampak pada kurang berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan air, pangan, dan energi mengakibatkan perekonomian daerah masih tergantung pada sektor hulu, lambatnya proses hilirisasi serta diversifikasi industri pengolahan. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar di wilayah Kalimantan akan berpengaruh pada daya tampung wilayah dalam menghadapi peningkatan aktivitas industri maupun kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Merespon kondisi di atas, dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Kementerian PU akan diarahkan untuk mengembangkan sejumlah kawasan prioritas yang meliputi kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan swasembada pangan, kawasan perdesaan, dan kawasan afirmasi dengan rincian dalam peta berikut ini.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Kalimantan terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.15 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Kalimantan

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan	Mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan melalui pembangunan/pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik). Pengembangan Khusus Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui pembangunan sosial <i>superhub ekonomi</i>, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat melalui hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral (nikel, tembaga, bauksit), sumber daya hayati, dan industri padat karya. Dan untuk pengembangan perindustrian hijau tanah kuning di Kalimantan Utara diarahkan untuk pembentukan <i>Eco Industrial Park</i> (KI berwawasan lingkungan). Pengembangan kawasan pariwisata Petualangan Derawan-Berau sebagai upaya pengembangan klaster pariwisata di Sekitar Ibu Kota Nusantara. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: Kawasan Perkotaan • Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi • Pembangunan dan pengembangan jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala • Pembangunan jaringan jalan akses menuju IKN (jalan tol/jalan bebas hambatan menuju KIPP) • Pembangunan jalan akses Pelabuhan Kijing • Preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistik di kawasan <i>Superhub Ekonomi IKN</i> • Pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5 di kawasan <i>Superhub Ekonomi IKN</i> • Pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM Kabupaten/Kota/Regional), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (berbasis 3R maupun TPST)

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• Pembangunan SPAM Regional Kalimantan Timur • Pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya di Kota Tanjung Selor • Peningkatan dan pemeliharaan jalan Kawasan Prioritas Nangatayap-Sungai Kelik-Siduk dan jalan strategis Dennaga Ferry-Teraju Kawasan Industri • Pembangunan jalan akses Bandara Singkawang • Peningkatan/perbaikan jalan akses ke lokasi sumber daya dan kawasan Kawasan Pariwisata • Pembangunan prasarana pengaman pantai di Sambang-Singkawang • Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan di Sambang-Singkawang • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan khususnya di Pulau Derawan dan Pulau Maratua • Pengembangan jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (<i>backbone</i>) dan perlengkapan jalan di Derawan-Berau
2	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi 1) Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas) 2) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Banjar 3) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Barito Kuala 4) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Tapin 5) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 7) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Hulu Sungai Utara 8) Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Tabalong	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas. Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu di Kalimantan Selatan dalam mewujudkan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di KSPP Pulang Pisau dan Kapuas • Pembangunan dan/atau pengembangan irigasi di Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kawasan Lumbung Rawa Batang Banyu
3	Kawasan Afirmasi 1) KPP Agropolitan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) melalui kawasan unggulan berbasis potensi lokasi (pariwisata, pertanian, dan sebagainya) serta diversifikasi ekonomi lokal.

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
2)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk, Kabupaten Sambas	Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan yang disertai dengan pemenuhan layanan kebutuhan dasar.
3)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Bengkayang	
4)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Kabupaten Sanggau	Pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik.
5)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Kapuas Hulu	
6)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Sintang	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
7)	Kawasan Transmigrasi (KT) Sekayam-Entikong, Kabupaten Sanggau	
8)	Kawasan Transmigrasi (KT) Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang	• Pembangunan jalan akses perbatasan Tebas-Merbau, Nanga Era-Bts Kaltim • Pembangunan irigasi perpipaan pertanian di PKSN • Pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, dan sistem drainase • Penyediaan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat, sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat • Pembangunan/pengembangan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN
9)	Kawasan Transmigrasi (KT) Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas	
10)	Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup	
11)	Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung)	
12)	Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama	
13)	KPP Agropolitan, Kabupaten Tanah Bumbu	
14)	KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten Tabalong	
15)	KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar	
16)	Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala	
17)	Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata, Kabupaten Kutai Kartanegara	
18)	Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser	
19)	Kawasan Perbatasan Prioritas, Kecamatan Perbatasan Prioritas Kabupaten Mahakam Ulu	
20)	Kawasan Perbatasan Prioritas, Kecamatan Perbatasan Prioritas Kabupaten Berau	
21)	KT Salimbatu	
22)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Malinau	
23)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kabupaten Nunukan	
24)	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, Kab. Tana Tidung	

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
4	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	
	1) Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>), Kab. Berau	Pengembangan kawasan berbasis kesatuan ekologi/ekosistem yang disertai peningkatan upaya mitigasi di Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan
	2) Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>), Kab. Kutai Timur	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
	3) Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>), Kab. Kutai Kartanegara	• Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan daerah berisiko tinggi di Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan
	4) Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>), Kab. Mahakam Ulu	
	5) Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>), Kab. Kutai Barat	

Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi *"Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA"* dalam RPJMN 2025-2029. Posisi geografis yang strategis, menjadikan Sulawesi berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN); *hub* dan pintu gerbang internasional KTI (Kawasan Indonesia Timur); serta Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik yang mendukung pergerakan barang dan logistik, serta jalur perdagangan dan investasi. Sulawesi mempunyai komoditas unggulan yang beragam mulai sumber daya alam (komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap), sumber daya mineral (nikel dan tembaga), pariwisata, energi, serta cadangan minyak bumi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, kurang memadainya SPM di kawasan perkotaan, belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antar daerah mengakibatkan belum optimalnya kegiatan penyangga ekonomi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan afirmasi, sehingga ketimpangan wilayah masih terjadi di Sulawesi. Selain itu, risiko bencana hidrometeorologi dan geologi yang cukup tinggi berpotensi mempengaruhi kinerja pembangunan/pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Sulawesi.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Sulawesi terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Sulawesi

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan 1) Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang Kota Bitung 2) Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang Kota Manado 3) Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang Kota Tomohon 4) Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang Kabupaten Minahasa 5) Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang Kabupaten Minahasa Utara 6) Wilayah Metropolitan Manado Kota Bitung 7) Wilayah Metropolitan Manado Kota Manado 8) Wilayah Metropolitan Manado Kota Tomohon 9) Wilayah Metropolitan Manado Kabupaten Minahasa 10) Wilayah Metropolitan Manado Kabupaten Minahasa Utara 11) Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado 12) Kawasan Perkotaan Sedang Kota Bitung 13) Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara 14) Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali 15) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kota Makassar 16) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kabupaten Maros 17) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kabupaten Gowa 18) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kabupaten Takalar 19) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kota Parepare 20) Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya Kabupaten Barru 21) Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Luwu Timur 22) Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Tana Toraja 23) Kawasan Industri Takalar 24) Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi 25) Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe 26) Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Kabupaten Kolaka 27) Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Kabupaten Konawe 28) Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo	Mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan melalui pembangunan/pengembangan wilayah metropolitan yang berkelanjutan di Manado dan Makassar dan sekitarnya. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik) serta skala kawasan perkotaannya. Bahodopi (Kab. Morowali) dikembangkan sebagai perkotaan kecil dengan tema pembangunan kota industri. Morosi (Kab. Konawe) sebagai perkotaan kecil, Sorowako (Kab. Luwu Timur) sebagai perkotaan kecil, dan Kota Bitung sebagai perkotaan sedang dikembangkan dengan tema pembangunan industri. Kota Gorontalo dikembangkan sebagai kawasan perkotaan sedang dengan tema Kota Pariwisata dan Kota Manado dengan tema Kota Perdagangan dan untuk Makale (Kab. Tana Toraja) dikembangkan sebagai Kota Kecil Berkarakter Khusus. Pengembangan kawasan industri di Takalar (Sulawesi Selatan) dilakukan melalui akselerasi investasi; KI Morowali dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah) melalui penguatan hilirisasi industri berbasis mineral; KI Konawe dan Kolaka (Sulawesi Tenggara) melalui peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar). Pembangunan DPP Manado dan Likupang (Sulawesi Utara) dan DPP Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dengan implementasi <i>blue, green dan circular economy</i>. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: Kawasan Perkotaan • Pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkar Manado <i>Outer Ring Road</i> • Peningkatan/pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota • Pengembangan SPAM Regional Bimatara, Bendungan Kuwil Kawangkoan, Bendungan Sawangan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala ulang 25-50 tahunan di kawasan perkotaan metropolitan

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
		• Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di perkotaan sedang dan kecil • Pengembangan sanitasi, pembangunan dan peningkatan SPAM, sistem pengelolaan persampahan skala kota • Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi • pengembangan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng • Pembangunan/pengembangan Jalan Tol Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar dan pembangunan jalan perkotaan • Preservasi jalan akses simpul transportasi Jalan Kota Gorontalo - Limboto - Isimu • Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, serta penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional Kawasan Industri • Pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali • Pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi • Pembangunan SPAM kabupaten/kota, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, pengolahan persampahan • Pembangunan/pengembangan Jalan <i>Shortcut</i> Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabanggele - Pebunooaha • Pembangunan jalan akses K1 Konawe Kawasan Pariwisata • Pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi-Bts. Kota Tondano • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) Terpusat Skala Kota dan Regional • Pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano • Pengembangan aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi
2	Kawasan Komoditas Unggulan	1) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sigi 2) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Donggala 3) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Poso Kawasan pertanian pangan, perkebunan, dan hortikultura di wilayah Sulawesi memiliki potensi unggulan dalam produksi komoditas seperti padi, jagung, kakao, kelapa, serta aneka hortikultura yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	4) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong 5) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Buol 6) Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tolitoli 7) Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gorontalo 8) Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Boalemo 9) Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pohuwato 10) Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone Bolango	lokal. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan sistem pertanian melalui penguatan infrastruktur, teknologi budidaya, serta kemitraan dengan pelaku usaha. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Preservasi ruas jalan Tolai-Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu-Tentena di Kabupaten Poso • Penuntasan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pembangunan jaringan irigasi, dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi • Peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman-Tabulo, Isimu-Paguyaman, dan Taludaa-Pelabuhan Gorontalo, pembangunan jalan koridor logistik, pembangunan jalan akses simpul transportasi • Pembangunan bangunan konservasi air
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	
	1) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu Timur 2) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu 3) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu Utara 4) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Wajo 5) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Bone 6) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Sinjai 7) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Bulukumba 8) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Sidenreng Rappang 9) Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Pinrang 10) Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe	Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan (KSP) di setiap provinsi dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan/potensial dari masing-masing lokus baik tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selanjutnya, dilakukan pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta peningkatan pengelolaan tampungan air dalam mewujudkan penyediaan air yang berkelanjutan. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan DI Gilireng, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Boya, Daerah Irigasi Saddang yang direhabilitasi, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan/pengembangan konservasi air • Pembangunan Bendungan Pelosika
4	Kawasan Afirmasi	
	1) KPP MAPALUS Kabupaten Minahasa 2) PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Kab. Kepulauan Sangihe 3) PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Kepulauan Talaud 4) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 5) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Utara	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) melalui kawasan unggulan berbasis potensi lokasi (pariwisata, pertanian, dan sebagainya) serta diversifikasi ekonomi lokal. Pengembangan KPP Mapalus (Sulawesi Utara) berbasis pertanian dengan sektor pendukung pariwisata. KPP Kab. Morowali (Sulawesi Tengah) diarahkan sebagai KP Sentra Minapolitan Salabangka yang berbasiskan perikanan dan dengan sektor pendukung perikanan. KPP Agrowisata Gurilla (Sulawesi Selatan)

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
6)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Minahasa Selatan	dikembangkan berbasiskan pariwisata dengan sektor pendukung pertanian dan industri. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan yang disertai dengan pemenuhan layanan kebutuhan dasar. Pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat (SPAM), pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (sampah berbasis 3R dan TPST) • Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan • Pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, dan sistem drainase • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala Kota/Kab di kawasan pulau-pulau kecil • Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik
7)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Bolaang Mongondow	
8)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Bolaang Mongondow Utara	
9)	KPP Kabupaten Morowali	
10)	KT Bungku, Kabupaten Morowali	
11)	KT Palolo, Kabupaten Sigi	
12)	KT Tapolore, Kabupaten Poso	
13)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kabupaten Toli-Toli	
14)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kabupaten Buol	
15)	KPP Agrowisata Gurilla Kabupaten Barru	
16)	KT Mahalona Kabupaten Luwu Timur	
17)	KT Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang	
18)	Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
19)	Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar	
20)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu Timur	
21)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu	
22)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Luwu Utara	
23)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Wajo	
24)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Bone	
25)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Sinjai	
26)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Bulukumba	
27)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kabupaten Enrekang	
28)	Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya Kota Palopo	
29)	KT Asinua Kabupaten Konawe	
30)	KT Anawua Kabupaten Kolaka	
31)	KT Mutiara Kabupaten Muna	
32)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara	
33)	KT Sumulata Kabupaten Gorontalo Utara	
34)	KT Ulumanda Kabupaten Majene	
35)	KT Tubbi Aramanu Kabupaten Polewali Mandar	
36)	KT Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	
37)	KT Sarudu Baras Kabupaten Pasangkayu	
38)	KT Mambi Mahelaan Kabupaten Mamasa	

No	Tematik Kawasan/Lokasi Prioritas	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
5	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	Penguatan ketangguhan kawasan rawan bencana melalui pengelolaan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Serta perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan/pengembangan prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan konservasi • Pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir pantai di Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo • Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana melalui penatanaan bangunan kawasan rawan bencana di Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami

Wilayah Maluku

Wilayah Maluku diarahkan menjadi "*Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia*" dalam RPJMN 2025-2029, untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berupa lautan sebesar >80%. Kondisi geografis ini, menjadikan Provinsi Maluku sebagai produsen tuna-cakalang-tongkol terbesar kedua di Indonesia. Komoditas unggulan pertanian lainnya yaitu pala (tertinggi ke-2) dan kelapa (tertinggi ke-4) di Indonesia, Selain itu terdapat potensi diversifikasi pangan mulai dari padi, sagu, kedelai, maupun ubi. Ekosistem Bahari, kekayaan sejarah dan budaya yang ada di dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi pariwisata, potensi pertambangan nikel dan gas bumi serta energi terbarukan menjadikan potensi Wilayah Maluku menjadi beragam.

Potensi wilayah yang melimpah dan bervariasi, ternyata belum mampu dioptimalkan, hal ini ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai TPT Provinsi Maluku lebih tinggi dibandingkan nasional. Kondisi ini terjadi karena masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu dikarenakan belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau. IPM di wilayah Maluku lebih rendah dari nilai nasional dikarenakan masih rendahnya akses air minum layak dan sanitasi layak. Nilai indeks risiko bencana yang berkategori tinggi di Wilayah Maluku dan banyaknya kawasan konservasi di kawasan pertumbuhan sehingga perlu disesuaikan dalam proses perencanaan dan penataan kawasannya.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Maluku terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Maluku

No	Kawasan	Deskripsi & Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan 1) Kawasan Pariwisata Banda Neira - Kab. Maluku Tengah 2) Kawasan Pemanfaatan Gas Bumi (Blok Masela) - Kab. Kepulauan Tanimbar 3) Kawasan perkotaan sedang Ambon - Kota Ambon 4) Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira - Kab. Maluku Tengah 5) Kawasan Perkotaan Kota Baru Sofifi - Kota Tidore Kepulauan 6) DPP Morotai - Kab. Pulau Morotai 7) Kawasan Perkotaan Weda - Kab. Halmahera Tengah 8) Kawasan Perkotaan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba - Kab. Pulau Morotai 9) Kawasan Industri KI Weda Bay - Kab. Halmahera Tengah 10) Kawasan Industri KI Buli - Kab. Halmahera Timur 11) KI Pulau Obi - Kab. Halmahera Selatan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik) serta skala kawasan perkotaannya. Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) dan Daruba (Kab. Pulau Maorotai) dikembangkan sebagai Kota Kecil Berkarakter Khusus. Kota Ambon dikembangkan sebagai kawasan perkotaan sedang dengan tema pengembangan pariwisata. Weda (Kab. Halmahera Tengah) dikembangkan sebagai kota industri. Pengembangan KI Pulau Obi dan KI Weda Bay di Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui penguatan hilirisasi pertambangan (nikel) dan turunannya, serta percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan enhanced NDC dan menuju net zero economy. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Morotai di Provinsi Maluku Utara memiliki potensi obyek daya tarik wisata yang beragam dari ekosistem bahari, kekayaan sejarah dan budaya, diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: Kawasan Perkotaan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan • Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, SPAM Skala Kota, SPAL, drainase, pengelolaan sampah berbasis 3R • Pembangunan jalan Tajawi-Kobe, peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba • Pembangunan embung Sofifi • Peningkatan sistem pengendalian banjir (<i>urban flood control system</i>) di Perkotaan Weda Kawasan Industri • Pembangunan jalan strategis menuju kawasan industri, peningkatan Jalan Ruas 035 Weda-Sagea, pembangunan alternatif akses jalan Maba-Kawasan Industri, pembangunan Jalan Sofifi-Buli, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi • Peningkatan kapasitas air baku, SPAM, air limbah, sistem pengelolaan sampah Kawasan Pariwisata • Penanganan jalan daerah (aksesibilitas pariwisata) • Optimalisasi SPAM, pembangunan TPS-3R, pengelolaan air limbah
2	Kawasan Komoditas Unggulan	

No	Kawasan	Deskripsi & Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	1) Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang dan Lobster Kota Ambon 2) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster Kab. Kepulauan Aru 3) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster Kab. Maluku Tengah 4) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster Kab. Seram Bagian Barat 5) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster Kab. Maluku Tenggara 6) Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT, Udang, dan Lobster Kota Tual 7) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Pala Kab. Halmahera Barat 8) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Pala Kab. Halmahera Tengah 9) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Pala Kab. Halmahera Utara 10) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa Kab. Kepulauan Sula 11) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa Kab. Halmahera Utara 12) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kelapa Kab. Halmahera Selatan 13) Sentra Industri Berbasis Komoditas Kelapa Kab. Halmahera Barat	Kawasan-kawasan komoditas unggulan di wilayah Maluku memiliki potensi unggulan di sektor kelautan serta perkebunan, khususnya komoditas tuna-cakalang-tongkol (TCT), udang, lobster, kelapa, dan pala. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk memperkuat rantai nilai industri berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil, dan perluasan pasar domestik maupun ekspor. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan karakteristik wilayah pesisir, kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Revitalisasi pasar rakyat
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi 1) Kab. Maluku Tengah : Potensial Pangan, Potensial Air 2) Kab. Maluku Tenggara: Potensial Pangan 3) Kab. Seram Bagian Barat: Potensial Energi 4) Kota Ambon: Potensial Energi 5) Kab. Buru: Potensial Pangan, Potensial Air 6) Kab. Kepulauan Tanimbar: potensial air 7) Kab. Halmahera Selatan: potensial energi 8) Kab. Halmahera Utara: potensial pangan, potensial energi 9) Kab. Halmahera Tengah: potensial air 10) Kab. Halmahera Timur: potensial pangan	Wilayah Maluku memiliki potensi strategis dalam pengembangan sumber daya pangan, air, dan energi yang beragam sesuai karakteristik wilayahnya. Potensi tersebut mencakup ketersediaan lahan pertanian produktif, sumber daya air yang melimpah, serta peluang pengembangan energi terbarukan. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan Bendungan Way Apu, Bendungan Way Yori dan Bendungan Tanimbar • Pembangunan Bendungan Wairoro • Pembangunan jaringan irigasi • Peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal • Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit

No	Kawasan	Deskripsi & Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
4	Kawasan Afirmasi	
	1) Kawasan Perdesaan Waepo Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi - Kab. Buru	Pengembangan Kawasan Perdesaan Halmahera Barat (Maluku Utara) melalui diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, serta KKP Waeapo Agropolitan di Provinsi Maluku berbasis komoditas unggulan padi, dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi.
	2) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir - Kab. Kepulauan Aru	
	3) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat - Kab. Maluku Tenggara	Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan yang disertai dengan pemenuhan layanan kebutuhan dasar.
	4) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Pulau Dullah Selatan - Kota Tual	Pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik.
	5) PKSN Ilwaki - Kab. Maluku Barat Daya	Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
	6) PKSN Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara - Kab. Kepulauan Tanimbar	
	7) Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat - Kab. Halmahera Barat	
	8) Kawasan Transmigrasi KT Pulau Morotai - Kab. Pulau Morotai	
	9) PKSN Daruba dan Kec. Morotai Utara - Kab. Pulau Morotai	
	10) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah	
	11) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Maba Utara Kab. Halmahera Timur	
	12) KT Sagea Waleh - Kab. Halmahera Tengah	
	13) KT Pulau Bacan - Kab. Halmahera Selatan	
	14) KT Patlean - Kab. Halmahera Timur	

Wilayah Papua

Wilayah Papua diarahkan untuk *"Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif"* dalam RPJMN 2025-2029 dikarenakan sebagian besar nilai IPM berkategori sedang serta persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi. Kondisi tersebut tidak berkesesuaian dengan potensi wilayah Papua yang melimpah dan beragam mulai dari komoditas perikanan tangkap, komoditas perkebunan, komoditas pertanian, potensi pariwisata (ekosistem bahari), potensi pertambangan minyak dan gas bumi serta energi terbarukan. Kondisi ini terjadi karena pengembangan komoditas unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi belum dilakukan secara optimal, salah satu penyebabnya yaitu belum meratanya pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga ketimpangan/disparitas antar wilayah dan antar golongan masih tinggi di wilayah Papua.

Selain itu, tantangan yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan pembangunan/pengembangan kawasan pertumbuhan yaitu indeks risiko bencana berkategori tinggi (banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi) serta banyaknya kawasan konservasi yang berada di kawasan pertumbuhan yang perlu diakomodir dalam proses perencanaan dan penataan kawasannya.

Adapun, indikasi *highlight* intervensi pada kawasan prioritas di wilayah Papua terkait lingkup Pekerjaan Umum dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Deskripsi dan Indikasi *Highlight* Intervensi Kawasan Prioritas Wilayah Papua

No	Kawasan	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
1	Kawasan Pertumbuhan	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan non-wilayah metropolitan dilakukan berdasarkan karakteristik dan potensi lokal (tematik) serta skala kawasan perkotaannya. Kota Jayapura dikembangkan sebagai kawasan perkotaan sedang dengan tema pembangunan Kota Perdagangan. Anggi (Kab. Pegunungan Arfak) dikembangkan sebagai Kota Kecil Berkarakter Khusus. Dan untuk Kota Sorong dikembangkan sebagai Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan dikembangkan dengan tema Kota Perdagangan. Kawasan Industri Fakfak yang berlokasi di Provinsi Papua Barat dikembangkan melalui percepatan hilirisasi industri petrokimia untuk memperkuat industri pupuk dalam negeri. DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat Daya diarahkan untuk pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: Kawasan Perkotaan • Penyusunan rencana induk (masterplan) pengemhangan dan penataan kawasan perkotaan • Pembangunan sarana dan prasaran di pusat pemerintahan • Pemhangunan jalan strategis, SPAM, SPAL Domestik Terpusat, pengelolaan sampah berbasis 3R Kawasan Industri • Pembangunan jalan strategis, • Pembangunan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik Kawasan Pariwisata • Pembangunan jalan daerah (aksesibilitas pariwisata) • Pembangunan SPAM, sistem pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan berbasis masyarakat

No	Kawasan	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
2	Kawasan Komoditas Unggulan	Kawasan-kawasan sentra industri dan produksi di wilayah Papua memiliki potensi unggulan di berbagai sektor komoditas strategis seperti tuna-cakalang-tongkol (TCT), udang, rumput laut, sagu, kakao, dan kopi. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi lokal melalui peningkatan kapasitas produksi, pengolahan, dan distribusi berbasis potensi di wilayah pesisir maupun pegunungan. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Revitalisasi pasar rakyat • Penanganan jalan strategis pendukung industri udang
	1) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kab. Biak Numfor 2) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kota Jayapura 3) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kab. Jayapura 4) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kab. Kepulauan Yapen 5) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kab. Waropen 6) Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT Kota Jayapura 7) Sentra Industri Berbasis Komoditas TCT Kab. Biak Numfor 8) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kakao Kab. Manokwari Selatan 9) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Sagu Kab. Mappi 10) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Sagu Kab. Merauke 11) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Sagu Kab. Asmat 12) Sentra Produksi Berbasis Komoditas TCT Kab. Merauke 13) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan Kopi Kab. Paniai 14) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan Kopi Kab. Dogiyai 15) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan Kopi Kab. Puncak Jaya 16) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan TCT Kab. Nabire 17) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Unggulan TCT Kab. Mimika 18) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi Kab. Lanny Jaya 19) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi Kab. Tolikara 20) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Kopi Kab. Jayawijaya 21) Sentra Industri Berbasis Komoditas Udang Kota Sorong 22) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang Kota Sorong 23) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang Kab. Sorong Selatan 24) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang Kab. Sorong 25) Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kab. Sorong	

No	Kawasan	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
26)	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut Kota Sorong	
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	KSPP Kaerom yang berlokasi di Provinsi Papua dalam pengembangannya didukung oleh kawasan Transmigrasi Senggi dan KSPP Merauke di Provinsi Papua Selatan didukung oleh kawasan transmigrasi Salor. Selanjutnya pengembangan kawasan sesuai dengan potensi yang ada dalam mendukung swasembada pangan, air, dan energi. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Penyiapan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP • Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal • Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Pembangunan embung dan tampungan air lainnya
	1) Kab. Keerom: KSPP 2) Kab. Sarmi: potensial pangan 3) Kab. Jayapura: potensial pangan, potensial air 4) Kab. Biak Numfor: potensial pangan 5) Kota Jayapura: potensial pangan, potensial energi 6) Kab. Mamberamo Raya: potensial energi, potensial air 7) Kab. Kepulauan Yapen: potensial pangan 8) Kab. Teluk Bintuni: Potensial Air, Potensial Energi 9) Kab. Manokwari: potensial pangan, potensial energi 10) Kab. Merauke: KSPP, potensial pangan, potensial energi 11) Kab. Boven Digoel: potensial air 12) Kab. Mimika: potensial pangan, potensial energi, dan potensial air 13) Kab. Nabire: potensial pangan, potensial energi, potensial air 14) Kab. Manokwari Selatan: potensial pangan 15) Kab. Kaimana: potensial air 16) Kab. Jayawijaya: potensial pangan dan potensial energi 17) Kab. Pegunungan Bintang: potensial air 18) Kab. Yahukimo: potensial air 19) Kab. Sorong: potensial pangan, potensial energi, potensial air 20) Kab. Sorong Selatan: potensial pangan 21) Kab. Tambrau: potensial air	
4	Kawasan Afirmasi	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) melalui kawasan unggulan berbasis potensi lokasi (pariwisata, pertanian, dan sebagainya) serta diversifikasi ekonomi lokal. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan yang disertai dengan pemenuhan layanan kebutuhan dasar. Pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui pengembangan ekonomi kawasan yang disertai dengan pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik. Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan:
	1) Kawasan Perbatasan PKSN Jayapura - Kota Jayapura 2) Kawasan Perbatasan PKSN Biak - Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa. dan Kec. Bondifuar - Kab. Biak Numfor 3) Daerah Tertinggal Mamberamo Raya 4) Daerah Tertinggal Waropen 5) Daerah Tertinggal Supiori	

No	Kawasan	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
6)	Kawasan Perbatasan Prioritas Kec. Sawai - Kab. Mamberamo Raya	• Peningkatan SPAM, SPAL, sistem drainase dan pengelolaan sampah berbasis 3R • Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan
7)	Kawasan Perbatasan Prioritas Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat - Kab. Sarmi	• Pembangunan jalan akses simpul ekonomi • Pembangunan jalan non-status dan jembatan
8)	Kawasan Perbatasan Prioritas Kec. Towe, Kec. Waris - Kab. Keerom	
9)	Kawasan Perbatasan Prioritas Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri - Kab. Supiori	
10)	Kawasan Transmigrasi Senggi - Kab. Keerom	
11)	Daerah Tertinggal Kab. Teluk Bintuni	
12)	Daerah Tertinggal Kab. Teluk Wondama	
13)	Kawasan Perbatasan PKSN Tanah Merah, Kec. Kombut, Kec. Waropko, dan Kec. Amatiwi - Kab. Boven Digoel	
14)	Daerah Tertinggal Kab. Boven Digoel	
15)	Daerah Tertinggal Kab. Asmat	
16)	Daerah Tertinggal Kab. Mappi	
17)	PKSN Merauke, Kec. Ilwayab, Kec. Tabonji, Kec. Waan, Kec. Tubang, Kec. Okaba, Kec. Malind, dan Kec. Naukenjerai - Kab. Merauke	
18)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Agats dan Kec. Fayit - Kab. Asmat	
19)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Minyamur - Kab. Mappi	
20)	Kawasan Transmigrasi KT Salor - Kab. Merauke	
21)	Kawasan Transmigrasi KT Muting - Kab. Merauke	
22)	Kawasan Perdesaan Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind - Kab. Merauke	
23)	Daerah Tertinggal Kab. Paniai	
24)	Daerah Tertinggal Kab. Dogiyai	
25)	Daerah Tertinggal Kab. Puncak	
26)	Daerah Tertinggal Kab. Puncak Jaya	
27)	Daerah Tertinggal Kab. Intan Jaya	
28)	Daerah Tertinggal Kab. Deiyai	
29)	Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita - Kab. Mimika	

No	Kawasan	Deskripsi dan Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi
	30) Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim - Kab. Pegunungan Bintang 31) Daerah Tertinggal Kab. Manokwari Selatan 32) Daerah Tertinggal Kab. Pegunungan Arfak 33) Daerah Tertinggal Kab. Jayawijaya 34) Daerah Tertinggal Kab. Yahukimo 35) Daerah Tertinggal Kab. Tolikara 36) Daerah Tertinggal Kab. Nduga 37) Daerah Tertinggal Kab. Lanny Jaya 38) Daerah Tertinggal Kab. Yalimo 39) Daerah Tertinggal Kab. Mamberamo Tengah 40) Daerah Tertinggal Kab. Pegunungan Bintang 41) Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat - Kab. Raja Ampat 42) Daerah Tertinggal Kab. Maybrat 43) Daerah Tertinggal Kab. Tambrau 44) Kawasan Transmigrasi KT Klamono - Segun - Kab. Sorong 45) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau - Kab. Raja Ampat 46) Kecamatan Perbatasan Prioritas Kec. Kwoor dan Kec. Abun - Kab. Tambrau	
5	Kawasan Konservasi/Rawan Bencana	
	1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Jayapura 2) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kab. Deiyai 3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kab. Lanny Jaya 4) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Sorong 5) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kab. Maybrat	Penguatan ketangguhan kawasan rawan bencana melalui pengelolaan risiko di kawasan rawan bencana gempa bumi Kota Jayapura (Provinsi Papua Barat Daya), Deiyai (Provinsi Papua Tengah), Lanny Jaya (Provinsi Papua Pegunungan), Maybat (Provinsi Papua Barat Daya), dan Kota Sorong (Provinsi Papua Barat Daya). Indikasi <i>highlight</i> intervensi yang dilakukan: • Pembangunan pengaman pantai di Kota Jayapura • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik • Penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami

3.2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam mewujudkan pembangunan/pengembangan infrastruktur yang terarah dan tepat sasaran untuk mencapai pembangunan nasional, Kementerian PU telah menetapkan 4 (empat) prinsip dalam pelaksanaan sasaran dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029. Prinsip tersebut terdiri dari: prinsip ketahanan; prinsip keberlanjutan; prinsip kesetaraan; dan prinsip infrastruktur cerdas. Secara kolektif, prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang terstruktur untuk menentukan kebijakan yang efektif dan koheren. Keempat prinsip tersebut akan dijelaskan secara lebih menyeluruh sebagai berikut.

Prinsip Ketahanan

Prinsip pertama, ketahanan, menekankan kapabilitas infrastruktur pekerjaan umum untuk bertahan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan seperti bencana alam, gangguan teknologi, hingga faktor manusia. Ketahanan sangat penting agar infrastruktur dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur yang berketahanan dapat menjamin bahwa kegiatan ekonomi dapat terus berlanjut, menekan biaya pemulihan pasca bencana, dan meningkatkan daya tarik investasi. Sebaliknya, infrastruktur yang kurang tangguh atau berketahanan dapat memicu dampak negatif yang berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup (UNDRR, 2022).

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menggarisbawahi prinsip ketahanan dalam pengarusutamaan pembangunan berketahanan iklim. Pembangunan berketahanan iklim ini disebutkan sebagai kombinasi dari adaptasi, manajemen risiko bencana, dan inisiatif peningkatan ketahanan. Tujuannya agar dapat memperkuat sistem pembangunan dalam menghadapi pengaruh negatif bahaya iklim pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum merumuskan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 dengan menerapkan pembangunan berketahanan iklim ke dalam penyediaan infrastruktur yang juga diselaraskan dengan prinsip ketahanan. Beberapa wujud konkret dari prinsip tersebut adalah: 1) pembangunan bendungan dan kolam retensi sebagai pengendali banjir (Kementerian PUPR, 2022, Lampiran II) ; 2) pembangunan sabo dam untuk mengendalikan aliran lahar dan sedimen (Kementerian PUPR, 2018); 3) pembangunan permukiman tahan bencana (Kementerian PUPR, 2020, p. 72); 4) pembangunan infrastruktur transportasi dengan fungsi ganda sebagai struktur mitigasi bencana (Kementerian PUPR, 2020, p. 67); 5) memonitor ancaman bencana banjir dan kekeringan untuk diinformasikan kepada masyarakat setempat.

Prinsip Keberlanjutan

Di sisi lain, suatu proyek infrastruktur harus mampu digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan berfokus pada pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang memperhitungkan sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial sesuai tiga pilar keberlanjutan. Tujuan dari infrastruktur yang berkelanjutan adalah untuk memenuhi tuntutan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pengembangan/pembangunan infrastruktur konvensional dapat berdampak pada kerusakan dan fragmentasi ekosistem serta penggunaan sumber daya secara berlebihan.

Pembangunan/pengembangan infrastruktur mempengaruhi semua tujuan dari lima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 3, 6, 7, 9, dan 11) (Thacker, *et. al.*, 2019). Prinsip keberlanjutan ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029 melalui pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan yang diinisiasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengarusutamaan SDGs ini diimplementasikan melalui berbagai strategi yang tercantum di berbagai dokumen perencanaan, salah satunya yaitu dalam Rencana Strategis.

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029, pengarusutamaan SDGs diadopsi dalam bentuk prinsip keberlanjutan. Contoh nyata perwujudan prinsip keberlanjutan ini di antaranya: 1) pembangunan dan standarisasi bangunan gedung hijau (*green building*) (Kementerian PUPR, 2016; Kementerian PUPR, 2020, p. 72) 2) pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di bendungan dan waduk (Kementerian PUPR, 2024) 3) pembangunan permukiman ramah lingkungan (Kementerian PUPR, 2020, p. 72); 4) pengelolaan sampah berbasis *waste to energy* (Kementerian PU, 2025); serta 5) optimalisasi penggunaan air melalui *greywater reuse* (Kementerian PU, 2024).

Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ke dalam pengembangan infrastruktur pekerjaan umum sehingga terciptanya akses dan penggunaan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam proses pembangunan yaitu pembangunan manusia bertumpu pada akses infrastruktur yang setara terhadap seluruh kelompok masyarakat, di mana keadilan spasial diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang responsif gender.

Dalam proses penyusunan Renstra untuk periode 2025–2029, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengintegrasikan PUG dalam penyelenggaraan infrastruktur – mulai dari pemrograman, perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan – melalui prinsip kesetaraan.

Renstra ini menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memenuhi prinsip "*Infrastructure for All*", yaitu universal, inklusif, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Selain itu, Renstra ini juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lewat kebijakan dan program yang responsif gender.

Strategi yang diadopsi meliputi peningkatan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan infrastruktur, penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung PUG, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan dan pembangunan yang responsif gender. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program. Dengan kata lain, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan internal yang lebih eksplisit dalam mengakomodasi PUG pada penyelenggaraan infrastruktur, baik dalam penyusunan standar, pedoman teknis, maupun dalam praktik penganggaran responsif gender.

Rangkaian implementasi infrastruktur yang inklusif tertuang dalam program-program PU di antaranya: 1) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Kementerian PU, 2025); 2) Pembangunan fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas; 3) Program GESIT-KIAT (*Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure* -

Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) 2022–2025; 4) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Kementerian PUPR, 2022), 5) Program Prasarana Strategis dan 6) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Prinsip Infrastruktur Cerdas

Infrastruktur cerdas mengacu pada komponen saling terkait yang menggunakan teknologi untuk memperoleh data, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan performa kota cerdas secara keseluruhan. Penggunaan infrastruktur cerdas digital memungkinkan untuk memperkuat pemahaman dan pengawasan operasional, serta optimalisasi sumber daya yang terbatas di dalam suatu daerah (UNCTAD, 2016). Prinsip infrastruktur cerdas menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk menyediakan data secara *real-time* dan berkelanjutan dari infrastruktur pekerjaan umum. Tujuan diberlakukannya prinsip ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan mengenai kebijakan infrastruktur dan operasi ke depan.

Dalam RPJMN 2025–2029, infrastruktur cerdas termasuk dalam pengarusutamaan transformasi digital, dimana disebutkan upaya-upaya seperti: 1) perluasan akses dan peningkatan layanan digital dan telekomunikasi; 2) mendorong pembangunan serta memperkuat pusat data dan ekosistem terkait; 3) menegakkan kedaulatan digital lewat peningkatan keamanan dan perlindungan data pribadi serta menciptakan lingkungan digital yang kondusif; 4) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan 5) membangun tata kelola yang dapat mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang bermanfaat bagi pemerintah, industri, dan masyarakat.

Beberapa bagian dari pengarusutamaan transformasi digital yang berkaitan dengan sektor infrastruktur diadopsi ke dalam prinsip infrastruktur cerdas yang digunakan pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025–2029. Strategi aplikasi prinsip infrastruktur cerdas tersebut dapat dilihat dalam: 1) pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi) (Kementerian PUPR, 2020, p. 27); 2) pengembangan sistem informasi sumber daya air; 3) pengembangan hunian cerdas (*smart living*) (Kementerian PUPR, 2020, p. 72); serta 4) penggunaan *Building Information Modeling* (BIM), yaitu gambaran digital dari suatu objek terbangun (bangunan, jembatan, jalan) yang dimanfaatkan untuk mendukung proses desain, konstruksi, dan operasi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan (Kementerian PUPR, 2018, Lampiran I).

Keempat prinsip yang telah dijabarkan di atas memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Melalui arah kebijakan dan strategi utama yang telah disusun, diharapkan tujuan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan optimal.

3.2.2 Program dan Kegiatan Pembangunan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam periode 2025–2029, Kementerian PU akan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung hal tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum akan melaksanakan 7 program.

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan: (1) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (2) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN); (3) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (4) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (5) Layanan Teknis SDA; (6) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi; (7)

Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (8) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (9) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (10) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana.

2. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan: (1) Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pembinaan dan Dukungan Pembangunan Jalan Daerah; (4) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2025-2026) terdiri dari kegiatan (1) Penyelenggaraan Air Minum yang Aman; (2) Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu; (3) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya; dan (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Strategis yang di tahun 2027 berpindah ke Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan dengan 2 kegiatan yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Program Infrastruktur Dasar Permukiman (2027-2029), terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Air Minum yang Aman; (2) Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu; (3) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya.
4. Program Prasarana Strategis, terdiri dari kegiatan: (1) Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan; (2) Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya; (3) Penyelenggaraan Pembinaan Prasarana Strategis.
5. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PU; (2) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Serta Advokasi Hukum; (3) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum; (4) Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah; (5) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (6) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (7) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (8) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (9) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (10) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum; (11) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (12) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (13) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya; (14) Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi; (15) Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi; (16) Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi; (17) Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; (18) Pembinaan Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi; (19) Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; (20) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (21) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum; (22) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (23) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (24) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Pekerjaan Umum; (25) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (26) Penyelenggaraan Pengelolaan Talenta; (27) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Prasarana Strategis; (28) Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Ditjen Bina Konstruksi.
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum; (2) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi.

7. Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan (3) Pengembangan Infrastruktur Perkotaan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan susunan rencana usulan regulasi yang diperlukan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung proses bisnis, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Kerangka regulasi yang menggambarkan deskripsi umum kebutuhan regulasi Kementerian Pekerjaan Umum beserta justifikasi penyusunan regulasi tersebut disertai tahun penyelesaian.

Adapun ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

- a) Kerangka Regulasi berisi kebutuhan regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN 2025-2029;
- b) Kerangka Regulasi harus didasarkan pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029;
- c) Kerangka Regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku Masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional;
- d) Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, dengan kondisi:
 - i. apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi yang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut sudah efektif dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, maka tidak perlu dibentuk regulasi baru; atau
 - ii. apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi yang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut belum efektif atau belum optimal dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, maka perlu dilakukan penyusunan dan/atau perubahan regulasi dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian atas urgensi pembentukan dan/atau perubahan regulasi.
- e) Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terkait dampak, biaya dan manfaat atas suatu regulasi bagi semua pemangku kepentingan melalui instrumen analisis biaya dan manfaat regulasi (*Cost and Benefit Analysis/CBA*). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, pembentukan regulasi dilaksanakan apabila:
 - i. nilai manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugiannya; dan/atau
 - ii. pembentukan regulasi tersebut adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra PU 2025–2029 mengakomodir pengusulan kerangka regulasi berupa revisi ataupun pengajuan regulasi baru setingkat Undang - Undang-Undang (UU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri (Permen PU), sedangkan untuk kerangka regulasi setingkat Surat Edaran Direktorat Jenderal, NSPK, Pedoman, dan lainnya akan diakomodir dalam Renstra tingkat Unit Organisasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang

diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

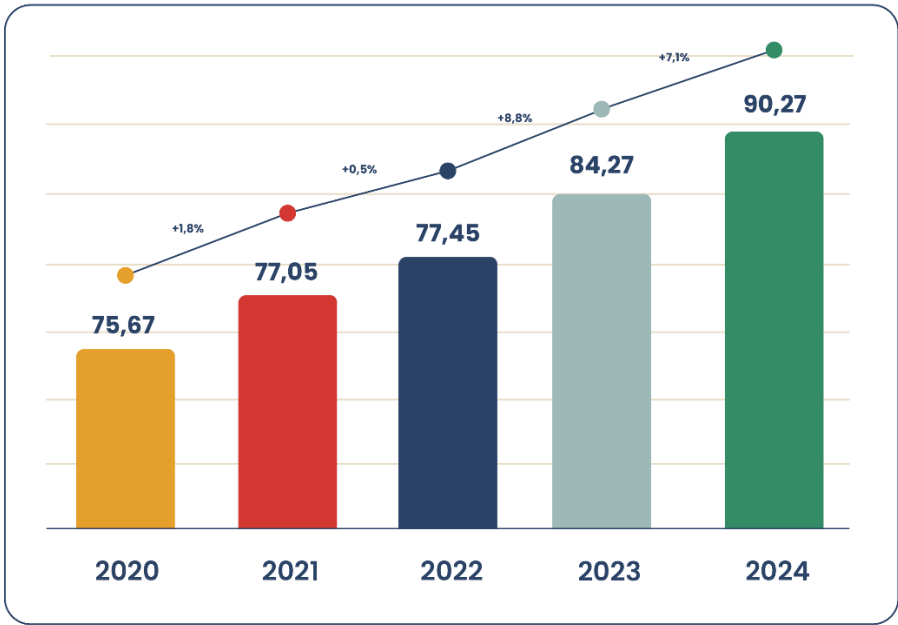
Kerangka kelembagaan yang tercantum dalam Renstra periode sebelumnya merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Evaluasi kelembagaan dilakukan untuk menilai ketepatan struktur dan proses yang efektif dan efisien.

3.4.1 Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean governance*), di mana hal tersebut menjadi landasan dan acuan dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi berperan dalam menjaga efisiensi dan tingkat kualitas pelayanan terhadap masyarakat, serta dalam penyelenggaraan aktivitas dan program pemerintah untuk pembangunan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dikawal bersama, salah satunya melalui pemantauan dan evaluasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi guna tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola pemerintah digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif namun juga budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas RB. Evaluasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pihak internal Kementerian PU maupun oleh Kementerian PANRB serta Kementerian/Lemabaga meso merupakan langkah kunci dalam mencapai visi *World Class Bureaucracy*. Dalam upaya memastikan ketepatan desain program berupa rencana aksi, keberhasilan pencapaian sasaran, dan berdampak positif terhadap masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR oleh Kementerian PAN-RB dalam kurun waktu 2020-2024, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.19 Penilaian Indeks RB Kementerian PU(PR) 2020-2024



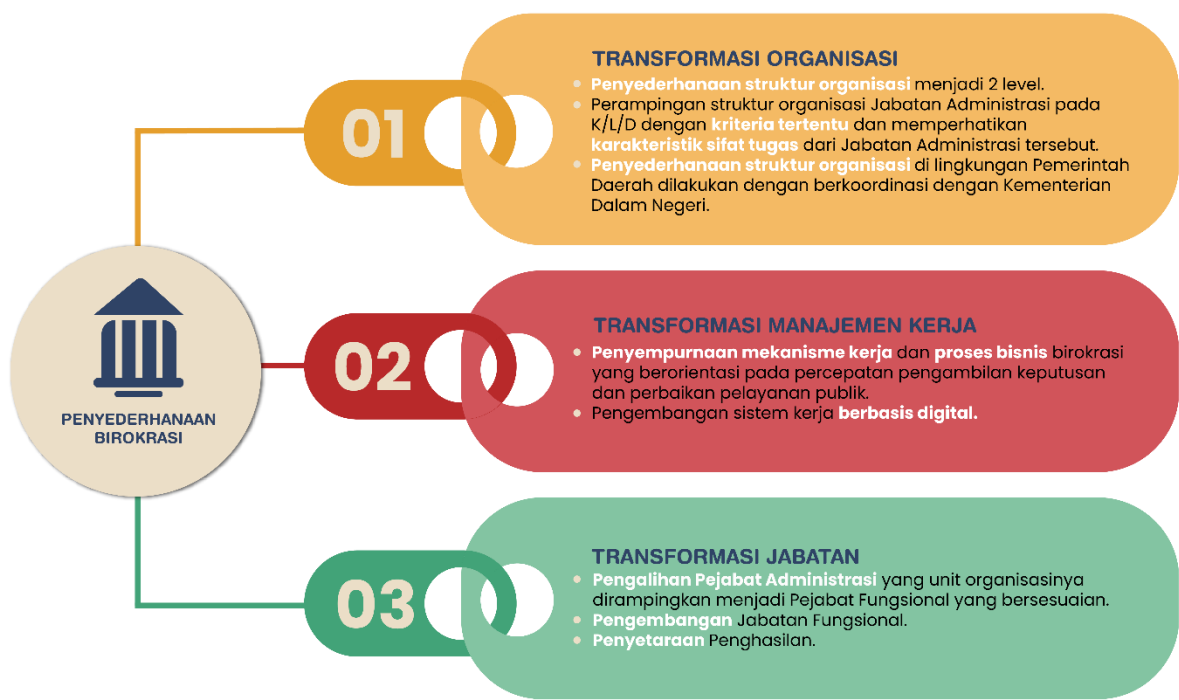
Gambar 3. 3 Penilaian Indeks RB Kementerian PU(PR) 2020-2024 dan Kenaikannya Per Tahun

Sumber: Laporan Hasil Evluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi untuk Kementerian PUPR dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 75,67 (2020) menjadi 90,27 (2024). Peningkatan signifikan yang terjadi sejak tahun 2023 tersebut tidak terlepas dari pengaruh ditetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, di mana terdapat perubahan Penilaian berupa Reformasi Birokrasi General dan Tematik berdampak.

3.4.2 Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi Kementerian PU

Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi terbit dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi.



Gambar 3. 4 Skema Penyederhanaan Birokrasi

Status terakhir Kementerian PU sebagai implikasi dari Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tersebut telah terjadi pengurangan sebanyak 766 Jabatan dari 1.902 jabatan menjadi 1.136 jabatan setelah penyederhanaan organisasi.

3.4.3 Evaluasi Kelembagaan Kementerian PU

Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah, hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Ruang lingkup evaluasi kelembagaan dibagi menjadi dua yaitu dimensi struktur dan dimensi proses. Dimensi struktur dilakukan untuk mengukur kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Sedangkan dimensi proses dilakukan untuk mengukur keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko serta teknologi informasi. Selain itu, evaluasi kelembagaan juga dilakukan untuk

mendapatkan gambaran secara penuh mengenai kondisi kelembagaan Kementerian PU dan memperkaya kajian akademis Kementerian PU kedepannya.

Adapun hasil evaluasi kelembagaan Kementerian PUPR yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Penilaian Evaluasi Kelembagaan Kementerian PUPR TA 2023

NO	K/L/D	HASIL PENILAIAN	KOMPOSIT
A	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	73,44	P-4
1	Sekretariat Jenderal	83,66	P-5
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	71,32	P-4
3	Direktorat Jenderal Bina Marga	62,92	P-4
4	Direktorat Jenderal Cipta Karya	62,92	P-4
5	Direktorat Jenderal Perumahan	89,25	P-5
6	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	63,47	P-4
7	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR	78,68	P-4
8	Inspektorat Jenderal	69,38	P-4
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	67,82	P-4
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68,05	P-4

Penjelasan dari peringkat komposit berdasar pada Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21 Kategori Peringkat Penilaian Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

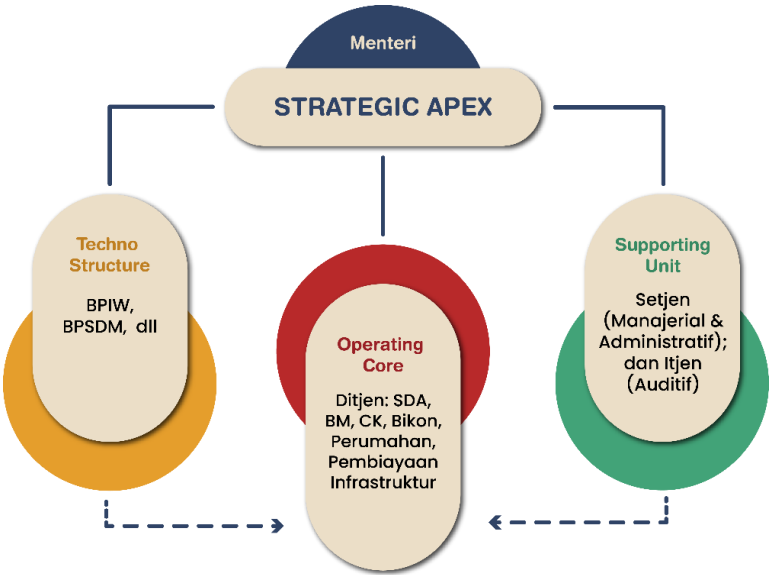
NO.	PERINGKAT	KETERANGAN
1	Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	sangat efektif, akomodatif kebutuhan internal, adaptif lingkungan
2	Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	efektif, akomodatif kebutuhan internal, adaptif lingkungan; ada kelemahan minor, perbaikan marginal
3	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	cukup efektif, akomodatif kebutuhan internal, adaptif lingkungan; bbrp kelemahan, perbaikan segera sistemik
4	Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	kurang efektif, akomodatif kebutuhan internal, adaptif lingkungan; banyak kelemahan dan simultan, tindakan korektif mendasar
5	Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	tidak efektif, akomodatif kebutuhan internal, adaptif lingkungan; banyak kelemahan mendasar, koreksi total

Sumber: Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada level kementerian dan unit organisasi secara umum berada pada kategori P-4. Nilai evaluasi mandiri evaluasi organisasi termasuk pada peringkat komposit P-4, yaitu dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki

beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal. Hasil selengkapnya pada masing-masing unit organisasi terlampir dalam laporan ini.

Selanjutnya, Analisis diferensiasi dilakukan Permen PANRB melalui pemetaan peran dalam struktur organisasi antara *strategic apex*, *supporting unit*, *techno structure*, dan *operating core* di setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti di bagan berikut.



Gambar 3. 5 Pemetaan Peran dalam Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan gambar di atas, selanjutnya hasil analisis pola peran *strategic apex*, *supporting unit*, *techno structure*, dan *operating core* di setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR tersaji pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.22 Hasil analisis pola peran <i>strategic apex</i> , <i>supporting unit</i> , <i>techno structure</i> , dan <i>operating core</i> di setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR TA 2023	
FUNGSI	ANALISA PERAN
<i>Strategic Apex</i>	Fungsi ini dimiliki oleh Menteri sebagai pimpinan tertinggi instansi. Peran yang dimiliki Menteri adalah memimpin Kementerian dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
<i>Operating Core</i>	<i>Operating Core</i> diperankan oleh unit organisasi yang berbentuk Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal menjalankan tugas-tugas yang menjadi amanat Undang-Undang sektoral yang diselenggarakan oleh Kementerian PU seperti UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
<i>Techno Structure</i>	Fungsi <i>Techno Structure</i> ini diperankan oleh BPIW, BPSDM, Pusdatin, Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Pusat PDPP, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, dan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, dalam memberikan dukungan teknis substantif dalam mendukung operasionalisasi <i>Operating Core</i> , yang berbentuk dukungan perencanaan yang dilaksanakan BPIW, dukungan SDM yang andal yang diperankan oleh BPSDM, dukungan pengelolaan data dan informasi oleh Pusdatin, dukungan fasilitas infrastruktur daerah Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, dukungan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan oleh PDPP, dukungan pengelolaan dan

FUNGSI	ANALISA PERAN
	mitigasi lumpur Sidoarjo oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, serta dukungan analisis pelaksanaan kebijakan oleh Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan.
Supporting Unit	Fungsi ini terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi auditif, dimana fungsi manajerial dan administratif dilaksanakan oleh unit kerja yang berbentuk Biro. Sedangkan fungsi auditif diperankan oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penataan kelembagaan di level instansi, Kementerian PU telah menerapkan prinsip kelembagaan yang memastikan terjadinya fungsi-fungsi organisasi yang baik seperti *check and balance*, kesatuan *output*, dan pembagian peran yang jelas antar Unit Organisasi. Secara umum organisasi/kelembagaan Kementerian PU memiliki kondisi dimensi struktur dan proses tergolong efektif, kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tergolong tinggi, serta kekurangan tergolong kelemahan kecil.

Pada aspek lain, dapat disimpulkan bahwa tidak ada fragmentasi dan tumpang tindih tugas secara tegas antar Unit Organisasi dan Satuan Kerja, atas fungsi Sektor/Sub-Sektor/ Manajerial/ Operasional. Rekomendasi untuk peningkatan organisasi/kelembagaan Kementerian PU yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pada beberapa unit organisasi masih diperlukan penajaman tugas dan fungsi serta penataan tata kerja, sehingga tindak lanjut hasil evaluasi yang perlu diagendakan adalah menata kembali/ menajamkan tugas dan fungsi organisasi, penjabaran dalam uraian tugas, maupun SOP.
2. Proses Bisnis Kementerian PU perlu segera disusun/diselesaikan/disesuaikan, untuk memetakan *positioning* dan peran unit-unit organisasi, serta mencegah fragmentasi dan tumpang tindih tugas fungsi.
3. Perlu melengkapi penyusunan SOP sesuai dengan peta kebutuhan SOP, untuk memastikan tugas-tugas layanan pendukung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjadi pedoman bagi para *stakeholders*.

3.4.4 Arah kebijakan kelembagaan berdasarkan RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran-sasaran dalam Prioritas Nasional, terdapat sejumlah arahan terkait pengembangan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029, baik untuk mengakomodir tugas dan fungsi yang belum terlaksana secara maksimal maupun penguatan proses bisnis dan peran antar lembaga yang memiliki keterkaitan dengan fungsi tersebut. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi, memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan advokasi yang selama ini terfragmentasi dan belum berjalan optimal, sekaligus menjadi langkah *debotllenecking* untuk menciptakan tata kelola lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan visi swasembada air, badan ini dirancang memiliki independensi operasional serta finansial untuk memastikan ketersediaan air yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir mulai dari penyediaan air baku, penyediaan dan distribusi air minum, hingga pengolahan air limbah domestik
2. Penataan Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Air Limbah Domestik untuk menciptakan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Kerangka kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah provinsi sebagai perpanjangan

tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik dan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, fungsi operasional akan didelegasikan kepada institusi di tingkat kabupaten/kota seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perusahaan Daerah Air Minum.

3. Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam rangka mendukung tata kelola persampahan yang partisipatif, terintegrasi, serta tidak tumpang tindih, maka diperlukan penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Penataan dan Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana Persampahan untuk melindungi jaminan kepemilikan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor persampahan dan tata kelola aset.

Transformasi kelembagaan serta penataan dan pengelolaan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan merupakan kunci dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai Asta Cita yang memerlukan kontribusi multipihak. Di bidang air minum, BUMD merupakan ujung tombak pemenuhan akses terhadap air minum di sisi hilir. Namun, kinerja BUMD terhambat oleh fragmentasi layanan yang berbasis skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan investasi, tarif yang tidak mampu menutup biaya operasional, serta tata kelola yang lemah. Hal ini yang menjadi dasar urgensi pembentukan Badan Regulator yang akan menjadi pengawas sektor air baku untuk air minum, penyediaan air minum dan air limbah domestik, serta mengatur terkait standar kualitas pelayanan, kinerja dan tarif. Kondisi ini juga mendorong pentingnya pembentukan Operator Sistem Usaha Air Nasional melalui Transformasi BUMN Air dan BUMD Air sebagai solusi atas fragmentasi layanan yang berbasis batas administratif wilayah, sehingga dapat mendorong skala usaha yang optimal dan modalitas investasi yang besar untuk perbaikan layanan serta perbaikan kualitas teknologi. Sementara untuk penguatan kelembagaan persampahan, Kementerian PU berperan strategis melalui fasilitasi pemisahan fungsi regulator dan operator, mendorong peningkatan UPTD menjadi BLUD, serta penguatan regulasi di bidang persampahan di tingkat daerah, termasuk pendampingan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

3.4.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum periode 2025 - 2029 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai Sasaran Strategis. Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip *right size dan right function* (organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari upaya penyesuaian struktur kelembagaan pemerintahan, berdasarkan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 Tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PUPR secara resmi mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Lebih lanjut, melalui Perpres Nomor 170 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat sejumlah penyesuaian dan penataan dalam struktur organisasi Kementerian PU.

Penataan organisasi pada tingkat unit organisasi dilakukan dengan menetapkan unit organisasi yang awalnya berwenang terhadap infrastruktur perumahan dan

permukiman menjadi penyelenggara infrastruktur keciptakaryaannya, lalu memisahkan fungsi-fungsi yang menangani infrastruktur prasarana strategis dengan keciptakaryaannya tersebut.

Selain itu dilakukan restrukturisasi terhadap Unit Organisasi Perumahan, di mana unit ini ditiadakan untuk periode mendatang, begitu pula dengan Unit Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman yang disesuaikan menjadi Pengembangan Kawasan Strategis, hal ini sejalan dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di mana telah mengakomodir fungsi dan kewenangan terkait penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman.



Gambar 3. 6 Skema Perubahan Organisasi Kementerian PU

Penataan organisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT distrukturkan kembali pembagian kerjanya berdasarkan pola kewilayahan.

3.4.6 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Untuk mencapai kondisi tersebut telah ditetapkan strategi dan *milestone* manajemen SDM Kementerian PU menuju layanan prima 2025, di mana pada tahap ke 3 (2020 – 2025) difokuskan pada Teknis dan Manajemen *Human Capital*.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama yang menunjang terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance*. Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel bergantung pada kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SDM Kementerian PU memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan strategis, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai sektor pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Kementerian PU sangat membutuhkan SDM yang kompeten dan andal untuk

meningkatkan kinerja instansi dan memastikan target-target prioritas pembangunan nasional tercapai dan berkelanjutan.

Tabel 3.23 Hasil yang diharapkan dari area/sektor organisasi dan kelembagaan dari Kementerian PU

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan *Grand Skenario* Perubahan Birokrasi 2012–2025, di mana pada periode 2020–2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan.

Pada tahun 2024, jumlah pegawai Kementerian PU mencapai 37.899 orang terdiri dari 18.635 PNS, 3.266 PPPK, dan 15.998 PPNPN. Jumlah tersebut turun 1% atau 346 orang dari tahun 2023. Seluruh pegawai terdistribusi ke dalam Unit Organisasi yang dikelompokkan menjadi (1) Unit Organisasi *Core Process*, yaitu unit organisasi yang memiliki tugas-fungsi yang secara langsung membangun infrastruktur; (2) Unit Organisasi *Techno-Structure* yang memiliki tugas-fungsi pendukung terhadap proses penyediaan infrastruktur; dan (3) Unit Organisasi *Supporting* yang memiliki tugas-fungsi manajemen umum.

Pencapaian target Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran, metode pelaksanaan pekerjaan, kecanggihan teknologi maupun siklus kerja yang disiplin, tetapi juga sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. SDM yang berkualitas akan mampu menggerakkan setiap program dan kegiatan secara efektif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan mengedepankan profesionalisme, inovasi, dan integritas. Kompetensi teknis yang kuat, kemampuan manajerial yang mumpuni, serta wawasan yang terus diperbarui menjadi modal utama untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran.

Meskipun terjadi penurunan jumlah pegawai pada tahun 2024, pengelolaan SDM tetap menjadi prioritas utama. Diproyeksikan ada peningkatan jumlah ASN yang signifikan, dari 22.609 orang pada tahun 2025 menjadi 40.969 orang pada tahun 2029. Peningkatan ini didukung oleh penambahan 1.000 CPNS per tahun dari 2027 hingga 2029, yang menunjukkan adanya kebutuhan besar untuk merekrut tenaga kerja baru secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang bertempat di pusat pada tahun 2025 terdiri dari 17.310 PNS, 2.426 CPNS, dan 2.873 PPPK. Di antara unit-unit organisasi, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diproyeksikan memiliki jumlah ASN terbanyak, menunjukkan peran strategis dan kebutuhan SDM yang tinggi di unit-unit tersebut.

Peningkatan ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terdapat proyeksi penambahan pada

jenjang pendidikan Sarjana (S1/D4) dengan total 20.322 orang di tahun 2029, diikuti oleh Magister (S2) sebanyak 4.455 orang, dan D3 sebanyak 2.728 orang. Pembagian proporsi antara bidang Teknik dan Non-Teknik juga menunjukkan prioritas rekrutmen. Meskipun jumlah total pegawai non-teknik lebih besar, penambahan CPNS diproyeksikan dengan pembagian 60% untuk pendidikan teknik dan 40% untuk non-teknik (pada tahun 2027), menegaskan fokus Kementerian PU pada penguatan SDM dengan keahlian teknis untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, pengelolaan SDM dalam kurun waktu lima tahun mendatang harus menjadi perhatian khusus. Investasi dalam pengembangan kapasitas, pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis beban kerja menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga yang mumpuni di setiap lini. Dengan kombinasi kualitas dan kuantitas SDM yang optimal, Kementerian Pekerjaan Umum akan memiliki kekuatan penuh untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra 2025–2029, sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PU menetapkan 7 Tujuan dan 7 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2025– 2029.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Kementerian PU
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (unit)	2025	2026	2027	2028	2029	Total	UIC
1.	Meningkatnya ketahanan air nasional	Persentase capaian ketahanan air nasional (%)	70	70	70	75	75	75	DJSDA
	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Indeks ketahanan air nasional (Nilai)	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75	3,75	DJSDA
2.	Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan (%)	84	85,5	87	88,5	90	90	DJBM
	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional (jam/100km)	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,70	DJBM
		Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional (jam/100km)	2,20	2,15	2,10	2,05	2,00	2,00	DJBM
3.	Menguatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja layanan infrastruktur dasar permukiman (%)	80	85	87,5	90	92,5	92,5	DJCK
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan (%)*	65,78	71,00	73,92	76,39	79,07	79,07	DJCK
			–	–	–	–	–	–	
			67,10	75,52	85,41	92,24	100	100	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (unit)	2025	2026	2027	2028	2029	Total	UIC
4.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional (%)	15,12	30,07	45,72	54,36	63,92	63,92	DJPS
	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU (%)	41,77	53,21	73,04	85,52	100	100	DJPS
	Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina (%)	80	85	87,5	90	92,5	92,5	BPSDM & DJBK
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Bersertifikat (%)	22,12	33,92	35,60	37,36	39,19	39,19	DJBK
		Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang pekerjaan umum yang kompeten dan siap kerja (%)	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	81,5	BPSDM
	Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur (%)	80	85	87,5	90	92,5	92,5	Setjen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (unit)	2025	2026	2027	2028	2029	Total	UIC
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU (%)	91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13	Setjen
		Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (%)	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90	89,90	Itjen
		Tingkat keterpaduan infrastruktur PU (%)	75,94	76,72	77,50	78,27	79,05	79,05	BPIW
		Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Konstruksi (%)	70,85	73,35	76,85	79,59	82,01	82,01	DJBK
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI
		Tingkat pengembangan kompetensi SDM Aparatur PU (%)	80,15	81,50	84,00	85,92	87,82	87,82	BPSDM
7.	Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,35	44,58	44,86	45,21	45,60	45,60	BPIW
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	44,81	45,01	45,21	45,41	45,61	45,61	BPIW
		Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	7,47	7,64	7,80	7,97	8,13	8,13	BPIW
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	48,66	48,96	49,26	49,56	49,86	49,86	BPIW
	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	40,93	41,14	41,40	41,72	42,09	42,09	BPIW

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (unit)	2025	2026	2027	2028	2029	Total	UIC
	perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	46,16	46,46	46,76	47,06	47,36	47,36	BPIW
		Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	3,42	3,44	3,46	3,49	3,52	3,52	BPIW
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	43,04	43,34	43,64	43,94	44,24	44,24	BPIW
		Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	3,89	3,92	3,95	3,98	4,01	4,01	BPIW
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	50,11	50,41	50,71	51,01	51,31	51,31	BPIW
		Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	3,57	3,72	3,85	3,99	4,12	4,12	BPIW
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	47,50	47,80	48,10	48,40	48,70	48,70	BPIW

**target DJCK dalam nilai rentang*

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan tersebut diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PU sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp960.929.675.649.000 sampai dengan Rp1.136.928.055.242.000.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PU 2025–2029 Per Program
(Ribu Rupiah)

Program	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Program Ketahanan Sumber Daya Air	36.184.662.000	32.095.164.000	105.133.125.000	96.604.341.000	94.417.788.000	364.435.080.000
Program Infrastruktur Konektivitas	35.123.511.337	67.109.701.931	92.591.746.218	87.471.211.830	74.597.673.656	356.893.844.973
Program Prasarana Strategis	21.680.149.931	26.960.808.853	31.041.404.049	16.038.742.115	14.646.023.191	110.367.128.139
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	57.275.683	140.648.866	163.432.269	183.975.334	208.573.510	753.905.662
Program Infrastruktur Dasar Permukiman*	5.163.467.049	10.509.356.211 – 37.002.597.010	14.719.727.787 – 55.766.703.875	16.059.094.577 – 66.133.668.411	11.142.799.928 – 69.526.388.800	57.594.445.553 – 233.592.825.145
Program Dukungan Manajemen	7.506.603.966	10.861.384.900	11.632.859.082	11.664.114.255	12.341.773.507	54.006.735.710
Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	4.321.745.613	2.562.070.000	4.407.932.000	2.990.185.000	2.596.603.000	16.878.535.613
TOTAL	110.037.415.579	150.239.134.761 – 176.732.375.560	259.690.226.405 – 300.737.202.493	231.011.664.112 – 281.086.237.945	209.951.234.792 – 268.334.823.664	960.929.675.649 – 1.136.928.055.242

Catatan:
*) Perhitungan batas atas mengacu kepada *resource envelope* dalam RPJMN 2025-2029 dan batas bawah mengacu pada tren alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional bidang infrastruktur dasar permukiman sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN diperlukan kontribusi pendanaan APBN dan non-APBN. Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan untuk kegiatan prioritas Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu-Hilir, Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS, serta Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR mencapai Rp 633,58 Triliun (Lampiran 2). Meskipun demikian, *resource envelope* jangka menengah yang dialokasikan dalam RPJMN untuk Kementerian PU sebesar Rp 233,59 Triliun. Angka ini lebih besar daripada kecenderungan pendanaan APBN Kementerian PU untuk program Infrastruktur Dasar Permukiman selama 5 tahun ke depan yang diperkirakan mencapai Rp 57,59 Triliun berdasarkan *trend* pagu alokasi anggaran. Oleh karena itu, pada matriks dan kerangka pendanaan dirumuskan dua skenario, yaitu skenario berdasarkan *trend* alokasi anggaran dengan target internal Ditjen Cipta Karya, dan skenario berdasarkan *resource envelope* dengan target sesuai RPJMN.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian PU tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PU. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PU untuk menyusun Renstra Unit Eselon I dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2027) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2029) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air										38.419.512	34.735.540	109.086.481	100.618.958	98.495.893	381.356.384	
	Tujuan: Meningkatkan ketahanan air nasional															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1) Persentase capaian ketahanan air nasional	%		70	70	70	75	75	75							
	Sasaran Strategis:															
	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:															
	1) Indeks Ketahanan Air Nasional	Nilai		3.5 (Moderat)	3.5 (Moderat)	3.5 (Moderat)	3.75 (Moderat)	3.75 (Moderat)	3.75 (Moderat)							
PROGRAM 1: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR										36.184.662	32.095.164	105.133.125	96.604.341	94.417.788	364.435.080	
	Sasaran Program:															
	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional															
	Indikator Kinerja Program:															
	1) Kapasitas tampungan air	(m3/kapita)		59,31	58,74	58,84	59,53	63,54	63,54							
	2) Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%		53,01%	52,55%	54,66%	56,05%	56,18%	56,18%							
	3) Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%		61,61%	61,73%	61,92%	62,14%	62,37%	62,37%							
	4) Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%		15,60%	15,66%	15,96%	16,29%	16,57%	16,57%							
	5) Efisiensi pemanfaatan air irigasi	(USD/ m3)		0,34	0,36	0,39	0,41	0,43	0,43							
	6) Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	(%)		12,00%	25,00%	55,00%	79,00%	100,00%	100,00%							
	7) Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	(%)		80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	88,00%							
	8) Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	(%)		4,07%	4,07%	5,04%	6,01%	7,04%	7,04%							
	9) Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	(%)		2,00%	8,00%	27,00%	45,00%	62,00%	62,00%							
KEGIATAN 7691: PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN. RAWA. DAN NON-PADI										5.285.953	9.379.645	37.508.568	34.703.874	31.702.538	118.580.822	Dit. Irigasi dan Rawa
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1) Jumlah luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Ha (Kumulatif)		466	4.671	26.447	49.669	72.319	72.319							
	2) Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Ha (Kumulatif)		10.000	27.351	178.534	327.534	500.000	500.000							
	3) Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha		75.864	273.294	859.643	1.467.764	2.000.000	2.000.000							
	4) Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa	Dokumen		126	75	102	22	4	329							
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi															
	RO: Bendung Irigasi	Unit Tersebar		4	2	22	16	14	58	148.749	154.900	1.623.042	1.789.016	1.585.085	5.300.792	
	RO: Rehabilitasi bendung	Unit Tersebar		12	0	0	0	0	12	316.462	-	-	-	-	316.462	
	RO: Bangunan Air Irigasi	Unit Tersebar		0	2	1	1	1	5	-	106.208	10.000	10.000	10.000	136.208	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO: Jaringan Irigasi untuk Komoditas Non Padi dan Tambak	Km Tersebar		14	0	98,27	115,34	199,38	427	60.000	-	257.809	77.515	318.451	713.776	
	RO: Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Km Tersebar		0	640	2.162,03	3.100,79	2.715,41	8618	-	2.215.085	4.260.223	4.583.258	2.798.154	13.856.720	
	RO: Pembangunan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa	Km Tersebar		41,78	0	0	0	0	42	38.600	-	-	-	-	38.600	
	RO: Rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi multikomoditas	Km Tersebar		334	0	0	0	0	334	344.500	-	-	-	-	344.500	
	RO: Rehabilitasi/ peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km Tersebar		47	0	0	0	0	47	191.094	-	-	-	-	191.094	
	RO: Rehabilitasi/ peningkatan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa	Km Tersebar		5	0	0	0	0	5	56.791	-	-	-	-	56.791	
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)															
	RO: Bangunan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Unit Tersebar		-	-	10	10	10	30	-	-	10.000	10.000	10.000	30.000	
	RO: Bendung Ciriang	Unit Jawa Barat		-	1	-	-	-	1	-	46.000	-	-	-	46.000	
	RO: Bendung Jatimlerek	Unit Jawa Timur		-	1	-	-	-	1	-	124.500	-	-	-	124.500	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)															
	RO: Jaringan Irigasi Waduk	Km Tersebar		22	9	111	169	168	479	242.714	141.274	976.255	1.177.832	1.391.011	3.929.086	
	RO: Pengembangan dan pengelblaan irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km Tersebar		21,7	0	0	0	0	21,7	7.000	-	-	-	-	7.000	
	RO: Jaringan Irigasi di Lokasi Optimasi Lahan Kementerian Pertanian	Km Tersebar		0	0	1	1	1	3	-	-	10.000	10.000	10.000	30.000	
	RO: Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Km Tersebar		66	0	546	332	288	1.232,00	410.730	-	4.865.398	3.499.039	2.279.137	11.054.304	
	RO: Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Km Tersebar		0	2.000	5.000	5.000	5.000	17.000,00	-	2.226.139	5.000.000	5.000.000	5.000.000	17.226.139	
	RO: Rehabilitasi/ peningkatan iaringan irigasi waduk	Km Tersebar		65	0	0	0	0	65	515.045	-	-	-	-	515.045	
	RO: Rehabilitasi/ peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km Tersebar		406	0	0	0	0	406	747.668	-	-	-	-	747.668	
	RO: Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah	Km Kalimantan Tengah		0	47	465,06	227,8	4,15	744,01	-	65.585	101.574	97.960	9.292	274.410	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)
	RO: Jaringan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan	Km	Papua Selatan	0	125	3.080,00	2.310,00	2.310,00	7.825,00	-	789.344	15.000.000	11.500.000	11.500.000	38.789.344	
	RO: Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Batang Asai	Km	Jambi	0	6	0	0	0	6	-	171.894	-	-	-	171.894	
	RO: Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Serayu	Km	Jawa Tengah	0	0,2	0	0	0	0,2	-	84.000	-	-	-	84.000	
	RO: Jaringan Irigasi DI Rentang (RIMP)	Km	Jawa Barat	187	1	1	1	1	191	514.574	635.897	784.814	1.046.418	523.209	3.504.912	
	RO: Jaringan Irigasi DI Komerling (KIP)	Km	Sumatera Selatan	76	194	130	0	0	400	360.649	422.549	387.953	-	-	1.171.151	
	RO: Jaringan Irigasi Wilayah Barat Indonesia (URSIP)	Km	Tersebar	15	15	81	130	0	241.122	146.966	285.641	300.000	303.150	-	1.035.756	
	RO: Jaringan Irigasi Wilayah Sulawesi Tengah (IRSL)	Km	Sulawesi Tengah	0,1	0	0	0	0	0,1	6.084	-	-	-	-	6.084	
	RO: Jaringan Irigasi Strategis (SIMURP)	Km	Tersebar	0,0001	0	0	0	0	0,0001	46.934	-	-	-	-	46.934	
	RO: Jaringan Irigasi Strategis yang Diairi oleh Waduk (FISP)	Km	Tersebar	0	0	40	167	84	290,8	-	-	909.418	1.811.335	4.062.377	6.783.130	
	RO: Jaringan Irigasi Strategis (DRIP)	Km	Tersebar	0	0	312	423	238	973,36	-	-	1.650.893	2.302.260	1.482.548	5.435.702	
	RO: Jaringan Irigasi Rawa yang dioptimalisasi (OLIFS)	Km	Tersebar	0	0	329	426	215	970,56	-	-	897.849	1.196.298	601.903	2.696.049	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Cisadane	Km	Jawa Barat dan Banten	7	9	0	0	0	15,81	59.050	60.800	-	-	-	119.850	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Baro Raya	Km	Aceh	15,32	0	0	0	0	15,32	46.788	-	-	-	-	46.788	
	RO: Pembangunan Daerah irigasi Batang Sinamar	Km	Sumatera Barat	2,8	0	0	0	0	2,8	35.000	-	-	-	-	35.000	
	RO: Pembangunan Daerah irigasi Batang Asai (Tahap II)	Km	Jambi	0,12	0	0	0	0	0,12	60.000	-	-	-	-	60.000	
	RO: Daerah irigasi Air Sehluma yang direhabilitasi	Km	Bengkulu	3,12	1,5	0	0	0	4,62	30.875	35.000	-	-	-	65.875	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Way Sekampung	Km	Lampung	22	0	0	0	0	22	121.435	-	-	-	-	121.435	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Jragung (Tahap II)	Km	Jawa Tengah	9,74	0	0	0	0	9,74	54.527	-	-	-	-	54.527	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Glapan (Tahap II)	Km	Jawa Tengah	44,67	0	0	0	0	44,67	150.000	-	-	-	-	150.000	
	RO: Rehabilitasi Daerah irigasi Pacal	Km	Jawa Timur	5	0	0	0	0	5	69.300	-	-	-	-	69.300	
	RO: Jaringan Irigasi DI Waduk Bening	Km	Jawa Timur	0	9	0	0	0	9	-	177.500	-	-	-	177.500	
	RO: Jaringan Irigasi DI Siman	Km	Jawa Timur	0	36	0	0	0	36	-	110.263	-	-	-	110.263	
	RO: Jaringan Irigasi DI Mrican	Km	Jawa Timur	0	30	0	0	0	30	-	140.010	-	-	-	140.010	
	RO: Jaringan Irigasi DI Bondoyudo	Km	Jawa Timur	0	33	0	0	0	33	-	114.479	-	-	-	114.479	
	RO: Jaringan Irigasi DI Pondok Waluh	Km	Jawa Timur	0	21	0	0	0	21	-	83.000	-	-	-	83.000	
	RO: Jaringan Irigasi DI Talang	Km	Jawa Timur	0	15	0	0	0	15	-	83.000	-	-	-	83.000	
	RO: Jaringan Irigasi DI Katon Kompleks	Km	Nusa Tenggara Barat	0	16	0	0	0	16	-	51.450	-	-	-	51.450	
	RO: Jaringan Irigasi DI Manganti	Km	Jawa Tengah	0	6	0	0	0	6	-	113.603	-	-	-	113.603	
	RO: Jaringan Irigasi DI Jatiluhur	Km	Jawa Barat	0	17	0	0	0	17	-	75.532	-	-	-	75.532	
	RO: Jaringan Irigasi DI Lematang	Km	Sumatera Selatan	0	1	0	0	0	1	-	48.575	-	-	-	48.575	
	RO: Jaringan Irigasi DI Cilauten II	Km	Jawa Barat	0	17	0	0	0	17	-	187.500	-	-	-	187.500	
	RO: Jaringan Irigasi DI Kumisik	Km	Jawa Tengah	0	34	0	0	0	34	-	82.940	-	-	-	82.940	
	RO: Jaringan Irigasi DI Molek	Km	Jawa Timur	0	42	0	0	0	42	-	131.000	-	-	-	131.000	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Dokumen Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Dokumen	Pusat	157	75	102	22	4	360	294.158	378.551	379.230	206.222	46.245	1.304.406	
	RO: Fasilitas Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen	Pusat	0	3	5	5	4	17	-	31.031	50.000	48.965	40.000	169.996	
	RO: Unit Desain	Dokumen	Pusat	0	0	38	38	38	114	-	-	13.000	13.000	13.000	39.000	
	KRO: Dukungan Teknis (Prioritas)															
	RO: Komerling Irrigation Project Stage III	Dokumen	Sumatera Selatan	1	0	0	0	0	1	35.409	-	-	-	-	35.409	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya pembinaan layanan irigasi dalam rangka peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kinerja layanan pembinaan irigasi dan rawa	%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Layanan teknis dan pembinaan bidang irigasi dan rawa	Rekomendasi		38	0	0	0	0	38	11.209	-	-	-	-	11.209	
	RO: Komerling Irrigation Project Stage III	Kajian		1	0	0	0	0	1	2.132	-	-	-	-	2.132	
	RO: Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP)	Kajian		1	0	0	0	0	1	2.800	-	-	-	-	2.800	
	RO: The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia	Kajian		1	0	0	0	0	1	30.515	-	-	-	-	30.515	
	RO: Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Kajian		4	0	0	0	0	4	128.196	-	-	-	-	128.196	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Bidang Irigasi dan Rawa	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	6.393	21.112	21.607	22.127	71.238	
	KEGIATAN 7692: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI									5.248.894	7.875.551	25.286.024	24.652.960	24.107.816	87.171.244	Dit. Sungai dan Pantai
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	Ha (Kumulatif)		3.600	6.472	14.298	20.727	27.000	27.000							
	2 Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	Juta m3 (Kumulatif)		0,35	1,04	2,1	3,13	4,3	4,3							
	3 Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	Kawasan (Kumulatif)		0	-	5	5	5	5							
	4 Jumlah dukungan teknis bidang sungai dan pantai	Dokumen		24	27	71	38	31	191							
	KRO: Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO: Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit	Tersebar	5	9	37	34	30	115	131.996	237.020	768.707	682.669	566.200	2.386.592	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi. Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air	Unit	Tersebar	6	2	15	6	6	35	75.000	81.500	413.100	164.000	141.533	875.133	
	RO: Bangunan Pendukung Pengendali Banjir IKN	Unit	IKN	2	0	0	0	0	2	51.559	-	-	-	-	51.559	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi. Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air	Km	Tersebar	25	33	113,08	104,53	138,1	413,71	928.379	1.476.717	4.564.591	3.467.923	4.261.158	14.698.767	
	RO: Prasarana Perlindungan Abrasi Kawasan Pesisir Perkotaan, Strategis Ekonomi, dan Kawasan Berisiko Abrasi Tinggi	km	Tersebar	1	6,3	13,57	13,93	16,05	50,85	360.500	442.000	830.468	640.206	572.620	2.845.794	
	RO: Prasarana Perlindungan Pantai Kawasan 3T	Km	Tersebar	1,1	1,1	1,39	1,38	1,25	6,22	91.533	194.000	250.810	172.000	170.679	879.023	
	RO: Normalisasi sungai	Km	Tersebar	0,15	0	0	0	0	0,15	25.000	-	-	-	-	25.000	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Dokumen Teknis Bidang Sungai dan Pantai	Dokumen	Tersebar	91	27	71	38	31	258	120.145	178.637	95.750	55.200	44.200	493.932	
	RO: Fasilitas Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen	Pusat	0	1	11	3	2	17	-	101.379	491.659	446.687	434.242	1.473.967	
	RO: Unit Desain	Dokumen	Pusat	0	0	1	1	1	3	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000	
	KRO: Dukungan Teknis (Prioritas)															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Engineering Service Project for Multipurpose Dams, Rivers and Coastal	Dokumen	Jawa Barat	1	0	0	0	0	1	6.618	-	-	-	-	6.618	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFREp)	Dokumen	Tersebar	15	0	0	0	0	15	61.672	-	-	-	-	61.672	
	KRO: Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana (Prioritas)															
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis	Unit	Tersebar	0	0	12	10	7	29	-	-	243.219	170.000	107.500	520.719	
	RO: Bangunan Pendukung Pengendali Banjir IKN	Unit	IKN	1	0	2	1	0	4	50.000	-	-	272.000	90.000	412.000	
	RO: Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi	Unit	Tersebar	0	0	2	1	1	4	-	-	25.000	20.000	18.000	63.000	
	RO: Prasarana Pengendali Sedimen Pulau Ternate	Unit	Maluku Utara	0	2	0	0	0	2	-	40.000	-	-	-	40.000	
	RO: Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen (Volcanic DRR)	Unit	Tersebar	0	5	7	6	1	19	-	368.112	844.752	410.000	19.700	1.642.563	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (NUFREp)	Unit	Tersebar	1	4	1	0	0	6	102.211	77.000	63.797	-	-	243.008	
	RO: Prasarana Pengendali Daya Rusak Air pada Kawasan Terpilih (FMSR)	Unit	Tersebar	0	0	1	2	2	5	-	-	20.000	30.000	30.000	80.000	
	RO: Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen (Volcanic DRR Phase II)	Unit	Tersebar	0	0	0	5	10	15	-	-	-	265.000	845.000	1.110.000	
	RO: Pembangunan Groundsill Sungai Cipamingkis (Tahap III)	Unit	Jawa Barat	2	0	0	0	0	2	160.000	-	-	-	-	160.000	
	RO: Groundsill Sungai Srandakan	Unit	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	0	0	0	2	100.000	134.700	-	-	-	234.700	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir di Kabupaten Seram Bagian Barat (Tahap II)	Unit	Maluku	2	0	0	0	0	2	35.000	-	-	-	-	35.000	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)															
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis	Km	Tersebar	0	0,6	2,67	1,75	1,33	6,35	-	85.000	251.796	203.000	120.272	660.067	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air	Km	Jawa Barat	0	0	7,57	3,72	1,08	12,37	-	-	319.886	228.206	215.958	764.050	
	RO: Prasarana Perlindungan Abrasi Kawasan Pesisir Perkotaan, Strategis Ekonomi, 3T, dan Kawasan Berisiko Abrasi Tinggi	Km	Tersebar	0	0	2,03	0,77	0	2,8	-	-	128.000	48.001	-	176.001	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir Mendukung Ketahanan Pangan	Km	Tersebar	0	29,7	2,5	2,5	2,5	37,2	-	848.500	500.000	500.000	500.000	2.348.500	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPp) Papua Selatan	Km	Tersebar	0	70	2086	6300	1380	9.836,00	-	602.870	11.000.000	8.500.000	7.500.000	27.602.870	
	RO: Prasarana Pengendali Banjir Kali Bekasi	Km	Jawa Barat	4	4.23	0	0	0	8.23	405.675	428.159	-	-	-	833.834	
	RO: Prasarana Pengaman Pantai Bali (BBCP)	Km	Bali	1	7,78	0,5	0	0	9,28	178.710	355.535	67.510	-	-	601.756	
	RO: Prasarana Perlindungan Daya Rusak Air di Sulawesi Tengah (IRSL)	Km	Sulawesi Tengah	0,1	0,7	0	0	0	0,8	45.022	17.293	-	-	-	62.315	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (UFCS)	Km	Tersebar	21,4	12,9	0	0	0	34,3	213.229	85.382	-	-	-	298.611	
	RO: Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis (NUFREp)	Km	Tersebar	5	11,2	11,58	0	-	27,78	480.936	786.921	1.043.080	-	-	2.310.938	
	RO: Prasarana Pengendali Daya Rusak Air pada Kawasan Terpilih (FMSR)	Km	Tersebar	0	0	13,4	15,41	17,13	45,9	-	580.000	690.000	875.000	-	2.145.000	
	RO: Prasarana Pengaman Pesisir Terintegrasi (ICP)	Km	Tersebar	0	0	3,01	5,64	4,29	12,94	-	-	390.000	565.000	475.000	1.430.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Tahap IV)	Km	Kepualan Riau	0,3	0,1	0	0	0	0,4	107.000	89.700	-	-	-	196.700	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu	Km	Bengkulu	0,5	0	0	0	0	0,5	100.000	-	-	-	-	100.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai Congot Kabupaten Kulonprogo	Km	Nusa Tenggara Barat	0,1	0	0	0	0	0,1	100.000	-	-	-	-	100.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai di 3 (Tiga) Gili Kabupaten Lombok Utara	Km	Nusa Tenggara Barat	0,9	0	0	0	0	0,9	80.000	-	-	-	-	80.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Suliti (Tahap II)	Km	Sumatera Barat	0,8	0	0	0	0	0,8	43.000	-	-	-	-	43.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Tahap II)	Km	Sumatera Barat	1,2	0	0	0	0	1,2	55.000	-	-	-	-	55.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Lembang (Tahap II)	Km	Sumatera Barat	1	0	0	0	0	1	60.000	-	-	-	-	60.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Kabupaten Dharmasraya (Tahap II)	Km	Sumatera Barat	1,1	0	0	0	0	1,1	65.000	-	-	-	-	65.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kaur (Tahap II)	Km	Bengkulu	0,8	0	0	0	0	0,8	45.000	-	-	-	-	45.000	
	RO: Pembangunan Pengamanan Pantai Bojongsalawe (Tahap IV)	Km	Jawa Barat	1	0	0	0	0	1	92.500	-	-	-	-	92.500	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai AURI Kota Balikpapan	Km	Kalimantan Timur	0,8	0	0	0	0	0,8	50.000	-	-	-	-	50.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kabupaten Minahasa (Tahap II)	Km	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	1	88.000	-	-	-	-	88.000	
	RO: Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Km	Sulawesi Utara	0,64	0	0	0	0	0,64	30.000	-	-	-	-	30.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Bolango (Tahap II)	Km	Gorontalo	1,14	0	0	0	0	1,14	40.000	-	-	-	-	40.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Lumu di Kabupaten Mamuju Tengah	Km	Sulawesi Barat	2	0	0	0	0	2	38.000	-	-	-	-	38.000	
	RO: Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Kalukku Kabupaten Mamuju	Km	Sulawesi Barat	3,3	0	0	0	0	3,3	57.000	-	-	-	-	57.000	
	RO: Prasarana Pengaman Pantai Jakarta	Km	Jakarta	0	0,2	0	0	0	0,2	-	110.300	-	-	-	110.300	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya ketahanan terhadap risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Ha (Kumulatif)		200	1.648	3.334	4.635	5.000	5.000							
	2 Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural di Pesisir Utara Jawa	Kawasan (Kumulatif)		-	5	8	11	11	11							
	KRO: Dukungan Teknis (Prioritas)															
	RO: Flood Management in North Java Project	Dokumen		7	0	0	0	0	7	14.878	-	-	-	-	14.878	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)															
	RO: Prasarana Jaringan Pengendali Risiko Daya Rusak Air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa	Km		0,1	36,58	6,51	10,69	13,62	67,5	56.042	562.938	852.189	5.726.251	6.142.462	13.339.882	
	RO: Prasarana Perlindungan Kawasan Pesisir Utara Jawa dari Daya Rusak Air (FMNJP)	Km		12,9	14,45	32,48	20,54	-	80,37	473.208	567.358	725.932	782.059	-	2.548.557	
	RO: Prasarana Pengendali Daya rusak Air pada Kawasan JABODETABEK (UFMJ)	Km		0	0	0,03	0,03	0,23	0,29	-	-	97.389	97.389	381.154	575.932	
	KRO: Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana (Prioritas)															
	RO: Prasarana Pengendali Risiko Daya Rusak Air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa	Unit	Tersebar	0	0	2	6	7	15	-	-	144.550	134.300	122.000	400.850	
	RO: Prasarana Pengendali Daya rusak Air pada Kawasan JABODETABEK (UFMJ)	Unit	Tersebar	0	0	1	1	1	3	-	-	289.317	552.477	552.477	1.394.270	
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Meningkatnya pembinaan pengelolaan risiko daya rusak air dalam rangka peningkatan ketahanan metropolitan dan wilayah sungai															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kinerja layanan pembinaan sungai dan pantai	%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Layanan teknis dan pembinaan bidang sungai dan pantai	Rekomendasi kebijakan		1	0	0	0	0	1	7.700	-	-	-	-	7.700	
	RO: Flood Management in North Java Project	Kajian		1	0	0	0	0	1	3.000	-	-	-	-	3.000	
	RO: Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II	Kajian		1	0	0	0	0	1	14.882	-	-	-	-	14.882	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian		1	0	0	0	0	1	5.500	-	-	-	-	5.500	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Bidang Sungai dan Pantai	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	4.530	7.523	7.591	7.660	27.305	
KEGIATAN 7693: PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BENDUNGAN PENAMPUNG AIR LAINNYA																
	Sasaran Kegiatan 1:									11.546.999	2.661.757	8.272.973	7.658.932	9.870.585	40.011.246	Dit. Bendungan dan Danau
	Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Unit (Kumulatif)		1	1	4	7	16	16							
	2 Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Unit (Kumulatif)		10	19	21	23	25	25							
	3 Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Unit (Kumulatif)		20	20	30	42	50	50							
	4 Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	%		38,00%	38,00%	40,00%	42,00%	47,00%	47,00%							
	5 Jumlah dukungan teknis bidang bendungan dan danau	Dokumen		18	2	11	7	9	47							
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi															
	RO: Bendungan untuk Swasembada Air, Pangan, dan Energi	Unit	Tersebar	13	9	2	2	2	28	32.524	419.005	150.000	200.000	40.000	841.528	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan bendungan	Unit	Tersebar	7	0	0	0	0	7	217.950	-	-	-	-	217.950	
	RO: Danau, Situ, dan Tampungan Air Alami	Unit	Tersebar	24	0	10	12	8	54	644.360	-	261.000	418.000	372.000	1.695.360	
	RO: Prasarana pendukung bendungan	Unit	Tersebar	13	0	0	0	0	13	414.593	-	-	-	-	414.593	
	RO: Bendungan Riam Kiwa	Unit	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	18.280	3.000	361.497	529.997	661.610	1.574.383	
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)															
	RO: Bendungan Cibeet	Unit	Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	742.260	42.500	1.007.289	1.470.621	1.813.269	5.075.939	
	RO: Bendungan Cijurey	Unit	Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	571.506	42.500	827.872	633.249	779.893	2.855.020	
	RO: Bendungan Kedunglanggar	Unit	Jawa Tengah	1	0	0	0	1	1	136.721	-	-	-	-	136.721	
	RO: Bendungan Mbay	Unit	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	0	0	1	372.890	119.483	10.992	-	-	503.365	
	RO: Bendungan Jenelata	Unit	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	0	1	727.664	532.677	970.059	758.723	-	2.989.123	
	RO: Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Unit	Aceh	1	1	1	1	0	1	216.455	42.500	262.995	112.695	-	634.645	
	RO: Bendungan Lau Simeme	Unit	Sumatera Utara	0	1	0	0	0	1	-	33.054	-	-	-	33.054	
	RO: Bendungan Tiga Dihaji	Unit	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	1.969.355	42.500	594.650	419.991	1.090.498	4.116.995	
	RO: Bendungan Jragung	Unit	Jawa Tengah	1	1	0	0	0	1	399.287	389.453	-	-	-	788.740	
	RO: Bendungan Bener	Unit	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1.281.486	42.500	618.595	633.189	826.717	3.402.488	
	RO: Bendungan Bagong	Unit	Jawa Timur	1	1	1	1	1	1	679.618	42.500	180.490	157.826	62.491	1.122.926	
	RO: Bendungan Manikin	Unit	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1	1	915.330	73.500	148.688	137.050	29.159	1.303.727	
	RO: Bendungan Bulango Ulu	Unit	Gorontalo	1	1	1	0	0	1	119.700	186.647	223.568	-	-	529.916	
	RO: Bendungan Budong-Budong	Unit	Sulawesi Barat	1	1	1	1	0	1	447.634	42.500	94.216	58.452	-	642.802	
	RO: Bendungan Way Apu	Unit	Maluku	1	1	1	0	0	1	532.683	268.557	189.871	-	-	991.111	
	RO: Bendungan Cabean	Unit	Jawa tengah	1	1	1	1	0	1	199.017	42.500	177.029	75.709	-	494.256	
	RO: Bendungan Karangnongko	Unit	Jawa Tengah	0	1	1	1	1	1	492.503	42.500	287.229	137.497	69.500	1.029.229	
	RO: Bendungan Karian	Unit	Banten	0	1	0	0	0	1	11.416	213.797	-	-	-	225.213	
	RO: Bendungan Pelosika	Unit	Sulawesi Tenggara	1	0	1	1	1	1	100	-	1.812.730	1.812.730	4.024.747	7.650.307	
	RO: Revitalisasi Situ Konservasi di Bayangkara Park Polda Bangka Belitung	Unit	Kepulauan Bangka Belitung	1	0	0	0	0	1	30.000	-	-	-	-	30.000	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Dokumen Teknis Bidang Bendungan dan Danau	Dokumen	Tersebar	84	2	14	11	9	120	323.345	27.397	68.600	77.600	75.100	572.042	
	RO: Kajian inovasi potensi tampungan air	Dokumen		5	0	0	0	0	5	16.000	-	-	-	-	16.000	
	RO: Unit Desain	Dokumen	Tersebar	0	0	0	0	0	0	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya pembinaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan sumber air dalam rangka kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kinerja layanan pembinaan bendungan dan danau	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Layanan teknis dan pembinaan bidang bendungan dan danau	rekomendasi		17	0	0	0	0	17	9.490	-	-	-	-	9.490	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Bidang Bendungan dan Danau	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	5.315	7.470	7.470	7.470	27.725	
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Meningkatnya layanan teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan sumber air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat layanan teknis Balai Teknik Bendungan	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai Teknik Bendungan	Indeks		80	82	84	86	88	88							
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Layanan teknis bidang bendungan	Dokumen		3	0	0	0	0	3	24.832	-	-	-	-	24.832	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Bidang Bendungan	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	7.370	13.132	13.132	13.132	46.766	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
KEGIATAN 7694: PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU										1.491.668	2.786.518	13.197.177	8.412.921	8.739.674	34.627.958	Dit. Air Tanah dan Air Baku
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	Unit (Kumulatif)		13	26	103	161	226	226							
	2 Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang direhabilitasi	Unit (Kumulatif)		6	11	44	71	107	107							
	3 Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	m3/detik (Kumulatif)		0,37	0,57	6,88	15,96	19,12	19,12							
	4 Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m3/detik (Kumulatif)		0,84	1,13	2,56	3,24	5,53	5,53							
	5 Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	%		35%	35%	38%	43%	45%	45%							
	6 Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	m3/detik (Kumulatif)		0,1	0,1	4,42	8,75	13,38	13							
	7 Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang direhabilitasi	m3/detik (Kumulatif)		0,04	0,04	8,67	17,3	26,44	26							
	8 Jumlah dukungan teknis bidang air tanah dan air baku	Dokumen		30	8	59	48	18	163							
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi															
	RO: Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis	Unit	Tersebar	15	13	68	57	72	225	147.100	181.000	1.371.927	1.010.709	1.518.083	4.228.819	
	RO: Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan Sulit Air. Bencana Kekeringan dan Terencil (3T)	Unit	Tersebar	11	5	17	10	16	59	133.400	88.500	387.056	140.850	167.550	917.356	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan embung dan tampungan air lainnya pada kawasan metropolitan, kawasan perkotaan dan kawasan strategis	Unit	Tersebar	3	0	0	0	0	3	31.000	-	-	-	-	31.000	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan embung dan tampungan air lainnya pada kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan terencil (3T)	Unit	Tersebar	2	0	0	0	0	2	6.200	-	-	-	-	6.200	
	RO: Sumur Air Tanah pada Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis	Unit	Tersebar	55	20	322	258	562	1.217	85.500	27.000	313.711	256.416	602.666	1.285.293	
	RO: Sumur Air Tanah pada Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Terencil (3T)	Unit	Tersebar	23	19	113	110	103	368	36.750	26.250	112.910	124.290	179.900	480.100	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan sumur air tanah pada kawasan metropolitan kawasan perkotaan, dan kawasan strategis	Unit	Tersebar	6	0	0	0	0	6	4.750	-	-	-	-	4.750	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan sumur air tanah pada kawasan sulit air, bencana kekeringan dan kawasan terencil (3T)	Unit	Tersebar	22	0	0	0	0	22	10.250	-	-	-	-	10.250	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Dukungan Teknis Bidang Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Tersebar	74	8	59	48	18	207	48.125	27.770	154.975	128.375	75.500	434.745	
	RO: Kajian potensi infrastruktur penyediaan air baku di wilayah sungai	Dokumen	Tersebar	6	0	0	0	0	6	8.450	-	-	-	-	8.450	
	RO: Fasilitas Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen	Pusat	0	0	1	1	1	3	-	-	10.000	10.000	10.000	30.000	
	RO: Unit Desain	Dokumen	Pusat	0	0	1	1	1	3	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO: Prasarana Air Baku Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis	km	Tersebar	42	87	381,26	240,3	108,09	858,65	170.406	728.073	3.326.666	1.546.864	1.347.057	7.119.065	
	RO: Prasarana Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terencil (3T)	km	Tersebar	2	0	75	1	15,46	93,46	39.000	-	251.000	3.500	121.700	415.200	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan prasarana air baku kawasan metropolitan, kawasan strategis, dan kawasan perkotaan	Km	Tersebar	13	0	0	0	0	13	138.500	-	-	-	-	138.500	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan prasarana air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan dan terencil (3T)	Km	Tersebar	3	0	0	0	0	3	35.750	-	-	-	-	35.750	
	RO: JIAT untuk Mendukung Swasembada Pangan	Km	Tersebar	1	0	840,12	840,12	840,12	2.521,36	1.500	-	1.265.626	1.252.780	1.252.780	3.772.687	
	RO: JIAT untuk Mendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km	Tersebar	0	0	22,09	22,09	122,09	166,27	-	-	39.386	39.386	236.720	315.492	
	RO: Rehabilitasi/peningkatan JIAT Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km	Tersebar	6	0	0	0	0	6	10.250	-	-	-	-	10.250	
	KRO: Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)															
	RO: Embung dan Tampungan Air Lainnya pada Kawasan IKN	Unit	IKN	8	0	3	4	0	15	55.000	-	200.000	194.000	-	449.000	
	RO: Prasarana Air Baku Mendukung Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Unit	Tersebar	0	0	5	5	5	15	-	500.000	100.000	100.000	100.000	800.000	
	RO: Prasarana Penyediaan Air Baku Kawasan Pedesaan dan Pulau-Pulau Kecil	Unit	Tersebar	0	0	135	68	83	286	-	-	484.786	344.525	406.133	1.235.444	
	RO: Prasarana Air Baku Bendung Gerak Sembayat	Unit	Jawa Timur	0	1	0	0	0	1	-	40.000	-	-	-	40.000	
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)															
	RO: Prasarana Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan	Km	Tersebar	0	0,1	114,24	60,43	60,6	235,37	-	3.000	1.104.319	986.700	639.607	2.733.626	
	RO: Prasarana Air Baku IKN	Km	IKN	0	0	2	8,5	0	10,5	-	10.597	100.000	119.403	-	230.000	
	RO: Prasarana Air Baku di Kawasan Sentra Produksi Pangan	Km	Tersebar	0	0	10	22	0	32	-	-	15.000	25.000	-	40.000	
	RO: Prasarana Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis	Km	Tersebar	0	0	16,5	0,08	0	16,58	-	-	42.600	4.940	-	47.540	
	RO: Jaringan Irigasi Air Tanah Mendukung Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Km	Tersebar	0	200	200	200	200	800	-	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	
	RO: Prasarana Air Tanah untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan (GRASS)	Km	Tersebar	0	0	237,35	237,35	237,35	712,05	-	-	412.465	412.465	412.465	1.237.396	
	RO: Prasarana Penyediaan Air Baku mendukung SPAM	Km	Tersebar	0	0	18,38	10,96	6,65	35,99	-	-	651.892	601.001	470.000	1.722.893	
	RO: Prasarana Penyediaan Air Baku Kawasan Pedesaan dan Pulau-Pulau Kecil	Km	Tersebar	0	0	1	0	0	1	-	-	100.000	-	-	100.000	
	RO: Pembangunan prasarana air baku Kotawaringin Barat	Km	Kalimantan Tengah	16,5	0	0	0	0	16,5	45.500	-	-	-	-	45.500	
	RO: Prasarana Air Baku Kertasari	Km	Jawa Barat	0	2	0	0	0	2	-	100.000	-	-	-	100.000	
	RO: Prasarana Air Baku Das Kawal	Km	Kepulauan Riau	0	2,5	0	0	0	2,5	-	40.000	-	-	-	40.000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m3/detik (Kumulatif)		0,7	1	7,73	8,34	8,82	8,82							
	KRO: Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)															
	RO: Prasarana Penyediaan Air Baku di Perkotaan Pesisir Utara Jawa	Km	Tersebar	0	0	6,4	4	9,15	19,55	-	-	236.000	140.703	228.500	605.203	
	RO: Prasarana Air Baku Karian Serpong (KSCS)	Km	Banten, Jakarta	5	5	22	12	1	45	366.287	509.930	1.999.178	453.333	453.333	3.782.061	
	RO: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong	Km	Banten, Jakarta	1	0	0	0	0	1	54.250	-	-	-	-	54.250	
	RO: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Lobener Kabupaten Indramayu	Km	Jawa Barat	7	0	0	0	0	7	56.000	-	-	-	-	56.000	
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Meningkatnya pembinaan layanan air baku dan air tanah dalam rangka peningkatan pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kinerja layanan pembinaan air tanah dan air baku	%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Layanan teknis dan pembinaan bidang air tanah dan air baku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	7.700	-	-	-	-	7.700	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Bidang Air Tanah dan Air Baku	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	4.398	12.680	12.680	12.680	42.438	
	KEGIATAN 7695: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA									7.142.589	6.632.167	12.966.715	13.494.212	14.228.529	54.464.212	Dit. Bina OP
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Terjaganya layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	Unit (Kumulatif)		1.563	1.563	3.886	4.022	4.213	4.213							
	2 Jumlah unit pengelola yang dibentuk/dioperasikan	Unit (Kumulatif)		109	109	109	109	109	109							
	3 Jumlah sempadan yang ditetapkan	Unit		21	15	35	35	40	40							
	4 Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m3/detik (Kumulatif)		78,78	78,78	86,29	90,04	93,79	93,8							
	5 Luas layanan irigasi yang dikelola	Ha (Kumulatif)		3.142.532	3.152.532	3.171.532	3.199.532	3.229.532	3229532							
	6 Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	Orang Kerja		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000							
	7 Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Miliar m3		55,4	52,64	50,01	47,5	45,13	45,1							
	8 Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Unit (Kumulatif)		549	553	593	645	697	697							
	9 Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	Km (Kumulatif)		1.784	1.784	1.935	2.075	2.222	2222,3							
	10 Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai		925	925	925	925	925	925							
	11 Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana	Jumlah Layanan		38	38	38	38	38	38							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Program padat karya irigasi	Rekomendasi Kebijakan		13	0	0	0	0	13	9.884	-	-	-	-	9.884	
	KRO: Operasi Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO: Operasi Monitoring Bencana	Operasi	Tersebar	56	39	77	77	77	77	85.363	31.625	25.426	26.698	28.280	197.392	
	RO: Operasi Tanggap Darurat Bencana UPT	Operasi	Tersebar	40	38	38	38	38	38	47.407	51.769	212.058	222.661	235.857	769.751	
	KRO: Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam															
	RO: Operasi Unit Pengelola Infrastruktur Sumber Daya Air	Operasi	Tersebar	65	54	109	109	109	109	37.525	53.450	181.779	190.867	202.179	665.800	
	RO: Unit pengelola irigasi	Operasi	Tersebar	40	0	0	0	0	40	23.008	-	-	-	-	23.008	
	RO: Operasi Pemantauan Reduksi Banjir dari Waduk	Operasi	Tersebar	11	0	0	0	0	11	5.003	-	-	-	-	5.003	
	KRO: OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Berat	Unit	Tersebar	843	811	2.166	2.166	2.166	2.166	213.473	168.472	241.675	253.759	268.798	1.146.177	
	KRO: OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi															
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Unit	Tersebar	186	186	227	231	234	234	323.104	339.757	666.709	710.732	758.514	2.798.816	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Mata Air	Unit	Tersebar	1.139	1.066	3.054	3.186	3.374	3.374	295.620	241.004	755.473	793.246	840.258	2.925.600	
	RO: Layanan Pemeliharaan Danau	Unit	Tersebar	74	65	225	225	225	225	103.686	77.015	772.959	811.607	859.707	2.624.974	
	RO: Layanan Pemeliharaan Situ	Unit	Tersebar	246	246	380	380	380	380	106.156	65.388	128.331	134.748	142.734	577.357	
	RO: Layanan Pemeliharaan Sungai	Unit	Tersebar	889	428	925	925	925	925	525.384	362.274	1.542.022	1.619.123	1.715.080	5.763.883	
	RO: Layanan Penetapan Sempadan	Unit	Tersebar	86	15	35	35	40	40	25.149	60.414	17.181	18.230	19.311	140.285	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Unit	Tersebar	514	575	589	678	715	715	125.061	122.973	234.970	246.718	261.340	991.063	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Tersebar	369	165	396	666	769	769	50.645	28.901	72.140	75.747	80.237	307.670	
	RO: Sempadan situ	Unit	Tersebar	3	0	0	0	0	3	12.287	-	-	-	-	12.287	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IKN	Unit	Tersebar	4	1	0	0	0	0	12.193	10.103	-	-	-	22.296	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Unit	Tersebar	550	561	1.244	1.247	1.253	1.253	296.964	260.789	825.687	866.971	918.352	3.168.764	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sumur JIAT	Unit	Tersebar	2331	1474	1265	1566	1897	1.897	118.914	102.071	174.950	183.698	194.585	774.219	
	RO: Citarum Harum	Unit	Jawa Barat	0	0	1	1	1	1	-	-	169.776	178.284	188.952	537.012	
	KRO: OP Prasarana Penanggulangan Bencana															
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit	Tersebar	526	445	486	512	538	538	60.077	55.611	110.381	115.895	122.746	464.710	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Unit	Tersebar	186	141	107	133	159	159	135.196	187.935	107.441	112.813	119.499	662.885	
	KRO: OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Km	Tersebar	41.083	11.430,00	46.137,79	46.488,32	46.882,41	46.882,41	4.115.098	1.334.615	1.985.634	2.084.916	2.208.478	11.728.741	
	RO: Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Km	Tersebar	866	1.400,00	1.752,10	1.856,10	1.959,33	1.959,33	186.864	277.762	349.825	367.317	389.086	1.570.854	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR				TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO:	Layanan Pemeliharaan Prasarana Pengaman Pantai	Km	Tersebar	330	100,9	182,9	218,9	262,67	262,67	89.718	83.321	186.360	195.678	207.275	762.353	
	RO:	Citarum Harum	Km	Jawa Barat	297	0	0	0	0	297	131.105	-	-	-	-	131.105	
	RO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Km	Tersebar	31	46	147	147	147	147	11.466	2.387	19.685	20.670	21.895	76.103	
	RO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana JIAT	Km	Tersebar	54	54	817,65	1013,27	1236,89	1.236,89	3.280	4.422	38.851	40.793	43.211	130.556	
	RO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi Tersier dan Kuarter	Km	Tersebar	0	0	250	250	250	250	-	-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000	
	RO:	Flood Management in North Java Project	Km	Tersebar	1	0	0	0	0	1	1.108	-	-	-	-	1.108	
	RO:	National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Km	Tersebar	2	0	0	0	0	2	2.350	-	-	-	-	2.350	
	KRO:	Dukungan Teknis															
	RO:	Dokumen Perhitungan Pasokan Air untuk Irigasi	Dokumen	Tersebar	1	0	0	0	0	1	300	-	-	-	-	300	
	RO:	Dokumen Teknis Bidang OP	Dokumen	Tersebar	0	11	10	10	5	36	-	10.109	68.552	250	223	79.135	
	KRO:	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi (Prioritas)															
	RO:	Prasarana Irigasi Melalui Padat Karya	Unit	Tersebar	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000	-	2.700.000	2.891.700	3.036.285	3.216.230	11.844.215	
KEGIATAN 7686: PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO																	
	Sasaran Kegiatan 1:																
	Meningkatnya ketahanan wilayah area yang terdampak lumpur Sidoarjo																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	1	Jumlah volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Juta m3 slurry		21	16	24	24	24	24							
	2	Panjang infrastruktur pengendalian lumpur Sidoarjo yang dibangun/ditingkatkan	Km (Kumulatif)		1	2	6,7	11,5	16,7	16,7							
	3	Panjang jaringan infrastruktur pengendali dampak semburan yang dibangun/ditingkatkan	Km (Kumulatif)		0	0	5,8	10,15	14,65	14,65							
	4	Panjang jaringan infrastruktur pengendali dampak semburan yang dioperasi dan dipelihara	Km		11,3	-	29	29	29	29							
	5	Luas kawasan sekitar tampungan lumpur Sidoarjo yang ditata, dimanfaatkan, dan/atau dikelola	Ha (Kumulatif)		1	2	14	19	24,3	24,3							
	6	Jumlah dukungan teknis bidang pengelolaan lumpur Sidoarjo	Dokumen		3	2	16	14	14	49							
	KRO:	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO:	Prasarana Kawasan Sekitar Tampungan Lumpur Sidoarjo	Unit	Jawa Timur	10	1	1	1	1	14	29.600	4.435	25.200	12.320	14.278	85.833	
	KRO:	Dukungan Teknis															
	RO:	Dokumen Teknis Bidang Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Dokumen	Jawa Timur	10	2	16	14	14	56	14.715	13.195	31.512	27.683	30.401	117.505	
	KRO:	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO:	Tanggul Penahan Lumpur Sidoarjo	Km	Jawa Timur	1	1	4,7	4,8	5,2	16,7	29.400	23.000	86.542	143.481	183.160	465.583	
	RO:	Jaringan Infrastruktur Pengendali Lumpur Sidoarjo	Km	Jawa Timur	0	0	5,8	4,35	4,5	14,65	-	-	50.545.000	35.134.246	44.732.803	130.412.048	
	KRO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Penanggulangan Bencana															
	RO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo	Unit	Jawa Timur	1	1	1	1	1	1	181.500	126.117	206.561	216.889	227.734	958.801	
	KRO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Sumber Daya Air															
	RO:	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo	Km	Jawa Timur	1	0	29	29	29	29	13.200	-	30.928	34.040	37.464	115.632	
	Sasaran Kegiatan 2:																
	Meningkatnya pembinaan untuk peningkatan ketahanan wilayah area yang terdampak lumpur Sidoarjo																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	1	Tingkat kinerja layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	KRO:	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO:	Layanan teknis dan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	Rekomendasi Kebijakan		1	0	0	0	0	1	1.775	-	-	-	-	1.775	
	KRO:	Pelayanan Publik Lainnya															
	RO:	Layanan Pelaksanaan Teknis Bidang Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Layanan	Jawa Timur	0	1	1	1	1	4	-	715	4.163	4.559	4.995	14.432	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	Sasaran Program 2:															
	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi															
	Indikator Kinerja Program:															
	1 Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat	(%)		85,88	87,94	93,13	94,88	96	96							
	2 Tingkat layanan administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional	(%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	3 Tingkat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	(%)		87,54	88	88,78	89,11	90,04	90,04							
	4 Tingkat keselarasan perencanaan dan pemrograman Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)		70	70	70	75	75	75							
	5 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)		80,72	80,74	80,76	80,78	80,8	80,8							
	6 Tingkat layanan teknis sumber daya air	(%)		92,85	93,43	94,05	94,63	95,25	95,25	-						
	7 Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)		36,43	45	55	65	75	75							
	8 Tingkat nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)		89,5	90	90,5	91	91,5	91,5							
KEGIATAN 7691: PENGEMBANGAN JAKINGAN IRIGASI PERMUKAAAN, KAWA, DAN NON-PADI										35	45	55	55	55	245	Dit. Irigasi dan Kawa
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan irigasi dan rawa															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		84,58	85,08	85,58	86,08	86,58	86,6							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		65,17	65,19	65,21	65,23	65,25	65,3							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		40	50	60	70	75	75							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Irigasi dan Rawa	Dokumen	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	45	55	55	55	210	
KEGIATAN 7692: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI										35	35	411	430	449	1.361	Dit. Sungai dan Pantai
	Sasaran Kegiatan 4:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang sungai dan pantai															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		85,05	85,55	86,05	86,55	87,05	87,05							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		70,02	70,04	70,06	70,08	70,1	70,1							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		50	60	70	75	80	80							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi kebijakan		2	0	0	0	0	2	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Bidang Sungai dan Pantai	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	35	411	430	449	1.326	
KEGIATAN 7693: PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BENDUNGAN PENAMPUNG AIR LAINNYA										35	35	55	55	55	235	Dit. Bendungan dan Danau
	Sasaran Kegiatan 4:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang bendungan dan danau															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		89,98	90,48	90,98	91,48	91,98	91,98							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		76,72	76,74	76,76	76,78	76,8	76,8							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		30	40	50	60	70	70							
	5 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Teknik	Nilai		95,32	95,82	96,32	96,82	97,32	97,32							
	6 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Balai Teknik	Nilai		61,22	61,24	61,26	61,28	61,3	61,3							
	7 Tingkat implementasi transformasi digital Balai Teknik	Nilai		70	75	80	85	85	85							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		2	0	0	0	0	2	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Bidang Bendungan dan Danau	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	35	55	55	55	200	
KEGIATAN 7694: PENGEMBANGAN JARINGAN AIR TANAH DAN AIR BAKU										35	20	55	55	55	220	Dit. Air Tanah dan Air Baku
	Sasaran Kegiatan 4:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang air tanah dan air baku															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		83,35	83,85	84,35	84,85	85,35	85,35							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		70,22	70,24	70,26	70,28	70,3	70,3							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		35	45	55	65	75	75							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Bidang Air Tanah dan Air Baku	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	20	55	55	55	185	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
KEGIATAN 7686: PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO										35	1.750	392	410	430	3.016	PPLS
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		89,89	90,39	90,89	91,39	91,89	91,89							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		77,82	77,84	77,86	77,88	77,9	77,9							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		50	60	70	75	80	80							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Bidang Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	1.750	392	410	430	2.981	
KEGIATAN 7695: OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA										782.416	663.993	1.558.586	1.634.133	1.727.954	6.367.082	Dit. Bina OP
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya pembinaan, layanan perizinan, dan tata kelola operasi dan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kinerja layanan pembinaan operasi dan pemeliharaan	%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%							
	2 Tingkat kinerja layanan pembinaan tata kelola operasi dan pemeliharaan	%		56,95%	61,07%	67,83%	75,64%	82,45%	3							
	3 Jumlah usulan perizinan yang diproses	Dokumen		500	550	605	665	732	3052							
	4 Jumlah fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana	Kegiatan		1	1	1	1	1	5							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Layanan teknis dan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	20	0	0	0	0	20	100.332	-	-	-	-	100.332	
	RO: Kelembagaan bidang irigasi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	25	0	0	0	0	25	12.213	-	-	-	-	12.213	
	RO: Jumlah usulan perizinan yang diproses	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	10	0	0	0	0	10	3.702	-	-	-	-	3.702	
	RO: Flood Management in North Java Project	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	561	-	-	-	-	561	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	24.890	-	-	-	-	24.890	
	KRO: Operasi Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO: Operasi Tanggap Darurat Bencana	Operasi	Pusat	22	1	1	1	1	26	319.226	248.699	535.500	562.275	595.598	2.261.297	
	RO: Operasi Penyediaan Bahan Persediaan Bencana	Operasi	Tersebar	1	1	1	1	1	5	50.000	50.000	53.550	56.228	59.560	269.337	
	RO: Operasi Modifikasi Cuaca	Operasi	Tersebar	0	0	1	1	1	3	-	-	74.970	78.719	83.384	237.072	
	KRO: Sarana Bidang Penanggulangan Bencana															
	RO: Alat Berat Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air	Unit	Pusat	25	49	1	1	1	77	50.000	102.300	85.680	89.964	95.296	423.240	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	1	-	1.784	3.213	3.374	3.574	11.944	
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Layanan		0	30	8	8	8	8	-	100.454	200.305	210.321	222.785	733.865	
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	Rekomendasi		400	440	484	532	585	585							
	2 Jumlah dokumen perhitungan indeks river basin organization performance benchmarking	Dokumen		38	38	38	38	38	38							
	3 Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi	Kelompok Masyarakat		1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1107							
	4 Jumlah wadah koordinasi pengelolaan sda wilayah sungai kewenangan pusat yang difasilitasi	Wadah koordinasi		64	64	64	64	64	64							
	5 Jumlah dokumen alokasi air yang disusun	Dokumen		64	64	64	64	64	64							
	KRO: Koordinasi															
	RO: Koordinasi TKPSDA WS Kewenangan Pusat dan Lembaga Lainnya	Kegiatan	Tersebar	106	33	64	64	64	64	113.094	73.652	433.465	453.776	478.673	1.552.660	
	RO: Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Kegiatan		25	0	0	0	0	25	7.069	-	-	-	-	7.069	
	KRO: Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat															
	RO: Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai	Kelompok Masyarakat	Tersebar	310	5	1045	1045	1045	1.045	22.483	600	24.889	26.134	27.682	101.789	
	RO: Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Tampung Air	Kelompok Masyarakat	Tersebar	3	0	62	62	62	62	438	-	3.213	3.374	3.574	10.598	
	RO: Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	Kelompok Masyarakat	Tersebar	50	0	38	38	38	38	10.802	-	12.852	13.495	14.294	51.443	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan	Dokumen	Tersebar	29	35	484	532	585	585	19.481	23.331	11.031	11.583	12.269	77.696	
	RO: Dokumen RBO Benchmarking	Dokumen	Tersebar	25	38	38	38	38	38	5.781	7.408	8.943	9.390	9.947	41.468	
	RO: Dokumen Alokasi air	Dokumen	Tersebar	31	47	64	64	64	64	24.448	29.452	69.615	73.096	77.428	274.038	
	RO: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dokumen	Tersebar	33	0	0	0	0	33	6.881	-	-	-	-	6.881	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Layanan	Tersebar	0	35	39	39	39	39	-	7.417	7.946	8.343	8.838	32.545	
	RO: Layanan Pemantauan Sumber Daya Air	Layanan	Tersebar	0	37	39	39	39	39	-	18.861	20.400	20.400	20.580	80.241	
	Sasaran Kegiatan 4:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		84,41	85,41	85,91	86,41	86,41	86,41							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		76,32	76,34	76,36	76,38	76,4	76,4							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		35	45	55	65	75	75							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	4	0	0	0	0	4	213	-	-	-	-	213	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	35	161	169	179	543	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
KEGIATAN 7687: LAYANAN KESEKRETARIATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSDAN)										12.124	7.679	25.309	27.840	30.624	103.575	Sekretariat DSDAN
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN)															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Jumlah layanan administrasi dan teknis operasional DSDAN	Layanan		5	5	5	5	5	25							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi terhadap Kebijakan Pengelolaan SDA Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	4	5	5	5	5	25	12.089	7.619	25.229	27.752	30.527	103.215	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Mentransformasi tata kelola Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		88,56	89,06	89,56	90,06	90,56	90,56							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		76,82	76,84	76,86	76,88	76,9	76,9							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		30	40	50	60	70	70							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	0	0	0	0	1	35	-	-	-	-	35	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Pendukung Kegiatan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	60	80	88	97	325	
KEGIATAN 7688: PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI										3.973.176	1.612.503	5.227.734	4.852.437	2.807.144	18.472.994	Dit. SSPSDA
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat fasilitasi program pengelolaan SDA jangka panjang	%		66%	68%	70%	72%	74%	74,38%							
	2 Jumlah dokumen pola dan rencana yang ditetapkan/direvisi	Dokumen		7	7	9	7	7	7							
	3 Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	%		38%	42%	48%	52%	55%	55,00%							
	4 Tingkat pembinaan dan penyalarsan perencanaan, pemrograman, penganggaran bidang sumber daya Air	%		80,09%	82,61%	82,61%	83,23%	84,18%	84,18%							
	5 Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif bidang sumber daya air	%		81,33%	81,33%	82,33%	89,00%	90,00%	90,00%							
	6 Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%		65,52%	65,52%	67,52%	67,52%	69,92%	69,92%							
	7 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		78,36	78,86	79,36	79,86	80,36	80,36							
	8 Tingkat pembinaan pemantauan dan evaluasi	%		85,31%	88,09%	89,94%	91,80%	93,65%	93,65%							
	9 Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di Direktorat Jenderal SDA	%		65,00%	67,50%	70,00%	72,50%	75,00%	75,00%							
	10 Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	%		25,00%	25,00%	50,00%	75,00%	75,00%	75,00%							
	11 Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/ BWS	%		87,57%	87,57%	90,69%	93,82%	93,82%	93,82%							
	12 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		79,82	79,84	79,86	79,88	79,9	79,9							
	13 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	14 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		60	70	75	80	85	85							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat	Rekomendasi kebijakan	Pusat	3	1	1	1	1	7	3.530	1.800	4.271	4.698	5.168	19.468	
	RO: Layanan administrasi dan pembinaan rencana, program, dan anggaran	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	3	0	0	0	0	3	3.191	-	-	-	-	3.191	
	RO: Flood Management in North Java Project	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	10.866	-	-	-	-	10.866	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	10.629	-	-	-	-	10.629	
	RO: Layanan administrasi dan pembinaan pelaksanaan SBSN dan kerja sama luar negeri	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	2.000	-	-	-	-	2.000	
	RO: Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Kajian	Pusat	1	0	0	0	0	1	10.897	-	-	-	-	10.897	
	RO: Layanan administrasi dan pembinaan pemantauan dan evaluasi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	2.470	-	-	-	-	2.470	
	RO: Dokumen pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1						1.060					1.060	
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	35	-	-	-	-	35	
	RO: Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	Rekomendasi kebijakan	Pusat	0	7	9	7	7	30	-	32.075	33.451	33.325	36.351	135.202	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen	Tersebar	0	2	2	2	2	8	-	19.324	24.200	26.620	29.282	99.426	
	RO: Dokumen Pelaksanaan Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya	Dokumen	Tersebar	0	114	114	114	114	456	-	10.500	64.870	67.022	75.515	217.907	
	KRO: Perencanaan dan Penganggaran															
	RO: Dokumen penyusunan/ revisi/reviu pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat	Rekomendasi kebijakan	Tersebar	13	0	0	0	0	13	19.750	-	-	-	-	19.750	
	RO: Dokumen pemantauan dan evaluasi pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat	Rekomendasi kebijakan	Tersebar	30	0	0	0	0	30	12.325	-	-	-	-	12.325	
	RO: Dokumen program dan anggaran		Tersebar	44	0	0	0	0		7.925	-	-	-	-	7.925	
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja, UPT, dan Satuan Kerja	Laporan	Tersebar	50	0	0	0	0	50	11.400	-	-	-	-	11.400	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	4.638	9.930	10.920	12.009	37.497	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya layanan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat layanan pembinaan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	%		77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							
	2 Jumlah luas pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	Ha		1.750,00	385	1.567,00	1.580,00	1.359,00	6.641,00							
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Bidang Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	381	39	39	39	39	537	3.877.099	1.544.167	5.091.012	4.709.852	2.648.819	17.870.947	
KEGIATAN 7689: KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR										25.834	15.211	56.733	62.406	68.647	228.831	Dit. Kepatuhan Intern
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya maturitas kepatuhan intern															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%		76,55	77,97	80,38	81,39	84	84							
	2 Tingkat Pengendalian Kepatuhan Intern	%		96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25							
	3 Tingkat Pemantauan Kepatuhan Intern	%		86,92	87,02	87,22	87,32	87,8	87,8							
	4 Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%		83,75	84,26	85,32	88,13	89,19	89,19							
	5 Tingkat Kepatuhan Intern Satuan Kerja	%		77,5	77,9	78,3	80,2	80,6	80,6							
	6 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		87,19	87,19	88,44	90,44	91,69	91,69							
	7 Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Nilai		96,23	96,73	97,23	97,73	98,23	98,23							
	8 Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		75,12	75,14	75,16	75,18	75,2	75,2							
	9 Tingkat Implementasi Transformasi Digital Unit Kerja	Nilai		50	60	70	75	80	80							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi kebijakan pembinaan kepatuhan intern	Rekomendasi Kebijakan		4	0	0	0	0	4	120	-	-	-	-	120	
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		226	0	0	0	0	226	25.714	-	-	-	-	25.714	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Layanan	Tersebar	0	202	202	202	202	808	-	2.790	30.150	33.165	36.482	102.587	
	RO: Zona Integritas	Layanan	Tersebar	0	47	47	47	47	188	-	1.952	13.876	15.263	16.790	47.881	
	RO: Layanan Pembinaan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Layanan	Tersebar	0	6	6	6	6	24	-	10.469	12.707	13.978	15.375	52.529	
KEGIATAN 7690: LAYANAN TEKNIS SDA										404.643	290.795	596.889	629.515	590.468	2.512.311	Dit. Bina Teknik
	Sasaran Kegiatan 1:															
	Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	%		70,96%	82,50%	85,00%	85,00%	87,50%	87,50%							
	2 Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Wilayah sungai		19	23	24	25	26	26							
	3 Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (KIA-WS)	Dokumen		64	0	0	64	0	128							
	4 Tingkat kesiapan teknis	%		85,00%	87,50%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%							
	5 Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Dokumen		64	64	64	64	64	320							
	KRO: Data dan Informasi Publik															
	RO: Sistem Informasi SDA	Dokumen	Tersebar	56	38	38	38	38	38	34.097	22.900	23.473	25.476	27.180	133.126	
	RO: Sistem Informasi Hidrologi dan Kualitas Air	Dokumen	Tersebar	102	38	38	38	38	38	180.587	124.465	153.175	161.088	168.984	788.299	
	RO: Neraca air wilayah sungai	Layanan	Tersebar	12	0	0	0	0	12	3.340	-	-	-	-	3.340	
	RO: Dokumen perhitungan indeks ketahanan air wilayah sungai	Dokumen	Tersebar	29	0	0	0	0	29	10.500	-	-	-	-	10.500	
	KRO: Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi															
	RO: Sistem Data dan Informasi SDA	Unit	Tersebar	4	7	7	7	7	7	976	24.935	99.576	97.707	79.707	302.902	
	RO: Pos Hidrologi	Unit	Tersebar	0	0	1	1	1	3	-	-	50.000	50.000	50.000	150.000	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Unit desain BBWS/BWS	Dokumen	Tersebar	40	0	0	0	0	0	27.325	-	-	-	-	27.325	
	RO: Dokumen Perhitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai	Dokumen	Tersebar	0	0	0	64	0	0	-	-	-	32.000	-	32.000	
	RO: Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai	Dokumen	Tersebar	0	64	64	64	64	64	-	13.300	32.000	32.000	32.000	109.300	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Unit Kaji Cepat	Layanan	Tersebar	0	38	38	38	38	38	-	19.000	44.770	49.247	54.172	167.189	
	KRO: Data dan Informasi Publik (Prioritas)															
	RO: Flood Management in North Java Project	Dokumen	Tersebar	2	0	0	0	0	2	13.967	-	-	-	-	13.967	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)	Dokumen	Tersebar	6	0	0	0	0	6	5.617	-	-	-	-	5.617	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	Sasaran Kegiatan 2:															
	Meningkatnya pembinaan kesiapan dan layanan teknis infrastruktur SDA dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat layanan pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	2 Tingkat pembinaan layanan teknis sumber daya air	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	3 Tingkat pembinaan sistem informasi sumber daya air (SISDA) direktorat jenderal sumber daya air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	%		76,00%	77,24%	78,55%	79,91%	82,00%	82%							
	4 Tingkat penerapan NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	5 Tingkat keandalan infrastruktur sumber daya air	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	6 Jumlah wilayah sungai Kewenangan Pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/ defisit	Wilayah Sungai		50	50	50	50	50	50							
	7 Tingkat pembinaan implementasi transformasi digital	%		32,14%	42,86%	53,57%	64,29%	75,00%	75%							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Layanan teknis dan pengelolaan jabatan fungsional serta fasilitasi pengembangan profesi bidang SDA	Rekomendasi Kebijakan	0	1	0	0	0	0	1	2.824	-	-	-	-	2.824	
	RO: Layanan teknis bidang SDA	Rekomendasi kebijakan	0	4	0	0	0	0	4	9.800	-	-	-	-	9.800	
	RO: Flood Management in North Java Project	Kajian	0	1	0	0	0	0	1	8.320	-	-	-	-	8.320	
	RO: National Urban Flood Resilience Project (NUFRoP)	Kajian	0	1	0	0	0	0	1	4.745	-	-	-	-	4.745	
	RO: Sistem Data Air Indonesia (SDAIR)	Kajian	0	1	0	0	0	0	1	4.750	-	-	-	-	4.750	
	RO: NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air	Kajian	0	9	0	0	0	0	9	3.226	-	-	-	-	3.226	
	RO: Dokumen evaluasi keandalan infrastruktur SDA	Rekomendasi kebijakan	0	1	0	0	0	0	1	2.100	-	-	-	-	2.100	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Layanan	Pusat	0	7	7	7	7	28	-	13.302	25.585	27.571	30.289	96.747	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Fasilitasi Unit Manajemen atau Pelaksanaan Proyek (PMU/PIU)	Dokumen	Pusat	0	2	2	1	0	5	-	11.046	15.809	11.073	-	37.927	
	Sasaran Kegiatan 3:															
	Meningkatnya layanan teknis infrastruktur SDA															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase layanan teknis Balai Teknik/ Balai	%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%							
	2 Jumlah dokumen pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi Balai Teknik/ Balai	Dokumen (Kumulatif)		26	46	79	106	132	389							
	3 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai	Indeks		81,88	83,44	85,13	86,69	88,38	88							
	4 Jumlah dokumen perhitungan indeks ketahanan air nasional (IKtA-N)	Dokumen		1	0	0	1	0	2							
	5 Jumlah dokumen perhitungan neraca air nasional	Dokumen		1	1	1	1	1	5							
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Sumber Daya Air	Layanan	Pusat	0	8	8	8	8	32	-	42.532	110.245	92.844	101.168	346.788	
	KRO: Dukungan Teknis															
	RO: Layanan teknis balai teknik/balai	Dokumen	Pusat	8	0	0	0	0	8	43.785	-	-	-	-	43.785	
	RO: Dokumen Pengembangan, Perekayasaan, dan Penerapan Teknologi	Dokumen	Pusat	6	20	27	27	26	106	14.153	17.766	40.911	47.127	45.550	165.508	
	RO: Dokumen pengukuran IKM	Dokumen	Pusat	4	0	0	0	0	4	25.425	-	-	-	-	25.425	
	RO: Dokumen Perhitungan Indeks Ketahanan Air Nasional	Dokumen	Pusat	3	0	0	1	0	4	8.820	-	-	2.000	-	10.820	
	RO: Dokumen Neraca Air Nasional	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	1.500	1.000	1.000	1.000	4.500	
	Sasaran Kegiatan 4:															
	Mentransformasi tata kelola pembinaan layanan teknis SDA															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	%		82,69	82,94	84,19	86,44	87,69	87,69							
	2 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Nilai		88,11	88,61	89,11	89,61	90,11	90,11							
	3 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai		71,07	71,09	71,11	71,13	71,15	71,15							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		35	45	55	65	75	75							
	4 Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Nilai		35	45	55	65	75	75							
	5 Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Teknik	Nilai		92,63	93,13	93,63	94,13	94,57	94,57							
	6 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Balai Teknik	Nilai		74,76	74,78	74,8	74,82	74,84	74,84							
	7 Tingkat implementasi transformasi digital Balai Teknik	Nilai		55	61	67	72	78	78							
	RO: Kepatuhan intern dan manajemen risiko serta pembangunan zona integritas	Rekomendasi kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	286	-	-	-	-	286	
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Teknis Pendukung Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Layanan	Pusat	0	4	4	4	4	16	-	50	346	381	419	1.195	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) //SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) //INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM 2:	DUKUNGAN MANAJEMEN											2.234.851	3.810.412	3.953.357	4.014.617	4.078.105	18.091.341	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya					83,29	85,25	85,25	85,25	85,25	85,25							
		1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	%														
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya																	
			Indikator Kinerja Sasaran Program:															
		1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	%		85,25	87,03	88,07	89,11	90,04	90,04							
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN SUMBER DAYA AIR												2.234.851	2.640.375	3.953.357	4.014.617	4.078.105	16.921.304	Sesditjen SDA
	Sasaran Kegiatan 1:																	
	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis																	
			Indikator Kinerja Kegiatan:															
		1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	%		86,42	86,94	87,98	89,01	90,03	90,03							
		2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	%		90	90,6	91,2	91,8	92,45	92,45							
		3	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional	%		94,05	94,4	94,75	95,1	95,5	95,5							
		4	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	%		77,54	80,65	83,75	86,86	90,01	90,01							
		5	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	%		73,17	77,36	81,56	85,76	90,01	90,01							
		6	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik	%		84,56	85,66	86,76	88,36	90,01	90,01							
		7	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Irigasi dan Rawa	%		88,83	89,93	91,03	92,13	93,28	93,28							
		8	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Sungai dan Pantai	%		86,76	87,86	88,96	90,06	91,21	91,21							
		9	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bendungan dan Danau	%		75,24	77,59	79,94	84,04	90	90							
		10	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Air tanah dan Air Baku	%		83,95	85,05	86,4	88,25	90,15	90,15							
		11	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	%		85,3	86,4	87,5	88,6	90	90							
		12	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	%		92,07	92,53	93	93,47	94	94							
		KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
		RO:	Layanan BMN	Layanan	Tersebar	99	106	240	240	240	925	43.688	32.801	66.873	70.216	73.727	287.306	
		RO:	Layanan Hukum	Layanan	Tersebar	1	58	58	58	58	233	150	12.403	16.590	17.420	18.290	64.853	
		RO:	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Tersebar	32	58	58	58	58	264	17.122	15.473	17.978	18.877	19.821	89.272	
		RO:	Layanan Protokol	Layanan	Tersebar	1	0	0	0	0	1	164	-	-	-	-	164	
		RO:	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Tersebar	165	59	240	240	240	944	147.685	19.217	646.890	679.235	713.197	2.206.224	
		RO:	Layanan Umum	Layanan	Tersebar	41	58	58	58	58	273	13.922	11.683	14.790	15.530	16.306	72.231	
		RO:	Layanan Bantuan Hukum	layanan	Tersebar	1	0	0	0	0	1	225	-	-	-	-	225	
		RO:	Layanan Perkantoran	Layanan	Tersebar	201	39	39	39	39	357	1.959.625	2.489.425	3.062.689	3.079.417	3.096.144	13.687.300	
		KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal																
		RO:	Layanan Sarana Internal	Unit	Tersebar	105	58	58	58	58	337	25.023	22.295	26.274	27.588	28.967	130.148	
		RO:	Layanan Prasarana Internal	Unit	Tersebar	4	1	1	1	1	8	12.224	9.086	58.749	61.687	64.771	206.517	
		KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
		RO:	Layanan Manajemen SDM	Layanan	Tersebar	1	45	58	58	58	220	325	12.393	16.590	17.420	18.290	65.018	
		KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
		RO:	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Tersebar	169	155	240	240	240	1.044	13.890	15.600	25.932	27.229	28.590	111.241	
		RO:	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Tersebar	3	0	0	0	0	3	341	-	-	-	-	341	
		RO:	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	Tersebar	3	0	0	0	0	3	466	-	-	-	-	466	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Bina Marga																
	Tujuan: Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1 Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	%		84	85,5	87	88,5	90,0	90,0							
	Sasaran Strategis: 02 - Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:															
	1 Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	jam/100 km		1,9	1,85	1,80	1,75	1,70	1,70							
	2 Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	jam/100 km		2,20	2,15	2,10	2,05	2,00	2,00							
PROGRAM 1: INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																
	Sasaran Program: 02.01 - Meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional															
	Indikator Kinerja Program:															
	1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan	km/100km2		2,60	2,62	2,67	2,75	2,84	2,84							
	2 Tingkat kondisi prasarana jalan Nasional	%		93,33	94,88	95,33	96,03	96,39	96,39							
	3 Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun (kumulatif)	km (kumulatif)		54,50 (2020 - 2025)	79,64 (2020 - 2026)	113 (2020 - 2027)	145 (2020 - 2028)	155 (2020 - 2029)	155							
	4 Persentase jalan nasional yang berkeselamatan	%		57,00	58,00	60,00	61,00	62,00	62,00	35.123.511.337	67.109.701.931	92.591.746.218	87.471.211.830	74.597.673.656	356.893.844.973	
KEGIATAN 1: Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional																
	Sasaran Kegiatan: 02.01.01 - Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan dan Preservasi Jalan															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan	%		100	100	100	100	100	100							
	2 Capaian tingkat kondisi prasarana jalan	%		100	100	100	100	100	100							
	3 Capaian Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif)	%		100	100	100	100	100	100							
	4 Capaian target jalan nasional yang berkeselamatan	%		100	100	100	100	100	100							
	KRO: Dukungan Teknis									2.101.692.365	3.344.407.477	5.937.002.007	5.905.126.907	5.995.043.849	23.283.272.605	
	RO: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	37 Provinsi	293,00	37,00	37,00	37,00	37,00	441,00	1.051.257.787	1.243.274.155	2.337.402.365	2.441.969.774	2.544.658.900		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	37 Provinsi	339,00	37,00	37,00	37,00	37,00	487,00	1.050.434.578	2.101.133.322	3.599.599.642	3.463.157.133	3.450.384.949		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (Jalan Daerah)	Dokumen	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: Dukungan Teknis									7.558.640	-	-	-	-	7.558.640	
	RO: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	Prov. Kalimantan Timur	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558.640	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan (IKN)	Dokumen	Prov. Kalimantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN)	Dokumen	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)									1.231.730.116	1.833.218.509	2.942.748.430	2.572.830.923	679.664.295	9.260.192.273	
	RO: Pembangunan Jalan	Km	Prov. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	1.107.399.760	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	Pusat	2,20	36,3	28,7	49,3	21,8	133,10	39.230.350	704.883.334	642.808.416	1.148.089.877	515.653.652		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Peningkatan Keselamatan Jalan	Km	Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	Prov. Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	65.100.000	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Bencana dan Longsoran	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Peningkatan Jalan Baru	Km	Pusat	0,00	14,64	33,63	25,22	3,07	76,55		1.068.335.175	2.299.880.014	1.424.141.046	164.010.643		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Blackspot	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)									633.572.275	1.586.871.772	4.164.148.499	4.029.011.476	3.205.343.015	13.618.947.037	
	RO: Pembangunan Jembatan	m	15 Provinsi	2149,19	147,44	763,00	570,00	450,00	4.079,63	488.072.908	49.493.483	762.330.040	749.103.860	650.000.000		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan (Perkotaan)	m	12 Provinsi	305,00	1.624,00	2.160,70	3.436,30	4.430,00	11.956,00	71.097.431	1.233.757.120	2.051.888.960	1.211.995.180	1.428.199.364		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Flyover/Underpass Sebidang Dengan Kereta Api	m	7 Provinsi	0,00	248,48	2.088,86	7.204,48	4.140,76	13.682,58		303.621.169	1.349.929.499	2.067.912.436	1.127.143.651		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	m	Prov. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara	841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	841,45	74.401.936	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Bencana dan Longsoran	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pemeliharaan Rutin Jembatan di Jalan Baru	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)									8.405.978.999	8.438.328.128	11.467.869.139	10.981.212.230	11.314.258.393	50.607.646.888	
	RO: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	33 Provinsi	22562,00	47.603,00	47.603,00	47.603,00	47.603,00		2.242.625.504	3.989.988.586	5.331.937.766	5.192.857.606	5.298.476.844		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	28 Provinsi	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.980.806						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Km	33 Provinsi	107,50	158,63	162,50	163,01	156,11	640,25	760.802.566	670.831.566	693.798.900	692.318.200	662.089.480		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Drainase dan Trotoar	Km	13 Provinsi	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.921.916						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	18 Provinsi	2574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.222.224						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Bencana dan Longsoran	Km	36 Provinsi	0,00	72,35	116,16	99,99	126,28	414,77		2.463.407.982	3.962.132.473	3.718.336.424	3.606.492.069		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km	30 Provinsi	16965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.590.933						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Drainase dan Trotoar (Padat Karya)	Km	Prov. Sulawesi Selatan	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.050						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Peningkatan Keselamatan Jalan	Km	20 Provinsi	0,00	499,80	567,80	517,40	570,60	2.155,60		1.314.100.000	1.480.000.000	1.377.700.000	1.747.200.000		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penataan Kawasan Sekitar Jalan	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Balai Pelaksana Jalan
	KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)									2.714.108.279	1.795.000.235	2.057.730.703	3.370.904.813	1.844.148.727	11.781.892.757	
	RO: Preservasi Rutin Jembatan	m	37 Provinsi	44460,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00		86.425.691	1.508.011.615	1.552.594.153	1.741.065.495	1.474.678.817		Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)
	RO: Preservasi Jembatan	m	33 Provinsi	104392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104392,20	1.543.424.575	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penggantian Jembatan	m	35 Provinsi	2821,00	791,92	1.568,22	4.240,77	1.332,70	2821,00	738.417.741	286.988.620	505.136.550	1.629.839.314	369.469.910	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pemeliharaan Rutin Jembatan di Jalan Baru	m	16 Provinsi	19405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19405,00	33.407.324	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pemeliharaan Rutin Jembatan Khusus	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Khusus	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penanganan Bencana dan Longsoran	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	m	30 Provinsi	331656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331656,00	312.432.948	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Peningkatan Keselamatan Jalan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Penataan Kawasan Sekitar Jembatan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)									7.141.752.507	8.441.007.140	11.961.226.308	11.932.334.463	8.078.426.215	47.554.746.633	
	RO: Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Km	Pusat	19,80	85,2	70,2	58,5	59,00	292,70	240.750.000	627.540.000	896.440.000	904.040.000	884.040.000	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Koridor Logistik (Backbone)	Km	Pusat	33,83	75,65	93,13	74,08	51,07	327,76	512.700.137	2.366.040.863	2.645.857.191	1.885.164.695	1.236.143.065	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Kawasan Prioritas	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi Utama dan Hinterland (Kawasan)	Km	Prov. Jambi, Jawa Barat	0,01		5,00	5,00	5,00	15,01	37.000.000	-	77.000.000	77.000.000	77.000.000	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	Km	Pusat	4,55	126,75	311,74	280,21	200,82	924,07	50.733.332	3.174.740.966	6.043.738.416	6.475.604.331	3.687.933.000	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO:Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Utara	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Selatan	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Nusa Tenggara Timur	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua Selatan	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili-Tramena	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bangka Belitung	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO:Pembangunan Jalan Perkotaan	Km	Pusat	0,00	4,00	13,00	35,00	40,00	92,00	-	788.742.500	1.253.533.043	1.630.933.937	1.150.727.150	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Infrastruktur IKN (Pembangunan)	Km	Prov. Kalimantan Timur	18,12	22,00	0,60	0,00	0,00	40,72	6.300.569.038	1.202.143.561	661.256.408	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Perbatasan dan Akses Kawasan PLBN	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Dukungan Kawasan Industri Prioritas	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Wilmar	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Batang	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Seafar	Km	BTS Kota Batang, BTS Kab. Kendal	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,00	-	21.400.000	85.600.000	67.000.000	134.000.000	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO:Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Sentra Lamongan	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Ngawi	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Ketapang	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia	Km	Kota Tanjung Selor	0,00	0,00	0,00	19,03	19,03	38,06	-	-	-	577.705.000	577.705.000	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri IPIP Pomalaa	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri VDNIP Konawe	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Stardust Estate Indonesia	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri IHIP Huabao	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) //SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) // INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025		2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri IMIP Morowali	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Sumbawa Barat	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Pulau Obi	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri IWIP Teluk Weda	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Buli	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Industri Fak-Fak	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik	Km	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi	Km	Kota Pacitan, Pelabuhan Bari, Jembatan Manokwari-Bandara, Teluk Tapang-Bunga Tanjung	0,00	12,1	19,12	20,42	20,83	72,47	260.399.250	297.801.250	314.886.500	330.878.000			Balai Pelaksana Jalan
	KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)									842.265.472	930.821.998	2.267.196.943	1.942.256.440	2.228.530.513	8.211.071.366	
	RO: Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong	m	Prov. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan	47,00	221,00	332,00	228,00	131,00	959,00	50.386.773	125.649.780	193.887.837	137.458.438	69.335.278		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Koridor Logistik (Backbone)	m	15 Provinsi	386,00	109,22	197,64	432,96	3.395,71	10.991,53	219.102.534	718.543.523	1.530.083.063	1.317.844.898	1.688.330.089		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Kawasan Prioritas	m	Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi Utama dan Hinterland (Kawasan)	m	Pusat	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	131.079.412	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	m	Pusat	180,00	553,00	983,8	638,00	235,00	2.589,80	36.555.180	73.770.863	487.994.278	379.304.679	130.095.936		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Utara	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Selatan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Nusa Tenggara Timur	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua Selatan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili-Tramena	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bangka Belitung	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Infrastruktur IKN (Pembangunan)	m	Pusat	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	405.141.573	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO:Pembangunan Jembatan Perkotaan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	550,00	2.260,00	2.810,00	-	30.000.000	68.750.000	325.000.000			Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Krakatu Industrial Estate Cilegon	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Wilmar	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Batang	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Seafar	m	Prov. Jawa Tengah	0,00	0,00	0,00	51,41	77,12	128,53	-	-	-	10.512.690	15.769.210		Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) //SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) // INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						2025	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri sentra Lamongan	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Ngawi	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Ketapang	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri IPIP Pomalaa	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri VDNIP Konawe	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Stardust Estate Indonesia	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri IHIP Huabao	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri IMIP Morowali	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Sumbawa Barat	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Pulau Obi	m	Pusat	0,00		30,00	36,00		66,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri IWIP Tekuk Weda	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Buli	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Industri Fak-Fak	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi	m	Prov. Kalimantan Barat, Jembatan Manokwari - Bandara	0,00	75,6	150,00	150,00	0,00	375,60		12.857.832	25.231.765	28.385.735	-		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)									5.586.830.128	17.042.691.204	16.517.994.025	16.055.797.819	15.328.122.437	70.531.435.613	
	RO: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	37 Provinsi	6847,00						696.162.979						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	Km	Prov. Papua Barat , Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya	99,03	123,70	169,80	131,70	97,20		1.158.279.088	611.695.382	830.945.666	860.232.801	534.621.794		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Koridor Logistik (Backbone)	Km	Pusat	429,00	5.316,60	4.503,00	4.371,60	3.432,80		3.098.878.487	11.107.386.166	11.199.340.884	10.901.386.725	10.543.024.730		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Dukungan Kawasan Prioritas	Km	Pusat	37,00	431,90	281,20	251,80	255,80		181.367.249	779.966.933	629.579.317	657.405.764	758.771.188		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi Utama dan Hinterland (Kawasan)	Km	Pusat	26,00	124,80	90,40	136,60	66,50		198.917.922	251.723.595	309.775.176	307.021.218	246.719.758		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	Km	Pusat	42,00	513,10	316,30	269,70	210,20		253.224.403	1.658.787.412	831.601.949	789.085.342	737.153.623		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah	Km	Pusat	0,00	3,70	4,30	14,70	17,20			11.841.060	11.295.063	24.129.552	43.369.472		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Utara	Km	Pusat	0,00	43,90	47,80	56,30	32,20			83.636.199	82.300.067	101.077.940	75.939.159		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Selatan	Km	Pusat	0,00	16,90	18,80	10,30	8,50			32.562.356	50.934.037	32.052.964	29.575.681		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Nusa Tenggara Timur	Km	Pusat	0,00	15,30	9,50	16,10	12,50			47.250.286	29.132.612	41.155.206	30.703.968		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua	Km	Pusat	0,00	8,40	4,20	5,90	2,50			26.252.869	12.792.541	10.262.878	2.752.749		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua Selatan	Km	Pusat	0,00	0,00	1,50	5,10	6,40			-	7.410.954	26.134.523	33.416.014		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili-Tramena	Km	Pusat	0,00	0,04	0,10	0,14	0,53			10.285.967	32.130.660	16.582.798	20.389.228		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang	Km	Pusat	0,00	0,10	0,10	0,80	0,30			139.973	279.946	2.327.261	591.600		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo	Km	Pusat	0,00	0,50	0,40	0,60	0,90			1.100.310	793.930	1.173.041	2.098.590		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba	Km	Pusat	0,00	84,70	69,00	62,20	41,00			148.758.835	130.841.481	143.040.210	134.885.271		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bangka Belitung	Km	Pusat	0,00	2,60	4,50	3,70	4,30			3.616.310	5.441.420	6.356.580	7.138.000		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya	Km	Pusat	0,00	0,10	0,00	0,10	0,20			414.000	156.706	167.647	313.412		Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						2025	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru	Km	Pusat	0,00	1,70	1,20	0,90	1,10			2.775.464	2.328.619	3.554.053	2.580.308		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai	Km	Pusat	0,00	16,00	10,40	6,60	6,60			33.664.787	17.858.541	12.822.207	17.637.662		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi	Km	Pusat	0,00	2,30	1,20	2,20	3,00			4.670.588	2.283.706	3.766.176	5.435.587		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali	Km	9 Provinsi	0,00	59,10	51,80	42,90	34,50			121.046.437	86.984.931	82.986.510	88.181.512		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	Km	Prov. Kepulauan Riau	0,00	65,60	77,90	97,30	88,90			62.512.993	98.662.484	133.280.509	103.480.629		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif DKI Jakarta	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Infrastruktur IKN (Preservasi)	Km	Pusat	0,00	44,90	17,60	62,00	31,90								Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Perkotaan	Km	Pusat	0,00	378,30	290,60	347,70	254,20			806.538.896	848.329.613	809.859.398	771.736.750		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate	Km	Sp. Busung - Sp. Lobam	0,00	1,10	1,30	2,80	3,40			1.121.215	1.288.036	2.968.499	2.897.690		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Krakatu Industrial Estate Cilegon	Km	Merak - BTS Kota Cilegon, Jln. Raya Merak (Cilegon)	0,00	1,00	2,50	1,90	0,90			1.736.653	9.726.166	6.458.145	3.464.507		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Wilmar	Km	Serdang - Bojonegara - Merak	0,00	16,80	3,80	14,10	0,80			14.103.712	7.935.618	5.973.644	1.343.965		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Batang	Km	BTS Kota Batang - BTS Kab. Kendal	0,00	11,20	8,10	7,90	4,30			25.433.639	43.401.957	13.742.890	11.486.166		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Sefer	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Sentra Lamongan	Km	Lohgung (Km. 93.175) - Sadang (BTS Kab. Lamongan)	0,00	3,80	2,80	4,10	1,30			7.066.779	4.407.302	5.789.955	4.948.045		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Ngawi	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Ketapang	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri IPM Pomalaa	Km	Pomalaa - Woluhu	0,00	3,00	1,70	1,60	2,10			6.883.117	3.758.627	3.342.765	5.044.824		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri VDNIP Konawe	Km	BTS Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe - Pohara	0,00	3,30	1,80	4,40	2,30			2.848.961	2.160.828	3.590.281	2.305.287		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Stardust Estate Indonesia	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri IHIP Huabao	Km	Bahonsuai - Bungku	0,00	3,30	23,10	8,60	1,20			8.747.122	30.792.669	14.668.633	3.316.613		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri IMP Morowali	Km	Bahodopi - BTS Prov. Sulawesi Tenggara	0,00	14,60	16,50	7,60	4,90			26.834.672	21.334.717	15.891.374	17.218.105		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Sumbawa Barat	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Pulau Obi	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri IWIP Teluk Weda	Km	Weda - Sagea, Sagea - Patani	0,00	11,30	10,20	4,10	4,00			28.220.249	38.871.041	25.507.975	22.745.114		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Buli	Km	Buli - Maba	0,00	11,50	6,70	3,90	4,80			22.937.446	20.572.358	20.832.603	24.601.460		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Fak-Fak	Km	Prov. Papua Barat	0,00							-	286.117	1.459.438	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	Km	Pusat	0,00	0,30	2,70	7,40	6,90			1.158.214	11.651.137	22.487.371	27.131.754		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Km	Pusat	0,00	0,80	1,20	0,90	0,70			1.499.690	2.782.378	2.672.455	2.402.031		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	Km	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	Km	Pusat	0,00	3,70	0,80	2,60	1,00			5.236.169	4.046.276	2.179.830	1.632.879		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik	Km	Pusat	0,00	2,20	4,50	2,70	1,00			5.912.168	10.252.119	9.739.679	6.874.363		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi	Km	Pusat	0,00	523,00	456,70	414,00	346,80			1.076.324.578	1.083.526.374	932.630.978	1.000.192.950		Balai Pelaksana Jalan
	KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)									1.007.867.457	3.778.505.325	3.773.969.131	2.112.946.309	3.638.376.833	14.311.665.055	
	RO: Preservasi Rutin Jembatan	m	12 Provinsi	38331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.733.185						Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong	m	Prov. Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya	6881,00	4298,13	6894,42	3795,86	4680,03		190.740.956	143.173.726	356.372.631	239.033.776	243.168.977		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Koridor Logistik (Backbone)	m	33 Provinsi	9740,00	83606,84	62793,96	34478,78	87657,35		507.926.322	2.642.139.267	2.503.418.416	1.312.733.345	2.474.691.948		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Dukungan Kawasan Prioritas	m	10 Provinsi	1278,00	5935,08	4957,36	2841,38	6504,08		144.029.331	170.340.089	167.005.298	82.559.263	164.615.322		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Akses Simpul Transportasi Utama dan Hinterland (Kawasan)	m	Pusat	2313,00	1236,75	1789,60	918,75	1399,85		54.940.434	46.891.923	84.132.515	43.136.583	50.916.651		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	m	13 Provinsi	1574,00	4217,25	3851,85	3240,10	4623,95		61.497.229	121.558.346	128.086.296	100.250.612	124.310.196		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah	m	Piang (Km 35) - Pulang Pisau, Pulang Pisau - Bts. Kota Kuala Kapuas, Bts. Kota Kuala Kapuas - Bts. Prov. Kaltel	0,00	280,50	175,30	10,00	280,50			9.841.034	7.210.945	1.023.881	9.841.034		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Utara	m	Provinsi Sumatera Utara	0,00	563,20	128,40	499,30	568,60			13.999.858	2.820.316	15.525.546	12.087.879		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Sumatera Selatan	m	Betung - Bts. Kota Palembang	0,00	335,86	97,30	135,60	342,46			6.744.079	1.661.031	3.305.550	8.177.222		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Nusa Tenggara Timur	m	Bts. Kota Waikabubak - Bts Kab. Sumba Timur	0,00	118,10	79,40	11,90	118,10			2.945.118	3.009.505	980.920	2.945.118		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan di Jalan Perkotaan	m	9 Provinsi	0,00	4942,92	3186,54	2205,40	5109,32			169.177.192	171.387.130	106.763.193	162.752.847		Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						2025	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili-Tramena	m	Mataram - Gerung	0,00	19,20	12,80	0,00	19,20			1.335.587	789.172	-	1.121.955		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado-Likupang	m	Provinsi Sulawesi Utara	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo	m	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,00	17,20	0,00	0,00	17,20			457.497	-	-	457.497		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba	m	Provinsi Sumatera Utara	0,00	515,90	417,40	195,00	495,90			11.706.513	11.792.053	4.974.133	8.665.426		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bangka Belitung	m	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,00	0,00	43,80	55,20	0,00			-	1.118.621	1.375.358	-		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Dukungan Infrastruktur IKN (Preservasi)	m	Pusat	0,00	169,50	68,00	65,30	224,50								Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua Selatan	m	Prov. Papua Selatan	0,00	117,70	30,40	105,70	117,70			3.497.841	1.071.890	2.697.012	3.497.841		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan Sekitarnya	m	Keprekan - Borobudur	0,00	29,00	25,00	0,00	29,00			671.109	437.121	-	671.109		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru	m	Lawean - Sukapura	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80			460.891	-	-	460.891		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai	m	Wayabula - Daruba	0,00	550,91	107,70	108,00	550,91			13.280.915	2.575.333	2.550.960	12.971.889		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Wakatobi	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali	m	BTS Kota Amlapura - Angentelu	0,00	1168,36	1489,90	1118,30	1155,66			69.474.534	36.119.473	30.357.998	26.313.608		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	m	Prov. Kepulauan Riau	0,00	367,60	1014,60	382,90	424,80			12.413.761	34.535.010	8.733.806	13.228.429		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Krakatu Industrial Estate Cilegon	m	Merak - BTS Kota Cilegon	0,00	0,00	0,00	12,10	-			-	508.645	-	-		Balai Pelaksana Jaiian
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Wilmar	m	Serdang - Bojonegara - Merak	0,00	82,90	109,90	6,40	76,50			4.226.871	3.365.879	243.371	2.766.561		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Batang	m	BTS Kota Batang - BTS Kab. Kendal	0,00	243,30	102,00	207,10	243,30			8.346.911	3.453.542	23.577.272	8.346.911		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Seaefer	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri isentra Lamongan	m	Lohgung (Km. 93.175) - Sadang (BTS Kab. Lamongan)	0,00	90,20	27,20	0,00	122,20			3.464.984	751.962	-	6.982.385		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Ngawi	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Ketapang	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri IPIP Pomalaa	m	Pomalaa - Wolulu	0,00	204,00	60,00	30,00	218,00			6.141.268	1.682.802	2.980.311	4.128.222		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri VDNIP Konawe	m	BTS Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe - Pohara	0,00	81,45	56,00	0,00	81,45			2.451.335	1.413.072	-	2.451.335		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Stardust Estate Indonesia	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri IHIP Huabao	m	Bahonsuai - Bungku	0,00	312,70	345,90	149,80	344,50			7.319.640	19.119.868	6.094.131	7.944.888		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri IMIP Morowali	m	Bahodopi - BTS Prov. Sulawesi Tenggara	0,00	296,60	104,60	34,70	308,80			7.793.239	3.855.915	2.827.225	7.113.817		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Sumbawa Barat	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Pulau Obi	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri IWIP Teluk Weda	m	Prov. Maluku Utara	0,00	119,40	135,15	218,60	119,40			2.972.299	4.637.369	4.617.193	2.972.299		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Buli	m	Buli - Maba	0,00	93,20	42,80	81,80	92,20			3.732.235	1.189.125	1.813.612	3.521.177		Balai Pelaksana Jaiian
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Industri Fak-Fak	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	m	BTS Aceh Utara/Lhokseumawe - Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe)	0,00	46,50	41,40	0,00	46,50			2.155.181	2.019.474	-	2.155.181		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Kendal	m	Jln. Lingkar Kaliwungu	0,00	15,00	19,80	0,00	15,00			1.478.498	1.951.617	-	1.478.498		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik	m	Sadang (BTS Kab. Lamongan) - BTS kota Gresik	0,00	7,50	0,00	8,20	7,50			486.696	-	278.200	299.985		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Destinasi Regeneratif DKI Jakarta	m	Pusat	0,00												Balai Pelaksana Jalan
	RO: Preservasi Jembatan Akses Simpul Transportasi	m	Pusat	0,00	9220,65	5880,63	3776,70	9701,65			284.627.872	215.646.021	114.513.058	264.120.719		Balai Pelaksana Jalan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
	2025	2026	2027			2028	2029	2025	2026	2027		2028	2029					
	RO: Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Papua			m	Prov. Papua	0,00	147,80	40,00	0,00	147,80		3.199.016	831.084	-	3.199.016		Balai Pelaksana Jalan	
	Sasaran Program: 02.02 - Meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol																	
	1	Indikator Kinerja Program: Panjang Jalan Tol yang beroperasi (Kumulatif angka dasar tahun 2020)		Km (kumulatif)		994,00	1.459,00	2.383,00	3.558,00	5.134,00	5.134,00							
KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol																		
	Sasaran Kegiatan: 02.02.01 - Meningkatkan kinerja Pembinaan dan dukungan pembangunan jalan tol											3.313.815.105	9.388.829.845	14.907.232.430	8.288.262.418	1.845.684.739	37.743.824.538	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan konstruksi jalan tol		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						BBPUN/BRPN	
	2	Tingkat kinerja pembinaan teknis jalan tol		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dit.JBH	
	3	Tingkat kinerja pengaturan pengusahaan jalan tol		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						BPJT	
KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												151.335.828	205.041.569	219.394.479	234.752.092	251.184.739	1.061.708.708	
	RO: Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan			Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	84.855.232,00	139.020.485	148.751.919	159.164.553	170.306.072		
	RO: Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol			Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	66.480.596,00	66.021.084	70.642.560	75.587.539	80.878.667		
KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)												3.162.479.277	9.183.788.276	14.687.837.951	8.053.510.326	1.594.500.000	36.682.115.830	
	RO: Pembangunan Jalan Bebas Hambatan			Km	Pusat	13,15	26,53	51,42	71,05	23,9	186,1	3.162.479.277	9.183.788.276	14.687.837.951	8.053.510.326	1.594.500.000	Balai Pelaksana Jalan	
	Sasaran Program: 02.03 - Meningkatkan konektivitas jalan daerah																	
	1	Indikator Kinerja Program: Tingkat pencapaian kinerja peningkatan konektivitas jalan daerah		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
KEGIATAN 3: Pembinaan dan Dukungan Pembangunan Jalan Daerah																		
	Sasaran Kegiatan: 02.03.01 - Meningkatkan kinerja pembinaan dan dukungan pembangunan jalan daerah												5.880.799.171	10.607.301.699	13.575.223.985	13.657.445.438	43.720.770.293	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan pembangunan jalan Daerah		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Dit. SSPJJ	
	2	Tingkat kinerja pembinaan teknis penyelenggaraan jalan daerah		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						BBPUN/BRPN	
KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												61.776.496	66.100.851	70.727.910	75.678.864	274.284.121		
	RO: Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Daerah			Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	61.776.496	66.100.851	70.727.910	75.678.864		Dit. SSPJJ	
KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)												917.526.000	2.212.506.834	1.934.755.833	2.012.026.333	7.076.815.000		
RO: Dukungan Penanganan Jalan Daerah												917.526.000	2.212.506.834	1.934.755.833	2.012.026.333		Balai Pelaksana Jalan	
KRO: Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)												603.333.330	592.000.000	592.000.000	592.000.000	2.379.333.330		
RO: Dukungan Penanganan Jembatan Daerah												11.333.330	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan	
RO: Pembangunan Jembatan Gantung												592.000.000	592.000.000	592.000.000	592.000.000		Balai Pelaksana Jalan	
KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)												-	-	-	-	-	-	
RO: Dukungan Penanganan Jembatan Daerah												-	-	-	-	-	Balai Pelaksana Jalan	
KRO: OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)												4.298.163.345	7.736.694.014	10.977.740.242	10.977.740.241	33.990.337.842		
RO: Dukungan Penanganan Jalan Daerah												4.298.163.345	7.736.694.014	10.977.740.242	10.977.740.241		Balai Pelaksana Jalan	
	Sasaran Program: 02.04 - Meningkatkan Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
	Indikator Kinerja Program: Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan			%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
KEGIATAN 4: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
	Sasaran Kegiatan: 02.04.01 - Meningkatkan Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											2.136.339.994	4.649.221.128	5.987.326.904	6.705.304.047	6.782.629.202	26.260.821.274	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	Tingkat kinerja pelayanan kebencanaan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Setditjen SSRJJ	
	2	Tingkat kinerja perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan jalan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Kondisi mantap jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota		%		94/71/56/82	96/72/57/83	97/73/61/84	98/75/63/84	98/76/66/85	98/76/66/85							
	4	Tingkat kinerja pembinaan keteknikan bidang jalan dan jembatan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Bintek	
	5	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Balai Teknik	
	6	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Pembangunan Jalan	
	7	Tingkat aksesibilitas daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan		km/100km2		2,23	2,25	2,29	2,31	2,33	2,33							
	8	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jembatan dan terowongan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Pembangunan Jembatan	
	9	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						Preservasi	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana									569.451.202	463.446.642	495.887.906	530.600.058	567.742.064	2.627.127.872	
	RO: Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	50.291.294,00	79.500.765	85.065.818	91.020.425	97.391.855		
	RO: Layanan Pengadaan Tanah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	204.349.733,00	-	-	-	-		
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	33.109.403,00	30.448.331	32.579.714	34.860.294	37.300.515		
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	19.878.330,00	27.643.062	29.578.076	31.648.541	33.863.939		
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	113.563.569,00	168.628.056	180.432.020	193.062.261	206.576.620		
	RO: Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	83.948.244,00	95.449.932	102.131.427	109.280.627	116.930.271		
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	64.310.629,00	61.776.496	66.100.851	70.727.910	75.678.864		
	KRO: Bantuan Penanggulangan Kebencanaan									203.345.351	209.982.146	224.680.896	240.408.559	257.237.158	1.135.654.109	
	RO: Fasilitas Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Paket	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	203.345.351	209.982.146	224.680.896	240.408.559	257.237.158		
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana									1.349.850.000	3.963.040.453	5.253.113.583	5.919.695.795	5.942.028.371	22.427.728.202	
	RO: Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	RO: Layanan Pengadaan Tanah	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Jalan Bebas Hambatan
	RO: Pembinaan Teknik Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Jalan Bebas Hambatan
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Pembangunan Jalan
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Pembangunan Jembatan
	RO: Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Kepatuhan Internal	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-		Direktorat Kepatuhan Intern
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Jawa Barat	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	535.300.000	535.300.000	535.217.760	535.217.760	535.217.760		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Pembangunan Fly Over Panorama I (Sitinjau Lauik I)	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Sumatera Barat	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,0		-	-	610.230.411	632.767.330		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas jayapura-Wamena Segmen Maberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Papua	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,0		-	565.905.370	622.155.000	622.155.000		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Betung - Tempino - Jambi dengan Skema PBBL	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Jambi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	440.500.000	3.053.750.000	3.778.000.000	3.778.000.000	3.778.000.000		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Jalintim Sumsel	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Sumatera Selatan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	225.710.000	225.630.880	225.630.880	225.630.880	225.630.880		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Jalintim Riau	Rekomendasi Kebijakan	Prov. Riau	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	148.340.000	148.359.573	148.359.573	148.461.744	148.257.401		Balai Pelaksana Jalan
	RO: Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU - AP) Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	m	Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-	-		Balai Pelaksana Jalan
	Sasaran Kegiatan: 02.04.02 - Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Ditjen Bina Marga															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%		64,55	68,03	71,57	75,60	82,54	82,54							Setditjen
	2 Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	%		85,00	88,00	90,00	95,00	100,00	100,00							SSPJJ
	3 Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	%		94,69	94,75	94,81	94,88	94,94	94,94							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana									13.693.441	12.751.887	13.644.519	14.599.635	15.621.609	70.311.091	
	RO: Pengaturan dan Pembinaan Kepatuhan Internal	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0	13.693.441,00	12.751.887	13.644.519	14.599.635	15.621.609		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028		2029
	Tujuan: Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80	85	87,50	90	92,50	92,50						
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:															
	1	Tingkat kualitas tata kelola kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13						
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN											2.189.068.046	3.009.638.875	2.506.264.006	2.681.702.486	2.869.421.660	13.256.095.073
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	1	Indikator Kinerja Program 2: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (D/BM)	%		86,60	87,24	87,91	88,55	89,35	89,35						
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga											2.189.068.046	3.009.638.875	2.506.264.006	2.681.702.486	2.869.421.660	13.256.095.073
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	%		82,14	82,79	83,18	83,73	84,23	84,23						
	2	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	3	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	4	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	5	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	6	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Jalan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	7	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Jembatan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	8	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	9	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	10	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jalan Bebas Hambatan	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
	11	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91						
12	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJJN/BJPJN	%		85,76	87,05	88,33	89,62	90,91	90,91							
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal										2.148.503.522	2.983.681.742	2.459.011.179	2.631.141.962	2.815.321.899	13.037.660.303
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	10.410.718		11.919.231	12.753.577	13.646.328	Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	4.436.318		5.079.140	5.434.680	5.815.108	Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	49.294.055		55.626.260	59.520.098	63.686.505	Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	155.521.666	151.127.867	178.056.755	190.520.728	203.857.179	Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	1.928.840.765	2.832.553.875	2.208.329.792	2.362.912.877	2.528.316.779	Setditjen Bina Marga
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal										40.564.524	25.957.133	47.252.827	50.560.525	54.099.761	218.434.770
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	28.250.263	23.129.870	33.154.229	35.475.026	37.958.277	Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Prasarana Internal	Unit	Pusat		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,0	12.314.261	2.827.263	14.098.597	15.085.499	16.141.484	Setditjen Bina Marga
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal											-	-	-	-	
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						Setditjen Bina Marga
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						Setditjen Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET				TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA	
						2025	2026	2027	2028		2029	2025	2026	2027	2028			2029
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Cipta Karya												10.670.460.000	15.200.886.283 - 41.694.127.082	21.968.158.809 - 63.015.134.897	21.270.188.130 - 71.344.761.964	16.203.577.624 - 74.587.166.496	85.313.271.049 - 261.311.650.641	
	Tujuan: Menguatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan																	
	Indikator Kinerja Tujuan																	
	1	Persentase capaian penyelenggaraan akses infrastruktur dasar permukiman			%		80	85	87,5	90	92,5	92,5						
	Sasaran Strategis: 03 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan																	
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Permukiman yang aman dan berkelanjutan			%		65,78 - 67,10	71,00 - 75,52	73,92 - 85,41	76,39 - 92,24	79,07 - 100,00	79,07 - 100,00						
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (2025-2026) PROGRAM: INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN (2027-2029)												5.163.467.049	10.509.356.211 - 37.002.597.010	14.719.727.787 - 55.766.703.875	16.059.094.577 - 66.133.668.411	11.142.799.928 - 69.526.388.800	57.594.445.553 - 233.592.825.145	
	Sasaran Program: 03.01 - Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang aman dan berkelanjutan																	
	Indikator Kinerja Program:																	
	1	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman		%		33,00	33,14 - 36,00	33,46 - 38,00	33,90 - 40,00	34,32 - 43,00	34,32 - 43,00							
	2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman		%		10,28 - 12,50	10,29 - 17,00	10,88 - 21,00	11,33 - 26,00	12,05 - 30,00	12,05 - 30,00							
	3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		%		21,11 - 24,00	21,90 - 28,00	24,54 - 31,00	25,73 - 34,00	26,38 - 38,00	26,38 - 38,00							
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Air Minum yang Aman												1.226.784.649	4.281.461.340 - 7.512.214.000	5.976.074.046 - 16.829.711.000	7.015.042.131 - 19.780.367.000	6.454.829.441 - 21.997.389.000	24.954.191.607 - 67.346.465.649	
	Sasaran Kegiatan: 03.01.01 - Meningkatnya Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Aman																	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	Kapasitas SPAM Terbangun		1/ dt		282.295	283.308 - 283.687	283.958 - 284.952	284.658 - 286.689	285.325 - 287.500	285.325 - 287.500							
	2	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan		%		30,15	30,29 - 31,20	30,62 - 34,20	31,06 - 37,20	31,48 - 40,20	31,48 - 40,20							
	3	Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM		%		33,00 - 32,00	33,00 - 30,00	32,00 - 28,00	31,00 - 27,00	30,00 - 25,00	30,00 - 25,00							
	4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan		%		39,2	40,00 - 42,24	41,94 - 45,28	43,87 - 48,32	45,64 - 51,36	45,64 - 51,36							
	5	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Pesisir Utara Jawa		%		30,07 - 31,50	30,42 - 33,50	31,24 - 36,00	32,35 - 38,50	33,41 - 41,00	33,41 - 41,00							
	6	Rumah Tangga Perdesaan akses air minum aman		%		22,00	22,16 - 24,00	22,56 - 26,00	23,43 - 28,00	24,30 - 30,00	24,30 - 30,00							
	Sasaran Kegiatan: 03.01.02 - Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum																	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	BUMD Air Minum Berkinerja Sehat		%		74,00		81,00	88,00	94,00	100,00	100,00						
	2	Jumlah BUMD air minum yang memiliki Dokumen RPAM		BUMD		176		231	286	341	394	394						
	3	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM		Provinsi/ Kab/Kota		18 Provinsi dan 178 Kab/Kota	23 Provinsi dan 261 Kab/Kota	28 Provinsi dan 344 Kab/Kota	33 Provinsi dan 427 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota						
	4	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPMN termutakhirkan		Provinsi/ Kab/Kota		23 Provinsi dan 508 Kab/Kota	27 Provinsi dan 508 Kab/Kota	32 Provinsi dan 508 Kab/Kota	36 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota	38 Provinsi dan 508 Kab/Kota						
5	Jumlah NSPK air minum yang tersusun/ termutakhirkan dan telah ditetapkan		NSPK		2	4	6	8	9	9	9							
KRO: Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Prioritas)																		
RO: Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota				Unit	Pusat	0	0	0	0	0	0	9.713.000	0	0	0	9.713.000	Dit. Air Minum	
Indikator Kinerja RO:																		
1	Jumlah liter per detik pembangunan SPAM Kabupaten/Kota		1/dt	0		0	0	0	0	0								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA	
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		
		RO: Pembangunan SPAM Regional	Unit	Pusat	2	0	0	0	0	2	282.953.000	0	0	0	0	282.953.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah liter per detik pembangunan SPAM Regional	l/dt		1.250	0	0	0	0	1.250								
		RO: Pembangunan SPAM	Unit	Pusat	0	32	5	12	9	38	0	1.532.500.000	1.250.000.000	1.375.000.000	1.417.500.000	5.575.000.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah liter per detik pembangunan SPAM	l/dt		0	613 - 1.210	500 - 1.000	550 - 1.075	567 - 1.120	2.230 - 4.405								
		RO: Peningkatan SPAM	Unit	Pusat	0	14	24	10	16	90	0	600.000.000	225.000.000	225.000.000	150.000.000	1.200.000.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah liter per detik SPAM yang ditingkatkan	l/dt		0	400	150	150	100	800								
		RO: Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	Unit	Pusat	2	0	0	0	0	2	213.753.000	0	0	0	0	213.753.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR		3.633	0	0	0	0	3.633								
		RO: Perluasan SPAM Regional	Unit	Pusat	0	0	0	0	0	0	88.457.000	0	0	0	0	88.457.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah perluasan SPAM Regional	SR		0	0	0	0	0	0								
		RO: Perluasan SPAM	Unit	Pusat	0	52	141	114	44	404	0	1.017.072.000	2.574.000.000	2.574.000.000	1.853.028.000	8.018.100.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah perluasan SPAM	SR		0	56.504 - 120.363	143.000 - 436.314	143.000 - 466.405	102.946 - 481.450	445.450 - 1.504.532								
		RO: Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	Unit	Pusat	299	0	0	0	0	299	179.753.000	0	0	0	0	179.753.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah infrastruktur air minum berbasis masyarakat	SR		23.920	0	0	0	0	23.920								
		RO: SPAM Berbasis Masyarakat	Unit	Pusat	0	470	1.130	2.500	2.500	6.600	0	300.000.000	721.276.596	1.595.744.681	1.595.744.681	4.212.765.958	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah SPAM berbasis masyarakat	SR		0	37.600 - 53.360	90.400 - 128.240	200.000 - 283.760	200.000 - 283.680	528.000 - 749.040								
		RO: Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM	Unit	Pusat	0	7	45	50	54	156	0	82.500.000	337.500.000	375.000.000	405.000.000	1.200.000.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah unit optimalisasi dan rehabilitasi SPAM	Unit		0	7	45	50	54	156								
		RO: Perluasan SPAM untuk Penanganan Stunting/Kemiskinan Ekstrim	Unit	Pusat	0	25	25	25	25	100	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah perluasan SPAM untuk penanganan stunting /kemiskinan ekstrem	SR		0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000								
		RO: Percepatan Penyediaan Prasarana Air Minum	Unit	Pusat	0	475	1.063	1.063	1.321	3.921	0	478.118.340	683.797.450	683.797.450	850.056.760	2.695.770.000	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah percepatan penyediaan prasarana air minum	SR		0	38.000 - 109.510	85.000 - 547.552	85.000 - 657.062	105.667 - 876.083	313.667 - 2.190.207								
		RO: Pembangunan SPAM IKN	Unit	Pusat	0	0	0	0	0	0	399.166.000	83.471.000	0	0	0		Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah liter per detik pembangunan SPAM IKN	l/dt		0	0	0	0	0	0								
		RO: Perluasan SPAM IKN	Unit	Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dit. Air Minum	
		Indikator Kinerja RO:																
	1	Jumlah sambungan rumah perluasan SPAM IKN	SR		0	0	0	0	0	0								
KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prioritas)																		
		RO: Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	Pusat	509	0	0	0	0	509	52.991.000	0	0	0	0	52.991.000	Dit. Air Minum	
		RO: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota	Pusat	0	509	509	509	509	509	0	138.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	558.000.000	Dit. Air Minum	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA			
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota	KK		8.200	0	0	0	0	8.200									
		RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)			Unit		0	1	4	2	1	8		0	46.120.380	195.571.220	357.841.360	16.713.210	616.246.170	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (IPLT)	KK		0	5.000 - 3.077.834	410.000 - 3.085.977	32.482 - 3.135.348	5.000 - 2.737.093	452.482 - 12.036.252									
		RO: Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional			Unit		0	0	0	0	0	0		13.700.000	0	0	0	0	13.700.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan persampahan skala regional	KK		20	0	0	0	0	20									
		RO: Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota			Unit		0	0	0	0	0	0		33.122.000	0	0	0	0	33.122.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan persampahan skala kota	KK		20	0	0	0	0	20									
		RO: Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan			Unit		13	0	0	0	0	13		409.982.000	0	0	0	0	409.982.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan persampahan skala kawasan	KK		10.200	0	0	0	0	10.200									
		RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu/Komunal (Tangki Septik)			Unit		0	11.000	11.250	11.875	12.500	46.625		0	238.365.750	248.459.400	272.458.620	298.236.610	1.057.520.380	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu/komunal (tangki septik)	KK		0	11.000 - 68.423	11.250 - 51.633	11.875 - 51.633	12.500 - 51.633	46.625 - 223.322									
		RO: Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat			Unit		0	2	2	1	0	5		0	14.083.170	13.172.000	9.307.690	0	36.562.860	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat	Unit		0	2	2	1	0	5									
		RO: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu			Unit		30.800	0	0	0	0	30.800		685.562.000	0	0	0	0	685.562.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu	KK		30.800	0	0	0	0	30.800									
		RO: Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			Unit		0	0	0	1	1	2		0	0	0	5.333.000	10.000.000	15.333.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	Unit		0	0	0	1	1	2									
		RO: Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat			Unit		100	0	0	0	0	100		70.200.000	0	0	0	0	70.200.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	KK		20.000	0	0	0	0	20.000									
		RO: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal			Unit		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal	KK		0	0	0	0	0	0									
		RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Khusus			Unit		0	12	12	12	12	48		0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	14.400.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik khusus	Unit		0	12	12	12	12	48									
		RO: Percepatan Penyediaan Prasarana Air Limbah Domestik			Unit		0	25.559	29.340	30.108	20.464	106.737		0	590.654.000	592.482.000	596.140.000	593.590.000	2.372.866.000	Dit. Sanitasi
		Indikator Kinerja RO:																		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029				
		1	Jumlah KK percepatan penyediaan prasarana air limbah domestik	KK	Pusat	0	26.017	30.052	31.389	21.128	108.586	0	625.440.351	2.132.438.286	1.937.008.875	1.007.964.907	5.702.852.419	Dit. Sanitasi	
	RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/ Kota/ Kawasan			Unit		0	5	14	7	6	32								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala	KK	Pusat	0	497.504 - 986.591	1.890.324 - 1.903.305	859.744 - 2.630.016	392.980 - 2.712.204	3.653.533 - 8.219.135	0	43.545.600	49.957.000	57.788.640	64.412.190	215.703.430	Dit. Sanitasi	
	RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat			Unit		0	54	59	65	69	247								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	KK	Pusat	0	10.800 - 368.585	11.800 - 429.176	13.000 - 408.739	13.800 - 467.130	49.400 - 1.673.630	0	0	137.813.000	0	0	137.813.000	Dit. Sanitasi	
	RO: Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dengan Metode Landfill Mining			Unit		0	0	1	0	0	1								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan metode landfill mining	Unit	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	26.250.000	27.562.500	0	49.928.000	103.740.500	Dit. Sanitasi	
	RO: Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/ Kota/ Kawasan			Unit		0	1	1	0	1	3								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan skala regional/ kota/ kawasan	Unit	Pusat	0	1	1	0	1	3	0	0	170.888.000	0	285.489.000	456.377.000	Dit. Sanitasi	
	RO: Optimalisasi dan Rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah			Unit		0	0	1	0	1	2								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah unit optimalisasi dan rehabilitasi tempat pemrosesan akhir sampah	Unit	Pusat	0	0	1	0	1	2	347.431.000	0	0	0	0	347.431.000	Dit. Sanitasi	
	RO: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik IKN			Unit		3	0	0	0	0	3								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK sistem pengelolaan air limbah domestik IKN	KK	Pusat	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	Dit. Sanitasi	
	RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat IKN			Unit		0	0	0	0	0	0								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat IKN	KK	Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dit. Sanitasi	
	RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan IKN			Unit		0	1	0	0	0	1								
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK pembangunan sistem pengelolaan persampahan IKN	KK	Pusat	0	52.500	0	0	0	52.500	0	50.500.000	0	0	0	50.500.000	Dit. Sanitasi	
KRO: Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman																			
	RO: Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman			Unit		0	0	0	0	0	0								0
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK terdampak Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan	KK	0	0	0	0	0	0	0								
		RO: Pembangunan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman			Unit	Pusat	0	3	5	5	9	22	0	35.761.000	45.661.000	64.007.000	79.546.000	224.975.000	Dit. Sanitasi
	Indikator Kinerja RO:																		
		1	Jumlah KK terdampak Pembangunan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan	KK	0		1.650	2.050	2.600	3.100	9.400								
KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prioritas)																			
		RO: Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi			Kab/ Kota	Pusat	509	0	0	0	0	509	193.579.000	0	0	0	193.579.000	Dit. Sanitasi	
		RO: Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Air Limbah Domestik			Kab/ Kota	Pusat	0	10	10	10	10	40	0	5.012.500	5.290.630	5.585.410	5.897.950	21.786.490	Dit. Sanitasi
		RO: Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik			Kab/ Kota	Pusat	0	10	10	10	10	40	0	5.300.000	5.620.000	5.961.500	6.326.130	23.207.630	Dit. Sanitasi
		RO: Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD dan Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)			Kab/ Kota	Pusat	0	10	10	10	10	40	0	4.750.000	5.015.000	5.296.000	5.594.080	20.655.080	Dit. Sanitasi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		RO: Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Persampahan	Kab/Kota	Pusat	0	2	2	2	2	8	0	10.500.000	12.128.000	12.734.000	13.371.000	48.733.000	Dit. Sanitasi
		RO: Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengaturan Pengelolaan Persampahan	Kab/Kota	Pusat	0	2	2	2	2	8	0	3.675.000	3.308.000	3.473.000	3.647.000	14.102.000	Dit. Sanitasi
		RO: Pembinaan Manajemen dan Monitoring Bidang Sanitasi	Kab/Kota	Pusat	0	509	509	509	509	509	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	Dit. Sanitasi
		KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
		RO: Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi	Kab/Kota	Pusat	0	509	509	509	509	509	0	149.917.000	167.710.000	251.658.000	209.175.000	778.460.000	Dit. Sanitasi
		KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
		RO: Penyusunan Peraturan dan NSPK Air Limbah Domestik	NSPK	Pusat	0	3	5	3	3	14	0	1.320.000	2.420.000	2.396.000	1.757.000	7.893.000	Dit. Sanitasi
		RO: Penyusunan Peraturan dan NSPK Teknis Persampahan	NSPK	Pusat	0	3	3	1	2	9	0	1.320.000	1.452.000	532.400	1.171.280	4.475.680	Dit. Sanitasi
	Sasaran Program: 03.02 - Meningkatkan kualitas proses bisnis penyelenggaraan infrastruktur Cipta Karya																
		Indikator Kinerja Program:															
		1	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur cipta karya	%	89,33	89,83	90,33	90,83	91,33	91,33							
		2	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur cipta karya	%	65,00	73,13	81,25	89,38	100,00	100,00							
		3	Tingkat Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya	%	79,36	82,14	84,92	87,70	90,48	90,48							
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya											697.938.000	666.718.000	717.027.000	773.647.000	789.243.000	3.644.574.000	
	Sasaran Kegiatan: 03.03.01 - Meningkatkan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur cipta karya																
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		1	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Cipta Karya	Nilai SAKIP	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,00							
		2	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00							
		3	Nilai realisasi penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
		KRO: Perencanaan dan Penganggaran															
		RO: Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	170.072.000	0	0	0	0	170.072.000	Dit. SSPICK
		RO: Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	12.250.000	13.500.000	14.750.000	14.750.000	55.250.000	Dit. SSPICK
		RO: Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	15.555.000	0	0	0	0	15.555.000	Dit. SSPICK
		RO: Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	170.075.000	0	0	0	0	170.075.000	Dit. SSPICK
		RO: Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	16.250.000	17.500.000	18.750.000	18.750.000	71.250.000	Dit. SSPICK
		RO: Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	Dokumen	Pusat	0	35	35	35	35	140	0	230.000.000	240.000.000	250.000.000	220.000.000	940.000.000	Dit. SSPICK
		RO: Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	8.600.000	0	0	0	0	8.600.000	Dit. SSPICK
		RO: Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	34.400.000	Dit. SSPICK
		KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
		RO: Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	23.617.000	0	0	0	0	23.617.000	Dit. SSPICK
		RO: Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	Laporan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	16.250.000	17.500.000	18.750.000	18.750.000	71.250.000	Dit. SSPICK
		RO: Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum dan Air Limbah Domestik	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	5	91.460.000	91.470.000	92.020.000	92.100.000	92.040.000	459.090.000	Dit. SSPICK

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Kegiatan: 03.03.02 - Meningkatkan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
		1	Persentase Capaian NSPK Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%													
		2	Persentase Capaian Advis Teknis Keandalan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%													
		3	Persentase Capaian Layanan Teknis Kliring, Pengkajian, serta Pengembangan Teknologi dan Peralatan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%													
		4	Persentase Capaian Pejabat Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan yang mendapatkan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional	%													
		5	Persentase Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan dan Bimbingan Teknik Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%													
		6	Persentase Penyediaan Bahan Publikasi Data dan Informasi Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%													
		7	Jumlah Proyek yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum (kumulatif)	proyek													
		8	Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek													
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																
		RO: Penyusunan NSPK Bidang Permukiman dan Perumahan	NSPK	Pusat	8	0	0	0	0	8	15.681.000	0	0	0	0	15.681.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Penyusunan NSPK Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	NSPK	Pusat	0	7	7	7	7	28	0	15.681.000	17.249.000	18.974.000	20.871.000	72.775.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana																
		RO: Penyusunan Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	120	0	0	0	0	120	9.970.000	0	0	0	0	9.970.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Advis Teknis Keandalan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	83	90	97	105	375	0	14.494.000	15.943.000	17.538.000	19.292.000	67.267.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya																
		RO: Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Layanan	Pusat	17	0	0	0	0	17	15.035.000	0	0	0	0	15.035.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Kliring, Pengkajian, serta Pengembangan Teknologi dan Peralatan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Layanan	Pusat	0	21	22	23	24	90	0	15.769.000	17.346.000	19.080.000	20.988.000	73.183.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Pengelolaan laboratorium serta Studio Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Layanan	Pusat	0	332	342	352	362	1.388	2.734.000	6.016.000	6.617.000	7.729.000	8.000.000	31.096.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya (Prioritas)																
		RO: Fasilitasi Pengembangan dan Piloting Teknologi SPAM	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.000	11.602.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Fasilitasi Pengembangan dan Piloting Teknologi SPALD yang aman	Layanan	Pusat	0	1	1	1	2	5	0	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.000	11.602.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Pelatihan Bidang Infrastruktur																
		RO: Peningkatan Kompetensi Teknis dan Profesi Jabatan Fungsional	Orang	Pusat	250	480	480	480	480	2.170	6.500.000	9.000.000	9.900.000	10.980.000	12.000.000	48.380.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Bimbingan Teknik Bidang Permukiman dan Perumahan	Orang	Pusat	5.660	0	0	0	0	5.660	4.265.000	0	0	0	0	4.265.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Bimbingan Teknik Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Orang	Pusat	0	5.750	5.800	5.850	5.900	23.300	0	17.716.000	19.487.000	21.435.000	23.578.000	82.216.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Pelatihan Bidang Infrastruktur (Prioritas)																
		RO: Pembinaan Teknis Bidang Air Minum *	Orang	Pusat	540	400	400	400	400	2.140	3.208.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	41.208.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi *	Orang	Pusat	300	300	300	300	300	1.500	1.791.000	14.819.000	21.678.000	31.217.000	40.713.000	110.218.000	Dit. Bina Teknik BGPL
	KRO: Data Informasi Publik																
		RO: Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	Pusat	4	0	0	0	0	4	20.319.000	0	0	0	0	20.319.000	Dit. Bina Teknik BGPL

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		RO: Penyediaan Data dan Informasi serta Pengelolaan Teknologi dan Informasi Komunikasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Dokumen	Pusat	0	2	2	2	2	8	0	10.800.000	11.880.000	13.100.000	14.400.000	50.180.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		KRO: Kemitraan															
		RO: Penyelenggaraan Habitat	Kesepakatan	Pusat	1	0	0	0	0	1	6.425.000	0	0	0	0	6.425.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Penyelenggaraan KKN Tematik	Kesepakatan	Pusat	1	0	0	0	0	1	904.000	0	0	0	0	904.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		RO: Kemitraan, Diseminasi, serta Habitat Permukiman dan Perumahan	Kesepakatan	Pusat	0	2	2	2	2	8	0	10.890.000	11.201.000	11.522.000	11.851.000	45.464.000	Dit. Bina Teknik BGPL
		KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Prioritas)															
		RO: Fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau	Prov/Kab/Kota	Pusat	0	3	3	3	3	12	0	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.334.000	18.574.000	Dit. Bina Teknik BGPL
*) Rincian Output pada tahun 2025 termasuk dalam kegiatan Penyelenggaraan Air Minum yang Aman dan Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu																	
	Sasaran Kegiatan: 03.03.03 - Meningkatkan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Ditjen Cipta Karya																
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%		76,85	78,88	80,90	82,93	84,95	84,95							
	2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	%		78,75	83,00	87,25	91,50	93,25	93,25							
	3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	%		72,25	74,13	76,25	78,63	81,50	81,50							
		KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
		RO: Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	9.037.000	0	0	0	0	9.037.000	Dit. Kepatuhan Intern
		RO: Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	18.484.000	22.181.000	26.618.000	31.941.000	99.224.000	Dit. Kepatuhan Intern
		Indikator Kinerja RO:															
	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya&	Laporan		0	40	40	40	40	40							
		KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
		RO: Pengendalian Kepatuhan Intern Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Laporan	Pusat	1	0	0	0	0	1	7.691.000	0	0	0	0	7.691.000	Dit. Kepatuhan Intern
		RO: Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya	Laporan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	6.615.000	7.937.000	9.525.000	11.430.000	35.507.000	Dit. Kepatuhan Intern
		RO: Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya	Laporan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	6.615.000	7.937.000	9.525.000	11.430.000	35.507.000	Dit. Kepatuhan Intern
	Sasaran Kegiatan: 03.03.04 - Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Cipta Karya																
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1	Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang Cipta Karya	%		20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00							
		KRO: Operasi Bidang Penanggulangan Bencana															
		RO: Infrastruktur Tanggap Darurat	Operasi	Pusat	35	35	35	35	35	175	115.000.000	126.500.000	139.150.000	153.065.000	168.372.000	702.087.000	Setditjen Cipta Karya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											1.185.247.540	2.129.460.072	3.012.999.022	2.713.408.553	2.956.674.696	11.997.789.883	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Program: Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJCK)	%		83,50	85,25	86,55	88,30	90,05	90,05							
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA											1.185.247.540	2.129.460.072	3.012.999.022	2.713.408.553	2.956.674.696	11.997.789.883	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis																
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		1 Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	%		86,18	87,27	88,10	89,32	90,77	90,77							
		2 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Air Minum	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		3 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sanitasi	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		4 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		5 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Penataan Bangunan	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		6 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		7 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		8 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
		9 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	%		87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	89,50							
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat		94	94	94	94	94	470	2.268.000	2.600.800	2.882.480	3.196.648	3.547.417	14.495.345	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat		1	1	1	1	1	5	3.931.000	4.324.100	4.756.510	5.232.161	5.755.377	23.999.148	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat		35	35	35	35	35	175	4.576.000	8.001.800	8.801.580	9.682.038	10.650.142	41.711.560	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat		47	47	47	47	47	235	10.685.000	11.771.500	20.869.320	22.981.472	25.310.923	91.618.215	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat		47	47	47	47	47	235	37.346.000	48.093.500	52.924.570	58.243.091	64.098.677	260.705.838	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Pusat		1	1	1	1	1	5	22.000	5.024.000	5.027.000	5.029.000	5.032.000	20.134.000	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat		94	94	94	94	94	470	1.086.399.960	1.822.575.956	2.006.207.637	2.208.477.304	2.431.303.717	9.554.964.574	Setditjen Cipta Karya
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal																
	RO: Layanan Sarana Internal	unit	Pusat		47	47	47	47	47	235	9.752.000	39.050.420	42.315.180	46.546.500	51.201.746	188.865.846	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Prasarana Internal	unit	Pusat		1	1	1	1	1	5	0	143.835.000	820.370.000	300.000.000	300.000.000	1.564.205.000	Setditjen Cipta Karya
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat		94	94	94	94	94	470	22.557.580	34.097.496	37.707.015	41.718.640	46.179.192	182.259.924	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	Pusat		47	47	47	47	47	235	4.128.000	6.273.700	6.923.170	7.640.507	8.436.362	33.401.739	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Audit Internal	Layanan	Pusat		47	47	47	47	47	235	2.992.000	3.162.800	3.500.660	3.875.902	4.295.323	17.826.685	Setditjen Cipta Karya
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat		1	1	1	1	1	5	590.000	649.000	713.900	785.290	863.819	3.602.009	Setditjen Cipta Karya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA							
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)								
		RO: Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas Nasional	Hektar	Pusat	0	10	58	40	22	130	0	617.573.000	354.600.000	236.400.000	137.900.000	1.346.473.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis dan Prioritas Nasional	Kawasan		0	3	18	12	7	40														
		RO: Pengembangan Kawasan Strategis Tertentu	Hektar	Pusat	0	25	41	30	20	116	0	167.282.000	197.000.000	137.900.000	98.500.000	600.682.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis Tertentu	Kawasan		0	6	10	7	5	28														
		RO: Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Hektar	Pusat	310	0	0	0	0	310	289.485.000	0	0	0	0	289.485.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Kawasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Kawasan		310	0	0	0	0	310														
		KRO: Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Prioritas)																						
		RO: Peremajaan Permukiman Kumuh	Hektar	Pusat	7	0	0	0	0	7	18.839.000	0	0	0	0	18.839.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Kawasan Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan		1	0	0	0	0	1														
		RO: Pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Metropolitan	Hektar	Pusat	0	0	52	55	53	160	0	0	434.000.000	434.000.000	434.000.000	1.302.000.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Metropolitan	Kawasan		0	0	1	1	1	3														
		RO: Pengembangan Kawasan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	Hektar	Pusat	0	0	160	120	120	400	0	0	720.000.000	540.000.000	540.000.000	1.800.000.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	Kawasan		0	0	4	3	3	10														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Hektar	Pusat	0	5	2	2	0	9	0	70.000.000	26.701.000	26.701.000	0	123.402.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Kawasan		0	2	1	1	0	4														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	Hektar	Pusat	0	0	1,5	1,5	0	3	0	0	24.120.000	24.120.000	0	48.240.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	Kawasan		0	0	1	1	0	2														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok - Gili Tramena	Hektar	Pusat	0	0	2,5	2,5	0	5	0	0	25.896.000	25.896.000	0	51.792.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok - Gili Tramena	Kawasan		0	0	1	1	0	2														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Hektar	Pusat	0	0	1,5	1,5	0	3	0	0	25.202.000	25.202.000	0	50.404.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Kawasan		0	0	1	1	0	2														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	Hektar	Pusat	0	1,75	1,75	1,75	1,75	7	0	26.867.000	26.867.000	26.867.000	26.867.000	107.468.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	Kawasan		0	1	1	1	1	4														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	Hektar	Pusat	0	0	3	4	3	10	0	0	33.390.000	33.390.000	33.390.000	100.170.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	Kawasan		0	0	1	1	1	3														
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	Hektar	Pusat	0	0	2	2	0	4	0	0	28.783.000	28.783.000	0	57.566.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis							
		Indikator Kinerja RO:																						
	1	Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	Kawasan		0	0	1	1	0	2														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta	Hektar	Pusat	0	2	1	1	0	4	0	37.391.000	26.026.000	26.026.000	0	89.443.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta	Kawasan		0	1	1	1	0	3							
		RO: Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Bali	Hektar	Pusat	0	0	2,5	2,5	0	5	0	0	24.758.000	24.758.000	0	49.516.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Destinasi Regeneratif Bali	Kawasan		0	0	1	1	0	2							
		RO: Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Hektar	Pusat	0	0	1,5	1,5	0	3	0	0	19.261.000	19.261.000	0	38.522.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Kawasan		0	0	1	1	0	2							
		RO: Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	Hektar	Pusat	0	0	1,5	1,5	0	3	0	0	17.139.000	17.139.000	0	34.278.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	Kawasan		0	0	1	1	0	2							
		RO: Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Weda Bay	Hektar	Pusat	0	0	5	5	0	10	0	0	20.142.000	20.142.000	0	40.284.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Weda Bay&	Kawasan		0	0	1	1	0	2							
		RO: Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Morowali	Hektar	Pusat	0	0	5	5	0	10	0	0	19.141.000	19.141.000	0	38.282.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Morowali&	Kawasan		0	0	1	1	0	2							
		RO: Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Konawe	Hektar	Pusat	0	3	4	3	0	10	0	19.421.000	19.421.000	19.421.000	0	58.263.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pengembangan Kawasan Mendukung Kawasan Industri Konawe&	Kawasan		0	1	1	1	0	3							
		RO: Pembangunan Infrastruktur Kawasan Berbasis Masyarakat	Hektar	Pusat	0	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	360.000.000	1.440.000.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Berbasis Masyarakat&	Kawasan		0	600	600	600	600	2.400							
		RO: Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Hektar	Pusat	0	250	250	250	250	1.000	0	72.600.000	72.600.000	72.600.000	72.600.000	290.400.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		Indikator Kinerja RO:															
		1 Jumlah Kawasan Penanganan Kemiskinan Ekstrem&	Kawasan		0	10	10	10	10	40							
		KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
		RO: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab/Kota	Pusat	514	0	0	0	0	514	42.924.000	0	0	0	0	42.924.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis
		RO: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis	Kab/Kota	Pusat	0	514	514	514	514	514	0	67.554.000	74.309.000	81.740.000	89.914.000	313.517.000	Dit. Pengembangan Kawasan Strategis

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA		
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028		2029	TOTAL (2025-2029)
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Prasarana Strategis											21.850.006.371,68	27.158.614.158,00	31.258.989.884,30	16.278.086.533,98	14.909.302.052,13	111.454.999.000,09	
	Tujuan: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas																
	Indikator Kinerja Tujuan																
	1	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional			15,12	30,07	45,72	54,36	63,92								
	Sasaran Strategis: 04 - Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU																
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU		%		41,77	53,21	73,04	85,52	100,00								
PROGRAM 1: PRASARANA STRATEGIS											21.680.149.930,68	26.960.808.853,00	31.041.404.048,80	16.038.742.114,93	14.646.023.191,17	110.367.128.138,6	
	Sasaran Program: 04.01 - Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU																
	Indikator Kinerja Program:																
	1	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		29,75	44,44	64,47	81,66	100,00								
	2	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		31,32	43,70	71,38	83,96	100,00								
	3	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	%		80,25	82,00	84,00	86,00	88,00								
	4	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	%		72,75	76,35	80,95	84,05	88,45								
KEGIATAN 1: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN											18.736.198.927,7	22.919.905.672,0	23.640.372.688,0	13.046.372.778,0	13.078.310.000,0	91.421.160.065,7	
	Sasaran Kegiatan: 04.01.01 - Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	1	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	15,69	38,08	59,51	79,76	100,00								
	KRO: Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah																
	RO: Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah		Unit	38 Provinsi	3	40	0	0	0	43	5.004.509.124	108.858.950	0	0	0	5.113.368.074,00	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Sekolah Rakyat		Unit	38 Provinsi	100	100	100	50	50	400	10.074.036.404	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	70.074.036.403,68	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah		Unit	38 Provinsi	556	0	0	0	0	556	2.522.185.213	-	0,00	0,00	0,00	2.522.185.213,00	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah		Unit	38 Provinsi	0	800	800	800	800	3200	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME // SASARAN KEGIATAN OUTPUT // INDIKATOR)	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)
	Sasaran Kegiatan: 04.01.02 - Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	28,21	38,46	61,54	79,49	100,00								
	KKO: Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi															
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	38 Provinsi	8	0	0	0	0	8	648.571.697					648.571.697	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi	Unit	38 Provinsi	0	3	6	4	5	18		258.156.304	954.372.688	324.272.778	355.000.000	1.891.801.770	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	38 Provinsi	3	0	0	0	0	3	479.396.490					479.396.490	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan	Unit	38 Provinsi	0	1	3	3	3	10		42.890.418	175.000.000	210.000.000	210.000.000	637.890.418	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
	Sasaran Kegiatan: 04.01.03 - Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	KKO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Perencanaan, Pemrogaman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan*)	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1	5	7.500.000	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00	53.910.000,00	Dit. Infrastruktur Dukungan Pendidikan
KEGIATAN 2: PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA										2.924.420.524,0	3.895.478.398,0	7.241.064.099,5	2.816.405.349,5	1.374.152.805,0	18.251.521.176,0	
	Sasaran Kegiatan: 04.01.01 - Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	10,00	25,00	45,00	65,00	100,00								
	2 Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	7,32	19,51	43,90	70,73	100,00								
	3 Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU	%	38 Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	4 Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	-	66,67	66,67	100,00								
	5 Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	20,00	40,00	80,00	100,00								
	6 Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	-	25,00	50,00	75,00	100,00								
	7 Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	38 Provinsi	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00								
	8 Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%	39 Provinsi	22,20	60,00	100,00	100,00	100,00								
	KKO: Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman															
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	Unit	38 Provinsi	2	3	4	4	7	20	201.141.870	435.853.670	2.500.294.195	1.657.000.000	741.300.000	5.535.589.735,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	Unit	38 Provinsi	3	0	0	0	0	3	339.605.084	-	-	-	-	339.605.084,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	RO: Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	Unit	Kab. Penajam Paser Utara	6	0	0	0	0	6	308.396.750	-	-	-	-	308.396.750,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan	Unit	38 Provinsi	0	0	2	0	1	3	1.900.000	18.309.500	52.257.528		15.379.035	87.846.063,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Prasarana Strategis	Unit	38 Provinsi	1	0	1	0	0	2	74.317.536	6.360.200	6.360.200	-	-	87.037.936,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	KKO: Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan															
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian	Unit	38 Provinsi	0	5	10	11	12	38	-	255.204.707	1.139.144.941,5	821.959.850	451.443.000	2.667.752.498,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	RO: Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi	Unit	38 Provinsi	222	378	400	0	0	1000	1.965.962.684	3.050.082.000	3.227.600.000			8.243.644.684,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	KKO: Prasarana Bidang Kesehatan															
	RO: Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan	Unit	38 Provinsi	0	1	1	2	1	5	-	100.782.768	222.565.192	270.265.500	112.882.770	706.496.230,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	KKO: Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya	Unit	Lokasi Prioritas	0	1	1	1	1	4	26.096.600	20.885.553	84.042.043	57.500.000	42.500.000	231.024.196,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
	Sasaran Kegiatan: 04.01.02 - Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	KKO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya*)	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1		7.000.000	8.000.000,00	8.800.000,00	9.680.000,00	10.648.000,00	44.128.000,00	Dit. Infrastruktur Dukungan P2KOSB
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS*)										19.530.479,0	145.424.783,0	159.967.261,3	175.963.987,4	193.560.386,2	694.446.896,9	
	Sasaran Kegiatan: 04.01.01 - Meningkatkan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategiss															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	Nilai SAKIP		75	76	78	80	82								
	2 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis	Nilai IKPA		81	82	83	84	85								
	3 Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	%		100	100	100	100	100								
	4 Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	%		65	70	75	80	85								
	KKO: Perencanaan dan Penganggaran															
	RO: Perencanaan Pembangunan Prasarana Strategis	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1		2.400.000	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	15.394.800	Dit. SSPPS
	RO: Perencanaan dan Penganggaran Bidang Prasarana Strategis	Dokumen	34 SNVT	34	34	34	34	34		1.159.600	11.424.783	12.567.261	13.823.987	15.206.386	54.182.018	Dit. SSPPS
	RO: Program dan Anggaran Pembangunan Prasarana Strategis	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1		1.740.400	113.575.311	124.932.842	137.426.126	151.168.739	528.843.418	Dit. SSPPS
	RO: Pengelola Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan Pembangunan Prasarana Strategis	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1		2.000.000	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	14.994.800	Dit. SSPPS
	KKO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1		2.400.000	3.024.689	3.327.158	3.659.874	4.025.861	16.437.582	Dit. SSPPS
	KKO: Data dan Informasi Publik															
	RO: Penyediaan data dan informasi Prasarana Strategis	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1		2.330.479	2.800.000	3.080.000	3.388.000	3.726.800	15.325.279	Dit. SSPPS
	Sasaran Kegiatan: 04.01.02 - Meningkatkan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	%		66,67	71,00	78,67	81,33	87,33								
	2 Persentase Pengendalian kepatuhan intern	%		70,00	75,00	80,00	85,00	90,00								
	3 Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	%		82,50	83,50	84,50	85,50	87,50								
	KKO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1		4.500.000	4.000.000	4.400.000	4.840.000	5.324.000	23.064.000,00	Dit. Kepatuhan Intern
	KKO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Penyelenggaraan Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1		1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	13.102.500,00	Dit. Kepatuhan Intern
	RO: Penyelenggaraan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1		1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	13.102.500,00	Dit. Kepatuhan Intern
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							
PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN										169.856.441,0	197.805.305,0	217.585.835,5	239.344.419,1	263.278.861,0	1.087.870.861,5	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPS)	%		80,75	82,7	85,26	87,68	90,04								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS										169.856.441,0	197.805.305,0	217.585.835,5	239.344.419,1	263.278.861,0	1.087.870.861,5	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	%	Pusat	78,50	80,30	82,40	84,40	86,60								
	2 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	%	Pusat	70,25	72,75	75,60	78,30	81,35								
	3 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, Sosial dan Budaya	%	Pusat	70,25	72,75	75,60	78,30	81,35								
	4 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	%	Pusat	70,25	72,75	75,60	78,30	81,35								
	5 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	%	Pusat	70,25	72,75	75,60	78,30	81,35								
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39		-	860.000,00	946.000,00	1.040.600,00	1.144.660,00	3.991.260,00	
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39		7.464.400,00	12.588.160,00	13.846.976,00	15.231.673,60	16.754.840,96	65.886.050,56	
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39		141.321.348,00	168.503.405,00	185.353.745,50	203.889.120,05	224.278.032,06	923.345.650,61	
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1		150.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	292.820,00	
	RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1		-	36.200,00	39.820,00	43.802,00	48.182,20	53.000,42	
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39		1.361.000,00	4.448.004,00	4.892.804,40	5.382.084,84	5.920.293,32	22.004.186,56	
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat + 34 SNVT	35	35	35	35	35		677.200,00	2.060.998,00	2.267.097,80	2.493.807,58	2.743.188,34	10.242.291,72	
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat + 4 Unit Kerja + 34 SNVT	39	39	39	39	39		13.180.360,00	4.861.038,00	5.347.141,80	5.881.855,98	6.470.041,58	35.740.437,36	
	RO: Layanan Prasarana Internal	Unit	Pusat	1	1	1	1	1		4.472.933,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	4.937.033,00	
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1		-	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	1.392.300,00	
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat + 34 SNVT	39	39	39	39	39		292.000,00	1.230.000,00	1.353.000,00	1.488.300,00	1.637.130,00	6.000.430,00	
	RO: Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	Pusat + 34 SNVT	39	39	39	39	39		300.000,00	1.492.000,00	1.641.200,00	1.805.320,00	1.985.852,00	7.224.372,00	
	RO: Layanan Audit Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1		637.200,00	1.125.500,00	1.238.050,00	1.361.855,00	1.498.040,50	5.860.645,50	

Keterangan:

*) Untuk TA 2025 masih menggunakan KRO/RO dan Anggaran dari Fungsi Pendidikan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum										87.847.000	147.138.728	224.336.000	196.239.000	202.487.000	858.047.728	
	Tujuan: Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1 Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80	85	87,5	90	92,5								
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%		100	100	100	100	100	100							
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN										19.672.000	52.879.000	99.600.000	67.447.000	69.218.000	308.816.000	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	%		100	100	100	100	100	100							
KEGIATAN 2: PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN										3.912.000	4.175.000	8.320.000	8.390.000	8.440.000	33.237.000	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur	%		100	100	100	100	100	100							
	2 Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur	%		100	100	100	100	100	100							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	6	8	3	3	3	23	2.313.000	2.415.455	4.500.000	4.500.000	4.500.000	18.228.455	Dit. PSSPP
	RO: Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	292.000	-	-	-	-	292.000	Dit. PSSPP
	KRO: Kemitraan															
	RO: Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. PSSPP
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
	RO: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	NSPK	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	350.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	5.300.000	Dit. PSSPP
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Data dan Informasi	Dokumen	Pusat	2	3	2	2	2	11	700.000	875.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.075.000	Dit. PSSPP
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	1	3	2	2	2	9	310.000	534.545	720.000	740.000	740.000	3.044.545	Dit. PSSPP
	RO: Layanan Audit Internal	Dokumen	Pusat	2	0	0	0	0	2	297.000	-	-	-	-	297.000	Dit. PSSPP
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM										15.760.000	48.704.000	91.280.000	59.057.000	60.778.000	275.579.000	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%		100	100	100	100	100	100							
	2 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	%		100	100	100	100	100	100							
	3 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	%		100	100	100	100	100	100							
	4 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Proyek		1	4	3	4	2	14							
	5 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)		9	11	11	12	13	13							
	6 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Proyek (kumulatif)		0	0	1	1	2	2							
	7 Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Proyek		0	0	0	1	0	1							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	3	2	3	10	386.000	334.000	2.200.000	1.700.000	2.900.000	7.520.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	2.052.000	-	-	-	-	2.052.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	3	0	0	0	0	3	200.000	-	-	-	-	200.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	1	3	3	3	12	434.000	250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.184.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	2	0	0	0	0	2	1.432.000	-	-	-	-	1.432.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	3	2	3	3	3	14	1.102.000	1.140.000	4.750.000	5.150.000	5.650.000	17.792.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.365.000	-	-	-	-	1.365.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	365.000	-	-	-	-	365.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	KRO: Kemitraan															
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Bina Marga	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Air Limbah yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Proyek KPBU Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	Pusat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
	RO: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	NSPK	Pusat	1	1	1	1	1	5	857.000	600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	6.857.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	NSPK	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	480.700	1.520.000	1.620.000	1.720.000	5.340.700	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	2.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.900.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	KRO: Data dan Informasi Publik															
	RO: Data dan Informasi Hasil Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	2	1	1	4	6	14	2.193.000	1.000.000	6.500.000	7.000.000	6.600.000	23.293.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Data dan Informasi Hasil Tahap Transaksi Proyek KPBU Infrastruktur Bina Marga	Dokumen	Pusat	2	0	0	0	0	2	1.331.000	-	-	-	-	1.331.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	200.000	508.000	508.000	508.000	1.724.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Manajemen Risiko Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	Dit. PSSPP
	RO: Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	6	4	4	4	18	-	1.780.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	14.380.000	Dit. PSSPP
	RO: Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	240.000	450.000	450.000	600.000	1.740.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	60.000	400.000	400.000	400.000	1.260.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	240.000	450.000	450.000	600.000	1.740.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	46.000	480.000	480.000	480.000	480.000	1.966.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	227.000	950.000	4.050.000	3.900.000	3.900.000	13.027.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	212.000	458.000	458.000	458.000	458.000	2.044.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	287.000	656.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	5.416.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	1.070.000	475.500	650.000	680.000	680.000	3.555.500	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	10.000	27.500	28.000	28.000	28.000	121.500	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000	Dit. PSSPP
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	211.000	211.000	211.000	211.000	844.000	Dit. PSSPP
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	240.000	34.000	34.000	34.000	342.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	240.000	34.000	34.000	34.000	342.000	Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	65.226.000	84.987.728	105.784.000	109.960.000	114.137.000	480.094.728	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	1	1	1	1	1	5	180.000	800.000	350.000	350.000	350.000	2.030.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal															
	RO: Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	272	348	385	415	444	1864	135.000	500.000	850.000	850.000	850.000	3.185.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	Pusat	1	0	0	0	0	1	421.000	-	-	-	-	421.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	237.000	300.000	480.000	480.000	480.000	1.977.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	124.000	900.000	3.224.000	3.224.000	3.224.000	10.696.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
	RO: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dokumen	Pusat	0	1	1	1	1	4	-	150.000	240.000	240.000	240.000	870.000	Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

SEKRETARIAT JENDERAL

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) // SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA	
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)
Unit Organisasi: Sekretariat Jenderal										528.443	543.355	562.759	584.430	607.894	2.826.881		
	Tujuan: Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya																
		Indikator Kinerja Tujuan															
	1	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80	85	87,5	90	92,5								
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN										528.443	543.355	562.759	584.430	607.894	2.826.881		
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Setjen)	%		83,76	84,79	85,83	86,98	88,15	88,15							
KEGIATAN 1: PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN, DAN UMUM										53.595	58.837	59.388	59.962	60.561	292.343		
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum																
		Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum.	%		90,60	91,31	92,06	92,96	95,01	95,01							
	Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan		%		95,92	96,25	96,69	97,23	97,77	97,77	21.839	27.220	27.220	27.220	27.220	130.718	
	1	Tingkat kualitas layanan administrasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum	%		95,50	95,80	96,10	96,40	96,70	96,70							
	2	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	%		80,70	80,80	80,90	81,00	81,10	81,10							
	3	Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	4	Tingkat kualitas perencanaan dan administrasi anggaran sesuai pedoman	%		94,33	95,33	96,67	98,33	100,00	100,00							
	5	Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	RO: Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program		Layanan		1	0	0	0	0	1	15.414	-	-	-	-	15.414	BPAKLN
	RO: Layanan Koordinasi Kegiatan Strategis Kementerian		Layanan		0	1	1	1	1	4	-	20.795	20.795	20.795	20.795	83.179	BPAKLN
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Layanan		1	1	1	1	1	5	240	240	240	240	240	1.200	BPAKLN
	RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan		1	1	1	1	1	5	185	185	185	185	185	925	BPAKLN
	KRO: Kerja sama																
	RO: Layanan Kerja Sama Luar Negeri		Kesepakatan		1	1	1	1	1	5	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	BPAKLN
	Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan		%		79,13	80,68	82,30	84,42	86,83	86,83	8.435	8.156	8.564	8.992	9.442	43.589	
	1	Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNPB	%		43,40	47,50	54,50	61,50	70,00	70,00							
	2	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%		97,20	97,40	97,60	97,80	98,00	98,00							
	3	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian	%		92,84	92,93	93,00	93,06	93,10	93,10							
	4	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI	%		82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00							
	5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%		60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	75,00							
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	RO: Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen		17,00	14,00	14,00	14,00	14,00	73,00	8.435	2.556	2.684	2.818	2.959	19.452	Biro Keuangan
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen		0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00	-	5.600	5.880	6.174	6.483	24.137	Biro Keuangan
	Tingkat Layanan Pengelolaan BMN		%		91,35	91,79	92,23	92,70	93,14	93,14	7.029	7.170	7.313	7.460	7.609	36.581	
	1	Tingkat ketepatan waktu dokumen pengelolaan BMN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		2	Tingkat kualitas layanan Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemusnahan BMN	%	85,50	86,13	86,75	87,38	88,00	88,00							
		3	Tingkat Efektivitas Penggunaan dan Pengamanan BMN	%	90,50	91,13	91,75	92,50	93,13	93,13							
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal														
			RO: Pengelolaan BMN Kementerian PU	Layanan	1	0	0	0	0	1	6.979	-	-	-	-	6.979	Biro PBMN
			RO: Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	50	51	52	53	54	260	Biro PBMN
			KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal														
			RO: Layanan Penguatan Tata Kelola Aset Kementerian	Layanan	0	1	1	1	1	4	-	7.119	7.261	7.406	7.555	29.341	Biro PBMN
			Tingkat Layanan Pengelolaan Umum	%	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,00	16.291	16.291	16.291	16.291	16.291	81.455	
		1	Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	%	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00							
		2	Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Kerumahtanggaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
		3	Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Prasarana Fisik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
		4	Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Keamanan dan Ketertiban serta Keprotokolan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal														
			RO: Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500	Biro Umum
			RO: Layanan Protokol	Layanan	1	1	1	1	1	5	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	20.460	Biro Umum
			RO: Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.665	11.665	11.665	11.665	11.665	58.324	Biro Umum
			RO: Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	134	134	134	134	134	671	Biro Umum
			KRO: Layanan Manajemen SDM Internal														
			RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500	Biro Umum
KEGIATAN 2: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN PU											9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	47.750	
			Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian PU														
			Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian PU	%	84,07	86,01	88,00	89,79	91,79	91,79							
		1	Tingkat Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	%	86,68	88,22	90,17	92,12	94,08	94,08							
		2	Tingkat Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	%	80,15	82,70	84,75	86,30	88,35	88,35							
			KRO: Layanan Manajemen SDM Internal														
			RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	6.289	6.500	6.500	6.500	6.500	32.289	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
			KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal														
			RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Kementerian PU	Layanan	1	1	1	1	1	5	2.403	2.230	2.230	2.230	2.230	11.323	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
			RO: Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	858	820	820	820	820	4.138	Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
KEGIATAN 3: PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA ADVOKASI HUKUM											7.991	8.231	8.478	8.732	8.994	42.426	
			Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum														
			Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum	%	93,98	94,23	94,46	94,68	94,88	94,88							
		1	Tingkat Efektivitas Penyelesaian produk hukum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
		2	Tingkat Penyelesaian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	%	90,91	91,67	92,31	92,86	93,33	93,33							
		3	Tingkat Efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	4	Tingkat Efektivitas advokasi hukum	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	5	Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern	%		90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	90,30							
	6	Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR Setjen	%		71,80	72,00	72,20	72,40	72,60	72,60							
	8	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	%		82,00	82,35	82,69	83,02	83,33	83,33							
	9	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
		RO: Layanan Hukum	Layanan		1	1	1	1	1	5	4.064	4.186	4.311	4.440	4.574	21.574	Biro Hukum
		RO: Layanan Bantuan Hukum	Layanan		1	1	1	1	1	5	2.707	2.789	2.872	2.959	3.047	14.374	Biro Hukum
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
		RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan		1	1	1	1	1	5	500	515	530	546	563	2.655	Biro Hukum
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
		RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		1	1	1	1	1	5	480	494	509	525	540	2.548	Biro Hukum
		RO: Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		1	1	1	1	1	5	240	247	255	262	270	1.274	
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK											15.158	15.312	16.843	18.527	20.380	86.220	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik																
		Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%		88,50	89,50	90,65	91,80	93,65	93,65							
		Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%		88,50	89,50	90,65	91,80	93,65	93,65							
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
		RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan		1	1	1	1	1	5	453	498	548	603	663	2.766	Biro Komunikasi Publik
		RO: Penyelenggaraan Layanan Hubungan Media, Hubungan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, dan Monitoring Evaluasi Komunikasi Publik	Layanan		1	1	1	1	1	5	3.173	3.490	3.839	4.223	4.646	19.371	Biro Komunikasi Publik
		RO: Layanan Publikasi, melalui Media dan Event	Layanan		1	1	1	1	1	5	7.142	7.856	8.642	9.506	10.457	43.603	Biro Komunikasi Publik
		RO: Layanan Pelaporan Pimpinan	Layanan		1	0	0	0	0	1	1.238	-	-	-	-	1.238	Biro Komunikasi Publik
		RO: Pelayanan Publik	Layanan		1	1	1	1	1	5	2.137	2.351	2.586	2.844	3.129	13.046	Biro Komunikasi Publik
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
		RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan		1	1	1	1	1	5	772	849	934	1.028	1.130	4.713	Biro Komunikasi Publik
		RO: Pembinaan Pegawai dan Jabatan Fungsional	Layanan		1	1	1	1	1	5	243	267	294	323	356	1.484	Biro Komunikasi Publik
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH											10.792	12.432	13.677	15.045	16.548	68.494	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah																
		Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	%		95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,00							
	1	Tingkat Kualitas Fasilitasi dalam Perencanaan	%		97,66	97,75	97,90	98,08	98,50	98,50							
	2	Tingkat Kualitas Fasilitasi dalam Pembinaan	%		92,52	93,34	93,60	94,92	95,60	95,60							
	3	Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	%		89,50	90,90	92,70	93,34	93,88	93,88							
	KRO: Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah																
		RO: Fasilitasi Infrastruktur Daerah Jalan dan Jembatan	Daerah (Prov/Kab/Kota)		541	541	541	541	541	2.705	3.597	4.144	4.559	5.015	5.516	22.831	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET				TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
	2025	2026	2027			2028	2029	2025	2026		2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)			
		RO: Fasilitas Infrastruktur Daerah Sumber Daya Air	Daerah (Prov/Kab/K ota)		541	541	541	541	541	2.705	3.597	4.144	4.559	5.015	5.516	22.831	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
		RO: Fasilitas Infrastruktur Daerah Air Minum dan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab/K ota)		541	541	541	541	541	2.705	3.597	4.144	4.559	5.015	5.516	22.831	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
KEGIATAN 6: PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM											69.962	69.346	76.307	83.969	92.404	391.988	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.04 - Meningkatkan Kualitas Layanan Digital																
		Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat layanan digital	%		68,60	71,71	75,04	80,28	85,50	85,50							
	1	Tingkat Kualitas Layanan Sistem Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE))	%		40,00	40,06	41,20	41,80	42,40	42,40							
	2	Tingkat penyelenggaraan transformasi digital di Kementerian PU	%		40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	100,00							
	3	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral bidang pekerjaan umum	%		66,00	67,00	68,00	69,20	70,20	70,20							
	4	Tingkat pengelolaan digitalisasi data geospasial yang mendukung interoperabilitas serta menggunakan teknologi 3D	%		60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00							
	5	Tingkat pengelolaan data bencana infrastruktur pekerjaan umum	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	KRO: Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)																
	RO: Operasional Sistem Informasi		Layanan		1	1	1	1	1	5	2.190	11.231	12.354	13.590	14.949	54.314	Pusdatin
	KRO: Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi																
	RO: Pengadaan Software		Unit		1	1	1	1	1	5	24.287	12.580	13.838	15.221	16.744	82.670	Pusdatin
	RO: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Unit		1	1	1	1	1	5	31.858	8.500	9.350	10.285	11.314	71.307	Pusdatin
	KRO: Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi																
	RO: Pengadaan Data Center		Unit		1	0	0	0	0	1	3.967	-	-	-	-	3.967	Pusdatin
	RO: Pemeliharaan Prasarana TIK		Unit		1	0	0	0	0	1	2.418	-	-	-	-	2.418	Pusdatin
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
	RO: Layanan Manajemen SDM		Layanan		1	1	1	1	1	5	169	265	318	381	458	1.591	Pusdatin
	KRO: Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)																
	RO: Penyiapan Data dan Informasi		Layanan		1	1	1	1	1	5	5.072	36.770	40.447	44.492	48.941	175.722	Pusdatin
KEGIATAN 7: PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN											21.020	28.658	28.658	28.658	28.658	135.652	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan layanan kajian dan pemantauan kebijakan		%														
		Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan	%		75,98	78,81	81,27	83,72	86,26	86,26							
	1	Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri secara profesional dan akuntabel	%		82,20	83,90	85,60	87,30	89,00	89,00							
	2	Tingkat layanan indeks kualitas kebijakan	%		92,00	93,00	94,00	95,00	96,40	96,40							
	3	Tingkat kepuasan pengguna bahan informasi Menteri dan Wakil Menteri PU	%		75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	85,00							
	4	Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri PU	%		70,00	75,00	77,50	80,00	82,50	82,50							
	5	Tingkat efektivitas dukungan persuratan Menteri dan Wakil Menteri PU	%		60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00							
	6	Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri PU	%		72,50	75,00	77,50	80,00	82,50	82,50							
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
	RO: Layanan Analisis Kebijakan Internal		Dokumen		3	3	3	3	3	15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	27.500	Pusaka
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
	RO: Layanan Perkantoran		Layanan		1	1	1	1	1	5	15.520	21.920	21.920	21.920	21.920	103.200	Pusaka
	RO: Layanan Pelaporan Pimpinan		Layanan		0	1	1	1	1	4	-	1.238	1.238	1.238	1.238	4.952	Pusaka

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
KEGIATAN 8: DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL										340.376	340.990	349.858	359.986	370.798	1.762.008	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan dukungan manajemen Unit Kerja Sekretariat Jenderal															
	Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat dukungan manajemen Unit Kerja Sekretariat Jenderal	%		82,51	83,94	85,17	86,32	87,56	87,56							
	KOORDINATOR : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri															
	PELAKSANA : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	%		83,19	84,76	86,33	87,70	88,77	88,77							
	Output Kegiatan:									18.183	24.540	25.667	26.851	28.093	123.335	
	KRO: Layanan sarana dan prasarana internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	370	370	370	370	370	1.850	BPAKLN
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	780	1.130	1.130	1.130	1.130	5.300	BPAKLN
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	16.533	22.540	23.667	24.851	26.093	113.685	BPAKLN
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal															
	RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan		1	1	1	1	1	5	500	500	500	500	500	2.500	BPAKLN
	PELAKSANA : Biro Keuangan	%		87,02	88,32	89,61	90,87	92,17	92,17							
	Output Kegiatan:									14.617	15.663	16.113	17.213	18.338	81.944	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	751	1.150	575	650	725	3.851	Biro Keuangan
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	13.716	14.363	15.363	16.363	17.363	77.168	Biro Keuangan
	KRO: Layanan sarana dan prasarana internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	150	150	175	200	250	925	Biro Keuangan
	PELAKSANA : Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	%		82,78	83,53	84,26	84,79	85,33	85,33							
	Output Kegiatan:									30.935	32.462	34.065	35.748	37.515	170.724	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.100	1.155	1.213	1.273	1.337	6.078	Biro PBMN
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	29.235	30.697	32.231	33.843	35.535	161.541	Biro PBMN
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	200	210	221	232	243	1.105	Biro PBMN
	RO: Layanan Prasarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	400	400	400	400	400	2.000	Biro PBMN
	PELAKSANA : Biro Umum	%		80,34	82,05	83,63	85,01	85,99	85,99							
	Output Kegiatan:									162.970	162.970	162.970	162.970	162.970	814.851	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	250	250	250	250	250	1.250	Biro Umum
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	154.707	154.707	154.707	154.707	154.707	773.533	Biro Umum
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014	40.068	Biro Umum
	PELAKSANA : Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	%		78,79	80,44	81,87	83,21	85,05	85,05							
	Output Kegiatan:									33.970	17.171	17.652	18.147	18.657	105.596	
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	500	500	500	500	500	2.500	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	652	652	652	652	652	3.261	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	RO: Layanan Pekantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	32.817	16.019	16.500	16.995	17.505	99.835	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	PELAKSANA : Biro Hukum	%		87,06	88,22	89,34	90,47	91,60	91,60							
	Output Kegiatan:									15.275	15.733	16.206	16.692	17.192	81.098	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.761	1.814	1.868	1.924	1.982	9.350	Biro Hukum
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	13.264	13.662	14.072	14.494	14.929	70.421	Biro Hukum
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	250	258	265	273	281	1.327	Biro Hukum
	PELAKSANA : Biro Komunikasi Publik	%		78,94	79,29	79,70	80,09	80,49	80,49							
	Output Kegiatan:									15.768	17.745	19.519	21.471	23.618	98.121	
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	400	440	484	532	586	2.442	Biro Komunikasi Publik
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	264	690	759	835	919	3.468	Biro Komunikasi Publik
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	15.104	16.614	18.276	20.103	22.114	92.211	Biro Komunikasi Publik
	PELAKSANA : Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	%		82,08	83,46	84,83	86,20	87,58	87,58							
	Output Kegiatan:									13.322	13.707	14.007	14.307	14.607	69.949	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	11.512	11.807	12.107	12.407	12.707	60.540	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600	7.910	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah
	PELAKSANA : Pusat Data dan Teknologi Informasi	%		83,78	84,97	86,16	87,36	89,55	89,55							
	Output Kegiatan:									20.951	26.613	29.274	32.201	35.422	144.461	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	2.351	5.059	5.565	6.121	6.733	25.830	Pusdatin
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	18.047	20.506	22.556	24.812	27.293	113.214	Pusdatin
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	136	532	585	643	707	2.603	Pusdatin
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan		1	1	1	1	1	5	417	517	568	625	688	2.814	Pusdatin
	PELAKSANA : Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	%		81,15	84,36	85,92	87,48	89,07	89,07							
	Output Kegiatan:									14.386	14.386	14.386	14.386	14.386	71.929	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	10.067	Pusaka
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	12.142	12.142	12.142	12.142	12.142	60.708	Pusaka
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Paket		1	1	1	1	1	5	231	231	231	231	231	1.153	Pusaka

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI										558.368.494	599.030.193	658.953.221	724.848.567	797.333.442	3.338.533.917	
	Tujuan Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1 Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	%		80,00	85,00	87,50	90,00	92,50	92,50							
	Sasaran Strategis: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Bersertifikat	%		22,12	33,92	35,60	37,36	39,19	39,19							
PROGRAM 1: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI										20.900.000	41.000.000	45.100.001	49.610.003	54.571.005	211.181.009	
	Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi															
	Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Pembinaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	%		90,00	91,75	93,50	95,25	97,00	97,00							
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI										20.900.000	41.000.000	45.100.001	49.610.003	54.571.005	211.181.009	
	Sasaran Kegiatan: Memfasilitasi peningkatan jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Terlatih dan/atau Tersertifikasi	%		100	100	100	100	100	100							
	Sub Indikator Kinerja Kegiatan: 1. s.d 7 Jumlah SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Terlatih dan/atau Tersertifikasi oleh BJKW 1-7	Orang		15.170	22.814	23.500	24.207	24.935	110.626							
	KRO: Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur															
	RO: Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 1-6 (Terampil)	Orang	Pusat	13.945	14.881	15.328	15.788	16.262	76.204	17.187.647	20.132.646	22.145.911	24.360.503	26.796.554	110.623.261	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
	RO: Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang 7 (Ahli)	Orang	Pusat	1.225	3.943	4.062	4.184	4.310	17.724	3.712.353	7.784.436	8.562.880	9.419.168	10.361.085	39.839.922	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
	RO: Instruktur dan/atau Asesor	Orang	Pusat	-	1.296	1.335	1.376	1.418	5.425	-	6.060.870	6.666.957	7.333.653	8.067.019	28.128.499	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
	KRO: Pelatihan Vokasi															
	RO: Pelatihan Percontohan	Orang	Pusat	-	2.694	2.775	2.859	2.945	11.273	-	7.022.048	7.724.253	8.496.679	9.346.347	32.589.327	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
	Tujuan: Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya															
	Indikator Kinerja Tujuan															
	1 Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80,00	85,00	87,50	90,00	92,50	92,50							
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: 1. Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Konstruksi	%		70,85	73,35	76,85	79,59	82,01	82,01							
PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN										537.468.494	558.030.193	613.853.220	675.238.564	742.762.437	3.127.352.908	
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Pembinaan Konstruksi	%		72,94	75,72	79,61	82,66	85,34	85,34							
KEGIATAN 1: PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI										22.619.413	15.712.208	17.283.430	19.011.778	20.912.958	95.539.787	
	Sasaran Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kualitas Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	%		59,51	63,39	67,43	71,65	75,88	75,88							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Bidang Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	4	4	4	4	4	20	3.332.500	1.983.320	2.181.652	2.399.818	2.639.800	12.537.090	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Lembaga															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Lembaga	Pusat	100	780	780	780	780	3220	1.700.000	1.921.740	2.113.914	2.325.306	2.557.837	10.618.797	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi dan BJKW
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Pengelolaan MPK dan PDN	Lembaga	Pusat	32	40	40	40	40	192	200.000	3.631.768	3.994.945	4.394.440	4.833.884	17.055.037	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi dan BJKW
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Bidang Jasa Konstruksi	Kelompok Masyarakat	Pusat	20	20	20	20	20	20	250.000	297.570	327.327	360.060	396.066	1.631.023	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Terlib Usaha Jasa Konstruksi dan Profil Pasar Jasa Konstruksi	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10	970.000	618.950	680.845	748.930	823.823	3.842.548	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Terlib Pengelolaan MPK dan PDN	Laporan	Pusat	32	68	68	68	68	304	7.660.103	340.000	374.000	411.400	452.540	9.238.043	BP2JK

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Bidang Jasa Konstruksi	Laporan	Pusat	105	105	105	105	105	105	740.000	249.960	274.956	302.452	332.698	1.900.066	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Sistem Informasi Bidang Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10	650.000	386.840	425.524	468.077	514.885	2.445.326	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Kelembagaan Pemerintah serta Penerapan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Daerah	Pusat	85	85	85	85	85	85	500.000	1.075.156	1.182.672	1.300.940	1.431.034	5.489.802	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi dan BJKW
	Sasaran Kegiatan: 2. Peningkatan Kinerja Layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kinerja Layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	%		72,28	73,28	74,28	75,28	76,28	76,28							
	A. Tingkat kepuasan layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi		Pusat	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,00							
	B. Tingkat ketepatan waktu layanan rekomendasi lisensi LSP sesuai SPM		Pusat	77,30	78,30	79,30	80,30	81,30	81,30							
	C. Tingkat ketepatan waktu layanan lisensi LSBU sesuai SPM		Pusat	72,70	73,70	74,70	75,70	76,70	76,70							
	D. Tingkat ketepatan waktu layanan pencatatan dan penetapan Penilai Ahli sesuai SPM		Pusat	70,80	71,80	72,80	73,80	74,80	74,80							
	E. Tingkat ketepatan waktu layanan akreditasi Asosiasi sesuai SPM		Pusat	72,40	73,40	74,40	75,40	76,40	76,40							
	F. Tingkat ketepatan waktu layanan penyetaraan Tenaga Kerja Asing sesuai SPM		Pusat	68,90	69,90	70,90	71,90	72,90	72,90							
	G. Tingkat ketepatan waktu layanan pencatatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai SPM		Pusat	70,40	71,40	72,40	73,40	74,40	74,40							
	KRO: Pelayanan Publik kepada Masyarakat															
	RO: Layanan Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi kepada Masyarakat	Laporan	Pusat	6	6	6	6	6	6	4.900.000	3.991.734	4.390.908	4.829.999	5.312.999	23.425.640	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
	RO: Layanan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.716.810	1.215.170	1.336.687	1.470.356	1.617.392	7.356.415	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
KEGIATAN 2: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KONSTRUKSI										41.547.745	25.776.897	28.374.587	31.212.049	34.333.257	161.244.535	
	Sasaran Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kualitas Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)	%		58,79	67,36	75,56	83,91	90,26	90,26							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Bidang Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1	5	1.000.000	595.140	654.654	720.120	792.132	3.762.046	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	KRO: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria															
	RO: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi 1 s.d 3 Jabatan Kerja	NSPK	Pusat		5	4	4	4	17		1.500.000	1.320.000	1.452.000	1.597.200	5.869.200	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	RO: Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Konstruksi lebih dari 3 Jabatan Kerja	NSPK	Pusat	2		1	1	1	5	1.000.000		350.000	385.000	423.500	2.158.500	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	RO: Rancangan Materi Kompetensi Konstruksi Strategis dan/atau Percontohan	NSPK	Pusat	1	1	1	1	1	5	300.000	200.000	220.000	242.000	266.200	1.228.200	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	KRO: Pelayanan Publik kepada Masyarakat															
	RO: Layanan Penyetaraan Kompetensi Regional (Mutual Recognition Arrangement)	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	1	930.000	553.480	608.828	669.711	736.683	3.498.702	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	RO: Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	1	700.000	416.600	458.260	504.086	554.495	2.633.441	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Lembaga															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Penerapan Kompetensi TKK	Lembaga	Pusat	4	4	4	4	4	20	500.000	535.630	589.193	648.113	712.925	2.985.861	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan TKK	Kelompok Masyarakat	Pusat	10	10	10	10	10	50	510.000	244.010	268.411	295.253	324.779	1.642.453	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Bidang Penerapan Kompetensi TKK	Laporan	Pusat	24	24	24	24	24	120	3.342.400	671.800	738.980	812.878	894.166	6.460.224	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK dan BJKW
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Bidang Pembinaan Keprofesian TKK	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15	1.450.000	245.950	270.545	297.600	327.360	2.591.455	Dit. Kompetensi dan Produktivitas TKK
	Sasaran Kegiatan: 2. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Strategis															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Terlatih dan/atau Tersertifikasi	%		100	100	100	100	100	100							
	Sub Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1. s.d 7 Jumlah TKK strategis/percontohan yang terlatih dan/atau tersertifikasi oleh BJKW 1-7	Orang		6.776	11.266	11.604	11.952	12.311	53.909							
	KRO: Pelatihan Bidang Infrastruktur															
	RO: Instruktur/Asesor Jasa Konstruksi	Orang	Pusat	1.536					1.536	6.135.288		-	-	-	6.135.288	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
	RO: Tenaga Kerja Konstruksi Strategis	Orang	Pusat	5.240	11.266	11.604	11.952	12.311	52.373	25.680.057	20.814.287	22.895.716	25.185.288	27.703.817	122.279.165	Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW)
KEGIATAN 3: PEMBINAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										88.888.967	50.106.620	55.117.283	60.629.018	66.691.926	321.433.814	
	Sasaran Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kualitas Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	%		69,50	73,50	78,00	82,25	87,50	87,50							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	4	4	4	4	4	20	1.938.500	1.153.690	1.269.059	1.395.965	1.535.562	7.292.776	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	652.500	388.330	427.163	469.880	516.868	2.454.741	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Lembaga															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan E-purchasing	Lembaga	Pusat	4	4	4	4	4	4	900.000	535.630	589.193	648.113	712.925	3.385.861	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Kelembagaan dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian	Lembaga	Pusat	34	170	170	170	170	170	865.663	1.238.865	1.362.752	1.499.028	1.648.931	6.615.239	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Kontrak Konstruksi	Lembaga	Pusat	4	4	4	4	4	4	739.148	386.840	425.524	468.077	514.885	2.534.474	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Pemilihan Jasa Konstruksi	Lembaga	Pusat	7	7	7	7	7	35	605.000	360.060	396.066	435.673	479.241	2.276.040	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	RO: Fasilitas dan Pembinaan SIPBJ, SIKOMPAK dan Pengisian Data Kinerja Penyedia	Lembaga	Pusat	4	4	4	4	4	4	590.156	209.490	230.439	253.483	278.832	1.562.400	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Nilai ITKP dan Pemanfaatan E-Purchasing	Laporan	Pusat	35	35	35	35	35	35	2.305.287	1.250.455	1.375.501	1.513.052	1.664.358	8.108.653	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Tertib Proses Pemilihan	Laporan	Pusat	35	35	35	35	35	35	3.155.369	1.101.020	1.211.122	1.332.235	1.465.459	8.265.205	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Tertib Administrasi Kontrak Konstruksi	Laporan	Pusat	4	69	69	69	69	280	2.900.000	2.065.920	2.272.512	2.499.764	2.749.741	12.487.937	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Sistem Informasi Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	Pusat	35	36	36	36	36	36	2.538.502	445.170	489.687	538.656	592.522	4.604.537	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
	Sasaran Kegiatan: 2. Peningkatan Kinerja Layanan Pemilihan Jasa Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Kinerja Layanan Pemilihan Jasa Konstruksi	%		80,50	82,50	84,50	88,00	90,00	90,00							
	KRO: Pelayanan Publik Lainnya															
	RO: Layanan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi	Layanan	Pusat	35	35	35	35	35	35	71.698.842	40.971.150	45.068.265	49.575.092	54.532.602	261.845.951	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)
KEGIATAN 4: PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI										8.168.053	6.408.896	7.049.786	7.754.767	8.530.247	37.911.749	
	Sasaran Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Pembinaan Keselamatan Dan Keberlanjutan Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kualitas pembinaan keselamatan dan keberlanjutan konstruksi	%		70,00	70,00	77,50	77,50	77,50	77,50							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	3	3	3	3	3	15	2.500.000	1.487.860	1.636.646	1.800.311	1.980.343	9.405.160	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Lembaga															
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Penerapan SMK K	Lembaga	Pusat	3	32	32	32	32	131	375.000	2.121.056	2.333.162	2.566.479	2.823.127	10.218.824	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi dan BJKW
	RO: Pendampingan Penerapan SMK oleh komite keselamatan konstruksi	Lembaga	Pusat	3	3	4	4	4	18	375.000	285.080	314.248	345.673	380.241	1.700.842	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan	Lembaga	Pusat	3	3	4	4	4	18	406.250	515.790	567.369	624.106	686.517	2.800.032	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	RO: Fasilitas dan Pembinaan Penerapan SIPASTI dan tertib penyusunan perkiraan biaya konstruksi	Lembaga	Pusat	3	3	4	4	4	18	750.000	571.360	628.496	691.346	760.481	3.401.683	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMK K	Laporan	Pusat	9	68	68	68	68	281	2.605.553	340.000	374.000	411.400	452.540	4.183.493	BP2JK
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Konstruksi Berkelanjutan	Laporan	Pusat	3	3	4	4	4	18	406.250	515.790	567.369	624.106	686.517	2.800.032	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SIPASTI dan tertib penyusunan perkiraan biaya konstruksi	Laporan	Pusat	3	3	4	4	4	18	750.000	571.360	628.496	691.346	760.481	3.401.683	Dit. Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: 2. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJBK)	%		80,42	81,94	83,41	84,97	86,48	86,48							
	A. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			59,80	62,35	64,90	67,45	70,00	70,00							
	B. Tingkat Pengelolaan BMN			95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00							
	C. Tingkat layanan pembentukan produk hukum			81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00							
	D. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00							
	E. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			89,00	90,00	91,00	93,00	95,00	95,00							
	F. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			70,17	75,13	80,09	85,04	90,00	90,00							
	G. Nilai SAKIP Unit Organisasi			71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00							
	H. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik			84,46	84,92	85,38	85,84	86,30	86,30							
	I. Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi			86,55	87,41	88,28	89,14	90,00	90,00							
	J. Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi			91,22	92,54	93,49	94,20	94,52	94,52							
KEGIATAN 5: PENERAPAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO DI DITJEN BINA KONSTRUKSI										6.096.500	6.862.060	7.548.270	8.303.100	9.133.410	37.943.340	
	Sasaran Kegiatan: 1. Peningkatan Kualitas Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Ditjen Bina Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat kualitas penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	%		91,22	92,54	93,49	94,20	94,52	94,52							
	KRO: Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
	RO: Rekomendasi Kebijakan Bidang Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	1	1	1	5	123.250	892.412	981.654	1.079.820	1.187.802	4.264.938	Dit. Kepatuhan Intern
	KRO: Fasilitas dan Pembinaan Lembaga															
	RO: Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Lembaga	Pusat	48	48	48	48	48	48	1.905.000	892.412	981.654	1.079.820	1.187.802	6.046.688	Dit. Kepatuhan Intern
	RO: Fasilitas Pengendalian Permasalahan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Lembaga	Pusat	10	10	10	10	10	50	772.500	892.412	981.654	1.079.820	1.187.802	4.914.188	Dit. Kepatuhan Intern
	RO: Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Eksternal	Lembaga	Pusat	10	10	10	10	10	50	772.500	892.412	981.654	1.079.820	1.187.802	4.914.188	Dit. Kepatuhan Intern
	RO: Fasilitas ZI/WBK/SMAP	Lembaga	Pusat	41	48	48	48	48	48	2.400.000	2.400.000	2.640.000	2.904.000	3.194.400	13.538.400	Seluruh Unit Kerja di DJBK

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
	KRO: Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
	RO: Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	Pusat	3	3	3	3	3	15	123.250	892.412	981.654	1.079.820	1.187.802	4.264.938	Dit. Kepatuhan Intern
KEGIATAN 6: LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DITJEN BINA KONSTRUKSI										370.147.816	453.163.512	498.479.864	548.327.852	603.160.639	2.473.279.683	
	Sasaran Kegiatan:															
	1. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Tingkat Pembinaan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi	%		75,94	78,21	80,65	81,87	83,92	83,92							
	2 Tingkat Dukungan Manajemen Satuan Kerja Setditjen	%		74,42	77,04	79,76	82,48	85,30	85,30							
	3 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	%		60,02	66,77	72,25	77,27	81,70	81,70							
	4 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	%		62,70	68,26	72,32	77,99	81,70	81,70							
	5 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	%		77,17	78,42	79,67	81,00	82,70	82,70							
	6 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	%		65,90	69,74	74,33	78,46	82,00	82,00							
	7 Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Kepatuhan Intern	%		59,08	65,56	71,44	76,87	81,70	81,70							
	8 Tingkat Dukungan Manajemen Satuan Kerja LPJK/Balai (42 Satker)	%		70,77	74,96	78,40	81,76	84,91	84,91							
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.250.000	650.000	715.000	786.500	865.150	4.266.650	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	8.000.000	650.000	715.000	786.500	865.150	11.016.650	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat	1	48	48	48	48	48	9.618.190	7.553.616	8.308.978	9.139.876	10.053.864	44.674.524	Seluruh Unit Kerja di DJBK
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.250.000	755.800	831.380	914.518	1.005.970	4.757.668	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	48	48	48	48	48	48	326.969.624	430.844.386	473.928.825	521.321.708	573.453.879	2.326.518.422	Seluruh Unit Kerja di DJBK
	RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.080.000	650.000	715.000	786.500	865.150	4.096.650	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Data dan Informasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	1	6.000.000	5.650.000	6.215.000	6.836.500	7.520.150	32.221.650	Setditjen Bina Konstruksi
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	48	48	48	48	48	48	5.150.001	3.064.910	3.371.401	3.708.542	4.079.397	19.374.251	Seluruh Unit Kerja di DJBK
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal															
	RO: Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2.505.000	650.000	715.000	786.500	865.150	5.521.650	Setditjen Bina Konstruksi
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	1	2.950.001	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	7.591.001	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	1	3.000.000	650.000	715.000	786.500	865.150	6.016.650	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.625.000	650.000	715.000	786.500	865.150	4.641.650	Setditjen Bina Konstruksi
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	1	750.000	394.800	434.280	477.708	525.479	2.582.267	Setditjen Bina Konstruksi

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029
INSPEKTORAT JENDERAL

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME //SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET				ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA		
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028		2029	TOTAL (2025-2029)
	RO: Surat Edaran /Kebijakan terkait Pengawasan			Rancangan Peraturan	Pusat	1	6	1	0	0	8	100.000	219.000	36.500	-	-	355.500	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																	
	RO: Layanan BMN			Laporan	Pusat	7	7	7	7	7	35	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Hukum			Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	300.000	100.000	103.000	106.090	109.273	718.363	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			Layanan	Pusat	2	2	2	2	2	10	400.000	200.000	206.000	212.180	218.545	1.236.725	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Protokoler			Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	150.000	100.000	103.000	106.090	109.272	568.362	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Laporan	Pusat	8	8	8	8	8	40	450.000	100.000	206.000	212.180	218.545	1.186.725	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Perkantoran			Layanan	Pusat	2	2	2	2	2	10	62.513.264	69.460.623	73.066.261	77.457.144	81.855.281	364.352.574	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal																	
	RO: Layanan Sarana Internal			Unit	Pusat	95	157	156	161	166	735	1.368.000	1.930.080	1.975.080	2.021.430	2.069.171	9.363.761	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal													-	-	-		
	RO: Layanan Manajemen SDM			Orang	Pusat	580	589	635	687	739	3230	1.066.526	1.430.200	1.778.000	1.923.600	2.069.200	8.267.526	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Pendidikan dan Pelatihan			Orang	Pusat	1131	944	997	1087	1150	5309	5.731.657	3.922.965	4.075.906	4.578.231	4.716.113	23.024.872	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																	
	RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran			Dokumen	Pusat	7	6	6	6	6	31	700.000	200.000	206.000	212.180	218.545	1.536.725	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi			Dokumen	Pusat	43	43	43	43	43	215	435.900	240.000	243.000	246.090	249.273	1.414.263	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Manajemen Keuangan			Dokumen	Pusat	9	9	9	9	9	45	300.000	200.000	206.000	212.180	218.545	1.136.725	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Reformasi Kinerja			Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	100.000	50.000	51.500	53.045	54.636	309.181	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	100.000	50.000	51.500	53.045	54.636	309.181	Sekretariat Inspektorat Jenderal
												-						
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis																	
	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur		%		79,15	81,78	84,41	87,10	89,90	89,90							
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																		
	Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																	
	Indikator Kinerja Program 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum			%	Pusat	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90	89,90	15.872.399,00	29.312.057,00	31.371.284,64	33.662.051,56	36.073.272,03	146.291.064,23	Inspektorat Jenderal
	1	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal		Level		Level 4 (Skor 4,08)	Level 4 (Skor 4,10)	Level 4 (Skor 4,12)	Level 4 (Skor 4,15)	Level 4 (Skor 4,2)	Level 4 (Skor 4,2)							
	2	Indeks Integritas Kementerian PU		Nilai		75	76	77	78	79	79							
	3	Tingkat Pembangunan Zona Integritas		Unit Kerja		10	11	12	13	14	14							
	4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan		%		75,51	78,14	80,78	83,42	86,11	86,11							
KEGIATAN 2: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM												15.872.399	29.312.057	31.371.285	33.662.052	36.073.272	146.291.064	Inspektorat I - VI
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I																	
		Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		%	Pusat	76,30	78,62	80,93	83,23	85,54	86	2.041.420	4.715.005	5.247.816	5.781.347	6.315.620	24.101.208	Inspektorat I
	1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I		Nilai		95,00	95,20	95,40	95,50	95,70	95,70							
	2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I		%		85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00							
	3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I		%		85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I		%		73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,00							
	5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	6	Nilai SAKIP Inspektorat I		Kategori		A	A	A	A	A	A							
	7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I		Level		82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00							
						Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
						75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR			SATUAN	LOKASI	TARGET					ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						TOTAL (2025-2029)	UNIT PELAKSANA
	2025	2026	2027			2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029					
	8	Transformasi Digital Inspektorat I	Nilai			30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00							
	9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I	Nilai			40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00							
		KRO: Kerja sama																
		RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat I	Kegiatan	Pusat		1	1	1	1	1	5	150.000	100.000	103.000	106.090	109.273	568.363	Inspektorat I
		KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																
		RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat I	Rancangan Standar	Pusat		1	0	0	0	0	1	50.000	-	-	-	-	50.000	Inspektorat I
		KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal																
		RO: Layanan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air	Laporan	Pusat		204	406	421	436	451	1918	846.608	700.000	721.000	742.630	764.909	3.775.147	Inspektorat I
		RO: Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Sumber Daya Air	Laporan	Pusat		5	9	10	11	12	47	344.757	570.699	634.110	697.521	760.932	3.008.019	Inspektorat I
		RO: Layanan Audit Kinerja Bidang Sumber Daya Air	Laporan	Pusat		4	28	32	36	40	140	434.928	3.117.800	3.563.200	4.008.600	4.454.000	15.578.528	Inspektorat I
		RO: Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Sumber Daya Air	Laporan	Pusat		2	2	2	2	2	10	105.741	99.684	99.684	99.684	99.684	504.477	Inspektorat I
		RO: Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Sumber Daya Air	Laporan	Pusat		3	2	2	2	2	11	109.386	126.822	126.822	126.822	126.822	616.674	Inspektorat I
												-						
		Sasaran Kegiatan 2:																
		Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	Pusat		76,61	78,86	81,11	83,36	85,63	85,63	2.065.746	4.396.427	4.929.238	5.462.769	5.997.042	22.851.222	Inspektorat II
	1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II	Nilai			94,50	94,60	94,70	94,80	95,00	95,00							
	2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	%			85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00							
	3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	%			85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	%			75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	77,50							
	5	Tingkat Perencanaan UP&P/I Inspektorat II	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	6	Nilai SAKIP Inspektorat II	Kategori			A	A	A	A	A	A							
						80,70	80,80	80,90	81,00	81,10	81,10							
	7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II	Level			Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
						77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00							
	8	Transformasi Digital Inspektorat II	Nilai			30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00							
	9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	Nilai			40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00							
		KRO: Kerja sama																
		RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	Kegiatan	Pusat		1	1	1	1	1	5	150.000	100.000	103.000	106.090	109.273	568.363	Inspektorat II
		KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										-						
		RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	Rancangan Standar	Pusat		1	0	0	0	0	1	50.000	-				50.000	Inspektorat II
		KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal										-						
		RO: Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	Laporan	Pusat		239	599	619	639	660	2756	835.132	700.000	721.000	742.630	764.909	3.763.671	Inspektorat II
		RO: Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	Laporan	Pusat		5	9	10	11	12	47	344.757	570.699	634.110	697.521	760.932	3.008.019	Inspektorat II
		RO: Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	Laporan	Pusat		4	24	28	32	36	124	434.928	2.672.400	3.117.800	3.563.200	4.008.600	13.796.928	Inspektorat II
		RO: Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	Laporan	Pusat		2	2	2	2	2	10	105.741	99.684	99.684	99.684	99.684	504.477	Inspektorat II
		RO: Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	Laporan	Pusat		4	4	4	4	4	20	145.188	253.644	253.644	253.644	253.644	1.159.764	Inspektorat II
		Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III																
		Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	Pusat		77,84	79,80	81,82	83,84	85,85	85,85	2.432.384	4.905.238	4.952.066	5.445.699	5.940.779	23.676.165	Inspektorat III
	1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III	Nilai			94,70	94,77	94,85	94,93	95,00	95,00							
	2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III	%			85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00							
	3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III	%			85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III	%			75,25	75,50	76,00	76,50	77,00	77,00							
	5	Tingkat Perencanaan UP&P/I Inspektorat III	%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	6	Nilai SAKIP Inspektorat III	Kategori			A	A	A	A	A	A							
						80,25	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00							
	7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III	Level			Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
						81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00							
	8	Transformasi Digital Inspektorat III	Nilai			30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00							
	9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III	Nilai			61,00	61,50	62,00	62,50	63,00	63,00							
		KRO: Kerja sama																
		RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat III	Kegiatan	Pusat		1	1	1	1	1	5	300.000	100.000	103.000	106.090	109.273	718.363	Inspektorat III
		KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										-						
		RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat III	Rancangan Standar	Pusat		1	0	0	0	0	1	50.000	-	-	-	-	50.000	Inspektorat III
		KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal										-						
		RO: Layanan Pengawasan Bidang Cipta Karya	Laporan	Pusat		251	344	356	369	382	1702	906.032	700.000	721.000	742.630	764.909	3.834.571	Inspektorat III
		RO: Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Cipta Karya	Laporan	Pusat		5	12	13	14	15	59	343.987	760.932	783.760	807.273	831.491	3.527.443	Inspektorat III
		RO: Layanan Audit Kinerja Bidang Cipta Karya	Laporan	Pusat		4	28	28	32	36	128	434.928	3.117.800	3.117.800	3.563.200	4.008.600	14.242.328	Inspektorat III

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Cipta Karya	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10	105.741	99.684	99.684	99.684	99.684	504.477	Inspektorat III
	RO: Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Cipta Karya	Laporan	Pusat	8	2	2	2	2	16	291.696	126.822	126.822	126.822	126.822	798.984	Inspektorat III
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV															
	Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	%	Pusat	75,51	77,95	80,38	82,82	85,51	85,51	2.293.743	5.213.166	5.757.977	6.303.868	6.850.871	26.419.625	Inspektorat IV
	1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV	Nilai		94,60	94,70	94,80	94,90	95,00	95,00							
	2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV	%		85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00							
	3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV	%		85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV	%		65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	75,00							
	5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	6 Nilai SAKIP Inspektorat IV	Kategori		A	A	A	A	A	A							
				80,06	80,10	80,15	80,20	80,25	80,25							
	7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV	Level		Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
				86,73	86,79	86,81	86,83	86,85	86,85							
	8 Transformasi Digital Inspektorat IV	Nilai		25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00							
	9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV	Nilai		45,00	48,75	52,50	56,25	60,00	60,00							
	KRO: Kerja sama															
	RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat IV	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	150.000	500.000	515.000	530.450	546.364	2.241.814	Inspektorat IV
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
	RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat IV	Rancangan Standar	Pusat	1	0	0	0	0	1	50.000	-	-	-	-	50.000	Inspektorat IV
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Pengawasan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	Laporan	Pusat	168	226	234	242	251	953	852.205	700.000	721.000	742.630	764.909	3.780.744	Inspektorat IV
	RO: Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	Laporan	Pusat	5	14	15	16	17	62	522.360	887.754	951.165	1.014.576	1.077.987	4.453.842	Inspektorat IV
	RO: Layanan Audit Kinerja Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	Laporan	Pusat	4	24	29	32	36	121	396.948	2.672.400	3.117.800	3.563.200	4.008.600	13.758.948	Inspektorat IV
	RO: Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20	175.042	199.368	199.368	199.368	199.368	972.514	Inspektorat IV
	RO: Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Prasarana Strategis dan Pembiayaan Infrastruktur	Laporan	Pusat	4	4	4	4	4	20	147.188	253.644	253.644	253.644	253.644	1.161.764	Inspektorat IV
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V															
	Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	%	Pusat	78,78	80,89	83,00	85,12	87,23	87,23	2.973.006	5.472.726	5.698.402	5.702.905	5.820.331	25.667.370	Inspektorat V
	1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V	Nilai		94,43	94,44	94,45	94,46	94,47	94,47							
	2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V	%		85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00							
	3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V	%		85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V	%		91,20	91,30	91,40	91,50	91,60	91,60							
	5 Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	%		95,49	95,50	95,51	95,52	95,53	95,53							
	6 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	7 Nilai SAKIP Inspektorat V	Kategori		A	A	A	A	A	A							
				81,56	81,57	81,58	81,59	81,60	81,60							
	8 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V	Level		Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
				78,35	78,36	78,37	78,38	78,39	78,39							
	9 Transformasi Digital Inspektorat V	Nilai		30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00							
	10 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V	Nilai		30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00							
	KRO: Kerja sama															
	RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat V	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	150.000	100.000	103.000	106.090	109.273	568.363	Inspektorat V
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria															
	RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat V	Rancangan Standar	Pusat	1	0	0	0	0	1	50.000	-	-	-	-	50.000	Inspektorat V
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Pengawasan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	Pusat	148	302	313	324	335	1274	638.085	700.000	721.000	742.630	764.909	3.566.624	Inspektorat V
	RO: Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	Pusat	5	7	8	9	10	34	366.957	443.877	507.288	570.699	634.110	2.522.931	Inspektorat V
	RO: Layanan Audit Kinerja Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	Pusat	3	20	21	20	20	81	326.195	2.199.163	2.310.513	2.199.163	2.199.163	9.234.197	Inspektorat V
	RO: Layanan Reviu RKA-K/L Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	Pusat	10	10	10	10	10	40	506.205	498.420	498.420	498.420	498.420	2.499.885	Inspektorat V
	RO: Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang SIBB dan Bina Konstruksi	Laporan	Pusat	12	10	10	10	10	40	435.564	634.110	634.110	634.110	634.110	2.972.004	Inspektorat V

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Layanan Pengawasan Wajib Tingkat Kementerian	Laporan	Pusat	18	18	18	18	18	72	500.000	897.156	924.071	951.793	980.347	4.253.366	Inspektorat V
										-						
	Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI															
	Indikator Kinerja Kegiatan 6: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI	%	Pusat	68,00	72,74	77,42	82,16	86,89	86,89	4.066.100	4.609.495	4.785.786	4.965.464	5.148.630	23.575.475	Inspektorat VI
	1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Pengawasan Inspektorat VI	Nilai		94,50	94,60	94,70	94,80	94,90	94,90							
	2 Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif	%		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00							
	3 Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan	%		85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00							
	4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI	%		81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,00							
	5 Kumulatif Unit Kerja yang Mendapat Penghargaan/Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari TPN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	6 Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan	Rekomendasi		2	2	2	2	2	10							
	7 Tingkat Fasilitas Survei Penilaian Integritas Kementerian Pekerjaan Umum	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	8 Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan	%		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00							
	9 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	10 Nilai SAKIP Inspektorat VI	Kategori		A	A	A	A	A	A							
				80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00							
	11 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI	Level		Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4							
				75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00							
	12 Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan	Laporan		2	2	2	2	2	10							
	13 Tingkat Fasilitas Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	14 Transformasi Digital Inspektorat VI	Nilai		34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	50,00							
	15 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI	Nilai		30,00	34,00	37,00	41,00	45,00	45,00							
	KRO: Kerja sama															
	RO: Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat VI	Kegiatan	Pusat	1	1	1	1	1	5	300.000	100.000	103.000	106.090	109.273	718.363	Inspektorat VI
	KRO: Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									-						
	RO: Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat VI	Rancangan Standar	Pusat	1	0	0	0	0	1	50.000	-	-	-	-	50.000	Inspektorat VI
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal									-						
	RO: Layanan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi	Laporan	Pusat	133	26	29	32	35	122	1.162.000	1.426.822	1.529.233	1.632.814	1.737.600	7.488.469	Inspektorat VI
	RO: Layanan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian/Pengawasan Intern	Laporan	Pusat	263	42	43	44	45	174	2.554.100	3.082.673	3.153.553	3.226.560	3.301.757	15.318.643	Inspektorat VI

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA	
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		
Unit Organisasi: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
	Tujuan: Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi																	
	Indikator Kinerja Tujuan																	
	1	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	%			80	85	87,50	90	92,50								
	Sasaran Strategis: 05 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional																	
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang kompeten dan siap kerja	%			77,50	78,50	79,50	80,50	81,50	81,50							
PROGRAM 1: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI												36.375.683,00	99.648.866,00	118.332.268,00	134.365.331,00	154.002.505,00	542.724.653,00	
	Sasaran Program: 05.01 - Meningkatkan SDM Vokasional Pendidikan Bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten dan Siap Kerja																	
		Indikator Kinerja Program: Tingkat pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi bidang Pekerjaan Umum	%			77,50	78,50	79,50	80,50	81,50	81,50							
KEGIATAN 1: PENYELENGGAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM												36.375.683,00	99.648.866,00	118.332.268,00	134.365.331,00	154.002.505,00	542.724.653,00	
	Sasaran Kegiatan: 05.01.01 - Meningkatkan mutu kuantitas dan kualitas SDM vokasional pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang kompeten																	
	Indikator Kinerja Kegiatan:																	
	1	Kecukupan jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Orang			40	45	50	55	60	60							
	2	Tingkat penelitian dan PKM dosen tetap	%			35	40	40	40	45	45							
	3	Tingkat kemitraan terkait Tridharma	%			85	86	88	90	92	92							
	4	Persentase lulusan pendidikan Politeknik PU yang kompeten	%			85	86	87	88	89	89							
	KRO: Akreditasi Lembaga																	
	RO: Akreditasi Pendidikan Politeknik		Lembaga	Kota Semarang		0	1	1	1	1	4	0	1.000.000,00	1.166.331,00	1.324.747,00	1.509.261,00	5.000.339,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Akreditasi Kelembagaan Politeknik	Lembaga	Kota Semarang		0	1	1	1	1								
	KRO: Kerja Sama																	
	RO: MoU dengan Lembaga		Kegiatan	Kota Semarang		1	1	1	1	1	5	71.240,00	2.500.000,00	2.915.826,00	3.311.867,00	3.773.153,00	12.572.086,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah kegiatan kerja sama lembaga politeknik	Kegiatan	Kota Semarang		1	1	1	1	1								
	KRO: Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan																	
	RO: Pengelolaan Pendidikan Politeknik		Lembaga	Kota Semarang		1	1	1	1	1	5	6.716.648,00	10.000.000,00	11.663.305,00	13.247.470,00	15.092.611,00	56.720.034,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Tata Kelola Pendidikan Politeknik	Lembaga	Kota Semarang		1	1	1	1	1								
	RO: Pengelolaan PNBP Tri Dharma Pendidikan Tinggi		Lembaga	Kota Semarang		1	1	1	1	1	5	1.000.000,00	11.000.000,00	12.829.636,00	14.572.217,00	16.601.872,00	56.003.725,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Tata Kelola PBNP Tri Dharma Pendidikan Tinggi Politeknik	Lembaga	Kota Semarang		1	1	1	1	1								
	RO: Pengelolaan PNBP Uji Laboratorium		Lembaga	Kota Semarang		0	1	1	1	1	4	0,00	241.127,00	281.234,00	319.432,00	363.924,00	1.205.717,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Tata Kelola PNBP Uji Laboratorium	Lembaga	Kota Semarang		0	1	1	1	1								
	KRO: Sarana Bidang Pendidikan																	
	RO: Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pembelajaran		Paket	Kota Semarang		1	1	1	1	1	5	2.120.852,00	30.000.000,00	34.989.916,00	39.742.409,00	45.277.833,00	152.131.010,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pembelajaran	Paket	Kota Semarang		1	1	1	1	1								
	RO: Pengadaan Perangkat Pengolah Data		Paket	Kota Semarang		1	1	1	1	1	4	0	5.000.000,00	5.831.653,00	6.623.735,00	7.546.306,00	25.001.694,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data	Paket	Kota Semarang		0	1	1	1	1								
	KRO: Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi																	
	RO: Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	Kota Semarang		0	1	1	1	1	4	0	2.000.000,00	2.332.661,00	2.649.494,00	3.018.522,00	10.000.677,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	Kota Semarang		0	1	1	1	1								
	RO: Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Pembelajaran		Unit	Kota Semarang		0	1	1	1	1	4	0	2.000.000,00	2.332.661,00	2.649.494,00	3.018.552,00	10.000.707,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	
	1	Jumlah Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Pembelajaran	Unit	Kota Semarang		0	1	1	1	1								
	RO: Pembangunan Gedung		Unit	Kota Semarang		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO:&																	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) //SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) //INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	1	Jumlah Pembangunan Gedung	Unit	Kota Semarang	0	0	0	0	0								
	KRO: OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi																
		RO: Pemeliharaan Aset Politeknik Pekerjaan Umum	Unit	Kota Semarang	1	1	1	1	1	5	18.138.510,00	19.707.739,00	22.985.738,00	26.107.767,00	29.744.124,00	116.683.878,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Pemeliharaan Aset Politeknik Pekerjaan Umum	Unit	Kota Semarang	1	1	1	1	1								
	KRO: Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur																
		RO: Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	Orang	Kota Semarang	242	339	414	489	564	2048	2.329.106,00	3.000.000,00	3.498.992,00	3.974.241,00	4.527.783,00	17.330.122,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	Orang	Kota Semarang	242	339	414	489	564								
		RO: Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air	Orang	Kota Semarang	248	347	422	497	572	2086	2.111.659,00	3.000.000,00	3.498.992,00	3.974.241,00	4.527.783,00	17.112.675,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air	Orang	Kota Semarang	248	347	422	497	572								
		RO: Pendidikan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	Orang	Kota Semarang	250	345	420	495	570	2080	2.687.668,00	3.000.000,00	3.498.992,00	3.974.241,00	4.527.783,00	17.688.684,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	Orang	Kota Semarang	250	345	420	495	570								
		RO: Pendidikan Teknologi Konstruksi Sanitasi	Orang	Kota Semarang	50	50	175	225	250	750	0,00	1.500.000,00	1.749.496,00	1.987.120,00	2.263.892,00	7.500.508,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Teknologi Konstruksi Sanitasi	Orang	Kota Semarang	50	50	175	225	250								
		RO: Pendidikan Teknologi Konstruksi Air Minum	Orang	Kota Semarang	0	50	175	225	250	700	0,00	1.500.000,00	1.749.496,00	1.987.120,00	2.263.892,00	7.500.508,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Teknologi Konstruksi Air Minum	Orang	Kota Semarang	0	50	175	225	250								
		RO: Pendidikan Keselamatan Kerja Konstruksi	Orang	Kota Semarang	0	0	125	225	350	700	0,00	0,00	2.108.750,00	2.355.800,00	3.606.317,00	8.070.867,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Mahasiswa Pendidikan Keselamatan Kerja Konstruksi	Orang	Kota Semarang	0	0	125	225	350								
	KRO: Penelitian dan Pengembangan Produk																
		RO: Penelitian	Produk	Kota Semarang	1	3	4	4	4	16	902.844,00	2.700.000,00	1.749.496,00	1.987.120,00	2.263.892,00	9.603.352,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Penelitian	Produk	Kota Semarang	1	3	4	4	4	4							
		RO: Jurnal	Produk	Kota Semarang	0	0	6	6	6	18	0,00	0,00	1.399.597,00	1.589.696,00	1.811.113,00	4.800.406,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Jurnal yang Terpublikasi	Produk	Kota Semarang	0	0	6	6	6								
		RO: Laporan Pengabdian Masyarakat	Produk	Kota Semarang	1	15	20	20	20	76	297.156,00	1.500.000,00	1.749.496,00	1.987.120,00	2.263.892,00	7.797.664,00	Politeknik PU
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat	Produk	Kota Semarang	1	15	20	20	20								
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur PU	%		80,15	81,50	84,00	85,92	87,82	87,82							
PROGRAM 2: DUKUNGAN MANAJEMEN											241.833.863,00	279.053.714,00	325.387.845,00	369.695.642,00	421.187.039,00	1.637.158.103,00	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Program: Tingkat pembagian kompetensi SDM aparatur PU (BPSDM)	%		80,15	81,50	84,00	85,92	87,82	87,82							
KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TALENTA											9.435.223,00	7.614.392,00	8.880.898,00	10.087.142,00	11.492.106,00	47.509.761,00	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	1	Persentase penempatan talenta pada Jabatan Target Kementerian	%		90	90,5	91	91,5	92	92							
	2	Tingkat pelaksanaan pengendalian dan pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	%		79	79,5	80	80,5	81	81							
	3	Persentase pemenuhan profil kompetensi	%		90	91	93	95	97	97							
	4	Tingkat kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi	%		80	81	83	85	86	86							
	KRO: Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria																
		RO: NSPK Pengelolaan Talenta	NSPK	Pusat	2	2	2	2	2	10	434.037,00	434.037,00	506.231,00	574.989,00	655.075,00	2.604.369,00	Pusat Pengelolaan Talenta
	Indikator Kinerja RO-5																
	1	Tersusunnya NSPK Pengelolaan Talenta	NSPK	Pusat	2	2	2	2	2								
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
		RO: Penilaian Kompetensi	Orang		2.000	2.000	3.000	3.500	4.000	14.500	7.264.655,00	5.343.820,00	6.232.660,00	7.079.209,00	8.065.220,00	33.985.564,00	Balai Penilaian Kompetensi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Jumlah Peserta Penilaian Kompetensi	Orang		2.000	2.000	3.000	3.500	4.000								
	RO: SDM Dikembangkan Talenta	Orang	Pusat	300	400	500	600	700	2.500	1.016.917,00	1.006.917,00	1.174.398,00	1.333.910,00	1.519.701,00	6.051.843,00	Pusat Pengelolaan Talenta
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Jumlah SDM Dikembangkan Talentanya	Orang	Pusat	300	400	500	600	700								
	RO: Pengelolaan Kinerja	Orang	Pusat	20.090	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	550.990,00	560.990,00	654.300,00	743.170,00	846.680,00	3.356.130,00	Pusat Pengelolaan Talenta
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Persentase ASN yang dipantau Kinerjanya	Orang	Pusat	20.090	39.000	39.000	39.000	39.000								
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Laporan Kepatuhan Internal Badan Pengembangan SDM	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2	10	168.624,00	268.628,00	313.309,00	355.864,00	405.430,00	1.511.855,00	Pusat Pengelolaan Talenta
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Jumlah Laporan Kepatuhan Internal Badan Pengembangan SDM	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2								
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG PEKERJAAN UMUM																
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PU									46.844.520,00	44.239.138,00	51.606.439,00	58.625.747,00	66.790.530,00	268.106.374,00	
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase ASN kompeten melalui pendidikan	%		91	91	92	92	93	93							
	2 Persentase ASN kompeten melalui pelatihan	%		85	85	86	87	87	87							
	3 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN	%		50	58	64	72	80	80							
	4 Tingkat kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	%		84	84	88	90	91	91							
	KRO: Sertifikasi Profesi dan SDM															
	RO: Sertifikasi Profesi dan SDM	Orang	Pusat	0	90	120	150	240	600	0,00	270.000,00	323.891,00	377.764,00	429.074,00	1.400.729,00	
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Jumlah Peserta Mengikuti Uji Kompetensi LSP BPSDM	Orang	Pusat	0	90	120	150	240								
	KRO: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria															
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Sumber Daya Air	NSPK	Pusat	5	6	6	7	10	34	594.900,00	1.185.000,00	1.382.102,00	1.569.825,00	1.788.747,00	6.520.574,00	Pusat Pengembangan Kompetensi SDA, CK, dan PS
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Sumber Daya Air	NSPK	Pusat	5	6	6	7	10								
	2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Sumber Daya Air	NSPK	Pusat	0	0	0	0	0								
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Cipta Karya dan Prasarana Strategis	NSPK	Pusat	5	6	9	12	13	45	478.600,00	1.185.000,00	1.382.102,00	1.569.825,00	1.788.747,00	6.404.274,00	Pusat Pengembangan Kompetensi SDA, CK, dan PS
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Cipta Karya dan Prasarana Strategis	NSPK	Pusat	5	6	9	12	13								
	2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Cipta Karya dan Prasarana Strategis	NSPK	Pusat	0	0	0	0	0								
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Bina Marga	NSPK	Pusat	6	9	9	10	10	44	820.400,00	3.225.000,00	3.761.416,00	4.272.309,00	4.867.367,00	16.946.492,00	Pusat Pengembangan Kompetensi BM, PI, dan PIW
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Bina Marga	NSPK	Pusat	6	6	6	7	7								
	2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Bina Marga	NSPK	Pusat	0	3	3	3	3								
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur	NSPK	Pusat	2	4	2	2	2	12	486.116,00	1.075.000,00	1.253.805,00	1.424.103,00	1.622.456,00	5.861.480,00	Pusat Pengembangan Kompetensi BM, PI, dan PIW
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Pembiayaan Infrastruktur	NSPK	Pusat	2	4	2	2	2								
	2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Pembiayaan Infrastruktur	NSPK	Pusat	0	0	0	0	0								
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	NSPK	Pusat	2	2	2	2	2	10	398.560,00	1.290.000,00	1.504.566,00	1.708.924,00	1.946.947,00	6.848.997,00	Pusat Pengembangan Kompetensi BM, PI, dan PIW
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	NSPK	Pusat	2	2	2	2	2								
	2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	NSPK	Pusat	0	0	0	0	0								
	RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Umum dan Konstruksi	NSPK	Pusat	11	10	10	10	10	51	947.223,00	2.120.000,00	2.472.621,00	2.808.464,00	3.199.634,00	11.547.942,00	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
	Indikator Kinerja RO:❖															
	1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Manajemen Umum dan Konstruksi	NSPK	Pusat	10	9	9	9	9								
	2 Jumlah Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Bidang Manajemen Umum dan Konstruksi	NSPK	Pusat	1	1	1	1	1								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		RO: NSPK, Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Pengembangan Kompetensi Bidang Kepemimpinan dan Fungsional	NSPK	Pusat	1	3	2	2	2	10	695.830,00	950.000,00	1.108.014,00	1.258.510,00	1.433.798,00	5.446.152,00	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Tersusunnya Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Kepemimpinan dan Fungsional	NSPK	Pusat	1	3	2	2	2								
		2 Tersusunnya Skema Sertifikasi Jabatan Bidang Kepemimpinan dan Fungsional	NSPK	Pusat	0	0	0	0	0								
		KRO: Layanan Manajemen SDM Internal															
		RO: Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pusat	10.010	12.145	13.383	15.105	16.738	67.381	42.422.891,00	32.939.138,00	38.417.922,00	43.636.023,00	49.713.760,00	207.129.734,00	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Balai Pengembangan Kompetensi
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Terdidik	Orang	Pusat	320	307	321	410	410								
		2 Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Terlatih	Orang	Pusat	9.690	11.838	13.062	14.695	16.328								
		Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya															
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	%		91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							
		Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
		Indikator Kinerja Program: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (BPSDM)	%		84,18	84,44	84,85	85,15	85,45	85,45							
KEGIATAN 4: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											185.554.120,00	227.200.184,00	264.900.508,00	300.982.753,00	342.904.403,00	1.321.541.968,00	
		Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya															
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		1 Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Badan	%		89,38	89,47	89,55	89,64	89,72								
		2 Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Talenta	%		87,42	87,61	87,81	88,01	88,21								
		3 Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis	%		82,92	82,98	83,06	83,14	83,22								
		4 Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	%		79,28	79,36	79,48	79,59	79,70								
		5 Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	%		79,19	79,28	79,39	79,51	79,62								
		6 Tingkat dukungan manajemen Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah	%		83,96	84,05	84,16	84,27	84,39								
		7 Tingkat dukungan manajemen Balai Penilaian Kompetensi	%		89,26	89,50	89,61	89,85	90,09								
		8 Tingkat dukungan manajemen Politeknik Pekerjaan Umum	%		77,23	77,32	77,43	77,54	77,66								
		KRO: Kerja Sama															
		RO: MoU dengan Lembaga	Kegiatan	Pusat	2	2	2	2	2	10	638.875,00	638.000,00	744.119,00	845.189,00	962.909,00	3.829.092,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 &Jumlah MoU dengan Lembaga	Kegiatan	Pusat	2	2	2	2	2								
		KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		RO: Layanan BMN	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	361.717,00	361.000,00	421.045,00	478.234,00	544.843,00	2.166.839,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Tata Kelola BMN	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
		RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	6.165.099,00	7.033.701,00	8.203.620,00	9.317.874,00	10.615.691,00	41.335.985,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Tata Kelola Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
		RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	2.262.795,00	1.805.979,00	2.016.368,00	2.392.465,00	2.725.694,00	11.203.301,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
		RO: Layanan Data dan Informasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	2.999.102,00	2.764.012,00	3.223.752,00	3.661.616,00	4.171.616,00	16.820.098,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Tata Kelola Data dan Informasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
		RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	162.984.576,00	198.934.427,00	232.023.295,00	263.537.777,00	300.243.994,00	1.157.724.069,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
		Indikator Kinerja RO-1:															
		1 Jumlah Layanan Perkantoran Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	269	284	284	284	284	1.405	3.258.000,00	6.054.760,00	7.061.851,00	8.021.025,00	9.138.214,00	33.533.850,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Fasilitas Kantor	Unit	Pusat	269	284	284	284	284								
	RO: Layanan Prasarana Internal	Unit	Pusat	0	1	1	1	1	4	0,00	600.000,00	699.798,00	794.848,00	905.557,00	3.000.203,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	Pusat	0	1	1	1	1								
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal															
	RO: Layanan Manajemen SDM	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	569.642,00	569.000,00	663.642,00	753.781,00	858.770,00	3.414.835,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Tata Kelola Administrasi Kepegawaian dan Manajemen ASN	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
	RO: Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	Pusat	3	4	4	4	4	19	440.539,00	700.000,00	816.431,00	927.323,00	1.056.483,00	3.940.776,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Internal	Layanan	Pusat	3	4	4	4	4								
	KRO: Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	3.108.351,00	4.196.586,00	4.894.606,00	5.559.415,00	6.333.744,00	24.092.702,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Layanan Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Anggaran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
	RO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	1.458.956,00	2.221.000,00	2.590.420,00	2.942.263,00	3.352.069,00	12.564.708,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
	RO: Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	1.306.468,00	1.121.719,00	1.308.295,00	1.485.994,00	1.692.967,00	6.915.443,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1								
	RO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0,00	200.000,00	233.266,00	264.949,00	301.852,00	1.000.067,00	Seluruh Unit Kerja BPSDM
	Indikator Kinerja RO-Is															
	1 Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	0	1	1	1	1								

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2025-2029

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET					TOTAL (2025-2029)	ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)					UNIT PELAKSANA	
					2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		TOTAL (2025-2029)
Unit Organisasi: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah																	
	Tujuan: Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya																
		Indikator Kinerja Tujuan															
	1	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	%		80	85	87,50	90	92,50								
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis:															
	1	Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PU	%	Pusat	75,94	76,72	77,50	78,28	79,05	79,05							
PROGRAM 1: DUKUNGAN MANAJEMEN											310.275.782,00	172.935.476,00	227.174.122,00	196.975.441,00	204.897.604,00	1.112.258.425,00	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
		Indikator Kinerja Program: Persentase Kinerja Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU	%	Pusat	93,67	94	94,33	94,67	95	95							
KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH											236.280.000,00	83.180.000,00	136.322.500,00	101.398.000,00	107.516.000,00	664.696.500,00	
	Sasaran Kegiatan: 06.01.01 - Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU																
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1	Persentase Keselarasan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian	%	Pusat	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	2	Persentase Keselarasan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PU Jangka Panjang/Menengah dengan Perencanaan Jangka Panjang/ Menengah Nasional	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	3	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah I	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	4	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah II	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	5	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah III	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	KRO: Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah																
	RO: Renstra Kementerian PU 2025-2029		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	1	0	0	0	2	1.000.000,00	500.000	0,00	0	0	1.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PU 2025-2029		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Renstra Kementerian PU 2030-2034		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	7	0	0	0	0	7	217.580.000,00	0	0	0	0	217.580.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Infrastruktur PU		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	2	2	2	3	9	0	3.500.000,00	7.180.000,00	7.360.000,00	11.310.000,00	29.350.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Kebijakan Teknis dan Strategi Transformasi Perkotaan Nasional		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	4	0	0	0	4	0	6.500.000,00	0	0	0	6.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Sumatera I		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.400.000,00	5.130.000,00	5.260.000,00	5.390.000,00	18.180.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Sumatera II		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.000.000,00	5.130.000,00	5.260.000,00	5.390.000,00	17.780.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Kalimantan		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.350.000,00	5.130.000,00	5.260.000,00	5.390.000,00	18.130.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Sumatera I		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Sumatera II		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Kalimantan		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Perkotaan di Wilayah I		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	4	0	0	0	4	0	8.000.000,00	0	0	0	8.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Jawa I		Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.580.000,00	5.230.000,00	5.360.000,00	5.500.000,00	18.670.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Jawa II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.580.000,00	5.230.000,00	5.360.000,00	5.500.000,00	18.670.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	2.590.000,00	5.230.000,00	5.360.000,00	5.500.000,00	18.680.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Jawa I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Jawa II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Perkotaan di Wilayah II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	4	0	0	0	4	0	7.400.000,00	0	0	0	7.400.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	3.000.000,00	5.640.000,00	5.780.000,00	5.930.000,00	20.350.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	3.000.000,00	5.640.000,00	5.780.000,00	5.930.000,00	20.350.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Prioritas di Wilayah Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	3.000.000,00	5.640.000,00	5.780.000,00	5.930.000,00	20.350.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU di Wilayah Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	0	0	1	0	0	4.200.000,00	0	0	4.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Rencana Pengembangan Infrastruktur PU Kawasan Perkotaan di Wilayah III	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	3	0	0	0	3	0	6.200.000,00	0	0	0	6.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program: Persentase Kinerja Kesinkronan Pemrograman Infrastruktur PU	%	Pusat	34,16	36,16	38,16	40,16	42,16	42,16							
KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
	Sasaran Kegiatan: 06.01.02 - Meningkatkan Kesinkronan Program dan Anggaran Infrastruktur PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1	Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan	%	Pusat	26,95	28,95	30,95	32,95	34,95	34,95						Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	2	Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan	%	Pusat	33,55	35,55	37,55	39,55	41,55	41,55						Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	3	Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan	%	Pusat	27,50	29,50	31,50	33,50	35,50	35,50						Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	4	Persentase Rancangan Program Pembangunan Tahunan dalam Alokasi Anggaran	%	Pusat	43,80	45,80	47,80	49,80	51,80	51,80						Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	KRO: Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah															
	RO: Program Infrastruktur PU Terpadu	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.350.000,00	0	0	0	0	1.350.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Terpadu	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	2	2	2	2	8	0	4.550.000,00	4.612.500,00	4.728.000,00	4.846.000,00	18.736.500,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Sumatera Bagian Utara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Sumatera Bagian Selatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Kalimantan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Sumatera I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	5.240.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Sumatera II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	5.240.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Kalimantan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	5.240.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	RO: Program Infrastruktur PU mendukung Kebijakan Tematik Nasional Wilayah I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Program Infrastruktur PU mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	750.000,00	0	0	0	0	750.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Jawa	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Bali dan Provinsi Jawa Timur	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Program Tahunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Jawa I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	3.670.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Jawa II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	3.670.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	5.240.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
	RO: Program Infrastruktur PU mendukung Kebijakan Tematik Nasional Wilayah II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Program Tahunan Wilayah Kepulauan Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Program Tahunan Wilayah Pulau Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.640.000,00	1.690.000,00	1.730.000,00	5.560.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Kepulauan Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.640.000,00	1.690.000,00	1.730.000,00	5.560.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	RO: Program dan Anggaran Prioritas Infrastruktur PU Wilayah Pulau Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	500.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.190.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	RO: Program Infrastruktur PU mendukung Kebijakan Tematik Nasional Wilayah III	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya															
	Indikator Kinerja Program: Persentase Kinerja Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	%	Pusat	100	100	100	100	100	100							
KEGIATAN 1: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
	Sasaran Kegiatan: 06.01.03 - Meningkatkan Kinerja Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU															
	Indikator Kinerja Kegiatan:															
	1 Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah I dalam Memorandum Program	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	2 Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah II dalam Memorandum Program	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	3 Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah III dalam Memorandum Program	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
	4 Tingkat Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	KRO: Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah															
	RO: Kinerja Dampak dan Manfaat Pengembangan Infrastruktur PU	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	750.000,00	0	0	0	0	750.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	2	2	2	2	8	0,00	6.000.000	4.100.000	4.220.000	4.320.000	18.640.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Sumatera Bagian Utara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.100.000,00	0	0	0	0	1.100.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Sumatera Bagian Selatan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	950.000,00	0	0	0	0	950.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Kalimantan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.300.000,00	0	0	0	0	1.300.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Sumatera I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.100.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.790.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Sumatera II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	950.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.640.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Kalimantan	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.200.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.890.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Jawa	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA	
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)		
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Bali dan Provinsi Jawa Timur	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	700.000,00	0	0	0	0	700.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Kepulauan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.200.000,00	0	0	0	0	1.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Jawa I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.100.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	5.840.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Jawa II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.330.000,00	1.540.000,00	1.580.000,00	1.620.000,00	6.070.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.150.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.840.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.400.000,00	0	0	0	0	1.400.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Kepulauan Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.200.000,00	0	0	0	0	1.200.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	RO: Kinerja Pembangunan Infrastruktur PU Terpadu di Pulau Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	1	0	0	0	0	1	1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Sulawesi	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.400.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	7.090.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Kepulauan Maluku	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.200.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	6.890.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU di Pulau Papua	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	1	1	1	1	4	0	1.500.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.160.000,00	7.870.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	
	Sasaran Strategis: 06 - Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	%	Pusat	91,14	91,38	91,63	91,88	92,13	92,13							Sekretariat Jenderal	
	Sasaran Program: 06.01 - Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya																
	Indikator Kinerja Program: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (BPIW)	%	Pusat	87,71	88,52	88,92	89,23	89,63	89,63								
KEGIATAN 2: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										73.995.782,00	89.755.476,00	90.851.622,00	95.577.441,00	97.381.604,00	447.561.925,00		
	Sasaran Kegiatan: 06.02.01 - Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	1	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat BPIW	%	Pusat	83,25	83,57	83,99	84,31	84,74	84,74							Sekretariat BPIW
	2	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	%	Pusat	78,84	79,23	79,75	80,14	80,69	80,69							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	3	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I	%	Pusat	78,61	79,00	79,52	79,91	80,46	80,46							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
	4	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	%	Pusat	78,18	78,58	79,09	79,49	80,03	80,03							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
	5	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	%	Pusat	78,29	78,68	79,20	79,59	80,14	80,14							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
6	Tingkat Kepatuhan Intern BPIW	%	Pusat	88,77	94,86	94,95	95,04	95,13	95,13							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	
	KRO: Kerja Sama																
	RO: Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	5	400.000,00	300.000,00	424.000,00	437.000,00	450.000,00	2.011.000,00	Sekretariat BPIW	
	KRO: Layanan Sarana dan Prasarana Internal																
	RO: Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	70	211	90	100	110	581	1.000.000,00	2.500.000,00	1.061.000,00	1.093.000,00	1.126.000,00	6.780.000,00	Sekretariat BPIW	
	KRO: Layanan Manajemen SDM Internal																
	RO: Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	6	213	341	341	341	1242	1.400.000,00	850.000,00	1.405.000,00	1.447.000,00	1.490.000,00	6.592.000,00	Seluruh Unit Kerja di BPIW	
	KRO: Layanan Dukungan Manajemen Internal																
	RO: Layanan Hukum	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	400.000,00	260.000,00	424.000,00	437.000,00	450.000,00	1.971.000,00	Sekretariat BPIW	
	RO: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat	3	3	2	2	2	12	1.000.000,00	1.020.000,00	943.000,00	972.000,00	1.001.000,00	4.936.000,00	Sekretariat BPIW	
	RO: Layanan Data dan Informasi	Layanan	Pusat	2	2	1	1	1	7	2.199.120,00	2.650.000,00	530.000,00	546.000,00	563.000,00	6.488.120,00	Sekretariat BPIW	
	RO: Layanan Umum	Layanan	Pusat	1	5	5	5	5	21	400.000,00	550.000,00	906.000,00	934.000,00	962.000,00	3.752.000,00	2025: Sekretariat BPIW 2026-2029: Seluruh Unit Kerja di BPIW	
	RO: Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	5	6	5	5	5	26	62.146.662,00	75.884.099,00	78.160.622,00	80.505.441,00	82.920.604,00	379.617.428,00	Seluruh Unit Kerja di BPIW	
	RO: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	5	600.000,00	535.000,00	637.000,00	656.000,00	675.000,00	3.103.000,00	Sekretariat BPIW	

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (DALAM RIBU RUPIAH)						UNIT PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL (2025-2029)	
		1	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
		2	Rasio Kab/Kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di Lokasi prioritas bencana	%	Pusat	19	38	56	78	100							
KEGIATAN 3: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN											0,00	0,00	172.500.000,00	492.500.000,00	492.500.000,00	1.157.500.000,00	
	Sasaran Kegiatan: 07.02.01 - Meningkatkan Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Non Metropolitan																
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
		1	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah Nasional	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
		2	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah I	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
		3	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah II	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
		4	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah III	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
		5	Tingkat Pelaksanaan Pemantauan Infrastruktur PU Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	%	Pusat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	KRO: Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah																
		RO: Kebijakan Teknis dan Strategi Transformasi Perkotaan Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	2	2	2	6	0	0,00	161.000.000,00	481.000.000,00	481.000.000,00	1.123.000.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
		RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Nasional	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
		RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Wilayah I	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I
		RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Wilayah II	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II
		RO: Rekomendasi Kebermanfaatan Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Wilayah III	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III
		RO: Sinkronisasi Pelaksanaan Infrastruktur PU Berketahanan Bencana	Rekomendasi Kebijakan	Pusat	0	0	1	1	1	3	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

VISI/MISI/TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
VISI	Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045					
MISI 01	Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air					
	TUJUAN 01	Meningkatnya ketahanan air nasional	Persentase capaian ketahanan air nasional	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-01 tahun ke-n dihitung dengan membagi nilai realisasi aktual terhadap nilai maksimal indeks ketahanan air nasional yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan rasio capaian. Rasio ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengkonversi nilai menjadi persentase	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun
MISI 02	Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional					
	TUJUAN 02	Menguatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan	Persentase capaian kinerja layanan konektivitas jalan	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-02 tahun ke-n dihitung dengan menambahkan nilai persentase dari capaian IKSS 1 dan IKSS 2 lalu dibagi dua sehingga menghasilkan rasio capaian. Adapun nilai realisasi aktual IKSS diperoleh dari membagi nilai waktu tempuh maksimal dengan capaian tahun ke-n dan dikalikan 100% untuk mengkonversi nilai menjadi persentase	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun
MISI 03	Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan					
	TUJUAN 03	Menguatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	Persentase capaian kinerja layanan infrastruktur dasar permukiman	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-03 tahun ke-n dihitung dengan membagi nilai realisasi aktual terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut yang akan menghasilkan rasio capaian. Rasio ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengonversi nilai menjadi persentase.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun
MISI 04	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional					
	TUJUAN 04	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas	Persentase capaian pembangunan sarana prasarana strategis yang mendukung penguatan Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-04 tahun ke-n dihitung dengan membagi nilai realisasi aktual terhadap target yang telah ditetapkan yaitu berupa kondisi nasional saat ini dan dikalikan dengan persentase proporsi anggaran. Rasio ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengonversi nilai menjadi persentase. Contoh : Kontribusi DJPS setiap tahunnya yaitu merevitalisasi madrasah dengan target yang direncanakan dibagi dengan kondisi madrasah dalam kondisi baik ditahun berjalan (baseline TA 2025 : 56.472 Unit Sekolah) untuk mendapatkan kontribusi tambahan terhadap sekolah kondisi baik	Kumulatif, meningkat setiap tahun
MISI 05	Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi					
	TUJUAN 05	Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi	Persentase capaian SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi yang terbina	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-05 tahun ke-n dihitung dengan membagi rata-rata nilai realisasi aktual IKSS terhadap target IKSS yang telah ditetapkan pada tahun tersebut yang akan menghasilkan rasio capaian. Rasio ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengonversi nilai menjadi persentase.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun

VISI/MISI/TUJUAN			INDIKATOR TUJUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
MISI 06	Menguatkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel						
	TUJUAN 06	Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya	Persentase capaian penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-06 tahun ke-n dihitung dengan membagi rata-rata nilai realisasi aktual IKSS terhadap target IKSS yang telah ditetapkan pada tahun tersebut yang akan menghasilkan rasio capaian. Rasio ini kemudian dikalikan dengan 100% untuk mengonversi nilai menjadi persentase.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
MISI 07	Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan						
	TUJUAN 07	Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-07.1 tahun ke-n dihitung dengan menjumlahkan nilai realisasi aktual IKSS 1 dengan IKSS 3, yang akan menghasilkan nilai persentase yang akan menjadi nilai capaian IKT 7.1	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-07.2 tahun ke-n dihitung dengan membagi dua nilai penjumlahan dari realisasi aktual IKSS 2 dengan IKSS 4, yang akan menghasilkan nilai persentase yang akan menjadi nilai capaian IKT 7.2	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
			Proporsi kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-07.3 tahun ke-n dihitung dengan menjumlahkan nilai realisasi aktual IKSS 5 dengan IKSS 7, yang akan menghasilkan nilai persentase yang akan menjadi nilai capaian IKT 7.3	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
			Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	Indikator Komposit	Persentase capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKT)-07.4 tahun ke-n dihitung dengan membagi dua nilai penjumlahan dari realisasi aktual IKSS 6 dengan IKSS 8, yang akan menghasilkan nilai persentase yang akan menjadi nilai capaian IKT 7.4	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 01	Meningkatnya Ketahanan Air Untuk Mendukung Pencapaian Swasembada Pangan, Energi, dan Air	IKSS 01	Indeks Ketahanan Air Nasional	Non Komposit	Indeks ketahanan air nasional diukur berdasarkan pedoman perhitungan indeks ketahanan air tingkat nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Dimensi untuk perhitungan indeks Ketahanan Air di Indonesia mengacu: 1) konservasi sumber daya air; 2) pendayagunaan sumber daya air; 3) pengendalian daya rusak air; 4) peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan 5) peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air.	Non Kumulatif, perhitungan dilaksanakan pada tahun 2025 dan 2028	Internal dan Eksternal DJSDA
145.FC - PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR							
SP 01.01	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	IKP 01	Kapasitas Tampungan Air	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 1 = \frac{\text{Kapasitas tampung dari tampungan buatan atau alami}}{\text{Jumlah penduduk Indoensia}}$ Keterangan: Kapasitas tampungan air multiguna per kapita (m3/kapita) Kapasitas tampung dari tampungan air (m3) Jumlah penduduk indonesia (jiwa)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 02	Rasio Kapasitas Air Baku Terpasang Terhadap Kebutuhan Penduduk	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun 2. Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pantai Utara Jawa	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 2 = \frac{\text{Kapasitas air baku terpasang}}{\text{Kebutuhan air baku domestik}}$ Keterangan: Rasio kapasitas air baku terhadap kebutuhannya (%) Kapasitas air baku terpasang berdasarkan aset prasarana air baku (m3/detik) Kebutuhan air baku domestik berdasarkan jumlah penduduk (m3/detik)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 03	Persentase Luas Baku Sawah Fungsional Beririgasi	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dibangun untuk Pertanian Multikomoditas	Dihitung dengan rumus: Overlay luas layanan potensial sawah beririgasi terhadap luas baku sawah (LBS) Keterangan: Persentase LBS fungsional beririgasi (%) merupakan luas baku sawah yang memiliki sistem irigasi Perhitungan menggunakan sistem GIS Penambahan luas layanan irigasi didapatkan melalui pembangunan jaringan irigasi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 04	Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 4 = \frac{\text{Luas layanan irigasi waduk}}{\text{Luas baku irigasi permukaan sesuai Permen PUPR No.14/2015}}$ Keterangan: Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk (%) Luas layanan irigasi waduk adalah luas daerah irigasi yang airnya dijamin oleh waduk	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 05	Efisiensi Pemanfaatan Air Irigasi	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 5 = \frac{PDB\ Sektor\ Tanaman\ Pangan}{Volume\ irigasi\ per\ tahun}$ Keterangan: Efisiensi pemanfaatan air irigasi (USD/m3) PDB Sektor Tanaman Pangan (USD) Volume air irigasi per tahun (m3) Tingkat konversi IDR ke USD ditetapkan 16.000	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 06	Persentase Luas Kawasan Prioritas yang Dilindungi dari Daya Rusak Air	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air 2. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 6 = \frac{Luas\ kumulatif\ kawasan\ yang\ terlindungi\ dari\ daya\ rusak}{Luas\ kawasan\ prioritas}$ Keterangan: Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (%) Luas kumulatif kawasan yang terlindungi dari daya rusak (Ha) Luas kawasan prioritas (Ha)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 07	Tingkat Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah Kumulatif Tampung Air yang Dikelola 2. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola 3. Jumlah sempadan yang ditetapkan 4. Jumlah sungai yang dipelihara 5. Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola 6. Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana 7. Jumlah unit pengelola yang dibentuk/dioperasikan 8. Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	Dihitung dengan rumus: $Tingkat\ Kinerja\ Layanan\ Infrastruktur\ SDA = A + B + C + D + E$ Keterangan: A : Tingkat Efisiensi dan Keandalan Distribusi Air Baku Terjaga sesuai Kebutuhan Rencana (bobot 20%) B : Tingkat Reduksi resiko dan Dampak Banjir (bobot 20%) C : Tingkat Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dipelihara (%) (bobot 20%) D : Tingkat Layanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana (%) (bobot 20%) E : Tingkat Kinerja Tata Guna Air (bobot 20%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 08	Persentase Pemanfaatan Air Tanah untuk Kebutuhan Pertanian Multikomoditas	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah Debit Air Tanah yang Dimanfaatkan untuk Lahan Multikomoditas yang dibangun 2. Jumlah Debit Air Tanah yang Dimanfaatkan untuk Lahan Multikomoditas yang direhabilitasi	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 8 = \frac{Kapasitas\ terpasang\ sumur\ JIAT}{Kebutuhan\ air\ pertanian\ multikomoditas}$ Keterangan: Indeks pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan hortikultura (%) Kapasitas terpasang air tanah/JIAT (m3/detik) Kebutuhan air untuk pertanian multikomoditas (m3/detik)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 09	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 9 = \frac{Luas\ Jaringan\ Irigasi\ yang\ Direhabilitasi}{Luas\ Jaringan\ Irigasi\ dengan\ Kondisi\ Rusak}$ Keterangan: Persentase kondisi keandalan daerah irigasi Data kondisi jaringan irigasi berdasarkan data kondisi infrastruktur irigasi Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dengan total 3.237.602 hektar irigasi dalam kondisi rusak (tetap) Penambahan luas keandalan daerah irigasi didapatkan melalui rehabilitasijaringan irigasi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 01.02	Mentransformasi Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Air Terintegrasi	IKP 01	Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, Kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Tingkat kinerja layanan pembinaan tata kelola operasi dan pemeliharaan 2. Jumlah usulan perizinan yang diproses 3. Jumlah dokumen perhitungan indeks river basin organization performance benchmarking 4. Jumlah Kelompok Masyarakat Dengan Penguatan Kelembagaan	Dihitung dengan rumus: IKP 1 = A + B + C Keterangan: IKP 1: Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, Kelembagaan pengelolaan SDA dan peran serta masyarakat A: Persentase jumlah perizinan yang diproses Direktur Jenderal SDA (40%) B: Persentase pencapaian target indeks RBO (40%) C: Persentase jumlah WS kewenangan pusat yang dipelihara dengan melibatkan peran serta kelompok masyarakat (20%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 02	Tingkat Layanan Administrasi dan Teknis Operasional Dewan SDA Nasional	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Jumlah Layanan Administrasi dan Teknis Operasional DSDAN	Dihitung dengan rumus: Jumlah pelaksana tugas Sekretariat Dewan SDA Nasional berdasarkan dokumen anggarannya. Keterangan: Tugas Sekretariat DSDAN menurut PermenPUPR No. 2/PRT/M/2017, meliputi: 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja (teknis) 2. Pemberian dukungan administratif (administratif) 3. Pemberian dukungan teknis operasional (teknis) 4. Pelaksanaan pembinaan organisasi (administratif) 5. Data dan pelaporan (teknis)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 03	Tingkat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern 2. Tingkat Pengendalian Kepatuhan Intern 3. Tingkat Pemantauan Kepatuhan Intern	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kepatuhan Intern Ditjen SDA = A + B + C Keterangan: A = Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (bobot 30%) B = Tingkat Pengendalian Kepatuhan Intern (bobot 40%) C = Tingkat Pemantauan Kepatuhan Intern (bobot 30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 04	Tingkat Keselarasan Perencanaan dan Pemrograman Direktorat Jenderal SDA	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Tingkat Fasilitasi Program Pengelolaan SDA Jangka Panjang 2. Tingkat Pembinaan dan Penyelarasan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran Bidang Sumber Daya Air	Dihitung sesuai dengan tata cara perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPP) berdasarkan Permen PPN No. 3/2023 disesuaikan dengan Ditjen SDA, dengan rumus: Tingkat Keselarasan PP Ditjen SDA = Aspek Integrasi + Aspek Sinkronisasi + Aspek Keterhubungan dengan perencanaan kinerja Keterangan: Aspek integrasi (60%): Konsistensi RENJA-RPSDA, Konsistensi RENJA-RENSTRA dan kepatuhan RENJA-RKP Aspek sinkronisasi (30%): Kepatuhan anggaran RKA-RKP (DIPA awal dan akhir) Aspek keterhubungan dengan perencanaan kinerja (10%): Konsistensi cascading RENSTRA-RPJM	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKP 05	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Tingkat Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi 2. Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di Direktorat Jenderal SDA 3. Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	Nilai SAKIP dihitung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan umum berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 06	Tingkat Layanan Teknis Sumber Daya Air	Komposit: dihitung dari capaian seluruh indikator sasaran kegiatan (ISK) pada Sasaran kegiatan (SK) nomor 1, 2, dan 3 dalam lingkup kegiatan Layanan Teknis SDA (7690)	Dihitung dari penjumlahan layanan teknis yang terdiri dari kesiapan teknis, pembinaan kesiapan dan layanan teknis infrastruktur sumber daya air, layanan teknis infrastruktur dengan rumus: IKP 6 = Kesiapan teknis + Pembinaan kesiapan teknis dan layanan infrastruktur SDA + layanan teknis infrastruktur Keterangan: IKP 6 : Tingkat layanan teknis sumber daya air Kesiapan teknis (20%) dilaksanakan oleh BBWS/BWS Pembinaan kesiapan teknis dan layanan teknis infrastruktur sumber daya air (40%) dilaksanakan oleh Dit. Bina Teknik layanan teknis infrastruktur (40%) dilaksanakan oleh Balai Teknik	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 07	Tingkat Implementasi Transformasi Digital Direktorat Jenderal SDA	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1.Tingkat Pembinaan Implementasi Transformasi Digital	Nilai transformasi digital dihitung berdasarkan penilaian oleh PUSDATIN KEMENPU sesuai dengan tata cara perhitungan yang ditentukan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKP 08	Tingkat Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal SDA	Komposit: dihitung dari indikator sasaran kegiatan (ISK): 1. Tingkat Pembinaan dan Penyelarasan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran Bidang Sumber Daya Air	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja anggaran (IKPA) Unit Eselon I, nilai IKPA tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7686 - Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo							
SK 01.01.01	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Area yang Terdampak Lumpur Sidoarjo	IKK 01	Jumlah Volume Luapan Lumpur yang Dialirkan ke Kali Porong	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Volume Luapan Lumpur yang Dialirkan ke Kali Porong	Dihitung berdasarkan jumlah volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Panjang Infrastruktur Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang Dibangun/Ditingkatkan	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Panjang Infrastruktur Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang Dibangun/Ditingkatkan	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO, dihitung berdasarkan panjang pembangunan tanggul utama pengendalian lumpur Sidoarjo	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Panjang Jaringan Infrastruktur Pengendali Dampak Semburan yang Dibangun/Ditingkatkan	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Panjang Jaringan Infrastruktur Pengendali Dampak Semburan yang Dibangun/Ditingkatkan	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO, dihitung berdasarkan panjang pembangunan tanggul dan infrastruktur lainnya di kawasan terdampak semburan lumpur Sidoarjo	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Panjang jaringan infrastruktur pengendali dampak semburan yang dioperasi dan dipelihara	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Panjang Jaringan Infrastruktur Pengendali Dampak Semburan yang Dioperasi dan Dipelihara	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO, dihitung berdasarkan panjang jaringan pengendali dampak semburan yang dioperasi dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Luas Kawasan Sekitar Tampungan Lumpur Sidoarjo yang Ditata, Dimanfaatkan dan atau Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Luas Kawasan Sekitar Tampungan Lumpur Sidoarjo yang Ditata, Dimanfaatkan, dan/atau Dikelola	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO, dihitung berdasarkan luas area pengembangan kawasan terdampak semburan lumpur Sidoarjo	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 06	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Pengelolaan Lumpur Sidoarjo	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Teknis Bidang Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO, dihitung berdasarkan jumlah penyusunan dokumen teknis yang selesai	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.02	Meningkatnya pembinaan untuk peningkatan ketahanan wilayah area yang terdampak lumpur Sidoarjo	IKK 01	Tingkat kinerja layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1	Dihitung dengan rumus: rerata tingkat capaian pada sasaran kegiatan 1 (Meningkatnya Ketahanan Wilayah Area yang Terdampak Lumpur Sidoarjo)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.03	Mentransformasi tata kelola pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7687 - Kegiatan Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)							
SK 01.02.01	Meningkatnya Layanan Kesekretariatan Dewan SDA Nasional (DSDAN)	IKK 01	Jumlah Layanan Administrasi dan Teknis Operasional DSDAN	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Layanan Administrasi dan Teknis Operasional DSDAN yang Dilaksanakan	Dihitung berdasarkan penjumlahan layanan yang diberikan setiap tahun diukur dari volume indikator RO. Tugas Sekretariat DSDAN tertuang pada PermenPUPR No. 2/PRT/M/2017,	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.02	Mentransformasi tata kelola Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7688 - Kegiatan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi							
SK 01.02.01	Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA	IKK 01	Tingkat fasilitasi program pengelolaan SDA jangka panjang	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Fasilitasi Program Pengelolaan SDA Jangka Panjang	Dihitung dengan rumus: Tingkat fasilitasi pengelolaan SDA jangka panjang= A+B+C+D+E+F Keterangan: A = Persentase jumlah WS kewenangan pusat yang memiliki dokumen pola dan atau rencana pengelolaan SDA (Bobot 40%) B = Persentase jumlah WS kewenangan pusat yang memiliki nilai pemantauan rencana pengelolaan SDA di atas 50% (Bobot 20%) C = Persentase layanan integrasi perencanaan lintas sektor (Bobot 10%) D = Persentase jumlah WS kewenangan Pemda yang memperoleh pembinaan penyusunan Pola dan Rencana PSDA (Bobot 10%) E = Persentase jumlah proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sektor sumber daya air yang dicek kesesuaiannya dengan rencana pengelolaan sda dan data dukung lainnya dari Direktorat teknis/BBWS/BWS (Bobot 10%) F = Persentase tingkat kesesuaian Rincian Output (RO) Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal SDA dengan upaya dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat (10%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah dokumen pola dan rencana yang ditetapkan/direvisi	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Pola dan Rencana yang Ditetapkan/Direvisi	Dihitung berdasarkan jumlah dokumen Pola atau Rencana PSDA WS yang ditetapkan dan direvisi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	Dihitung berdasarkan jumlah wilayah sungai yang melakukan pemantauan terhadap implementasi RPSDA WS kewenangan Pusat	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Tingkat pembinaan dan penyalarsan perencanaan, pemrograman, penganggaran bidang sumber daya Air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan dan Penyalarsan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran Bidang Sumber Daya Air	Dihitung dengan rumus: Tingkat pembinaan PPP bidang SDA = A + B + C Keterangan: A = Jumlah satuan kerja dengan rata-rata nilai kualitas perencanaan anggaran minimal 50 berdasarkan sistem OMSPAN Kemenkeu (Bobot 30%) B = Kesesuaian pemrograman tahunan dengan RENSTRA SDA, diukur dari persentase jumlah indikator kinerja program (IKP) yang diprogramkan pada dokumen rencana kerja Ditjen SDA berdasarkan KRISNA RENJA Bappenas minimal 80% (Bobot 40%) Kriteria nilai: dinilai dari jumlah penggunaan IKP RENSTRA pada RENJA > 80% = 100,00 (minimal 14 indikator digunakan) 50% - 80% = 75,00 (minimal 9 indikator digunakan) < 50% = 50,00 (di bawah 9 indikator digunakan) C = Tingkat kesesuaian RO RENJA terhadap RENSTRA (Bobot 30%) PPP = Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 05	Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif bidang sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang Efektif Bidang Sumber Daya Air	Dihitung dengan rumus: Tingkat layanan kerja sama LN efektif = A + B + C Keterangan: A: Persentase target revisi AWP dibandingkan dengan realisasi revisi AWP (bobot 20%) B: Persentase jumlah satker pengelola SBSN yang memiliki deviasi RPD di bawah 25% (bobot 20%) C: Jumlah dokumen kerja sama luar negeri yang diproses setiap tahun (bobot 30%) D: Ketepatan penyampaian laporan kinerja pelaksanaan PHLN (bobot 30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 06	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT = A + B Keterangan: A: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan sistem OM-SPAN Kemenkeu (Rerata seluruh satuan kerja dalam satu UPT) (bobot 60%) B: Tingkat konsistensi pemrograman terhadap RENSTRA UPT, dihitung berdasarkan seluruh proyek (RO) yang dianggarkan (pada DIPA) terhadap pada RENSTRA UPT (bobot 40%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 07	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 08	Tingkat pembinaan pemantauan dan evaluasi	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air	Dihitung dengan rumus: Tingkat pembinaan pemantauan dan evaluasi = A + B Keterangan: A = Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui i-eMonitoring (Bobot 50%) B = Tingkat pelaporan penyelenggaraan SAKIP (Bobot 50%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 09	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di Direktorat Jenderal SDA	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Evaluasi SAKIP Entitas	Dihitung berdasarkan jumlah entitas dengan nilai SAKIP diatas 60 Entintas yang dinilai meliputi: eselon II, BBWS/BWS, Balai Teknik/Balai, dan SKPD TP-OP	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 10	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Evaluasi SAKIP Entitas	Dihitung berdasarkan jumlah entitas dengan nilai SAKIP diatas 60 Entintas yang dinilai adalah satuan kerja dalam lingkungan BBWS/BWS	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 11	Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air BBWS/BWS	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS = A + B Keterangan: A = Tingkat kepatuhan pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui i-eMonitoring (Bobot 50%) B = Tingkat pelaporan penyelenggaraan SAKIP (Bobot 50%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 12	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 13	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 14	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
SK 01.02.02	Meningkatnya layanan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	IKK 01	Tingkat layanan pembinaan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Pembinaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Sumber Daya Air	Dihitung dengan rumus: Tingkat layanan pembinaan pengadaan tanah = A + B Keterangan: A = Perbandingan jumlah luas tanah yang dibebaskan dengan kebutuhan pengadaan tanah infrastruktur Sumber Daya Air per tahun (Bobot 90%) B = Tingkat pelaporan penyelenggaraan pengadaan tanah pada minggu pertama setiap bulan, dinilai berdasarkan ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah luas pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Luas Tanah untuk Infrastruktur Sumber Daya Air yang Dibebaskan	Dihitung jumlah luas pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
7689 - Kegiatan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air							
SK 01.02.01	Meningkatnya Maturitas Kepatuhan Intern	IKK 01	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pembinaan dan pengembangan KI =A+B+C+D+E Keterangan: A = Indeks Integritas Unit Organisasi (Bobot 10%) B = Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI (Bobot 10%) C = Tingkat Pelaporan Penerapan MR UPR T-2 (Bobot 40%) D = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 10%) E = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 20%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat Pengendalian Kepatuhan Intern	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pengendalian KI =A+B+C Keterangan: A = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (37,5%) B = Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum (37,5%) C = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Tingkat Pemantauan Kepatuhan Intern	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pemantauan KI =A+B+C Keterangan: A = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi (40%) B = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (10%) C = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (50%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat KI UPT=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J Keterangan: A = Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI (3%) B = Tingkat Pelaporan Penerapan MR UPR T-3 (12%) C = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (6%) D = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (6%) E = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (15%) F = Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum (15%) G = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (10%) H = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi (15%) I = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) J = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (15%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Tingkat Kepatuhan Intern Satuan Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat KI Satker =A+B+C Keterangan: A = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (30%) B = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T3 (40%) C = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 06	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 07	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 08	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 09	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7690 - Kegiatan Layanan Teknis SDA							
SK 01.02.01	Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	IKK 01	Tingkat Layanan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Layanan Hidrologi untuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidroklimatologi, dan Hidrogeologi (SIH3)	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2. Tingkat Layanan Hidrologi untuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidroklimatologi, dan Hidrogeologi (SIH3) 3 Jumlah Pos Hidrologi yang dibangun	Dihitung dengan rumus: Persentase capaian realisasi layanan SISDA dan Sistem Informasi Hidrologi, Hidroklimatologi, dan Hidrogeologi (SIH3) Layanan SISDA dan Sistem Informasi Hidrologi meliputi: 1. kelengkapan pengisian sistem SDAir (WRDC) dari UPT 2. persentase data hidrologi tervalidasi 3. persentase data hidrologi terintegrasi portal SIH3 4. persentase pos hidrologi terbangun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Wilayah Sungai dengan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Dihitung dari jumlah wilayah sungai yang melakukan pengembangan melalui pengadaan peralatan dan pengembangan sistem	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS)	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Perhitungan Nilai Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai yang Disusun	Dihitung dari jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai yang disusun	Non Kumulatif, dihitung setiap 2 tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Tingkat kesiapan teknis	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Kesiapan Teknis	Persentase realisasi kajian teknis terhadap target kajian teknis	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai yang Disusun	Dihitungdari jumlah dokumen neraca air yang disusun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.02	Meningkatnya pembinaan kesiapan dan layanan teknis infrastruktur SDA dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	IKK 01	Tingkat Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi	Dihitung dengan rumus: Persentase jumlah pembinaan jabfung dan pengembangan profesi terhadap rencana target per tahun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat pembinaan layanan teknis sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan Layanan Teknis Sumber Daya Air	Persentase jumlah layanan teknis terhadap rencana target per tahun Layanan teknis meliputi: 1. Advis teknis 2. Rekomendasi teknis bencana 3. Bimbingan teknis	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Tingkat pembinaan sistem informasi sumber daya air (SISDA) direktorat jenderal sumber daya air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Layanan Hidrologi untuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidroklimatologi, dan Hidrogeologi (SIH3)	Dihitung dengan rumus: Tingkat pembinaan SISDA dan SIH3=A+B+C+D Keterangan: A = Persentase Kinerja data pada portal satu data sumber daya air (WRDC) (40%) B = Persentase Kinerja peralatan hidrologi yang terintegrasi dalam Portal Data Hdrologi (SIHKA) (20%) C = Persentase pos hidrologi yang terintegrasi dengan portal SIH3 (20%) D = Pemanfaatan Data Proyeksi Iklim di Indonesia Untuk Analisa Banjir Dalam Rangka Adaptasi Perubahan Iklim (20%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat penerapan NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Penerapan NSPK, Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dihitung dari persentasi jumlah layanan NSPK, teknologi dan peralatan infrastruktur yang dilakukan terhadap target pertahun Layanan meliputi: 1. Penyusunan NSPK bidang SDA 2. Kliring teknologi bidang SDA 3. Penerapan BIM pembangunan infrastruktur SDA 4. Bimbingan teknis pembinaan laboratorium bidang sumber daya air 5. Perumusan Kerja Sama dalam dan luar negeri 6. Penerapan kebijakan pelaksanaan konstruksi bidang SDA 7. Penyusunan NSPK pembinaan dan pengelolaan jafung SDA 8. Penyusunan NSPK bidang keamanan bangunan air	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Tingkat keandalan infrastruktur sumber daya air	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Keandalan Infrastruktur SDA	Dihitung dari persentase layanan teknis dihasilkan pertahun terhadap target tahunan Layanan meliputi: 1. Perizinan sumber daya air 2. Pengalihan alur sungai	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 06	Jumlah wilayah sungai Kewenangan Pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Wilayah Sungai Kewenangan Pusat dengan Neraca Air Tidak dalam Kondisi Kritis/Defisit 2. Jumlah Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai yang Disusun 3. Jumlah Dokumen Neraca Air Nasional yang Disusun	Dihitung dari penjumlahan wilayah sungai dengan nilai neraca positif (ketersediaan air > kebutuhan air) pertahun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 07	Tingkat pembinaan implementasi transformasi digital	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Tingkat Pembinaan Implementasi Transformasi Digital	Dihitung dari jumlah UPT dan UKER yang sudah memiliki predikat "sudah transformasi digital"	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.03	Meningkatnya Layanan Teknis Infrastruktur SDA	IKK 01	Persentase Layanan Teknis Balai Teknik/Balai	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Persentase Layanan Teknis Balai Teknik/Balai	Dihitung dengan rumus: Persentase jumlah realisasi layanan teknis kepada UPT terhadap target per tahun Layanan teknis meliputi: 1. Advis teknis 2. Pengujian lab 3. Data dan Informasi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah dokumen pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi Balai Teknik/Balai	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Pengembangan dan Perekayasaan Balai Teknik/Balai	Dihitung dengan jumlah dokumen pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi bidang SDA yang disusun oleh Balai Teknik/Balai	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Balai	Dihitung berdasarkan Permen PANRB no. 14 Tahun 2017 Meliputi 9 komponen: Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Prasarana	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Jumlah dokumen perhitungan indeks ketahanan air nasional (IKtA-N)	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Perhitungan Nilai Indeks Ketahanan Air Nasional yang disusun	Dihitung dari jumlah dokumen perhitungan indeks ketahanan air nasional yang disusun	Non Kumulatif, dihitung setiap 2 tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Jumlah dokumen perhitungan neraca air nasional	Indikator dihitung secara komposit dari Indikator RO: 1. Jumlah Dokumen Neraca Air Nasional yang Disusun	Dihitung dari jumlah dokumen perhitungan neraca air nasional yang disusun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.04	Meningkatnya pelaksanaan kepatuhan intern	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 05	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pada balai teknik, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 06	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 07	Tingkat implementasi transformasi digital Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7691 - Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi							
SK 01.01.01	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi	IKK 01	Jumlah luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah luas layanan irigasi yang dijamin waduk	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan tambahan layanan irigasi yang airnya bersumber dari waduk melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi. Volume air dari waduk bisa mengairi seluruh atau sebagian luas daerah irigasi sehingga tambahan luas layanan irigasi waduk tidak selalu sama dengan luas baku daerah irigasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan luas layanan irigasi dari hasil pembangunan jaringan irigasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan luas layanan irigasi dari hasil rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah dokumen teknis yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah penyusunan dokumen teknis	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.02	Meningkatnya pembinaan layanan irigasi dalam rangka peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi	IKK 01	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Irigasi dan Rawa	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1	Dihitung dengan rumus: rata-rata tingkat pencapaian indikator pada SK1	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.03	Mentransformasi tata kelola pembinaan irigasi dan rawa	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7692 - Kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai							
SK 01.01.01	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	IKK 01	Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan luas area yang aman terhadap risiko daya rusak air dari pembangunan prasarana pengendali banjir atau pengaman pantai	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana pengendali lahar/sedimen	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan kapasitas tampungan lahar/sedimen yang terbentuk oleh pembangunan sabo/check dam	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non- struktural	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non- struktural	Dihitung dari jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Jumlah dukungan teknis bidang sungai dan pantai	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah dokumen teknis yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah penyusunan dokumen teknis	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.02	Meningkatnya ketahanan terhadap risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	IKK 01	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pantai Utara Jawa	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Luas Kawasan yang Terlindungi dari Risiko Daya Rusak Air di Pesisir Utara Jawa	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan luas area yang aman terhadap risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa dari pembangunan prasarana pengendali banjir atau pengaman pantai	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non- struktural di Pesisir Utara Jawa	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Kawasan yang Menerapkan Pendekatan Terpadu Struktural dan Non-Struktural di Pesisir Utara Jawa	Dihitung dari jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural di Kawasan Pesisir Utara Jawa	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.03	Meningkatnya pembinaan pengelolaan risiko daya rusak air dalam rangka peningkatan ketahanan metropolitan dan wilayah sungai	IKK 01	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Sungai dan Pantai	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 2	Dihitung dengan rumus: Rata-rata tingkat pencapaian indikator pada SK1 dan SK2	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.04	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang sungai dan pantai	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7693 - Kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							
SK 01.01.01	Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	IKK 01	Jumlah Bendungan yang Selesai Dibangun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO berdasarkan jumlah bendungan yang selesai dibangun (<i>impounding</i>)	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO berdasarkan jumlah bendungan yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi, peningkatan, dan/atau pemasangan instrumen/prasarana pendukung	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 03	Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO berdasarkan jumlah pelaksanaan pekerjaan revitalisasi danau atau tampungan air alami, kegiatan revitalisasi meliputi: pengendalian sedimen, pengerukan, pengendalian sempadan, dan restorasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 04	Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Persentase reduksi banjir oleh bendungan	Dihitung dari rerata volume indikator RO. Tingkat reduksi debit banjir oleh tampungan waduk, tingkat reduksi dihitung berdasarkan flood routing pada spillway bendungan terhadap debit banjir kala ulang 25 tahunan (Q25th)	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 05	Jumlah dukungan teknis bidang bendungan dan danau	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah dokumen teknis yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah penyusunan dokumen teknis	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.02	Meningkatnya pembinaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan sumber air dalam rangka kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	IKK 01	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Bendungan dan Danau	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1	Dihitung dengan rumus: Rata-rata tingkat pencapaian indikator pada SK1	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.03	Meningkatnya layanan teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan sumber air	IKK 01	Tingkat Layanan Teknis Balai Teknik Bendungan	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Persentase jumlah realisasi layanan teknis terhadap rencana setiap tahun. Layanan teknis meliputi: inspeksi, sertifikasi, dan rekomendasi teknis	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan Balai Teknik Bendungan	Non Komposit	Dihitung berdasarkan Permen PANRB no. 14 Tahun 2017 Meliputi 9 komponen: Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Prasarana	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.04	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang bendungan dan danau	IKK 01	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK 02	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 03	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 04	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 05	Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari satuan kerja pada balai teknik, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 06	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK 07	Tingkat implementasi transformasi digital Balai Teknik	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7694 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku							
SK 01.01.01	Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku	IKK1	Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Dibangun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah unit embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Jumlah Embung dan Tampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang direhabilitasi	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah unit embung dan tampungan air lainnya yang direhabilitasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK3	Kapasitas Prasarana Air baku yang Dibangun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dibangun	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO berdasarkan jumlah kapasitas prasarana air baku yang dibangun	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK4	Kapasitas Prasarana Air baku yang Direhabilitasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO berdasarkan jumlah kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK5	Rasio Kapasitas Air Baku Terhadap Potensinya	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku waduk yang dibangun	Diukur berdasarkan persentase pemanfaatan air baku dari bendungan (prasarana air baku terbangun) terhadap potensi penyediaan air baku dari bendungan	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK6	Jumlah Debit Air Tanah yang Dimanfaatkan untuk Lahan Multikomoditas yang dibangun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dibangun	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO berdasarkan kapasitas sumur air tanah yang dibangun	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK7	Jumlah Debit Air Tanah yang Dimanfaatkan untuk Lahan Multikomoditas yang direhabilitasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	Diukur berdasarkan penjumlahan volume indikator RO berdasarkan kapasitas sumur air tanah yang direhabilitasi	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK8	Jumlah dukungan Teknis Bidang Air Tanah dan Air Baku	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah dokumen teknis yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan jumlah penyusunan dokumen teknis	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.02	Meningkatnya Penyediaan Pasokan Air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di pesisir utara jawa	IKK	Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara Jawa	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun di Pesisir Utara Jawa	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pantai Utara Jawa. Volume indikator dihitung berdasarkan kapasitas prasarana air baku yang dibangun/direhabilitasi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.01.03	Meningkatnya Pembinaan Layanan Air Baku dan Air Tanah Dalam Rangka Peningkatan pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku	IKK	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Air Tanah dan Air Baku	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 2	Diukur berdasarkan rata-rata tingkat pencapaian indikator pada SK1 - SK2	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.04	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang air tanah dan air baku	IKK1	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK3	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK4	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
7695 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana							
SK 01.01.01	Terjaganya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan, meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air serta dalam rangka meningkatkan ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	IKK1	Jumlah Kumulatif Tampungan Air yang Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah tampungan air (alami/buatan) yang di operasi dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Jumlah Unit Pengelola yang Dibentuk/Dioperasikan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Unit Pengelola Bendungan (UPB) yang Dibentuk/Dioperasikan 2. Jumlah Unit Pengelola Irigasi (UPI) yang Dibentuk/Dioperasikan	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah unit pengelola yang dibentuk atau dioperasionalkan Unit pengelola yang dimaksud adalah Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Unit Pengelola Irigasi (UPI)	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK3	Jumlah Sempadan yang ditetapkan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Sempadan Sungai yang Ditetapkan 2. Jumlah Sempadan Bendungan yang Ditetapkan 3. Jumlah Sempadan Danau yang Ditetapkan 4. Jumlah Sempadan Situ yang Ditetapkan 5. Jumlah Sempadan Embung yang Ditetapkan	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah penetapan sempadan yang meliputi sempadan danau, bendungan, embung, situ dan sungai	Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK4	Jumlah Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah kapasitas prasarana air baku yang dioperasikan dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK5	Luas Layanan Irigasi yang Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah luas layanan irigasi yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah luas layanan irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK6	Jumlah Tenaga Kerja yang Berpartisipasi Dalam Padat Karya	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam program padat karya P3TGA	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK7	Volume Layanan Air untuk Meningkatkan Produktivitas Irigasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan hasil pengukuran jumlah volume suplai air untuk irigasi	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK8	Jumlah Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air dalam satuan "unit" yang dioperasikan dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK9	Panjang Jaringan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dikelola	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah panjang infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah panjang infrastruktur pengendali daya rusak air dalam satuan "km" yang dioperasikan dan dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK10	Jumlah Sungai yang Dipelihara	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah sungai yang dikelola	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah sungai yang dipelihara	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK11	Layanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Layanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Dihitung berdasarkan penjumlahan operasi penanggulangan darurat akibat bencana	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.02	Meningkatnya Pembinaan, Layanan Perizinan, dan Tata Kelola Operasi dan Pemeliharaan	IKK1	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan	Indikator dihitung secara komposit dari rerata capaian seluruh indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan 1	Diukur berdasarkan rata-rata tingkat pencapaian indikator pada SK1	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Tingkat Kinerja Layanan Pembinaan Tata Kelola Operasi dan Pemeliharaan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Indeks <i>River Basin Organization Performance Benchmarking</i> 2. Jumlah Kelompok Masyarakat dengan Penguatan Kelembagaan 3. Jumlah dokumen alokasi air yang disusun 4. Jumlah Layanan BJPSDA yang Difasilitasi	Dihitung dengan rumus: Tingkat Pembinaan Tata Kelola OP=A+B+C+D+E Keterangan: A = Persentase jumlah BBWS/BWS dengan Indeks <i>River Basin Organization Performance Benchmarking</i> Diatas 3,5 (Bobot 20%) B = Persentase layanan pembinaan Lembaga Koordinasi dan Kelompok Masyarakat (Bobot 20%) C = Persentase jumlah BBWS/BWS dan badan badan usaha pengelolaan SDA yang sudah menerapkan BJPSDA (Bobot 20%) D = Persentase jumlah penetapan Alokasi Air yang tepat waktu (Juni) (Bobot30%) E = Persentase fasilitasi penyiapan konsepsi peraturan perundang-undangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK3	Jumlah Usulan Perizinan yang Diproses	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Usulan Perizinan yang Diproses	Dihitung dari jumlah usulan perizinan yang diproses	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK4	Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Fasilitasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Dihitung dari jumlah fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 01.02.03	Meningkatnya Tata Kelola Operasi dan Pemeliharaan	IKK1	Jumlah Rekomendasi Teknis yang Disusun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan rencana penyusunan dokumen rekomendasi teknis	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Jumlah Dokumen perhitungan Indeks River Basin Organization Performance Benchmarking	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Indeks River Basin Organization Performance Benchmarking	Dihitung dari Jumlah dokumen perhitungan Indeks River Basin Organization (RBO) Performance Benchmarking	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK3	Jumlah Kelompok Masyarakat Dengan Penguatan Kelembagaan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Kelompok Masyarakat dengan Penguatan Kelembagaan	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan: kelompok masyarakat peduli sungai, kelompok masyarakat peduli tampungan air, dan GNKPA	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK4	Jumlah Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Pusat yang Difasilitasi	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Pusat yang Difasilitasi	Dihitung berdasarkan penjumlahan volume indikator RO. Volume indikator RO diisi berdasarkan jumlah wadah koordinasi yang difasilitasi. Wadah koordinasi meliputi fasilitasi lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK5	Jumlah Alokasi Air yang Disusun	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Jumlah dokumen alokasi air yang disusun	Dihitung dari penjumlahan volume indikator RO dihitung berdasarkan rencana penyusunan dokumen alokasi air	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
SK 01.02.04	Mentransformasi tata kelola pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan	IKK1	Tingkat Kepatuhan Intern Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung dengan rumus: Tingkat pelaksanaan KI UKER = A + B + C + D + E + F + G Keterangan: A = Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (Bobot 6%) B = Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (Bobot 6%) C = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%) D = Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (Bobot 20%) E = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Unit Kerja (25%) F = Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (3%) G = Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti (30%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dari rerata satuan kerja pada unit kerja, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersedia pada sistem OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK3	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan nilai SAKIP entitas pada unit kerja. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan PermenPUPR No. 9 Tahun 2018	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
		IKK4	Tingkat implementasi transformasi digital Unit Kerja	Non Komposit	Dihitung berdasarkan tata cara perhitungan tingkat implementasi transformasi digital oleh PUSDATIN Kementerian PU	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal DJSDA
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSS 01	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU			

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	Komposit dari ISK 1: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen DJSDA = A + B + C + D + E + F Keterangan: A = Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (15%) B = Tingkat Pengelolaan BMN (20%) C = Tingkat layanan pembentukan produk hukum (15%) D = Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (15%) E = Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (20%) F = Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
7755 - Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air							
SK 06.01.01	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Nilai indikator kinerja anggaran 4. Nilai SAKIP 5. Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko T2 6. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 7. Tingkat layanan hukum 8. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP 9. Tingakt layanan komunikasi publik 10. Tingkat Tranasformasi digital unit kerja	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D+E+F+G+H+I+J Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) C = Nilai indikator kinerja anggaran (10%) D = Nilai SAKIP (10%) E = Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko T2 (10%) F = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (10%) G = Tingkat layanan hukum (10%) H = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan HP BPK RITL LHP (10%) I = Tingkat layanan komunikasi publik (10%) J = Tingkat Transformasi Digital Unit Kerja (10%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK3	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK4	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK5	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK6	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK7	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Irigasi dan Rawa	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK8	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Sungai dan Pantai	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK9	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bendungan dan Danau	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK10	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Air tanah dan Air Baku	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK11	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan 4. Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UKER = A+B+C+D Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (25%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (25%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (25%) D = Tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RITL LHP (25%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA
		IKK12	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	Indikator dihitung secara komposit dari indikator RO: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN 2. Tingkat layananan kepegawaiana yang diselesaikan tepat waktu 3. Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan	Dihitung dengan rumus: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen UPT=A+B+C Keterangan: A = Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (33,3%) B = Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (33,3%) C = Tingkat kualitas pengelolaan kearsipan (33,3%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal DJSDA

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 02	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan	IKSS 01	Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	Non Komposit	$AT_{ML} = \frac{\sum_i^n \left(\frac{100}{\left(\frac{D_{ML} i}{TT_{ML} i} \right)} \right)}{n}$ Keterangan: AT_{ML} = Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional = Rata-rata waktu tempuh pada lintas utama*) (jam/100 km) n = Jumlah lintas utama D_{ML}i = Jarak tempuh pada lintas utama i (km) TT_{ML}i = Waktu tempuh pada lintas utama i (jam)) Lintas utama adalah Rute Asian Highway (AH2 dan AH 25)	Non Kumulatif	Google Map
		IKSS 02	Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional	Non Komposit	$AT_{NRC} = \frac{\sum_i^n \left(\frac{100}{\left(\frac{D_{NRC} i}{TT_{NRC} i} \right)} \right)}{n}$ Keterangan: AT_{NRC} = Waktu tempuh pada jaringan jalan nasional = Rata-rata waktu tempuh pada koridor jalan nasional*) di setiap Provinsi (jam/100 km) n = Jumlah koridor jalan nasional keseluruhan D_{NRC}i = Jarak tempuh pada koridor i (km) TT_{NRC}i = Waktu tempuh koridor i (jam)) diukur pada 38 koridor yang menghubungkan seluruh PKN di Indonesia	Non Kumulatif	Google Map
145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS							
SP 02.01	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional	IKP 01	Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	Non Komposit	$AL_{NR} = \frac{B_{NR}}{I_{LA}} \times 100$ Keterangan: AL_{NR} = Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan (km/100 km2) BNR = Total panjang jalan yang telah dibangun Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia (km) ILA =Total luas wilayah daratan Indonesia (km2)	Kumulatif	Internal DJBM
		IKP 02	Tingkat kondisi prasarana jalan	Komposit	$RR_{NR} = 0,70 \times SR_P + 0,15 \times CR_B + 0,15 \times RLS$ Keterangan: RR_{NR} = Tingkat kondisi jalan nasional (%) SR_P = Tingkat kemantapan perkerasan (%), nilai IRI < 8 m/km (jalan berpenutup), IRI < 12 m/km (jalan tanah) CR_B = Tingkat kemantapan jembatan (%), nilai kondisi < 3 RLS = Tingkat kondisi lereng (%), tingkat resiko rendah/ sedang	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKP 03	Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif angka dasar tahun 2020)	Non Komposit	$TL_{UR} = L_{UR}(n - 1) + L_{UR}(n)$ Keterangan: TL_{UR} = Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif angka dasar tahun 2020) (km) L_{UR} (n-1) = Akumulasi panjang jalan dan jembatan di kawasan perkotaan yang selesai dibangun/ditingkatkan hingga tahun (n-1)	Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 04	Persentase jalan nasional yang berkeselamatan	Non Komposit	$SL_{NR} = \frac{\sum NRL_{(SR \geq 3)}}{\sum NRL} \times 100\%$ Keterangan: SLNR = Persentase jalan nasional yang berkeselamatan (%) □ NRL(SR>3) = Panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria star rating 3 (km) □ NRL = Total Panjang jalan nasional km)	Non Kumulatif	Internal DJBM
7696 - Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional							
SK 02.01.01	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Pembangunan dan Preservasi Jalan	IKK 01	Capaian tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	Non Komposit	$AALM_{UDB(i)} = \left(\frac{RALM_{UDB(i)}}{TALM_{UDB(i)}} \right) \times 100\%$ Keterangan: AALMUDB(i) = Capaian tingkat aksesibilitas jalur utama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan RALMUDB(i) = Realisasi tingkat aksesibilitas jalur utama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pada wilayah kerja Balai i (km/ 100km2) TALMUDB(i) = Target tingkat aksesibilitas jalur utama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pada wilayah kerja Balai i (km/ 100km2)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 02	Capaian tingkat kondisi prasarana Jalan	Non Komposit	$ARC_{NR(i)} = \left(\frac{RRC_{NR(i)}}{TRC_{NR(i)}} \right) \times 100\%$ Keterangan: ARCNR(i) = Capaian tingkat kondisi prasarana jalan Balai i (%) RRCNR(i) = Realisasi tingkat kondisi prasarana jalan Balai i (%) TRCNR(i) = Target tingkat kondisi prasarana jalan Balai i (%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 03	Capaian Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif)	Komposit	$RJL_{NR} = \left(\frac{\frac{RJLK_{NR}}{TRJLK_{NR}} \times 100\% + \frac{RFOUP_{NR}}{TFOUP_{NR}} \times 100\% + \frac{RPML_{NR}}{TPML_{NR}} \times 100\%}{3} \right)$ Keterangan: CIKNR = Capaian Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif angka dasar Tahun 2020) (%) RJLKNR = Realisasi pembangunan jalan lingkaran balai i (km) TJLKNR = Target pembangunan jalan lingkaran balai i (km) RFOUPNR = Realisasi pembangunan FO/UP perkotaan balai i (m) TFOUPNR = Target pembangunan FO/UP perkotaan balai i (m) RPMLNR = Realisasi pelebaran jalan menambah lajur balai i (km) TPMLNR = Target pelebaran jalan menambah lajur balai i (km)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 04	Capaian target jalan nasional yang berkeselamatan	Non Komposit	$ASL_{NR(i)} = \left(\frac{ASL_{NR(i)}}{ASL_{NR(i)}} \right) \times 100\%$ Keterangan: ASLNR(i) = Capaian panjang jalan nasional yang berkeselamatan (%) RSLNR(i) = Realisasi panjang jalan nasional dgn Star Rating > 3 di Balai i (km) TSLNR(i) = Target panjang jalan nasional dgn Star Rating > 3 di Balai i (km)	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 02.02	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan tol	IKP 01	Panjang Jalan Tol yang beroperasi (Kumulatif angka dasar tahun 2020)	Non Komposit	$TL_{TR} = L_{TR}(n - 1) + L_{TR}(n)$ Keterangan: TL_{TR} = Panjang jalan tol yang beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020) (km) $L_{TR}(n-1)$ = Akumulasi panjang jalan tol yang selesai dibangun dan dioperasikan pada tahun (n-1) $L_{TR}(n)$ = Panjang jalan tol yang selesai dibangun dan dioperasikan pada tahun (n)	Kumulatif	Internal DJBM
7697 - Kegiatan Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol							
SK 02.02.01	Meningkatnya kinerja Pembinaan dan Dukungan Pembangunan Jalan Tol	IKK 01	Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan konstruksi jalan tol	Non Komposit	$CSPL_{TR} = \left(\frac{RCS_{TR(i)}}{TCS_{TR(i)}} \right) \times 100\%$ Keterangan: $CSPL_{TR}$ = Tingkat kinerja pelaksanaan dukon jalan tol (%) $RCSTR(i)$ = Realisasi dukungan konstruksi jalan tol pada Balai i (km) $TCSTR(i)$ = Target dukungan konstruksi jalan tol pada Balai i (km)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 02	Tingkat kinerja pembinaan teknis jalan tol	Komposit	$TRTAPL = \left(\frac{\frac{TRRT}{TRRT} \times 100\% + \frac{TRLAT}{TRLAT} \times 100\% + \frac{TRCSR}{TRCSR} \times 100\% + \frac{TRFCR}{TRFCR} \times 100\% + \frac{TRSPR}{TRSPR} \times 100\%}{5} \right)$ Keterangan: $TRTAPL$ = Tingkat kinerja pembinaan teknis jalan tol (%) $TRRTR$ = Realisasi rekomendasi teknis rencana pembangunan jalan tol yang dikeluarkan (rekomendasi) $TRRTT$ = Rencana*) dan usulan rekomendasi teknis rencana pembangunan jalan tol yang diterima (rekomendasi) $TRLAR$ = Realisasi kegiatan fasilitasi pengadaan tanah jalan tol yang dilaksanakan (paket) $TRLAT$ = Jumlah pengajuan fasilitasi pengadaan tanah jalan tol yang diterima (paket) $TRCSR$ = Realisasi dukungan konstruksi jalan tol keseluruhan (km) $TRCST$ = Target dukungan konstruksi jalan tol keseluruhan (km) $TRFCR$ = Realisasi jalan tol yg dinyatakan laik fungsi dan operasi (dok) $TRFCT$ = Jumlah pengajuan uji laik fungsi dan operasi jalan tol (dok) $TRSPR$ = Jumlah ruas jalan tol yang memenuhi SPM (ruas) $TRSPT$ = Jumlah ruas jalan tol yang beroperasi (ruas)) Rencana rekomendasi teknis mencakup rencana kegiatan Pra FS (Solicited) yang akan dilakukan oleh Subdit Perencanaan Teknis JBH	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 03	Tingkat kinerja pengaturan perusahaan jalan tol	Komposit	$TRBR_{PL} = \left(\frac{\frac{TRBCR}{TRBCT} \times 100\% + \frac{TRBER}{TRBET} \times 100\%}{2} \right)$ Keterangan: $TRBR_{PL}$ = Tingkat kinerja pengaturan perusahaan jalan tol $TRBCR$ = Realisasi jumlah PPJT yang ditandatangani (perjanjian) $TRBCT$ = Target jumlah PPJT yang ditandatangani (perjanjian) $TRBER$ = Realisasi evaluasi perusahaan yang diselesaikan (dok) $TRBET$ = Usulan pelaksanaan evaluasi perusahaan (dok)	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 02.03	Meningkatnya konektivitas jalan daerah	IKP 01	Tingkat pencapaian kinerja peningkatan konektivitas jalan daerah	Non Komposit	$PL_{SNR} = \frac{RCP_{SNR}(n)}{TCP_{SNR}(n)} \times 100\%$ Keterangan: <i>PLSNR</i> = Tingkat pencapaian kinerja peningkatan konektivitas jalan daerah (%) <i>RCPSNR(n)</i> = Realisasi kegiatan dukungan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan daerah di Tahun-n <i>TCPSNR(n)</i> = Target kegiatan dukungan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan daerah di Tahun-n	Non Kumulatif	Internal DJBM
7996 - Kegiatan Pembinaan dan Dukungan Pembangunan Jalan Daerah							
SK 02.03.01	Meningkatnya kinerja pembinaan dan dukungan pembangunan jalan daerah	IKK 01	Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan pembangunan jalan Daerah	Komposit	$CSPL_{SNR} = \left(\frac{SNRRCR_R \times 100\% + SNRRPR_R \times 100\% + SNRBCR_R \times 100\%}{3} \right)$ Keterangan: <i>CSPLSNR</i> = Tingkat kinerja pelaksanaan dukungan pembangunan jalan daerah (%) <i>SNRRCR</i> = Realisasi dukungan pembangunan jalan daerah balai i (km) <i>SNRRCT</i> = Target dukungan pembangunan jalan daerah balai i (km) <i>SNRRPR</i> = Realisasi dukungan preservasi jalan daerah balai i (km) <i>SNRRPT</i> = Target dukungan preservasi jalan daerah balai i (km) <i>SNRBCR</i> = Realisasi dukungan pembangunan jembatan daerah balai i(m) <i>SNRBCT</i> = Target dukungan pembangunan jembatan daerah balai i(m)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 02	Tingkat kinerja pembinaan teknis penyelenggaraan jalan daerah	Komposit	$SNRTA_{PL} = \frac{\left(\frac{SNRTA_R}{SNRTA_T} \times 100\% + \frac{SNRCSR}{SNRCST} \times 100\% \right)}{2}$ Keterangan: <i>SNRTAPL</i> = Tingkat kinerja pembinaan teknis penyelenggaraan jalan daerah <i>SNRTAR</i> = Realisasi jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah (Pemda) <i>SNRTAT</i> = Target jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah (Pemda) <i>SNRCSR</i> = Rata-rata realisasi dukungan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan daerah (%) <i>SNRCST</i> = Rata-rata target dukungan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan daerah (%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
SP 02.04	Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	IKP 01	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Non Komposit	$EBP_{NR} = \frac{RIKPNR(N)}{RFIKNR(N)} \times 100\%$ Keterangan: <i>EBPNR</i> = Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan (%) <i>RIKPNR(N)</i> = Realisasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jemnatan (IKP 01, IKP 02, IKP03, IKP04, IKP05, dan IKP 06) di Tahun-n <i>RFIKNR(N)</i> = Realisasi penyerapan APBN Ditjen Bina marga Tahun untuk Program Infrastruktur Konektivitas di Tahun-n	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
		IKK 01	Tingkat kinerja pelayanan Kebencanaan	Non Komposit	$DA_{DL} = \left(\frac{\sum DA_R}{\sum DA_P} \right) \times 100\%$ Keterangan: DADL = Tingkat kinerja pelayanan kebencanaan (%) DAR = Total realisasi penyaluran dana bantuan tanggap bencana (Rp) DAP = Total pengajuan dana bantuan tanggap bencana (Rp)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 02	Tingkat kinerja perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan jalan	Komposit	$PE_{PL} = \left(\frac{CSR}{CST} \times 100\% + \frac{FPR}{FPT} \times 100\% + \frac{PCR_R}{PCR_T} \times 100\% \right) / 3$ Keterangan: PEPL = Tingkat kinerja perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan jalan (%) CSR = Realisasi dukungan konektivitas jalan nasional terhadap simpul dan kawasan prioritas (lokasi) CST = Target dukungan konektivitas jalan nasional terhadap simpul dan kawasan prioritas (lokasi) FPR = Realisasi PHLN dan KPBu yang difasilitasi (kegiatan) FPT = Rencana PHLN dalam Greenbook dan rencana KPBu dalam rencana umum KPBu Kementerian PU (kegiatan) PCRPL = Tingkat kepatuhan penyiapan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LAKIN) pada seluruh Entitas di Lingkungan Ditjen Bina Marga PCRR = Realisasi dokumen PK yang ditandatangani dan dokumen LAKIN yang disusun oleh Entitas di Lingkungan DJBM (dok) PCRT = Target jumlah dokumen PK dan LAKIN dari seluruh entitas di lingkungan Ditjen Bina Marga (dok)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 03	Kondisi mantap jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Komposit	$AR_{SL} = (NRSL + PR_{SL} + KR_{SL} + CR_{SL}) / 4$ Keterangan: ARSL = Kondisi mantap jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota (%) NRSL = Kondisi mantap jalan Nasional (%) PRSL = Kondisi mantap jalan Provinsi (%) KRSL = Kondisi mantap jalan Kabupaten (%) CRSL = Kondisi mantap jalan Kota (%)		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 02.04.01	Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKK 04	Tingkat kinerja pembinaan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Komposit	$TARB_{PL} = \left(\frac{\frac{NSPK_R}{NSPK_T} \times 100\% + \frac{RSL_R}{RSL_T} \times 100\% + \frac{DRB_R}{DRB_T} \times 100\% + \frac{FCI_R}{FCI_T} \times 100\%}{4} \right)$ Keterangan: TARBPL = Tingkat kinerja pembinaan keteknikan jalan dan jembatan (%) NSPKR = Realisasi legalisasi NSPK jalan/jembatan (dokumen) NSPKT = Target legalisasi NSPK jalan/jembatan (dokumen) RSLR = Realisasi persentase jalan nasional yang berkeselamatan (%) RSLT = Target persentase jalan nasional yang berkeselamatan (%) DRBR = Realisasi layanan (verifikasi validasi data, <i>downtime</i>, tingkat keamanan dan pelayanan keluhan jaringan) data jalan, jembatan, dan lereng (%) DRBT = Target layanan (verifikasi validasi data, <i>downtime</i>, tingkat keamanan, dan pelayanan keluhan jaringan) data jalan, jembatan, dan lereng (%) FCIR = Realisasi jumlah peserta peningkatan kompetensi fungsional (orang) FCIT = Target jumlah peserta peningkatan kompetensi fungsional (orang)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 05	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Komposit	$TSRB_{PL} = \left(\frac{\frac{RBT_R}{RBT_T} \times 100\% + \frac{LTAF_R}{LTAF_T} \times 100\%}{2} \right)$ Keterangan: TSRBPL = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%) RBTR = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen) RBTT = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen) LTAFR = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai) LTAFR = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai) Khusus Balai Jembatan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 06	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan	Komposit	$RCAP_L = \left(\frac{\frac{NRC_R}{NRC_T} \times 100\% + \frac{RWD_R}{RWD_T} \times 100\% + \frac{NRIR}{NRIT} \times 100\%}{3} \right)$ Keterangan: RCAPL = Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jalan (%) NRCR = Realisasi panjang jalan yang dibangun (km) NRCT = Target panjang jalan yang dibangun (km) RWDR = Realisasi panjang jalan yang dilebarkan (14 m) (km) RWDT = Target panjang jalan yang dilebarkan (14 m) (km) NRIR = Realisasi panjang jalan baru yang ditingkatkan (km) NRIT = Target panjang jalan baru yang ditingkatkan (km)	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 07	Tingkat aksesibilitas daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan	Non Komposit	$AALM_{UD(i)} = \Sigma \left(\frac{RAL_{UD(i)}}{100 * TALUD_{(i)}} \right)$ Keterangan: AALUD(i) = Tingkat aksesibilitas daerah tertinggal dan kawasan perbatasan (km/100km2) RALUD(i) = Panjang jalan nasional pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan i (km) TALUD (i) = Luas wilayah daerah tertinggal dan kawasan perbatasan i (100km2)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 08	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jembatan dan terowongan	Komposit	$BCA_{PL} = \left(\frac{\frac{NBCR}{NBCT} \times 100\% + \frac{DBCR}{DBCT} \times 100\% + \frac{RBCR}{RBCT} \times 100\% + \frac{NFUCR}{NFUCT} \times 100\% + \frac{NRBCR}{NRBCT} \times 100\%}{5} \right)$ Keterangan: BCAPL = Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan pembangunan jembatan (%) NBCR = Realisasi panjang jembatan yang dibangun (m) NBCT = Target panjang jembatan yang dibangun (m) DBCR = Realisasi panjang jembatan yang diduplikasi (m) DBCT = Target panjang jembatan yang diduplikasi (m) RBCR = Realisasi panjang jembatan yang diganti (m) RBCT = Target panjang jembatan yang diganti (m) NFUCR = Realisasi panjang flyover/underpass yang dibangun (m) NFUCT = Target panjang flyover/underpass yang dibangun (m) NRBCR = Realisasi panjang jembatan gantung daerah yg dibangun (m) NRBCT = Target panjang pembangunan jembatan gantung daerah yang dibangun (m)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 09	Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan	Komposit	$RBPAPL = \left(\frac{\frac{RMR}{RMT} \times 100\% + \frac{BMR}{BMT} \times 100\% + \frac{RIR}{RIT} \times 100\% + \frac{BIR}{BIT} \times 100\%}{4} \right)$ Keterangan: RBPAPL = Tingkat kinerja pembinaan pelaksanaan preservasi (%) RMR = Realisasi panjang jalan yang dipreservasi (km) RMT = Target panjang jalan yang dipreservasi (km) BMR = Realisasi panjang jembatan yang dipreservasi (km) BMT = Target panjang jembatan yang dipreservasi (km) RIR = Realisasi panjang jalan yang ditingkatkan (km) RIT = Target panjang jalan yang ditingkatkan (km) BIR = Realisasi panjang jembatan yang ditingkatkan (m) BIT = Target panjang jembatan yang ditingkatkan (m)	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 02.04.02	Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Ditjen Bina Marga	IKK 1	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	Komposit	Rata-rata dari nilai persentase: 1. Indeks Integritas Unit Organisasi 2. Unit Kerja yang berhasil melakukan pembangunan ZI 3. Tingkat Pelaporan Penerapan MR UPR T-2 dan UPR T-3 4. Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratiifikasi 5. Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan 6. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti 7. Tingkat Efektiifitas Penerapan MR UPT T1 Unit Organisasi	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 2	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	Komposit	Rata-rata dari nilai persentase: 1. Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan 2. Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 3	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	Komposit	Rata-rata dari nilai persentase: 1. Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan 2. Tingkat Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Bidang Jalan 3. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti 4. Tingkat Fasilitas Pemanfaatan Sistem Informasi Kepatuhan Intern	Non Kumulatif	Internal DJBM
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSS 01	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU			
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 02	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	Komposit	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Keasripan (15%) 2. Tingkat Pengelolaan BMN (20%) 3. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (15%) 4. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (15%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHK BPK RI (20%) 6. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik 15%	Non Kumulatif	Internal DJBM
7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga							
SK 06.01.01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Komposit	1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (10%) 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (10%) 4. Tingkat Layanan Hukum (10%) 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (10%) 6. Nilai Sakip unit Kerja (10%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK, RITL, LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%) 9. Transportasi Digital Unit Kerja (10%) 10. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Jalan	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Jembatan	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 06	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 07	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 08	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 09	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM
		IKK 10	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJA/BJA	Komposit	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif	Internal DJBM

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 03	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan	IKSS 01	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan infrastruktur dasar permukiman yang aman, dan berkelanjutan	Indikator Komposit/ Gabungan	Dihitung berdasarkan pencapaian target indikator dibandingkan dengan target nasional di tahun 2029. Pada tahun 2025-2026, perhitungan mengacu pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pembobotan 70% indikator teknis dan 30% indikator nonteknis. Mulai tahun 2027-2029, seiring perubahan menjadi Program Infrastruktur Dasar Permukiman, metode perhitungan disesuaikan dengan bobot 64% indikator teknis dan 36% indikator nonteknis. Indikator teknis bersifat kumulatif dengan peningkatan target setiap tahun, sedangkan indikator nonteknis bersifat nonkumulatif yang dihitung berdasarkan capaian tahunan.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal dan/ atau Eksternal DJCK
145.IA - PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN							
SP 03.01	Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang aman dan berkelanjutan	IKP 01	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	Tunggal	1. Hasil audit Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes pada tahun berjalan. 2. Apabila hasil audit SKAM-RT oleh Kemenkes belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, maka perhitungan dapat dilakukan secara internal dengan memperhitungkan penambahan sambungan rumah hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan atau difasilitasi Ditjen Cipta Karya (perluasan SPAM, SPAM berbasis masyarakat, dsb) yang dipersentasekan terhadap jumlah KK nasional dan ditambah baseline capaian di tahun N-1.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Kemenkes atau Internal DJCK
		IKP 02	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman	Tunggal	1. Sesuai dengan angka BPS 2. Apabila hasil perhitungan berdasarkan angka BPS (Susenas) belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan secara internal dengan memperhitungkan penambahan akses KK sanitasi aman hasil pembangunan yang dilakukan atau difasilitasi Ditjen Cipta Karya yang dipersentasekan terhadap jumlah KK nasional dan ditambah baseline capaian di tahun N-1	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	BPS atau Internal DJCK
		IKP 03	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Tunggal	Dihitung jumlah timbulan sampah (ton) yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di tahun N dibagi jumlah timbulan sampah nasional (ton) di tahun N dikalikan 100% ditambahkan baseline persentase capaian di tahun N-1	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7714 - Kegiatan Penyelenggaraan Air Minum yang Aman							
SK 03.01.01	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Aman	IKK 01	Kapasitas SPAM Terbangun	Tunggal	Dihitung berdasarkan kapasitas SPAM yang terbangun dan diakumulasikan dengan kapasitas SPAM baseline N-1	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Tunggal	Dihitung berdasarkan Sambungan Rumah (SR) yang dipasang (asumsi 1 SR = 1 Rumah Tangga), diakumulasikan dengan jumlah RT yang telah terpasang SR dari baseline N-1, dibagi dengan jumlah RT nasional N x 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Penurunan Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM	Tunggal	1. Mengacu pada hasil audit buku kinerja BUMD Air Minum 2. Apabila hasil audit BUMD Air Minum belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan melalui pengumpulan data kebocoran distribusi atau NRW BUMD Air Minum yang dilakukan Direktorat Air Minum	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Kemendagri atau Internal DJCK
		IKK 04	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Tunggal	1. Hasil audit Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes pada tahun berjalan. 2. Apabila hasil audit SKAM-RT oleh Kemenkes belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, maka perhitungan dapat dilakukan secara internal dengan memperhitungkan penambahan sambungan rumah perkotaan hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan atau difasilitasi Ditjen Cipta Karya (perluasan SPAM, SPAM berbasis masyarakat, dsb) yang dipersentasekan terhadap jumlah KK perkotaan dan ditambah baseline capaian di tahun N-1."	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Kemenkes atau Internal DJCK
		IKK 05	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Pesisir Utara Jawa	Tunggal	Dihitung berdasarkan Sambungan Rumah (SR) yang dibangun pada kawasan pesisir utara jawa, diakumulasikan dengan jumlah rumah tangga yang telah terlayani air minum dengan jaringan perpipaan sampai dengan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah rumah tangga kawasan pesisir utara. Lokasi perhitungan mencakup: DK Jakarta, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangsel, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi. Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Barang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 06	Rumah Tangga Perdesaan akses air minum aman	Tunggal	1. Hasil audit Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Kemenkes pada tahun berjalan. 2. Apabila hasil audit SKAM-RT oleh Kemenkes belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, maka perhitungan dapat dilakukan secara internal dengan memperhitungkan penambahan sambungan rumah perdesaan hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan atau difasilitasi Ditjen Cipta Karya (perluasan SPAM, SPAM berbasis masyarakat, dsb) yang dipersentasikan terhadap jumlah KK perdesaan dan ditambah baseline capaian di tahun N-1.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Kemenkes atau Internal DJCK
SK 03.01.02	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	IKK 01	BUMD Air Minum Berkinerja Sehat	Tunggal	1. Mengacu pada hasil audit buku kinerja BUMD Air Minum 2. Apabila hasil audit BUMD Air Minum belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan melalui pengumpulan data kinerja BUMD Air Minum yang	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Kemendagri atau Internal DJCK
		IKK 02	Jumlah BUMD air minum yang memiliki Dokumen RPAM	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah BUMD air minum yang telah menyusun dokumen RPAM	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki dokumen Jakstra SPAM	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 04	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki dokumen RISPAM termutakhirkan	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 05	Jumlah NSPK air minum yang tersusun/ termutakhirkan dan telah ditetapkan	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah NSPK air minum yang telah ditetapkan	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7715 - Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu							
SK 03.01.01	Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi Aman	IKK 01	Idle Capacity IPLT	Tunggal	(Kapasitas total IPLT - Kapasitas IPLT terpakai) dibagi dengan kapasitas total	Non kumulatif	Internal DJCK
		IKK 02	Idle Capacity IPAL	Tunggal	(Kapasitas total IPAL - Kapasitas IPAL terpakai) dibagi dengan kapasitas total	Non kumulatif	Internal DJCK
		IKK 03	Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki IPLT terbangun dan dioptimalisasi, diakumulasikan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki IPLT terbangun dan dioptimalisasi sampai dengan tahun sebelumnya.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 04	Jumlah Kapasitas Kapasitas IPAL yang terbangun	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah kapasitas SPALDT Regional/Kota/Pemukiman yang terbangun, diakumulasikan dengan jumlah kapasitas IPAL sampai dengan tahun sebelumnya.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 05	Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	Tunggal	Dihitung dari indikator terpilih : Jumlah KK yang terlayani SPALDS Skala Individu/Komunal dan jumlah KK Tangki Septik dari kegiatan Percepatan Penyediaan Prasarana Air Limbah Domestik di tahun N dibagi jumlah KK nasional di tahun N dikalikan 100% ditambahkan dengan baseline persentase capaian di tahun N-1.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 06	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) terbangun dan dioptimalisasi di Pesisir Utara Jawa, diakumulasikan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) terbangun dan dioptimalisasi di Pesisir Utara Jawa sampai dengan tahun sebelumnya.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 07	Rumah Tangga Perdesaan akses sanitasi aman	Tunggal	1. Sesuai dengan angka BPS tahun berjalan 2. Apabila hasil perhitungan berdasarkan angka BPS (Susenas) belum diterbitkan hingga batas akhir penyusunan LKj Ditjen Cipta Karya, perhitungan dapat dilakukan secara internal dengan memperhitungkan penambahan akses KK sanitasi aman di perdesaan hasil pembangunan yang dilakukan atau difasilitasi Ditjen Cipta Karya yang dipersentasekan terhadap jumlah KK perdesaan dan ditambah baseline capaian di tahun N-1	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	BPS atau Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 03.01.02	Meningkatnya Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	IKK 01	Jumlah Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Tunggal	Jumlah kapasitas (ton/hari) fasilitas pengolahan sampah pada skala regional/kota/kawasan ditambah fasilitas pengolahan di IKN dan ditambah fasilitas pengolahan berbasis masyarakat (TPS 3R) di tahun N	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	TPA/LUR yang dioperasikan secara Sanitary Landfill / Tingkat Pengontrolan Penuh	Tunggal	Jumlah unit TPA/LUR yang dioptimalisasi dan rehabilitasi pada tahun N ditambah dengan jumlah unit pembangunan sistem pengelolaan persampahan dengan metode landfill mining pada tahun N, diakumulasikan dengan tahun sebelumnya	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
SK 03.01.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengolahan Sampah	IKK 01	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan LLTT	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan penyiapan LLTT, diakumulasikan dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan penyiapan LLTT sampai dengan tahun sebelumnya.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	Tunggal	Dihitung berdasarkan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan, selanjutnya diakumulasikan dengan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan hingga tahun sebelumnya.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Jumlah BUMD air minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik	Tunggal	Dihitung berdasarkan BUMD air minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik, diakumulasikan dengan jumlah BUMD air minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik sampai dengan tahun sebelumnya.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 04	Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	Tunggal	Dihitung berdasarkan NSPK air limbah domestik yang tersusun/ termutakhirkan dan telah ditetapkan pada tahun berjalan, diakumulasikan dengan tahun sebelumnya	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 03.02	Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan infrastruktur Cipta Karya	IKP 01	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur cipta karya	Komposit	Dihitung dari rerata gabungan 3 Indikator Kinerja Kegiatan	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKP 02	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur cipta karya	Komposit	Dihitung dari rerata gabungan 8 Indikator Kinerja Kegiatan	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKP 03	Tingkat Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya	Komposit	Dihitung dari rerata indikator terpilih melalui gabungan: (1) Indeks Integritas Unit Organisasi (2) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR T1 Unor (3) Tingkat Kepatuhan Hasil Penelaahan Pengawasan Intern	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
7716 - Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Cipta Karya							
SK 03.03.01	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya	IKK 01	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di	Tunggal	Rerata nilai evaluasi implementasi SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan dari seluruh entitas di lingkungan Ditjen Cipta Karya	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Nilai Kinerja Anggaran	Tunggal	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Ditjen Cipta Karya	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri	Tunggal	Persentase total gabungan realisasi pada kinerja penyelenggaraan Kegiatan Kerjasama, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dengan bobot Kerjasama dan Penyiapan PHLN 80% dan bobot Pelaksanaan PHLN 20%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
SK 03.03.02	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	IKK 01	Persentase Capaian NSPK bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Tunggal	Capaian realisasi NSPK bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan yang ditetapkan dibagi jumlah target NSPK Dit. BTBGPL dalam Renstra dikalikan 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Persentase Capaian Advis Teknis Keandalan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Tunggal	Capaian realisasi advis teknis keandalan bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan dibagi jumlah target advis teknis di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100%	Tidak kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Persentase Capaian Layanan Teknis Kliring, Pengkajian, serta Pengembangan Teknologi dan Peralatan Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Tunggal	Capaian realisasi layanan teknis kliring, pengkajian, serta pengembangan teknologi dan peralatan BGPL dibagi jumlah target layanan teknis di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100%	Tidak kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Persentase Capaian Pejabat Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan yang mendapatkan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional	Tunggal	Capaian realisasi pejabat fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan yang mendapat layanan pengelolaan jabatan fungsional dibagi jumlah target pejabat fungsional bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan di dalam renstra di tahun yang sama dikalikan 100%.	Kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 05	Persentase Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Tunggal	Capaian realisasi jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknik bangunan gedung dan penyehatan lingkungan dibagi jumlah target di tahun yang sama dikalikan 100%	Tidak kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 06	Persentase Penyediaan Bahan Publikasi Data dan Informasi Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan	Tunggal	Capaian realisasi bahan publikasi data dan informasi bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan dibagi target publikasi data dan informasi bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100%	Tidak kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 07	Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang Air Minum (kumulatif)	Tunggal	Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum	Kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 08	Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	Tunggal	Jumlah proyek yang mendapatkan pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik	Kumulatif, capaian realisasi setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 03.03.03	Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Ditjen Cipta Karya	IKK 01	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	Tunggal	Jumlah Rerata dari: 1. Indeks Integritas Unit Organisasi 2. Unit Kerja yang Berhasil melakukan Pembangunan Zona Integritas 3. Tingkat Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko 4. Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi 5. Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan Persentase RO diambil berdasarkan rencana kerja tiap tahun	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	Tunggal	Jumlah Rerata dari: 1. Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan 2. Tingkat Fasilitas penyelesaian permasalahan Hukum 3. Tingkat Kepatuhan Hasil Penelaahan Pengawasan Intern 4. Tingkat Kepatuhan Administrasi Kontrak Persentase RO diambil berdasarkan rencana kerja tiap tahun	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	Tunggal	Jumlah Rerata dari: 1. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi 2. Pelaporan Harta kekayaan dan Perpajakan 3. Tingkat Rekomendasi laporan Hasil Audit/pengawasan Unor yang ditindaklanjuti Persentase RO diambil berdasarkan rencana kerja tiap tahun	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
SK 03.03.04	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Cipta Karya	IKK 01	Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang Cipta Karya	Tunggal	Jumlah laporan tanggap darurat yang tersusun setiap tahunnya dibagi dengan target total laporan tanggap darurat yang tersusun pada periode renstra dikali 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
SS 06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	IKSS 01	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU				
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 13	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJCK)	Komposit	1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (15%) 2. Tingkat Pengelolaan BMN (20%) 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (15%) 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (15%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (20%) 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK	
			a.	Tingkat kualitas pengelola kearsipan	Komposit	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
			b.	Tingkat pengelolaan BMN		1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
			c.	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Tingkat efektivitas advokasi hukum: Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			d. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
			e. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
			f. Tingkat Layanan Komunikasi Publik		1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media: Persentase persepsi/sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Kementerian PU/ Unit Organisasi/ Unit Pelaksana Teknis (Balai) di media 2. Tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi: Persepsi/sentimen positif stakeholder terhadap penyelenggaraan event dan/atau jumlah follower akun media sosial Kementerian PU/ Unit Organisasi/ Unit Pelaksana Teknis (Balai) 3. Tingkat kepuasan pengguna layanan publik: Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
7757 - Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya							
SK 06.01.01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (10%) 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (10%) 4. Tingkat Layanan Hukum (10%) 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setditjen Cipta Karya(10%) 6. Nilai SAKIP Setditjen Cipta Karya (10%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK, RITL, LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%) 9. Transportasi Digital Setditjen Cipta Karya (10%) 10. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Air Minum	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sanitasi	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Penataan Bangunan	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 06	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penvehatan Lingkungan	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 07	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 08	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
		IKK 09	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	Komposit/ Gabungan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal DJCK
SS 07	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	IKSS 01	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB WM KBI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Anggota WM KBI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 02	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= $\text{Misi X} = \sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor WM KBI= $IKB = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 03	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB WM KTI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Anggota WM KTI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 04	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau	Kalkulasi skor capaian misi= $\text{Misi X} = \sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor WM KTI= $IKB = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu			
		IKSS 05	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB Non-WM KBI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Non WM KBI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 06	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= Misi X= $\sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor Non-WM KBI= $IKB = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 07	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB Non-WM KTI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Non WM KTI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 08	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= Misi X= $\sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor Non-WM KTI= $IKB = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
145.IE - PROGRAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN							
SP 07.01	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur keciptakaryaan di kawasan strategis & penataan bangunan gedung yang andal	IKP 01	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan	Komposit dari 2 IKK	Jumlah dari indikator terpilih: (1) Jumlah kawasan strategis yang dilakukan pengembangan; dan (2) Jumlah kawasan strategis yang dilakukan pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat. Pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		IKP 02	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	Tunggal	Penjumlahan dari jumlah kabupaten/kota yang telah menerbitkan PBG dan SLF. Rumusan perhitungan mengacu pada Kepmen PPN/Bappenas No Kep. 26A/M.PPN/HK/05/2025 tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal, hasil pengolahan data SIMBG
7772 - Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis							
SK 07.01.01	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan strategis	IKK 01	Persentase dokumen keterpaduan perencanaan kawasan strategis	Tunggal	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
		IKK 02	Persentase pengembangan kawasan strategis	Tunggal	Untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2025-2026): Jumlah luas pengembangan kawasan strategis pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%. Untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi maka pada Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (2027-2029): Jumlah kawasan strategis yang dilakukan pengembangan pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
		IKK 03	Persentase pembangunan infrastruktur kawasan berbasis masyarakat	Tunggal	Untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2025-2026): Jumlah luas pengembangan kawasan strategis pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%. Untuk menyesuaikan dengan tugas dan fungsi maka pada Program Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (2027-2029): Jumlah kawasan strategis yang dilakukan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2029 dikalikan 100%.	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
		IKK 04	Persentase capaian kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang penyelenggaraan kawasan strategis	Tunggal	Dihitung berdasarkan capaian RO Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis (Kab/Kota), kemudian dibagi dengan jumlah Kab/Kota Nasional sesuai target pada tahun tersebut dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 07.02.02	Meningkatnya kapasitas pembinaan dan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	IKK 01	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Andal	Komposit/ Gabungan dari RO terpilih	Dihitung dari rerata persentase capaian RO terpilih yaitu: 1. Pembinaan Penyelenggara Bangunan Gedung Negara dengan rumus perhitungan: jumlah provinsi yang dibina pada tahun N dibagi jumlah provinsi di Indonesia dikali 100% 2. Peningkatan Kapasitas Koordinator Pengelola Teknis dan Pengelola Teknis dengan rumus perhitungan: jumlah provinsi yang dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas koordinator pengelola teknis dan pengelola teknis pada tahun N dibagi jumlah provinsi di Indonesia dikali 100% 3. Pelayanan Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dengan rumus perhitungan: jumlah layanan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara yang dilaksanakan sampai tahun N dibagi total target 2025- 2029 dikali 100% 4. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara dengan rumus perhitungan: luas pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung negara yang selesai dilaksanakan sampai tahun N dibagi total target 2025-2029 dikali 100% husus untuk TA 2025, capaian RO terpilih yaitu: 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan dengan rumus perhitungan: jumlah kab/kota yang dibina pada tahun N dibagi jumlah kab/kota di Indonesia dikali 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum yang Andal	Komposit/ Gabungan dari RO terpilih	Dihitung dari rerata persentase capaian RO terpilih yaitu: 1. Pembinaan Penyelenggara Bangunan Gedung Umum dengan rumus perhitungan: jumlah provinsi yang dibina pada tahun N dibagi jumlah provinsi di Indonesia dikali 100% 2. Pengawasan dan Pendampingan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum dengan rumus perhitungan: jumlah kab/kota yang dilaksanakan pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung umum pada tahun N dibagi jumlah kab/kota di Indonesia dikali 100% 3. Pelayanan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum dengan rumus perhitungan: jumlah layanan konsultasi penyelenggaraan bangunan gedung umum yang dilaksanakan sampai tahun N dibagi total target 2025-2029 dikali 100% 4. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Umum dengan rumus perhitungan: luas pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung umum yang selesai dilaksanakan sampai tahun N dibagi total target 2025-2029 dikali 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
		IKK 03	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Rumah Negara	Komposit/ Gabungan dari RO terpilih	Rumusan Perhitungan TA 2025 Dihitung dari rerata persentase capaian RO terpilih yaitu: 1. Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara dengan rumus perhitungan: jumlah unit rumah negara yang dikelola pada tahun N dibagi target tahun N dikali 100% Rumusan Perhitungan TA 2026-2029 Dihitung dari rerata persentase capaian RO terpilih yaitu: 1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Rumah Negara dengan rumus perhitungan: jumlah provinsi yang dibina dan dilakukan pengawasan pengelolaan rumah negara pada tahun N dibagi jumlah provinsi di Indonesia dikali 100% 2. Pelayanan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III dengan rumus perhitungan: jumlah unit rumah negara golongan III yang dikelola sampai tahun N dibagi total target 2025-2029 dikali 100%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 04	Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKSS 01	Persentase kontribusi pemenuhan sarana prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang dibangun dan diperbaiki sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/ Gabungan	Gabungan dari pembobotan IKSP dengan pembagian: IKSP 1 : Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%) IKSP 2 : Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (40%) IKSP 3 : Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis (10%) IKSP 4 : Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
145.GM - PROGRAM PRASARANA STRATEGIS							
SP 01	Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKP 01	Persentase satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana-prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/ Gabungan	Gabungan dari pembobotan 3 IKK (IKK 1.1.1, IKK 1.2.1, IKK 1.3.1), dengan pembagian: IKK 1.1.1 : Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%) IKK 1.2.1 : Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (45%) IKK 1.3.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 02	Persentase sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan kualitas sarana- prasarananya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/Gabungan	Gabungan dari pembobotan 9 IKK (IKK 2.1.1, IKK 2.1.2, IKK 2.1.3, IKK 2.1.4, IKK 2.1.5, IKK 2.1.6, IKK 2.1.7, IKK 2.1.8 dan IKK 2.2.1), dengan pembagian: IKK 2.1.1 : Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.2 : Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.3 : Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.4 : Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.5 : Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.6 : Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.7 : Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.1.8 : Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (11,25%) IKK 2.2.1 : Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU (10%)	Kumulatif, Meningkat setiap tahun	Internal
		IKP 03	Persentase capaian kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	Komposit/Gabungan	Rata-rata persentase dari 4 IKK (IKK 3.1.1, IKK 3.1.2, IKK 3.1.3, dan IKK 3.1.4) IKK 3.1.1 : Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.2 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Prasarana Strategis IKK 3.1.3 : Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan IKK 3.1.4 : Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKP 04	Tingkat kepatuhan Intern Ditjen Prasarana Strategis	Komposit/Gabungan	Jumlah dari Pembobotan setiap IKK, dengan rincian: IKK 3.2.1 : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (30%) IKK 3.2.2 : Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (40%) IKK 3.2.3 : Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (30%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7717 - KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN							
SK 04.01.01	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase satuan pendidikan dasar dan menengah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 4 (empat) Output, yaitu: 1. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah 2. Sekolah Rakyat 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah 4. Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah Dihitung dari Jumlah unit prasarana terbangun (sekolah dan madrasah) yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/renovasi/revitalisasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
SK 04.01.02	Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase sarana prasarana pendidikan tinggi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 4 (empat) Output, yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Jumlah unit prasarana Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi/revitalisasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
SK 04.01.03	Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur bidang pendidikan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah laporan Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan yang disusun setiap tahun dibagi dengan target tahun berjalan dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
7718 - KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN, PERIBADATAN, KESEHATAN, OLAHRAGA, DAN SOSIAL BUDAYA							
SK 04.01.01	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase sarana prasarana olahraga yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana olahraga yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 02	Persentase sarana prasarana perekonomian yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Komposit/Gabungan	Persentase gabungan dari 2 (dua) Output, yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian Jumlah unit prasarana pasar (TA 2025) dan prasarana perekonomian (TA 2026-2026) yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Persentase sarana prasarana strategis pendukung IKN yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai kepada penugasan Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana strategis pendukung IKN yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 04	Persentase sarana prasarana peribadatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana peribadatan yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 05	Persentase sarana prasarana kesehatan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana kesehatan yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 06	Persentase sarana prasarana sosial budaya yang ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana cagar budaya yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/renovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 07	Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana strategis lainnya yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi/revovasi dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
		IKK 08	Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah unit prasarana dapur yang mendapatkan pembangunan dibagi dengan target kumulatif pada tahun 2029 dikalikan 100%	Kumulatif, Meningkatkan setiap tahun	Internal
SK 04.01.02	Terselenggaranya perencanaan, pembinaan dan pengawasan teknis yang berkualitas dalam pelaksanaan infrastruktur bidang perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	IKK 01	Persentase perencanaan, pembinaan dan pengawasan infrastruktur Bidang Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase dari 1 (satu) Output Jumlah laporan Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dukungan Pendidikan perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang disusun setiap tahun dibagi dengan target tahun berjalan dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7987 - KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PRASARANA STRATEGIS							
SK 04.01.01	Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi prasarana strategis	IKK 01	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Ditjen Prasarana Strategis	Komposit/Gabungan dari 2 (dua) output	Dihitung dari Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Seluruh Entitas DJPS di tahun n-1 yang meliputi 1. Rerata hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Tahun n-1 2. Rerata hasil evaluasi atas implementasi SAKIP SNVT Tahun n-1 Untuk tahun 2025 perhitungan nilai SAKIP menggunakan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Baseline Direktorat PS 2024 : 87,65 2023 : 85,66 2022 : 86,51 2021 : 88,33 2021 : 82,71 Rerata Hasil Evaluasi atas implementai SAKIP Unit Kerja/UPT: $\frac{\text{jumlah nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja/UPT}}{\text{jumlah Unit Kerja/UPT}}$ Rerata Hasil Evaluasi atas implementai SAKIP Satuan Kerja: $\frac{\text{jumlah nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Satuan Kerja}}{\text{jumlah Satuan Kerja}}$	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 02	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran ditjen prasarana strategis	Tunggal dari 1 (satu) output	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang terdiri dari penilaian kualitas perencanana anggaran, kuliatas pelaksnaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN. Baseline DJPS 2025 TW III : 83,55 Baseline Direktorat PS 2024 : 86,94 2023 : 88,99 2022 : 78,12 2021 : 93,40	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 03	Nilai realisasi Kemitraan dan Koordinasi Pengadaan Lahan	Tunggal dari 1 (satu) output	Persentase capaian kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan pada tahun berjalan yang dihitung dari kgiatan pengelolaan kemitraan dan koordinasi pengadaan lahan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dikalikan 100%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Prasarana Strategis	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari 2 Indikator Output, yaitu: 1. Capaian realisasi bahan publikasi data dan informasi prasarana strategis dibagi target publikasi data dan informasi di dalam renstra dengan tahun yang sama dikalikan 100% (bobot 50%) 2. Nilai Transformasi Digital yang dinilai oleh Pusdatin untuk Tingkat Unor (50%) Baseline Direktorat PS: 25.25 Target 2025 : 30% Target 2026 : 40% Target 2027 : 50% Target 2028 : 60% Target 2029 : 70% Simulasi perhitungan Nilai Akhir: 1. 50% 2. 50% dari Nilai Transformasi Digital (30) Total = 50 + 15 = 65%	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
SK 04.01.02	Meningkatnya Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	IKK 01	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 30%: 1. Indeks Integritas Unit Organisasi (5%) 2. Unit Kerja yang Berhasil melakukan Pembangunan Zona Integritas (5%) 3. Tingkat Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (5%) 4. Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi 10%) 5. Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (5%) Persentase RO diambil berdasarkan rencana kerja tiap tahun	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 02	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 40%: 1. Pengelolaan Penanganan Pengaduan (15%) 2. Tingkat Fasilitas penyelesaian permasalahan Hukum (10%) 3. Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern (15%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 03	Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern	Tunggal dari 1 (satu) output	Dihitung dari Indikator dibawah ini, dengan total 30%: 1. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi (10%) 2. Pelaporan Harta kekayaan dan Perpajakan (15%) 3. Tingkat Rekomendasi laporan Hasil Audit/pengawasan Unor yang ditindaklanjuti (5%)	Non Kumulatif, dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU			
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 04	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPS)	Dihitung dari 6 Indikator Penilaian: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (15%) 2. Tingkat Pengelolaan BMN (20%) 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (15%) 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (15%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (20%) 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (15%)	Indikator 1 Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
					Indikator 2 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
					Indikator 3 1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Tingkat efektivitas advokasi hukum: Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
					Indikator 4 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana layanan kepegawaian yang diukur meliputi: a. kenaikan pangkat b. pensiun c. penghargaan d. gelar akademik e. mutasi f. jabatan fungsional g. kenaikan gaji berkala h. SKP i. diklat/pelatihan j. hukuman disiplin	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Indikator 5 Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
					Indikator 6 1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media: Persentase persepsi/sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Kementerian PU/ Unit Organisasi/ Unit Pelaksana Teknis (Balai) di media 2. Tingkat kepuasan pengguna layanan publik: Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
7838 – KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PRASARANA STRATEGIS							
SK 06.01.01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Dihitung dari 10 Indikator Penilaian: 1. Tingkat kualitas pengelola kearsipan (10%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 4. Tingkat Layanan Hukum (10%) 5. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Setditjen (10%) 6. Nilai SAKIP Setditjen (10%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%) 9. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%) 10. Transformasi Digital Seditjen (10%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 3 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 6 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 Indikator 9 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 10 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Infrastruktur Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Kepatuhan Intern	Dihitung dari 8 Indikator Penilaian: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 3. Tingkat kualitas pengelola kearsipan(15%) 4. Transformasi Digital (15%) 5. Nilai SAKIP (10%) 6. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (15%) 7. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI RITL LHP (10%) 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN yang dilakukan dinilai berdasarkan Penatausahaan BMN (30%, RKBMN (25%), Penggunaan BMN (20%), Wasdal BMN (25%). Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (100%) Indikator 3 1. Nilai kualitas pengelola kearsipan (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP Unit Kerja periode n-1, untuk TA 2025 menggunakan nilai evaluasi SAKIP TA 2024 sebagai Direktorat Prasarana Strategis Indikator 6 1. Dihitung berdasarkan Nilai IKPA Indikator 7 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 8 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2	Non Kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun	Internal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU				
		IKSS 05	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan Infrastruktur pekerjaan umum yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Komposit dari Indikator-Indikator sbb: 1. Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% 2. Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur PU	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% Indikator 2 (80%): $\%NPIt = \frac{NPIt}{target\ NPIt}$ <i>Keterangan:</i> <i>%NPIt = Persentase Ketersediaan Investasi atau Pembiayaan Infrastruktur PU</i> <i>NPIt = Nilai Realisasi potensi nilai investasi proyek KPBU/pembiayaan kreatif (Penyiapan + Transaksi (PQ)) pada tahun t</i> <i>Target NPIt = Target potensi nilai investasi proyek KPBU/pembiayaan kreatif (Penyiapan + Transaksi (PQ)) pada tahun t</i>	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 05	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJPI)	<i>(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PU)</i> 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan 2. Tingkat Pengelolaan BMN 3. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 4. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI 7. Nilai SAKIP 8. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik 9. Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi 10. Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (10%): 1. Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 (10%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (10%): 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100% Indikator 4 (10%): 1. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%): 1. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian (IKPA) Indikator 6 (10%): 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%): 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 8 (10%): 1. Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media (Persentase persepsi/sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU di media 2. Persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback Indikator 9 (10%): 1. Nilai transformasi digital Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 (10%): 1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern 2. Persentase pengendalian kepatuhan intern 3. Persentase pemantauan kepatuhan intern	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 11	Tingkat Ketersediaan KPBU infrastruktur Pekerjaan Umum yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Komposit dari Indikator-Indikator sbb: 1. Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% 2. Realisasi Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif (Penyiapan dan Transaksi) per Tahun yang difasilitasi dibagi Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif (Penyiapan dan Transaksi) per Tahun yang ditargetkan dikali 100%	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (20%): 1. Hasil Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dibandingkan Target dikali 100% Indikator 2 (80%): $\%PPKt = \frac{PPKt}{target\ PPKt}$ <i>Keterangan:</i> %PPK = Persentase ketersediaan proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU PPKt = Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif (tahap penyiapan dan transaksi/ siap dikerjasamakan) infrastruktur SDA, BM, dan CK pada tahun t Target PPK = Target jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif infrastruktur PU pada tahun t <i>Catatan:</i> - Pembiayaan Kreatif adalah berbagai skema pembiayaan selain skema KPBU yang bersumber dari dana swasta maupun dana dari pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana pemerintah (Penugasan BUMN, <i>Business to Business</i> , LVC, dll). - Proyek penyiapan adalah minimal telah disusunnya Prastudi Kelayakan dan sudah dimulainya proses pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC). - Proyek Transaksi/Siap Dikerjasamakan adalah Proyek KPBU/pembiayaan kreatif yang telah/sedang proses Prakuualifikasi (PQ). - PPKt adalah Realisasi jumlah proyek KPBU/pembiayaan kreatif tahap penyiapan infrastruktur SDA, BM, dan CK + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur sumber daya air yang siap dikerjasamakan + realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan + Realisasi jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur persampahan yang siap dikerjasamakan pada tahun t	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7764 – KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM							
SK 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja (DJPI)	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infastruktur Pekerjaan Umum	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat Layanan Hukum (10%) 4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 5. Nilai layanan keuangan (10%) 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP (10%) 7. Nilai SAKIP (10%) 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%) 9. Transformasi Digital Unit Kerja (10%) 10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan pengelolaan BMN yang dilakukan Indikator 3 1. Layanan hukum yang dilakukan Indikator 4 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 1. Layanan keuangan yang dilakukan Indikator 6 1. Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 8 1. Layanan komunikasi publik yang dilakukan Indikator 9 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 10 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sesuai penilaian oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%). 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%).	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sesuai penilaian oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%). 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%) .	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sesuai penilaian oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%). 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%) .	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sesuai penilaian oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (20%) 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%) 3. Nilai SAKIP (20%). 4. Transformasi Digital Unit Kerja (20%) 5. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (20%) .	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) oleh Biro Umum Indikator 2 1. Layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Indikator 3 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai penilaian KemenPAN-RB Indikator 4 1. Nilai transformasi digital Unit Kerja yang dilakukan oleh PUSDATIN Indikator 5 1. Nilai Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 sesuai penilaian oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
		IKK 06	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Unit Organisasi	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T1	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T1 sesuai penilaian oleh APIP	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7765 – KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN							
SK 02	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	IKK 02.01	Tingkat Implementasi Strategi dan Program Pembiayaan Infrastruktur (%)	Tingkat implementasi strategi dan program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah rekomendasi kebijakan strategi/program pembiayaan infrastruktur yang disusun (teralisasi) dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi/informasi pimpinan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur PU yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	Tahunan	Internal
		IKK 02.02	Tingkat Implementasi Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur (%)	Tingkat implementasi sistem dan kemitraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah rekomendasi kebijakan sistem/kemitraan pembiayaan infrastruktur yang disusun (teralisasi) dibandingkan dengan target (70%) 2. Jumlah dokumen pengembangan/pengelolaan data dan sistem informasi pembiayaan infrastruktur dibandingkan dengan target (30%)	Tahunan	Internal
7766 – KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM							
SK 01	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU yang handal dan berkualitas	IKK 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Bina Marga yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Bina Marga pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Cipta Karya	Tingkat Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Cipta Karya	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator (100%): 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran/Draft atau Dokumen NSPK/Layanan Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Cipta Karya yang disusun dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Proyek KPBU/Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan pada Tahap Penyiapan dibandingkan dengan target (60%)	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Indikator: Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 05	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Indikator: Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang Siap Dikerjasamakan	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 06	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Indikator: Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Limbah Domestik yang Siap Dikerjasamakan	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 07	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Indikator: Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Persampahan yang Siap Dikerjasamakan	Tahunan	Internal dan Eksternal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 05	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	IKSS 01	Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Bersertifikat	Non Komposit	$IKSS = \frac{\text{Jumlah SDM Vokasi Bidang Konstruksi yang lulus sertifikasi}}{\text{Jumlah potensi lulusan pendidikan vokasional bidang konstruksi} ***} \times 100\%$ ***) Angka potensi lulusan yang digunakan: 61.714 orang, diperoleh dr inputan baiai. timestamp 29 april 2025	Tahunan	Internal dan Eksternal
145.DL - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							
SP 05.02	Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	IKP 01	Tingkat Kualitas Pembinaan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	Non Komposit	$IKP = \frac{\text{Jumlah SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang lulus sertifikasi}}{\text{Realisasi SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang terlatih dan/atau tersertifikasi}} \times 100\%$	Tahunan	Internal
7685 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi							
SK 05.02.01	Memfasilitasi peningkatan jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	IKK 01	Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Terlatih dan/atau Tersertifikasi* *) SDM Vokasional Bidang Konstruksi adalah lulusan/calon lulusan SMK, Politeknik, dan Universitas Bidang Konstruksi	Non Komposit	$IKK = \frac{\text{Realisasi SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang terlatih dan/atau tersertifikasi} **}{\text{Target SDM vokasional bidang konstruksi yang terlatih dan/atau tersertifikasi}} \times 100\%$ ***) Realisasi SDM vokasional bidang konstruksi yang terlatih dan/atau tersertifikasi adalah seluruh peserta yang mengikuti sertifikasi melalui BJKW (Lulus dan Tidak Lulus)	Tahunan	Internal
SS 06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	IKSS 04	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Konstruksi	Komposit	IKSS = (90% × IKP 1) + (10% × Indeks Kondisi Bisnis Konstruksi*) * Diambil dari data BPS tahun T-1, namun apabila BPS tidak menerbitkan data, maka menggunakan data tahun terakhir. Untuk perhitungan target Renstra 2025–2029 digunakan angka rata-rata Indeks Kondisi Bisnis 2020–2024.	Kumulatif	Internal dan Eksternal
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	IKP 12	Tingkat kualitas pembinaan konstruksi	Komposit	$IKP\ 1 = \frac{(IKK\ 1.1 + IKK1.2 + IKK2.1 + IKK2.2 + IKK3.1 + IKK3.2 + IKK4.1)}{7}$	Kumulatif	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7759 - Kegiatan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi							
SK 06.01.01	Peningkatan Kualitas Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	IKK 01	Tingkat Kualitas Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Komposit	IKSK 1.1 = (25% x Sub IKK 1.1.1) + (25% x Sub IKK 1.1.2) + (25% x Sub IKK 1.1.3) + (25% x Sub IKK 1.1.4) Sub IKK 1.1.1 = Tingkat Kualitas Pembinaan Tertib Usaha BUJK Sub IKK 1.1.1 = Persentase Pembinaan Tertib Usaha BUJK (A) × 50% + Tingkat Tertib Usaha Jasa Konstruksi (B) × 50% A = (A.1 + A.2) ÷ 2 A.1 = (Realisasi BUJKA yang dilakukan Pemantauan & Evaluasi ÷ Target BUJKA yang dilakukan PE) × 100% A.2 = (Realisasi BUJK yang difasilitasi dan dibina ÷ Target BUJK yang difasilitasi dan dibina) × 100% B = (Total Nilai Tertib Usaha pada BUJK yang Didampingi* ÷ Jumlah BUJK yang Didampingi**) *Penjelasan nilai tertib usaha, mengacu pada PP 5/2021. Nilai sudah berbentuk persentase. Nilai bisa didapatkan dari Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi (AUJK). **BUJK yang didampingi : Sampling (slovin) BUJK yang menjadi penyedia jasa Konstruksi di Kementerian PU tahun 2024 Sub IKK 1.1.2: Tingkat Kualitas Pembinaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Bidang Jasa Konstruksi Sub IKK 1.1.2 = Persentase Pembinaan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat Bidang Jasa Konstruksi (A) × 50% + Persentase OPD Suburusan Jasa Konstruksi yang memenuhi tugas sesuai komitmen (B) × 15% + Persentase asosiasi badan usaha yang memenuhi kewajiban PUB (C) × 15% + Persentase LSBU yang berkinerja baik (D) × 20% A = $\frac{1}{3} \times ((\text{Realisasi Lembaga Pemerintah yang difasilitasi \& dibina} \div \text{Target lembaga pemerintah yang difasilitasi \& dibina}) + (\text{Realisasi Lembaga Masyarakat yang difasilitasi \& dibina} \div \text{Target lembaga masyarakat yang difasilitasi \& dibina}) + (\text{Realisasi pelaksanaan PE kelembagaan} \div \text{Target pelaksanaan PE kelembagaan})) \times 100\%$ B = (Jumlah OPD Kumulatif yang didampingi dan yang memenuhi tugas utama ÷ Realisasi OPD yang dilakukan PE) × 100% C = (Jumlah asosiasi badan usaha yang didampingi & memenuhi kewajiban PUB ÷ Realisasi asosiasi badan usaha yang dilakukan PE) × 100% D = (Jumlah LSBU yang dilakukan PE yang memiliki kinerja dengan nilai baik ÷ Realisasi LSBU yang dilakukan PE) × 100%	Kumulatif	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub IKK 1.1.3 = Tingkat Ketersediaan Informasi Pasar Jasa Konstruksi Sub IKK 1.1.3 = (Total Nilai Ketersediaan Informasi Jasa Pasar Konstruksi ÷ Target wilayah provinsi yang memiliki Informasi Pasar Jasa Konstruksi 2025–2029) Sub IKK 1.1.4 = Tingkat Kualitas Pembinaan Pengelolaan MPK dan PDN Sub IKK 1.1.4 = Persentase Pembinaan MPK dan TKDN (A) × 50% + Persentase paket pekerjaan konstruksi yang tersedia data MPK pada SIMPK di Kementerian PU (B) × 25% + Persentase paket pekerjaan konstruksi Kementerian PU dengan nilai TKDN ≥ ambang batas (C) × 25% A = $\frac{1}{2} \times ((\text{Jumlah Pengguna Jasa yang terfasilitasi dan terbina MPK \& PDN} + \text{Target Pengguna Jasa yang difasilitasi dan dibina MPK \& PDN}) + (\text{Realisasi Paket Pekerjaan yang dilaksanakan PE MPK \& PDN} \div \text{Target Paket Pekerjaan yang dilaksanakan PE MPK \& PDN})) \times 100\%$ B = (Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi yang difasilitasi/dibina dengan ketersediaan data MPK pada SIMPK ÷ Jumlah realisasi paket pekerjaan konstruksi yang difasilitasi/dibina) × 100% C = (Jumlah Paket Pekerjaan Konstruksi yang difasilitasi/dibina dengan nilai TKDN ≥ Ambang Batas ÷ Jumlah realisasi paket pekerjaan konstruksi yang difasilitasi/dibina) × 100% Baseline pelaksanaan verifikasi TKDN **Pengguna Jasa yang didampingi : Sampling (slovin) Paket Jasa Konstruksi yang terkontrak di Kementerian PU tahun 2024 Baseline pelaksanaan verifikasi MPK **Pengguna Jasa yang didampingi : Sampling (slovin) Paket Jasa Konstruksi yang terkontrak di Kementerian PU tahun 2024		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 06.01.02	Peningkatan Kinerja Layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	IKK 01	Tingkat Kinerja Layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Komposit	IKK 1.2 = Tingkat kepuasan layanan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (A) × 10% + Tingkat ketepatan waktu layanan Rekomendasi Lisensi LSP sesuai SPM (B) × 15% + Tingkat ketepatan waktu layanan Lisensi LSBU sesuai SPM (C) × 15% + Tingkat ketepatan waktu layanan Pencatatan dan Penetapan Penilai Ahli sesuai SPM (D) × 15% + Tingkat ketepatan waktu layanan Akreditasi Asosiasi sesuai SPM (E) × 15% + Tingkat ketepatan waktu layanan Penyetaraan Tenaga Kerja Asing sesuai SPM (F) × 15% + Tingkat ketepatan waktu layanan Pencatatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sesuai SPM (G) × 15% A = Hasil survei kepuasan pelanggan terhadap seluruh layanan LPJK B = (Jumlah permohonan Rekomendasi Lisensi LSP yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah permohonan Rekomendasi Lisensi LSP) × 100% C = (Jumlah permohonan Lisensi LSBU yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah total permohonan Lisensi LSBU) × 100% D = (Jumlah permohonan Pencatatan dan Penetapan Penilai Ahli yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah permohonan Pencatatan dan Penetapan Penilai Ahli) × 100% E = (Jumlah permohonan Akreditasi Asosiasi yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah permohonan Akreditasi Asosiasi) × 100% F = (Jumlah permohonan Penyetaraan Tenaga Kerja Asing yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah total permohonan Penyetaraan Tenaga Kerja Asing) × 100% G = (Jumlah permohonan Pencatatan Pengembangan Keprofesian dan/atau Pengembangan Usaha Berkelanjutan yang diproses tepat waktu ÷ Jumlah permohonan Pencatatan Pengembangan Keprofesian dan/atau Pengembangan Usaha Berkelanjutan) × 100%	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7761 - Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi							
SK 06.01.01	Peningkatan Kualitas Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	IKK 01	Tingkat Kualitas Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)	Komposit	IKK 2.1 = (25% × Sub IKK 2.1.1) + (25% × Sub IKK 2.1.2) + (25% × Sub IKK 2.1.3) + (25% × Sub IKK 2.1.4) Sub IKK 2.1.1 = Tingkat Ketersediaan Rancangan Bakuan Kompetensi Bidang Pekerjaan Umum Sub IKK 2.1.1 = Persentase penyusunan standar kompetensi (A) × 75% + Persentase penyusunan materi kompetensi (B) × 25% A = (Jumlah rancangan standar kompetensi yang dihasilkan kurun waktu 2025-2029 ÷ Jumlah kebutuhan standar kompetensi*) × 100% B = (Jumlah rancangan materi kompetensi konstruksi strategis dan/atau percontohan yang dihasilkan kurun waktu 2025-2029 ÷ Jumlah kebutuhan materi kompetensi konstruksi strategis dan/atau percontohan**) × 100% *Kebutuhan SKKNI untuk 5 Tahun mendatang berdasarkan SK Dirjen BK No. 114/2024 **Kebutuhan Kompetensi yang Strategis dan/atau Percontohan mencakup 5 Bidang Prioritas: (BIM, LG, SMKK, BGC, MK-DB) Sub IKK 2.1.2 = Tingkat Tertib Penerapan Kompetensi TKK Sub IKK 2.1.2 = Persentase pembinaan tertib penerapan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) (A) × 50% + Tingkat tertib penyelenggaraan pelatihan TKK strategis oleh BJKW* (B) × 10% + Tingkat tertib sertifikasi oleh LSP** (C) × 10% + Tingkat pemenuhan laporan tracer study pembinaan TKK oleh BJKW (D) × 30% A = ½ × ((Realisasi fasilitasi dan pembinaan Penerapan Kompetensi TKK ÷ Target fasilitasi dan pembinaan Penerapan Kompetensi TKK****) + (Realisasi pelaksanaan PE bidang Penerapan Kompetensi ÷ Target pelaksanaan PE Bidang Penerapan Kompetensi TKK****)) × 100% B = (Jumlah kegiatan pelatihan BJKW yang memenuhi tertib pelatihan TKK tahun berjalan ÷ Jumlah kegiatan pelatihan BJKW tahun berjalan) × 100% C = (Jumlah LSP beroperasi yang dilakukan PE dengan indeks kinerja minimal baik** ÷ Jumlah LSP yang dilakukan PE***) × 100% D = (Jumlah laporan tracer study kegiatan pembinaan TKK oleh BJKW ÷ Jumlah BJKW) × 100% *) Pelatihan termasuk Bimtek pada jabatan kerja strategis dan percontohan, antara lain: BGH, Launcher Gantry, BIM, MK, SMKK, MP, DB **) 49 LSP beroperasi di tahun 2024 ***) Jumlah LSP yang di PE adalah 17 LSP berdasarkan rumus slovin dengan margin of error 20% terhadap populasi 49 LSP beroperasi ****) Fasilitasi dan pembinaan mencakup LSP dan/atau LPPK *****) PE bidang penerapan mencakup 17 LSP dan 7 Tracer Study BJKW	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub IKK 2.1.3 = Tingkat Kualitas Pembinaan Keprofesian TKK Sub IKK 2.1.3 = $\text{Persentase asosiasi profesi terakreditasi terfasilitasi PKB (A) x 40\% + Persentase pelaksanaan PE tertib penggunaan TKK Asing (B) x 30\% + Persentase permohonan ACPE dan AA yang diverifikasi dan validasi (C) x 20\% + Persentase pelaksanaan PE Remunerasi TKK (D) x 10\%}$ A = $\text{(Jumlah asosiasi profesi terakreditasi terfasilitasi PKB ÷ Target fasilitasi pembinaan asosiasi profesi terakreditasi) × 100\%}$ B = $\text{(Realisasi Pelaksanaan PE tertib penggunaan TKK asing ÷ Target Pelaksanaan PE Tertib Penggunaan TKK Asing) × 100\%}$ C = $\text{(Jumlah permohonan AA dan ACPE yang diverifikasi dan validasi ÷ Jumlah orang yang mengajukan permohonan AA (baru dan perpanjangan) dan ACPE (Baru dan Update data)) × 100\%}$ D = $\text{(Realisasi Pelaksanaan PE Remunerasi TKK) / (Target Pelaksanaan PE Remunerasi TKK) x 100\%}$ PKB = Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan AA = Asean Architect ACPE = Asean Chartered Professional Engineer Sub IKK 2.1.4 = Tingkat Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Sub IKK 2.1.4 = $\text{Tingkat pelaksanaan pembinaan terhadap JF PJK 2025–2029 (A) x 80\% + Tingkat layanan pembinaan terhadap JF PJK (B) x 20\%}$ A = $\text{((Jumlah JF PJK yang terfasilitasi tahun berjalan) ÷ (Jumlah JF PJK aktif tahun berjalan)) × 100\%}$ B = $\text{(Jumlah rekomendasi formasi JF PJK tahun berjalan) ÷ (Jumlah usulan formasi JF PJK tahun berjalan) x 100\%}$ Catatan: - Bentuk fasilitasi JF PJK = sosialisasi, audiensi, konsultasi, pendampingan, korespondensi, bimtek, - JF PJK Aktif = ASN JF PJK non-struktural - Rekomendasi formasi JF PJK = surat rekomendasi formasi JF PJK yang diterbitkan oleh pimpinan unit Pembina JF PJK (Dit KPTKK) kepada Instansi Pengguna - Jumlah usulan formasi = total permohonan rekomendasi formasi JF PJK baik melalui korespondensi resmi maupun penyampaian drafting dokumen usulan		
SK 06.01.02	Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Strategis	IKK 01	Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Terlatih dan/atau Tersertifikasi	Komposit	IKK 2.2 = (Realisasi Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan/atau tersertifikasi + Target Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan/atau tersertifikasi) × 100% Sub IKK 2.2.1 sd Sub IKK 2.2.7 = Jumlah TKK strategis yang terlatih dan/atau tersertifikasi oleh BJKW 1-7 Sub IKK 2.2.1 sd Sub IKK 2.2.7 = $\text{(Realisasi Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan atau tersertifikasi ÷ Target Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan atau tersertifikasi) × 100\%}$	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7762 - Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa							
SK 06.01.01	Peningkatan Kualitas Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKK 01	Tingkat Kualitas Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Komposit	IKK 3.1 = (25% × Sub IKK 3.1.1) + (25% × Sub IKK 3.1.2) + (25% × Sub IKK 3.1.3) + (25% × Sub IKK 3.1.4) Sub IKK 3.1.1 = Tingkat Kinerja Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sub IKK 3.1.1 = Persentase pembinaan kinerja sistem pengadaan jasa konstruksi (A) × 50% + Tingkat kualitas pendampingan tertib SOP Pemilihan Jasa Konstruksi (B) × 20% + Tingkat pemanfaatan SIPBJ (C) × 15% + Tingkat kepuasan layanan pengadaan secara elektronik (D) × 15% A = (A1+A2) ÷ 2 A1 = ½ × ((Realisasi BP2JK yang difasilitasi dan dibina tertib SOP ÷ Target BP2JK yang difasilitasi dan dibina tertib SOP) + (Realisasi pelaksanaan PE tertib SOP ÷ Target pelaksanaan PE tertib SOP)) × 100% A2 = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina SIPBJ ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina SIPBJ) + (Realisasi pelaksanaan PE SIPBJ ÷ Target pelaksanaan PE SIPBJ)) × 100% B = Jumlah total nilai tertib administrasi SOP dari BP2JK yang didampingi ÷ Jumlah BP2JK yang didampingi penerapan SOP C = (Jumlah paket terdaftar di SIPBJ dengan data lengkap ÷ Jumlah paket terdaftar di SIPBJ) × 100% D = Berdasarkan hasil pengisian kuesioner kepuasan layanan pengadaan secara elektronik Sub IKK 3.1.2 = Tingkat Kualitas Layanan dan Kelembagaan UKPBJ Sub IKK 3.1.2 = Tingkat pemenuhan administrasi kematangan kelembagaan UKPBJ (A) × 50% + Tingkat kepuasan layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (B) × 50% A = (Jumlah dokumen tingkat kematangan UKPBJ level strategis yang diusulkan ÷ Target dokumen pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ level strategis) × 100% B = Berdasarkan hasil pengisian kuesioner kepuasan layanan UKPBJ	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub IKK 3.1.3 = Tingkat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan E-purchasing Sub IKK 3.1.3 = Persentase pembinaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Epurchasing (A) × 50% + Tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Epurchasing (B) × 50% A = (A1+A2) ÷ 2 A1 = (Realisasi pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penerapan prinsip kehati-hatian pada paket Epurchasing > Rp15M ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan prinsip kehati-hatian pada paket Epurchasing > Rp15M) × 100% A2 = (Realisasi pelaksanaan PE penerapan prinsip kehati-hatian pada paket Epurchasing > Rp15M ÷ Target Pelaksanaan PE penerapan prinsip kehati-hatian pada paket Epurchasing > Rp15M) × 100% B = (Jumlah paket yang menerapkan prinsip kehati-hatian pada paket ePurchasing >Rp15M yang dilakukan pemantauan dan evaluasi ÷ Jumlah paket ePurchasing >Rp15M yang dilakukan pemantauan dan evaluasi) × 100% Sub IKK 3.1.4 = Tingkat Tertib Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Sub IKK 3.1.4 = Persentase pembinaan tertib pelaksanaan kontrak konstruksi (A) × 50% + Tingkat tertib administrasi kontrak (B) × 40% + Tingkat pemanfaatan SIKOMPAK (C) × 5% + Tingkat ketersediaan data kinerja penyedia (D) × 5% A = (A1+A2+A3) ÷ 3 A1 = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina tertib administrasi kontrak ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina tertib administrasi kontrak) + (Realisasi pelaksanaan PE tertib administrasi kontrak ÷ Target pelaksanaan PE tertib administrasi kontrak)) × 100% A2 = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina pemanfaatan SIKOMPAK ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina pemanfaatan SIKOMPAK) + (Realisasi pelaksanaan PE pemanfaatan SIKOMPAK ÷ Target pelaksanaan PE pemanfaatan SIKOMPAK)) × 100% A3 = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina ketersediaan data kinerja penyedia ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina ketersediaan data kinerja penyedia) + (Realisasi pelaksanaan PE ketersediaan data kinerja penyedia ÷ Target pelaksanaan PE ketersediaan data kinerja penyedia)) × 100% B = Jumlah total nilai tertib administrasi kontrak dari paket yang dilakukan pemantauan dan evaluasi ÷ Jumlah paket yang dilakukan pemantauan dan evaluasi kontrak* C = (Jumlah paket tender seleksi terkontrak yang mengisi fitur SIKOMPAK ÷ Jumlah paket tender seleksi terkontrak) × 100% D = (Realisasi data kinerja penyedia jasa paket tender seleksi dengan kontrak SYC T- 1 ÷ Jumlah keseluruhan paket tender seleksi kontrak SYC T-1) × 100% *) Jumlah paket yang dilakukan PE ditentukan dengan metode sampling		

[illegible]

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 06.01.01	Peningkatan Kualitas Pembinaan Keselamatan Dan Keberlanjutan Konstruksi	IKK 01	Tingkat Kualitas Pembinaan Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Komposit	IKK 4.1 = Tingkat Kualitas Pembinaan Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi IKK 4.1 = (40% × Sub IKK 4.1.1) + (25% × Sub IKK 4.1.2) + (35% × Sub IKK 4.1.3) Sub IKK 4.1.1 = Tingkat Kualitas Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Sub IKK 4.1.1 = Persentase Pelaksanaan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (A) × 50% + Tingkat Kualitas Penerapan SMKK dan/atau Nihil Kecelakaan Konstruksi pada Satker yang Didampingi (B) × 50% A = (A1 + A2) ÷ 2 A1 = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan SMKK ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan SMKK) + (Realisasi pelaksanaan PE penerapan SMKK ÷ Target pelaksanaan PE penerapan SMKK)) × 100% A2 = (Realisasi Satker yang didampingi oleh Komite K2 ÷ Target satker yang didampingi oleh Komite K2) × 100% B = (B1 + B2) ÷ 2 B1 = ((Jumlah Satker yang difasilitasi dan dibina dengan hasil penilaian minimal Baik*) / (Total Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan SMKK)) × 100% B2 = ((Jumlah Satker yang didampingi Komite yang nihil kecelakaan konstruksi**) / (Total Satker yang didampingi Komite)) × 100%) Berdasarkan Permen 10 tahun 2021 dan SOP PE SMKK Nomor 01/SOP/Dk/2024) Diluar kejadian kecelakaan pada paket yang tidak memenuhi rekomendasi Komite. Sesuai dengan kriteria kecelakaan konstruksi yang terdapat dalam SOP Investigasi Kecelakaan Konstruksi Komite K2 Nomor 01/SOP/KKK/2024 dan dan Nomor 02/SOP/KKK/2024 Sub IKK 4.1.2 = Tingkat Kualitas Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan Sub IKK 4.1.2 = Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan (A) × 50% + Tingkat Kinerja Penerapan Konstruksi Berkelanjutan (B) × 50% A = ½ × ((Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan Konstruksi Berkelanjutan ÷ Target Satker yang difasilitasi dan dibina penerapan Konstruksi Berkelanjutan) + (Realisasi Satker yang dilakukan PE Penerapan Konstruksi Berkelanjutan ÷ Target Satker yang dilakukan PE Penerapan Konstruksi Berkelanjutan)) × 100% B = (Jumlah Satker yang didampingi dengan hasil Penilaian Kinerja minimal Baik* ÷ Total Satker yang didampingi dalam Penerapan Konstruksi Berkelanjutan) × 100%) Sesuai dengan Permen PUPR 09/2021 dan Juknis Penilaian Kinerja Penyelenggaraan KB Nomor 38/KPTS/Dk/2023 Kriteria paket yang didampingi nilai paket >100M dan sudah dalam proses Pembangunan atau operasi dan pemeliharaan	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub IKK 4.1.3 = Tingkat Kualitas Pembinaan Penyusunan Perkiraan Pekerjaan Biaya Konstruksi Sub IKK 4.1.3 = $\text{Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan HPS (A)} \times 50\% + \text{Tingkat Kualitas Penyusunan HPS (B)} \times 50\%$ A = $\frac{1}{2} \times ((\text{Realisasi Satker yang difasilitasi dan dibina dalam Penyusunan HPS} \div \text{Target Satker yang difasilitasi dan dibina dalam Penyusunan HPS}) + (\text{Realisasi Pelaksanaan PE Penyusunan HPS} \div \text{Target Pelaksanaan yang dilakukan PE Penyusunan HPS})) \times 100\%$ B = $(\text{Jumlah Satker yang didampingi dan difasilitasi dalam Penyusunan HPS dengan hasil penilaian kinerja minimal baik} \div \text{Total Satker yang didampingi dan difasilitasi dalam Penyusunan HPS yang terdapat di SIPASTI}) \times 100\%$		
SS 06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	Komposit	IKSS = Agregat dari Seluruh Unit Organisasi	Kumulatif	Internal dan Eksternal
SP 06.01	Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	IKP 06	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJBK)	Komposit	IKP 06 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan $\times 10\% +$ (2) Tingkat Pengelolaan BMN $\times 10\% +$ (3) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum $\times 10\% +$ (4) Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana $\times 10\% +$ (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran $\times 10\% +$ (6) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI $\times 10\% +$ (7) Nilai SAKIP Unit Organisasi $\times 10\% +$ (8) Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik $\times 10\% +$ (9) Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi $\times 10\% +$ (10) Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi $\times 10\%$	Kumulatif	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7839 - Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Ditjen Bina Konstruksi							
SK 06.01.02	Peningkatan Kualitas Penerapan Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko Di Ditjen Bina Konstruksi	IKK 01	Tingkat Kualitas Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Komposit	IKK 5.1 = (30% × Sub IKK 5.1.1 + 40% × Sub IKK 5.1.2+ 30% Sub IKK 5.1.3) Sub IKK 5.1.1 = Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Sub IKK 5.1.1 = Indeks Integritas Unit Organisasi (A) × 5% + Unit Kerja yang Berhasil Melakukan Pembangunan ZI (B) × 10% + Tingkat Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (C) × 35% + Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi (D) × 25% Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan (E) × 25% A = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit Organisasi (SPI Ditjen Bina Konstruksi)* B = (Jumlah Unit Kerja yang diusulkan TPU dan lolos penilaian oleh TPI ÷ Jumlah Unit Kerja yang diusulkan TPU ke TPI) × 100% C = ((Jumlah laporan pembinaan KI dan laporan pembinaan MR yang disampaikan + Jumlah laporan pembinaan KI dan laporan pembinaan MR yang tepat waktu) ÷ 8) × 100% D = ((Jumlah laporan kinerja pengendalian gratifikasi yang disampaikan + Jumlah laporan kinerja pengendalian gratifikasi yang tepat waktu) ÷ 4) × 100% E = (Jumlah pegawai DJBK yang teridentifikasi berpotensi memiliki benturan kepentingan dan menyampaikan deklarasi benturan kepentingan ÷ Jumlah pegawai DJBK yang teridentifikasi berpotensi memiliki benturan kepentingan) × 100% Catatan: * = Nilai SPI tahun Y merupakan nilai dari SPI di tahun Y-1, dan seterusnya Dalam 1 tahun disusun laporan pembinaan KI dan MR 2 kali (per semester) Dalam 1 tahun disusun laporan pengendalian gratifikasi 2 kali (per semester) Sub IKK 5.1.2 = Tingkat Efektivitas Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Sub IKK 5.1.2 = Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (A) × 25% + Tingkat Fasilitasi Permasalahan Hukum (B) × 25% + Persentase Penyelesaian Validasi Tepat Waktu (C) × 25% + Persentase Penyelesaian Penilaian PIPK (D) × 25% A = (Jumlah pengaduan yang ditelaah tepat waktu ÷ Jumlah pengaduan yang masuk pada DJBK*) × 100% B = (Jumlah fasilitasi yang dilakukan atas permasalahan hukum yang masuk pada DJBK ÷ Jumlah permasalahan hukum yang masuk pada DJBK**) × 100% C = (Jumlah dokumen yang divalidasi tepat waktu ÷ Jumlah dokumen permohonan validasi) × 100% D = (Jumlah Satker yang dilakukan penilaian PIPK tepat waktu ÷ Jumlah Satker yang dilakukan penilaian PIPK) × 100% Catatan: * = Pengaduan yang diterima adalah pengaduan yang resmi disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Intern (TNDE, dan kanal pengaduan resmi). Pengaduan yang ditangani merupakan pengaduan yang belum dilakukan tindak lanjut oleh APIP (Litwal atau Audit). Bentuk penanganan yang dilakukan dapat berupa antara lain : Penelahaan yang telah disampaikan kepada APIP ** = Permasalahan Hukum: keterlibatan/atensi APH berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh APH	Kumulatif	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub IKK 5.1.3 = Tingkat Tertib Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Sub IKK 5.1.3 = Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi (A) × 10% + Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan (B) × 30% + Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit atau Pengawasan yang Sudah Ditindaklanjuti (C) × 30% + Presentase Penilaian Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 (D) × 30% A = Nilai hasil evaluasi tingkat efektivitas penerapan MR UPR T1 Ditjen Bina Konstruksi* B = $\frac{1}{2} \times ((\text{Jumlah pegawai wajib lapor LHKPN yang sudah melakukan pelaporan LHKPN} + \text{Jumlah pegawai wajib lapor LHKPN}) + (\text{Jumlah pegawai wajib lapor SPT Pajak Tahunan yang sudah melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan} + \text{Jumlah pegawai wajib lapor SPT Pajak Tahunan})) \times 100\%$ C = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil audit yang telah ditindaklanjuti}^{**} + \text{Jumlah rekomendasi hasil audit yang harus ditindaklanjuti}) \times 100\%$ D = $(\text{Jumlah UPR T2 yang dilakukan penilaian tingkat efektivitas peerapan MR UPR T-2 tepat waktu} : \text{Jumlah UPR T2 yang dilakukan penilaian tingkat efektivitas penerapan MR UPR T2}) \times 100\%^{***}$ Catatan: * = Nilai tahun Y merupakan nilai ditahun Y-1, dan seterusnya ** = Rekomendasi hasil audit yang terdapat di EPTLHP (APIP) dan SIPTL (BPK RI). Rekomendasi yang ditindaklanjuti baik yang sesuai maupun yang belum sesuai *** = Penilaian tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur di Kementerian PU		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7758 - Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi							
SK 06.01.02	Peningkatan layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi	IKK 01	Tingkat Pembinaan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Konstruksi	Komposit	IKK 6.1 = (Sub IKK 6.1.1 × 37,5%) + (Sub IKK 6.1.2 × 25%) + (Sub IKK 6.1.3 × 37,5%) Sub IKK 6.1.1 = Pembinaan Layanan Perencanaan, Program dan Keuangan Sub IKK 6.1.1 = (45% × (1) Ketepatan waktu layanan BMN (Usulan RKBMN, Usulan PSP, Usulan penghapusan/ pemindahtanganan)) + (10% × (2) Tingkat usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Khusus Ditjen Bina Konstruksi) + (45% × (3) Persentase tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP) (1) = ½((usulan permohonan penghapusan BMN oleh Satker yang ditindaklanjuti tepat waktu + usulan permohonan penghapusan) + (usulan permohonan RKBMN yang ditindaklanjuti tepat waktu + usulan permohonan RKBMN) + (usulan permohonan PSP BMN oleh Satker yang ditindaklanjuti tepat waktu + usulan permohonan PSP BMN)) × 100% (2) = (Jumlah usulan SBK Khusus yang diajukan melalui biro keuangan ÷ Jumlah RO yang tertuang di renstra DJBK 2025-2029 yang belum masuk dalam SBK Umum dan SBK Khusus) × 100% (3) = Jumlah rekomendasi LHE SAKIP oleh Itjen yang ditindaklanjuti Sub IKK 6.1.2 = Pembinaan Layanan Kepegawaian dan Umum Sub IKK 6.1.2 = 50% × (1) Tingkat Layanan Pembinaan Kearsipan Unit Pengolah + 50% × (2) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (1) = Layanan pembinaan kearsipan kepada Unit kerja dan Unit Pelayanan Teknis (2) = Layanan kepegawaian yang dimaksud adalah kenaikan pangkat. (Jumlah usulan kenaikan pangkat yang terproses tepat waktu/Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diterima) x 100% Sub IKK 6.1.3 = Pembinaan Layanan Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik Sub IKK 6.1.3 = 33% × (1) Tingkat pemenuhan tahapan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum (realisasi tahapan/standar tahapan) + 34% × (2) Nilai Penanganan Pengaduan + 33% × (3) Tingkat layanan infrastruktur Teknologi Informasi DJBK (survei kepuasan) (1) = ½ ((Jumlah dokumen sirkuler ÷ jumlah usulan produk hukum) x 100%) + (Jumlah pendampingan ÷ jumlah permohonan advokasi hukum) x 100%)) (2) = Jumlah pengaduan yang ditangani ÷ jumlah pengaduan yang masuk (3) = (Tingkat penyelesaian permintaan layanan infrastruktur (A) × 70%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan infrastruktur (B) × 30%)	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Tingkat Dukungan Satuan Kerja Setditjen		IKK 6.2 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan × 10% + (2) Tingkat Pengelolaan BMN × 10% + (3) Tingkat Layanan Hukum × 10% + (4) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu × 10% + (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran × 10% + (6) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI × 10% + (7) Nilai SAKIP Unit Kerja × 10% + (8) Tingkat Layanan Komunikasi Publik × 10% + (9) Nilai Transformasi Digital Unit Kerja × 10% + (10) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 × 10%	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi		IKK 6.3 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Unit Kerja(15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi		IKK 6.4 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Unit Kerja(15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi		IKK 6.5 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Unit Kerja(15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 06	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi		IKK 6.6 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Unit Kerja(15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 07	Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Direktorat Kepatuhan Intern		IKK 6.7 = (1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Unit Kerja(15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 08	Tingkat Dukungan Manajemen Satuan Kerja LPJK/Balai (42 Satker)		IKK 6.8 = ((Sub IKK 6.8.1) + (Sub IKK 6.8.....) + (Sub IKK 6.8.42)) ÷ 42 Sub IKK 6.8.1-6.8.42 = (1) Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (10%) + (2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) + (3) Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (15%) + (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (15%) + (5) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI TL LHP (10%) + (6) Nilai SAKIP Balai (15%) + (7) Transformasi Digital Unit Kerja (10%) + (8) Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (15%)	Tahunan	Internal dan Eksternal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 06	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya	IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	Tingkat Kualitas Tata Kelola	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 : Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PU (50%) Indikator 2 : Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PU (50%)	Take Last	Internal dan Eksternal
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 07	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Setjen)	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Indeks Reformasi Birokrasi General terkait dukungan manajemen	Indikator 1 (30%), dihitung dari penjumlahan :		
					1 Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi (Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi) (1%)		
					2 Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai (Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi) (1%)		
					3 Indeks Pemerintah Digital (Indeks SPBE) (6%)		
					4 Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE (Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE) (1%)		
					5 Tingkat Maturitas SPIP (2%)		
					6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) (1%)		
					7 Indeks Kualitas Kebijakan (1%)		
					8 Indeks Reformasi Hukum (1%)		
					9 Tingkat Digitalisasi Arsip (1%)		
					10 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Indeks Pembangunan Statistik) (1%)		
					11 Opini BPK (3%)		
					12 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (2%)		
					13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (1%)		
					14 Indeks Pengelolaan Aset (1%)		
					15 Survei Kepuasan Masyarakat (5%)		
					16 Indeks Pelayanan Publik (1%)		
					17 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (1%)		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				2 Tingkat pembinaan dan pengelolaan dukungan manajemen Kementerian PU	Indikator 2 (50%), dihitung dari penjumlahan :		
					1 Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan umum (20%)		
					2 Tingkat pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian PU (5%)		
					3 Tingkat pembentukan dan evaluasi peraturan perundang- undangan serta advokasi hukum (5%)		
					4 Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (5%)		
					5 Tingkat kualitas fasilitasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah (5%)		
					6 Tingkat layanan digital (5%)		
					7 Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan (5%)		
				3 Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Indikator 3 (20%), dihitung dari penjumlahan :		
					1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Setjen (2%)		
					2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Setjen (4%)		
					3 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Setjen (4%)		
					4 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Setjen (3%)		
					5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setjen (3%)		
					6 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP Sekretariat Jenderal (2%)		
					7 Transformasi Digital Sekretariat Jenderal (2%)		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7751 - Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum							
SK 06.01.01	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	IKK 01	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat kualitas layanan administrasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum	Indikator 1 (10%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Tingkat penyampaian dokumen penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian PU (70%). = Target kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen yang diunggah di Portal RB Nasional.		
					b. Tingkat kualitas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (30%). = Rencana aksi telah memuat tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya dan upaya mencapai target indeks RB sesuai Road Map RB Kementerian PU		
				2 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal.	Indikator 2 (10%) :		
					a. Penilaian SAKIP Setjen oleh Tim Evaluator Itjen (100%). = Capaian Nilai SAKIP Setjen.		
				3 Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini.	Indikator 3 (20%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Data pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini (50%). = Nilai kinerja kualitas data Kementerian PU dari i-eMonitoring yang terdiri atas komponen: a.1. Kelengkapan data Pemaketan, Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK), dan Rencana Fisik a.2. Akurasi pagu i-eMonitoring dengan SPAN.		
					b. Tingkat penyampaian data pemantauan Rencana Program dan Kegiatan Strategis Kementerian PU yang lengkap dan tepat waktu (50%). = Laporan progres Rencana Aksi dan Kegiatan Strategis Kementerian PU		
				4 Tingkat kualitas perencanaan dan administrasi anggaran sesuai pedoman.	Indikator 4 (30%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Kesesuaian pagu alokasi anggaran dengan ADK RKAKL (33,33%). = Persentase pagu alokasi anggaran sesuai dengan ADK RKAKL.		
					b. Waktu pemrosesan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (MYC) (33,33%). = Target hari penyelesaian dokumen MYC sesuai SE Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2024 (2 hari) dibagi dengan Rata- rata hari dokumen yang diselesaikan kondisi aktual dikali 100%.		
					c. Kualitas perencanaan penganggaran beserta peruntukannya (bencana, APBNP, tambahan anggaran) (33,33%). = Kelengkapan administrasi perencanaan penganggaran beserta perubahanya sesuai dengan ketentuan.		
				5 Tingkat layanan kerja sama luar negeri yang efektif.	Indikator 5 (30%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Tingkat penyampaian laporan progres PHLN Kementerian Pekerjaan Umum yang tepat waktu (50%). = Laporan progres PHLN		
					b. Tingkat proses administrasi penugasan dan perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing yang tepat waktu (50%). = Lama waktu pemrosesan administrasi penugasan dan perizinan sesuai SOP yang berlaku.		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Tingkat layanan pengelolaan keuangan, komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNBP.	Indikator 1 (20%), dihitung dari penjumlahan : a Persentase keterisian formasi jafung keuangan yang merupakan pejabat perbendaharaan dan penyusun laporan keuangan (25%) = Jumlah pejabat perbendaharaan dan penyusun laporan keuangan yang mengisi formasi jafung keuangan. b Persentase jumlah laporan penyusunan target dan pagu PNBP yang tepat waktu (50%). = Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan penyampaian target dan pagu PNBP. c Penilaian kinerja bendahara (25%). = Nilai rata-rata dari indikator CMS, KKP, LPJ dan UP/TUP (IKPA) periode sebelumnya.		
				2 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	Indikator 2 (25%), dihitung dari penjumlahan : a Nilai IKPA berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%). = Penilaian kualitas Pelaksanaan Anggaran berdasarkan aplikasi MONEV-PA b Nilai pagu minus (40%). = data jumlah satker yang memiliki pagu minus terhadap jumlah satker di akhir tahun anggaran.		
				3 Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian.	Indikator 3 (30%), dihitung dari penjumlahan : a Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan MonSAKTI pada Menu To Do List dan Rekon SAKTI-SPAN Periode Tahunan pada LK Unaudited (40%) b Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan LHP BPK RI terkait pengungkapan/ CaLK (40%) c Efektifitas PIPK (20%) = Hasil Penilaian PIPK Kementerian		
				4 Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI.	Indikator 4 (15%), dihitung dari penjumlahan : a Persentase jumlah TL rekomendasi yang disampaikan tepat waktu atas LHP 60 hari sejak serah terima LHP (40%) b Seluruh rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terhadap seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI sejak tahun 2005 (60%) = presentase perbandingan jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI sesuai aplikasi SIPTL BPK-RI		
				5 Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP.	Indikator 5 (10%), dihitung dari penjumlahan : a Aspek Kelengkapan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP (80%). = Persentase jumlah Laporan SPIP Tepat Waktu dan Lengkap b Target Pelaksanaan Tindak Lanjut Area of Improvement (AOI) Hasil Evaluasi Maturitas SPIP (20%). = Persentase jumlah tindak lanjut atas hasil evaluasi AOI		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Tingkat layanan pengelolaan BMN, Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat ketepatan waktu dokumen pengelolaan BMN	Indikator 1 (30%), dihitung dari penjumlahan : a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna (40%) = Tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku. b. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (40%). = Tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku. c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna (20%). = Tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.		
				2 Tingkat kualitas layanan Pemindahtanganan, Pemanfaatan penghapusan dan Pemusnahan BMN	Indikator 2 (40%), dihitung dari penjumlahan : a Pemindahtanganan (Hibah, Penjualan BMN) a.1 Hibah: Jumlah NUP usulan objek hibah yang ditindaklanjuti dengan persetujuan/izin prinsip Pengguna Barang atau permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang (DJKN) sesuai ketentuan perundang-undangan dibagi dengan jumlah NUP BMN yang diusulkan oleh UPPB E-1 sebagai objek hibah (25%). a.2 Penjualan BMN : Jumlah NUP usulan objek penjualan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan/izin prinsip Pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan dibagi dengan jumlah NUP BMN yang diusulkan oleh UPPB E-1 sebagai objek penjualan (25%). b Usulan pemanfaatan (25%). = Jumlah Usulan Pemanfaatan yang telah diterbitkan Izin Prinsip Pemanfaatan oleh Pengguna Barang dibagi dengan Jumlah Usulan Pemanfaatan yang diusulkan oleh UPPB E-1 kepada Pengguna Barang. c. Penghapusan dan Pemusnahan (25%). = Jumlah NUP BMN Penghapusan dan Pemusnahan yang ditetapkan Persetujuan dan Izin Prinsip Penghapusan dan Pemusnahan oleh Pengguna Barang dibagi dengan Jumlah NUP BMN Objek Penghapusan yang diusulkan oleh UPPB E-1.		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				3 Tingkat Efektifitas Penggunaan dan Pengamanan BMN.	Indikator 3 (30%), dihitung dari penjumlahan : a Penggunaan a.1. Penetapan Status Penggunaan BMN : Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP objek PSP. BMN objek PSP adalah BMN dengan perolehan T-1 (25%). a.2. Alih Status Penggunaan BMN : Jumlah NUP BMN yang telah memperoleh Izin Prinsip Alih Status Penggunaan dari Pengguna Barang dibagi dengan jumlah NUP BMN yang diusulkan oleh UPPB E-1 (25%). b Pengamanan (50%). = Penuntasan target sertifikasi: Capaian sertifikasi dibagi dengan target sertifikasi (bidang) yang sudah ditetapkan oleh Pengelola Barang.		
				Tingkat layanan pengelolaan umum, Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:		
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal	Indikator 1 (25%), dihitung dari penjumlahan : a Pembinaan tata persuratan: Persentase pembinaan tata persuratan = jumlah unit kerja yang terbina tata persuratan dibagi jumlah seluruh unit kerja (20%) b Layanan Penerimaan Surat Terpusat: Persentase layanan penerimaan surat terpusat = jumlah surat prioritas yang terdistribusi dibagi jumlah seluruh surat prioritas (surat prioritas adalah surat yang ditujukan untuk menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, dan biro hukum) (20%) c Pengelolaan Kearsipan: Persentase unit kerja di kementerian pu yang telah melaksanakan alih media arsip dinamis = jumlah unit kerja di kementerian pu yang telah melaksanakan alih media arsip dinamis dibagi jumlah seluruh unit kerja di Kementerian PU (20%) d Ppenyelesaian rekomendasi teknis atas usulan pengelolaan bmn satuan kerja di sekretariat jenderal: Persentase penyelesaian rekomendasi teknis atas usulan pengelolaan bmn satuan kerja di sekretariat jenderal = jumlah rekomendasi teknis atas usulan pengelolaan bmn (penghapusan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan bmn) satuan kerja di sekretariat jenderal yang telah diselesaikan dibagi total usulan rekomendasi teknis atas usulan pengelolaan bmn (penghapusan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan bmn) satuan kerja di sekretariat jenderal (20%) e Pelaksanaan asuransi bmn bangunan kantor di biro umum: Persentase pelaksanaan asuransi BMN bangunan kantor di biro umum = pelaksanaan asuransi BMN bangunan kantor di Biro Umum dibagi usulan pelaksanaan asuransi bmn bangunan kantor di Biro Umum (20%)		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				2 Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Kerumahtanggaan.	Indikator 2 (25%), dihitung dari penjumlahan : a Kesesuaian penyelenggaraan layanan kesehatan dengan kebutuhan layanan kesehatan: Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan = jumlah layanan kesehatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh peserta yang mendaftar pelayanan kesehatan (50%) b Kegiatan acara kementerian yang terlayani: Persentase kegiatan acara kementerian yang terlayani = jumlah acara kementerian yang terlayani dibagi jumlah seluruh acara kementerian (50%)		
				3 Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Prasarana Fisik.	Indikator 3 (25%), dihitung dari penjumlahan : a. Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat, Rumah Jabatan: Persentase renovasi dan rehabilitasi gedung kantor pusat, rumah jabatan = jumlah kegiatan realisasi m² renovasi dan rehabilitasi gedung kantor pusat dan rumah jabatan dibagi target m² renovasi dan rehabilitasi gedung kantor pusat dan rumah jabatan (33,33%) b. Terpeliharanya <i>Chiller</i>, <i>STP</i>, <i>Mechanical Electrical and Plumbing</i>, dan Jaringan Kantor : Persentase terpeliharanya chiller, stp, mechanical electrical and plumbing, dan jaringan kantor = jumlah realisasi pemeliharaan chiller, stp, mechanical electrical and plumbing, dan jaringan kantor dibagi jumlah pemeliharaan chiller, stp, mechanical electrical and plumbing, dan jaringan kantor (33,33%) c. Terpeliharanya taman, halaman, dan sarana prasarana bangunan gedung kantor: Persentase terpeliharanya taman, halaman, dan sarana prasarana bangunan gedung kantor = jumlah realisasi pemeliharaan taman, halaman, dan sarana prasarana bangunan gedung kantor dibagi jumlah pemeliharaan taman, halaman, dan sarana prasarana bangunan gedung kantor (33,33%)		
				4 Tingkat Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Keamanan dan Ketertiban serta Keprotokolan.	Indikator 4 (25%), dihitung dari penjumlahan : a. Pelayanan pengaduan ketidakamanan dilingkungan Kementerian PU Persentase pelayanan pengaduan ketidakamanan dilingkungan Kementerian PU = jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PU yang tertangani dibagi jumlah pengaduan ketidakamanan dilingkungan Kementerian PU (50%). b. Terselenggaranya Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan Persentase Terselenggaranya Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan = Jumlah dukungan layanan Keprotokolan dibagi jumlah Acara yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian (50%).		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7745 - Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PU							
SK 06.01.01	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian PU	IKK 01	Tingkat pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian PU	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
				1 Tingkat Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	Indikator 1 (60%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Jumlah Pengelola Kepegawaian yang dibina dibagi total pengelola kepegawaian yang ada x 100 (33,33%)		
					b. Survei kepada pegawai di lingkungan Kementerian untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian (50%)		
					c. Survei kepada pegawai di lingkungan Kementerian untuk menilai tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan layanan data dan informasi kepegawaian (16,67%)		
				2 Tingkat Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	Indikator 2 (40%), dihitung dari penjumlahan :		
a. Tingkat kualitas evaluasi kelembagaan Kementerian (50%)							
				b. Survei kepada pegawai di lingkungan Kementerian untuk menilai tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana. (50%)			
7746 - Kegiatan Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum							
SK 06.01.01	Meningkatnya Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan serta Advokasi Hukum	IKK 01	Tingkat Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan serta Advokasi Hukum	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Efektivitas Penyelesaian produk hukum	Indikator 1 (15%):		
					Tingkat Penyelesaian Produk Hukum = Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum (dikali 100%)		
				2 Tingkat Penyelesaian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator 2 (15%):		
					Tingkat Penyelesaian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan = Jumlah peraturan yang berhasil dievaluasi dibagi dengan jumlah peraturan yang perlu dievaluasi (dikali 100%)		
				3 Tingkat Efektivitas penyebarluasan produk hukum	Indikator 3 (10%):		
					Tingkat Efektivitas Penyebarluasan Produk Hukum = Nilai Kinerja Pengelolaan JDIH Nasional		
				4 Tingkat Efektivitas advokasi hukum	Indikator 4 (25%):		
Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum = Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%							
5 Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern	Indikator 5 (7,5%):						
	Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern = Nilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)						
6 Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi	Indikator 6 (10%):						
	Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi = Presentase Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi (Semester I dan II) yang disampaikan tepat waktu.						
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR Setjen	Indikator 7 (7,5%):						
	Tingkat Efektivitas Penerapan MR Setjen = Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan MR Setjen						

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				8 Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	Indikator 8 (5%), dihitung dari penjumlahan : Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian = Jumlah Perjanjian yang sudah dilakukan pembahasan dibagi dengan jumlah usulan Perjanjian dikali 100%		
				9 Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	Indikator 9 (5%), dihitung dari penjumlahan : Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum = Jumlah Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan Pertimbangan Hukum dikali 100%		
7752 - Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik							
SK 06.01.01	Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	IKK 01	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	1 Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Indikator 1 : dihitung dari penjumlahan dengan pembobotan (%) a. Persentase sentimen pemberitaan (positif dan/atau netral) di media massa (<i>online</i> , cetak, dan elektronik) yang dihasilkan dari <i>press release</i> Kementerian PU (20%). = Analisis konten pemberitaan di media massa (<i>online</i> , cetak, dan elektronik) yang dihasilkan dari <i>press release</i> Kementerian PU. b. Jumlah <i>engagement</i> media sosial Kementerian PU (<i>follows</i> , <i>likes</i> , <i>shares</i> , <i>comment/replies</i> , <i>retweet by channel</i>) (20%). = Data analitik atau <i>engagement</i> pada <i>platform</i> media sosial Kementerian PU. c. Sentimen <i>stakeholder</i> pada <i>event</i> kampanye dan edukasi publik bidang PU (10%). = Survei <i>feedback</i> peserta event kampanye dan edukasi publik bidang PU. d. Data estimasi <i>reach</i> (jangkauan) dari media massa (cetak, <i>online</i> , elektronik) dimana informasi bidang PU dipublikasikan (20%). = Data estimasi <i>reach</i> (jangkauan) dari media massa (jumlah oplah untuk media cetak dan jumlah kunjungan ke situs untuk media <i>online</i>) dari media massa dimaksud atau estimasi dari digital media <i>platform</i> . e. Pelayanan informasi publik dan pengaduan (15%). = Persentase permohonan informasi publik dan pengaduan terlayani f. Kepuasan pengguna layanan publik (15%) = Persentase UPT/Balai yang melaksanakan dan melaporkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif dihitung peningkatan setiap tahun	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7748 - Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah							
SK 06.01.01	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	IKK 01	Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Komposit dari Indikator-indikator sbb:		Non Kumulatif dihitung peningkatan setiap tahun	Internal
				1 Tingkat Kualitas Fasilitasi dalam Perencanaan.	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)		
					Indikator 1 (60%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Usulan Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah Bidang PU : a.1. Kuantitas: Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai usulannya dibagi Jumlah Pemerintah Daerah yang mengusulkan (20%) a.2. Kualitas: Survei Kepuasan Fasilitasi Perencanaan Penilaian DAK Fisik dengan menggunakan pembobotan (30%)		
				2 Tingkat Kualitas Fasilitasi dalam Pembinaan.	b. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Data Kondisi Infrastruktur Daerah Bidang PU : b.1. Kuantitas: Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai usulannya dibagi Jumlah Pemerintah Daerah yang mengusulkan (20%) b.2. Kualitas: Survei Kepuasan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan menggunakan pembobotan (30%)		
					Indikator 2 (20%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/workshop : Kualitas: <i>pre test & post test</i> dan survei dengan pembobotan (40%)		
					b. Audiensi/konsultasi : b.1. Kuantitas: Audiensi yang dilaksanakan dibagi Jumlah Permohonan Audiensi (20%) b.2. Kualitas: Pengisian survei (40%)		
				3 Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi.	Indikator 3 (20%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Surat hasil monev yang disampaikan ke Pemerintah Daerah dibagi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (20%)		
					b. Data pelaporan yang lengkap, akurat (pagu krisna dibandingkan pagu emondak), dan terkini (80%) =Data Pelaporan Pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur PU oleh Pemerintah Daerah dalam Aplikasi E-Monitoring DAK.		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7747 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum							
SK 06.01.01	Meningkatnya Kualitas Layanan Digital	IKK 01	Tingkat layanan digital	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%)	Non Kumulatif dihitung peningkatan setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Layanan Sistem Pemerintahan Digital (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE))	Indikator 1 (40%), dihitung dari penjumlahan : a. Tingkat penyampaian dokumen pada penyelenggaraan penilaian Indeks Pemerintah Digital (Indeks SPBE) (50%). = Target kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen yang diunggah di aplikasi penilaian SPBE (https://tauval.spbe.go.id/) b. Tingkat kualitas dokumen penyelenggaraan penilaian Indeks Pemerintah Digital (Indeks SPBE) (50%). = Kualitas dokumen telah sesuai dengan indikator-indikator penilaian pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2021: Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2020 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 117 Tahun 2020: Tentang Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.		
				2 Tingkat penyelenggaraan transformasi digital di Kementerian PU.	Indikator 2 (20%): Tingkat pembangunan transformasi digital di Kementerian PU (100%) = Hasil Penilaian Transformasi Digital Kementerian PU yang menunjukkan jumlah unit organisasi yang telah mendapat nilai diatas 70% (Sudah "Proses Transformasi Digital")		
				3 Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral bidang pekerjaan umum.	Indikator 3 (20%), dihitung dari penjumlahan : a. Tingkat penyampaian dokumen pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) (50%). = Target kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen yang diunggah di portal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) (https://epss.web.bps.go.id/home). b. Tingkat kualitas dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) (50%) = Kualitas dokumen telah sesuai dengan indikator-indikator penilaian pada Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020: Tentang Indikator Statistik Sektoral.		
				4 Tingkat pengelolaan digitalisasi data geospasial yang mendukung interoperabilitas serta menggunakan teknologi 3D.	Indikator 4 (10%): Tingkat pengelolaan Building Information Modelling (BIM) Kementerian PU = Jumlah paket BIM PSN dan Non-PSN terintegrasi pada CDE (<i>Common Data Environment</i>)		
				5 Tingkat pengelolaan data bencana infrastruktur pekerjaan umum.	Indikator 5 (10%): Tingkat pengelolaan data bencana infrastruktur Kementerian PU yang tepat waktu = Laporan pengelolaan data bencana infrastruktur tiap bulan		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7750 - Kegiatan Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan							
SK 06.01.01	Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan	IKK 01	Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan	Komposit dari Indikator-indikator sbb: 1 Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri secara profesional dan akuntabel 2 Tingkat layanan indeks kualitas kebijakan 3 Tingkat kepuasan pengguna bahan informasi Menteri dan Wakil Menteri PU 4 Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri PU 5 Tingkat efektivitas dukungan persuratan Menteri dan Wakil Menteri PU 6 Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri PU	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Indikator 1 (15%): a. Ketepatan waktu dan substansi dalam pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri terhadap target waktu dan substansi (40%). = Jumlah pemantauan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri dalam waktu tertentu yang tepat waktu dan sesuai substansi. b. Survei terhadap persepsi stakeholder untuk menilai kepuasan terhadap risalah agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri PU (60%). = Indeks kepuasan terhadap risalah agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri PU. Indikator 2 (20%), dihitung dari penjumlahan : a. Tingkat penyampaian dokumen pada penyelenggaraan penilaian indeks kualitas kebijakan (60%). = Target kelengkapan dan ketepatan waktu dokumen yang diunggah di sistem informasi IKKLAN. b. Tingkat kualitas dokumen penyelenggaraan penilaian indeks kualitas kebijakan (40%). = Kualitas dokumen telah sesuai dengan indikator-indikator penilaian pada Surat Edaran Kepala LAN Nomor 22/K.1/HKM.02.3/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Indikator 3 (15%): Survei terhadap persepsi stakeholder untuk menilai kepuasan terhadap bahan informasi Menteri dan Wakil Menteri PU (100%). = Indeks Kepuasan terhadap bahan informasi Menteri dan Wakil Menteri PU. Indikator 4 (15%): Jumlah agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri yang dilaksanakan terhadap agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri yang direkomendasikan (100%). = Jumlah agenda prioritas Menteri dan Wakil Menteri yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator 5 (15%): Jumlah surat masuk Menteri dan Wakil Menteri yang terdisposisi terhadap surat Menteri dan Wakil Menteri yang dilaporkan (100%). = Jumlah surat masuk Menteri dan Wakil Menteri yang terdisposisi dalam waktu tertentu. Indikator 6 (20%): Survei terhadap persepsi <i>stakeholder</i> untuk menilai kepuasan terhadap dukungan layanan pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri PU (100%). = Indeks Kepuasan terhadap dukungan layanan pelaksanaan kebijakan Menteri dan Wakil Menteri PU.	Non Kumulatif dihitung peningkatan setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7749 - Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal							
SK 06.01.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Unit Kerja Sekretariat Jenderal	IKK 01	Tingkat dukungan manajemen Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuip tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro PAKLN untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro PAKLN yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro PAKLN	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro PAKLN		
				7 Nilai SAKIP Biro PAKLN	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro PAKLN setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro PAKLN		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Tingkat dukungan manajemen Biro Keuangan	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro Keuangan untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro Keuangan yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro Keuangan	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro Keuangan		
				7 Nilai SAKIP Biro Keuangan	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro Keuangan setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro Keuangan		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Tingkat dukungan manajemen Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro PBMN untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro PBMN yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro PBMN	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro PBMN		
				7 Nilai SAKIP Biro PBMN	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro PBMN setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro PBMN		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat dukungan manajemen Biro Umum	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro Umum untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro Umum yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro Umum	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro Umum		
				7 Nilai SAKIP Biro Umum	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro Umum setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro Umum		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 05	Tingkat dukungan manajemen Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuip tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		
				7 Nilai SAKIP Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 06	Tingkat dukungan manajemen Biro Hukum	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuip tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro Hukum untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Biro Hukum yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro Hukum	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Biro Hukum		
				7 Nilai SAKIP Biro Hukum	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Biro Hukum setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro Hukum		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 07	Tingkat dukungan manajemen Biro Komunikasi Publik	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%):		
					Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan :		
					a. Penatausahaan :		
					b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
					c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%)		
					d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%):		
					Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Biro Komunikasi Publik untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%):		
					IKPA Satuan Kerja Biro Komunikasi Publik yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%):		
					Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Biro Komunikasi Publik	Indikator 6 (10%):		
					Nilai Transformasi Digital Biro Komunikasi Publik		
				7 Nilai SAKIP Biro Komunikasi Publik	Indikator 7 (15%):		
					Capaian nilai SAKIP Biro Komunikasi Publik setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%):		
					Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Biro Komunikasi Publik		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 08	Tingkat dukungan manajemen Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yaitu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah		
				7 Nilai SAKIP Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 09	Tingkat dukungan manajemen Pusat Data dan Informasi	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Pusat Data dan Informasi untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Pusat Data dan Informasi	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Pusat Data dan Informasi		
				7 Nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Pusat Data dan Informasi setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 10	Tingkat dukungan manajemen Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Komposit dari Indikator-indikator sbb:	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	Non Kumulatif dihitung peningkatan setuiap tahun	Internal dan Eksternal
				1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal = Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusunan, sarana dan prasarana		
				2 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN.	Indikator 2 (15%), dihitung dari penjumlahan : a. Penatausahaan : ketepatan tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%) b. RKBMN: Ketepatan tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%). c. Penggunaan: Penetapan status BMN yatu Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.(25%) d. Wasdal BMN: Ketepatan tanggal penyampaian Laporan pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian berdasarkan aturan yang berlaku. (25%).		
				3 Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	Indikator 3 (15%): Nilai survei kepada pegawai di lingkungan Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan untuk menilai tingkat kepuasan layanan kepegawaian.		
				4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator 4 (15%): IKPA Satuan Kerja Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan yang diambil dari aplikasi OMSPAN		
				5 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RITL LHP	Indikator 5 (10%): Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu.		
				6 Transformasi Digital Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Indikator 6 (10%): Nilai Transformasi Digital Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan		
				7 Nilai SAKIP Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Indikator 7 (15%): Capaian nilai SAKIP Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan setiap tahun		
				8 Nilai evaluasi efektivitas Manajemen Risiko T2	Indikator 8 (10%): Nilai laporan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan		

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Lainnya	IKSS 02	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur&		Diukur dari realisasi Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU	Tahunan	Eksternal		
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 08	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	Komposit dari		Rerata Nilai Pengawasan Kearsipan		Tahunan	Eksternal
				1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (Bobot 10%)	Rerata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Unit Kerja di Inspektorat Jenderal		Tahunan	Eksternal
				2	Tingkat Pengelolaan BMN (Bobot 10%)	Diukur melalui indikator sebagai			
						a	Penatausahaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.		
						b	Perencanaan BMN	Tahunan	Internal
							Tingkat ketepatan waktu penyampaian RKBMN sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.		
						c	Penggunaan BMN	Tahunan	Internal
							Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP.		
						d	Pengawasan dan Pengendalian BMN	Tahunan	Internal
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku								

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				3	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (Bobot 10%)		Diukur melalui indikator sebagai berikut		
					a	Tingkat Efektifitas Penyelesaian Produk Hukum	Tahunan	Internal	
						Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah usulan produk hukum.			
					b	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	Tahunan	Internal	
						Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah usulan Perjanjian.			
					c	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	Tahunan	Internal	
						Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah Pertimbangan Hukum.			
					d	Tingkat Efektivitas Advokasi Hukum	Tahunan	Internal	
						Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara.			
				4	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (Bobot 10%)		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan hasil survey	Tahunan	Internal
5	Nilai Kinerja Anggaran (Bobot 10%)		Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri atas Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan aplikasi SMART DJA.	Tahunan	Eksternal				
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Bobot 10%)		Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah tuntas ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI	Kumulatif	Internal				
7	Predikat SAKIP Unit Organisasi (Bobot 10%)		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Organisasi oleh Inspektorat Jenderal	Tahunan	Eksternal				

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				8	Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik (Bobot 10%)		Tingkat kepuasan pengguna layanan publik berupa persepsi/sentimen positif stakeholder dan/atau stakeholder feedback	Tahunan	Eksternal
				9	Nilai Transformasi Digital Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)		Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Internal
				10	Tingkat Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal (Bobot 10%)	a	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (Bobot 30%)		
						1	Indeks Integritas Unit Organisasi, yaitu Hasil Survei Penilaian Integritas Unit Organisasi,	Tahunan	Eksternal
						2	Unit Kerja yang berhasil melakukan Pembangunan ZI, yaitu presentase keberhasilan Unit Kerja yang diusulkan TPU dan lolos penilaian oleh TPI,	Tahunan	Internal
						3	Tingkat Pembinaan KI dan MR, yaitu presentase Laporan Pembinaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko yang disampaikan tepat waktu,	Tahunan	Internal
						4	Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi, yaitu presentase Laporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi (Semester I dan II) yang disampaikan tepat waktu,	Tahunan	Internal
						5	Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan, yaitu presentase deklarasi benturan kepentingan pejabat dan pegawai di Unit Organisasi.	Tahunan	Internal
						b	Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (Bobot 40%)		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					1 Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan, yaitu presentase Pengelolaan Pengaduan yang ditindaklanjuti,	Tahunan	Internal
					2 Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum, yaitu presentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang ditangani,	Tahunan	Internal
					3 Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern, yaitu presentase Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern yang tepat waktu.	Tahunan	Internal
					c Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (Bobot 30%)		
					1 Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T-1 Unit Organisasi, yaitu nilai hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Penerapan MR UPR T1 Unit Organisasi,	Tahunan	Internal
					2 Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, yaitu presentase pelaporan LHKAN (LHKPN dan SPT Pajak) oleh wajib lapor di Unit Organisasi,	Tahunan	Internal
					3 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti, yaitu presentase Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan Unit Organisasi yang ditindaklanjuti,	Tahunan	Internal
					4 Rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2, yaitu rata-rata Nilai Efektivitas Penerapan MR UPR T-2,	Tahunan	Internal
					5 Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal, yaitu presentase Laporan Pemantauan MR UPR T-1 dan T-2 Inspektorat Jenderal.	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 13	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum	Komposit dari subindikator sebagai berikut:			
				1 Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (Bobot 20%)	Hasil dari Penilaian Mandiri dan/atau Evaluasi BPKP atas Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian Pekerjaan Umum/Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Tahunan	Eksternal
				2 Indeks Integritas Kementerian Pekerjaan Umum (Bobot 15%)	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Tahunan	Eksternal
				3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Bobot 15%)	Kumulatif Unit Kerja yang Mendapat Predikat menuju WBK dan/atau WBBM dari Tim Penilai Nasional	Kumulatif	Eksternal
				4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (Bobot 50%)	Rerata dari	Tahunan	Internal dan Eksternal
					1. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I,		
					2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II,		
					3. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III,		
					4. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV,		
					5. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, dan		
					6. Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA						
7753 - Kegiatan Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan														
SK 06.01.01	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Komposit dari subindikator sebagai berikut:										
				1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal		Tahunan	Eksternal					
						a	Penatausahaan BMN			Tahunan	Internal			
								Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku						
									b			Perencanaan BMN	Tahunan	Internal
									c			Penggunaan BMN	Tahunan	Internal
								Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP						
						d	Pengawasan dan Pengendalian BMN		Tahunan	Internal				
				Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku										
					3	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (Bobot 8%)	Tingkat Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Layanan Hukum		Tahunan	Internal				

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				4	Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (Bobot 8%)	Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan Jumlah layanan kepegawaian yang dilaksanakan	Tahunan	Internal
				5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bobot 8%)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan SMART DJA	Tahunan	Eksternal
				6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (Bobot 10%)	Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan secara tepat waktu 60 hari kerja atas rekomendasi temuan BPK RI terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI terbaru	Tahunan	Internal
				7	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik (Bobot 8%)	Tingkat ketepatan waktu Laporan PPID	Tahunan	Internal
				9	Transformasi Digital Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				10	Tingkat Efektivitas penerapan MR UPR T-2 Sekretariat Inspektorat Jenderal (Bobot 8%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T- 2 Sekretariat Inspektorat Jenderal oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				11	Tingkat Pelaksanaan Kepatuhan Intern (Bobot 8%)	Tingkat Pelaksanaan Program Kerja Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				12	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (Bobot 12%)	Tingkat Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7754 - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum							
SK 06.01.01	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Komposit dari			
				1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat I (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	Tahunan	Internal
				2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat I (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat I (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat I (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5 Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat I (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang disusun.	Tahunan	Internal
				6 Nilai SAKIP Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat I oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat I (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat I	Tahunan	Eksternal
SK 06.01.02	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Komposit dari				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat II oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat II	Tahunan	Eksternal
SK 06.01.03	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Komposit dari				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat III (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III	Tahunan	Internal
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat III (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat III (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat III (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat III yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat III oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat III (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat III	Tahunan	Eksternal
SK 06.01.04	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Komposit dari subindikator sebagai berikut:				
				1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat IV (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat IV (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat IV (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat IV (Bobot 15%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat IV (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV yang disusun.	Tahunan	Internal
				6	Nilai SAKIP Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat IV oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				8	Transformasi Digital Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat IV (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat IV	Tahunan	Eksternal
SK 06.01.05	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Komposit dari subindikator sebagai berikut:			
				1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat V (Bobot 20%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V	Tahunan	Internal
				2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat V (Bobot 20%)	Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal	Tahunan	Internal
				3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat V (Bobot 20%)	Perbandingan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya	Tahunan	Internal
				4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat V (Bobot 10%)	Perbandingan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal dan Eksternal
				5 Tingkat Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Bobot 5%)	Perbandingan Hasil Penjaminan Kualitas Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal terhadap Hasil Penilaian Evaluasi Maturitas SPIP oleh BPKP	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				6	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat V (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat V yang disusun.	Tahunan	Internal
				7	Nilai SAKIP Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				8	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat V oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				9	Transformasi Digital Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				10	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat V (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat V	Tahunan	Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 06.01.06	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja di Inspektorat VI	IKK 01	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Komposit dari subindikator sebagai berikut:			
				1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses Audit Inspektorat VI (Bobot 10%)	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI	Tahunan	Internal
				2 Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif (Bobot 10%)	Perbandingan jumlah audit investigasi yang terindikasi tindak pidana dibandingkan dengan total pelaksanaan audit investigasi.	Tahunan	Internal
				3 Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan (Bobot 10%)	Diukur dari perbandingan jumlah pengaduan umum dan Whistleblowing System Kementerian Pekerjaan Umum (Wispu) yang telah ditindaklanjuti dengan pembobotan sesuai tahapan penanganan pengaduan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya.	Tahunan	Internal
				4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil ADTT-Audit Investigatif yang Ditindaklanjuti di Inspektorat VI (Bobot 10%)	Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan ADTT-Audit Investigatif yang dinyatakan tuntas dan/atau memadai sesuai tahapan penuntasan rekomendasi dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi	Tahunan	Internal
				5 Tingkat Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas (Bobot 5%)	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum	Kumulatif	Internal
				6 Tingkat Rekomendasi Pengembangan Pengawasan yang digunakan/diimplementasikan (Bobot 10%)	Jumlah rekomendasi pengembangan pengawasan yang diimplementasikan oleh Unit Organisasi Kementerian PU	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				7	Tingkat Fasilitasi Survei Penilaian Integritas Kementerian Pekerjaan Umum (Bobot 5%)	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Survei Penilaian Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum	Tahunan	Internal
				8	Tingkat Layanan Teknologi Informasi Pengawasan (Bobot 5%)	Presentase ketersediaan layanan teknologi informasi pengawasan: Jumlah hari sistem informasi berfungsi dibandingkan dengan total hari dalam satu tahun	Tahunan	Eksternal
				9	Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat VI (Bobot 5%)	Penyelesaian Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI yang disusun.	Tahunan	Internal
				10	Nilai SAKIP Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja yang dilakukan internal Inspektorat Jenderal	Tahunan	Internal
				11	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Evaluasi Efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Inspektorat VI oleh Unit Kepatuhan Intern	Tahunan	Internal
				12	Tingkat Pelaporan Hasil Pengawasan (Bobot 5%)	Tingkat penyelesaian dokumen IHP Semester I dan II yang telah disusun.	Tahunan	Internal
				13	Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal (Bobot 5%)	Tingkat pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penilaian Mandiri dan Pemantauan AOI Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal.	Tahunan	Internal
				14	Transformasi Digital Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital	Tahunan	Eksternal
				15	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat VI (Bobot 5%)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat VI	Tahunan	Eksternal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSS 03	Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PU	Komposit dari Indikator sbb: 1. IKP 1: Persentase Kinerja Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU 2. IKP 2: Persentase Kinerja Kesinkronan Pemrograman Infrastruktur PU 3. IKP 3: Persentase Kinerja Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	$IKSS = \left(\frac{a + b + c}{3}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKSS : Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PU a : IKP 1 b : IKP 2 c : IKP 3	Tahunan	Internal
		IKSS 01	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PU	Mendukung indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PU			
145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 17	Persentase Kinerja Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU	Komposit dari Indikator sbb: 1. IKK 1.1: Persentase Keselarasan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian 2. IKK 1.2: Persentase Keselarasan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PU Jangka Panjang/Menengah dengan Perencanaan Jangka Panjang/Menengah Nasional 3. IKK 1.3-1.5: Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, II, III	$IKP\ 1 = \left(\frac{a+b+c}{3}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKP 1: Persentase Kinerja Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU a: IKK 1.1 b: IKK 1.2 c: IKK 1.3-1.5 (seluruh kawasan)	Tahunan	Internal
		IKP 14	Persentase Kinerja Kesinkronan Pemrograman Infrastruktur PU	Komposit dari Indikator sbb: 1. IKK 2.1-2.3: Persentase Memorandum Program (Wilayah I, II, III) dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan 2. IKK 2.4: Persentase Rancangan Program Pembangunan Tahunan dalam Alokasi Anggaran	$IKP\ 2 = \left(\frac{a + b}{2}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKP 2: Persentase Kinerja Kesinkronan Pemrograman Infrastruktur PU a : Persentase Memorandum Program (Wilayah I, II, III) dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan b : Persentase Adaptasi Rancangan Program Pembangunan Tahunan dalam Alokasi Anggaran T-1 T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
		IKP 16	Persentase Kinerja Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	Komposit dari Indikator sbb: 1. IKK 3.1-3: Persentase Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III 2. IKK 3.4: Tingkat Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	$IKP\ 3 = \left(\frac{a + b}{2}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKP 3: Persentase Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU a : Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU b : Tingkat Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKP 09	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (BPIW)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (8,3%) 2. Tingkat Pengelolaan BMN (8,3%) 3. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum (8,3%) 4. Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana (8,3%) 5. Nilai Kinerja Anggaran (8,3%) 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (8,3%) 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi (8,3%) 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (8,3%) 9. Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi (8,3%) 10. Tingkat Layanan Kepatuhan Intern (8,3%) 11. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PU (8,3%) 12. Nilai SAKIP Kementerian PU (8,3%)	Indikator 1 (8,3%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (8,3%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3.&Penggunaan: Penetapan Status 3. Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (8,3%): 1. Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% 2. Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% 3. Jumlah usulan pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% 4. Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7768 - Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah								
SK 06.01.01	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Infrastruktur PU	IKK 01	Persentase Keselarasan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian		Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Persentase Kepatuhan Rencana Strategis Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian (70%) 2. Persentase Kepatuhan Perencanaan Kinerja Tahunan terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%)	IKK 1.1 = $(a \times 70\%) + (b \times 30\%)$ Keterangan: IKK 1.1: Persentase Kepatuhan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian a: Persentase Kepatuhan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian b: Persentase Kepatuhan Perencanaan Kinerja Tahunan terhadap Rencana Strategis Kementerian	Tahunan	Internal dan Eksternal
			1.1.a	Persentase Kepatuhan Rencana Strategis Unit Organisasi terhadap Rencana Strategis Kementerian (70%)	Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Kinerjanya yang sesuai pada Rencana Strategis Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%) 2. Jumlah Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang sesuai pada Rencana Strategis Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (40%) 3. Jumlah Anggaran yang Sesuai pada Rencana Strategis Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%)	IKK 1.1.a = $\left(\frac{a}{b} \times 30\%\right) + \left(\text{rerata}\left(1 - \frac{[c-d]}{d}\right) \times 40\%\right) + \left(\text{rerata}\left(1 - \frac{[e-f]}{f}\right) \times 40\%\right)$ Keterangan: IKK 1.1.a: Persentase Kepatuhan Rencana Strategis Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian a : Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang sesuai pada Renstra Unor Teknis b : Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Unor Teknis pada Renstra Kementerian c : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang sesuai pada Renstra Unor Teknis d : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Renstra Kementerian e : Anggaran pada Renstra Unor Teknis yang sesuai f : Anggaran pada Renstra Kementerian	Tahunan	Internal dan Eksternal
			1.1.b	Persentase Kepatuhan Perencanaan Kinerja Tahunan terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%)	Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Kinerjanya yang sesuai pada Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%) 2. Jumlah Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang sesuai pada Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (40%) 3. Jumlah Anggaran yang sesuai pada Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian (30%)	IKK 1.1.b = $\left(\frac{a}{b} \times 30\%\right) + \left(\text{rerata}\left(1 - \frac{[c-d]}{d}\right) \times 40\%\right) + \left(\text{rerata}\left(1 - \frac{[e-f]}{f}\right) \times 40\%\right)$ Keterangan: IKK 1.1.b: Persentase Kepatuhan Perencanaan Kinerja Tahunan Unit Organisasi Teknis terhadap Rencana Strategis Kementerian a : Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang sesuai pada Perjanjian Kinerja Unor Teknis b : Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Unor Teknis pada Renstra Kementerian c : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang sesuai pada Perjanjian Kinerja Unor Teknis d : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Renstra Kementerian e : Anggaran pada Perjanjian Kinerja Unor Teknis yang sesuai f : Anggaran pada Renstra Kementerian	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Persentase Keselarasan Kebijakan dan Strategi Infrastruktur PU Jangka Panjang/Menengah dengan Perencanaan Jangka Panjang/Menengah Nasional	Non Komposit	$IKK\ 1.2 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 1.2: Persentase Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Jangka Panjang/Menengah dengan Perencanaan Jangka Panjang/Menengah Nasional a : Jumlah arah dan target pembangunan infrastruktur PU dalam Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang/Menengah b : Jumlah arah dan target pembangunan infrastruktur PU dalam RPJPN/RPJMN	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 03	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah I	Non Komposit	$IKK\ 1.3 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 1.3: Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah I a : Jumlah kawasan di Wilayah I dalam Rencana Strategis Kementerian PU b : Jumlah kawasan di Wilayah I dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah I	Tahunan	Internal
		IKK 04	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah II	Non Komposit	$IKK\ 1.4 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 1.4: Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah II a : Jumlah kawasan di Wilayah II dalam Rencana Strategis Kementerian PU b : Jumlah kawasan di Wilayah II dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah II	Tahunan	Internal
		IKK 05	Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah III	Non Komposit	$IKK\ 1.5 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 1.5: Persentase Kesesuaian Rencana Strategis Kementerian PU terhadap Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah III a : Jumlah kawasan di Wilayah III dalam Rencana Strategis Kementerian PU b : Jumlah kawasan di Wilayah III dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah III	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 06.01.02	Meningkatnya Kesinkronan Program dan Anggaran Infrastruktur PU	IKK 01	Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan		Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan 2. Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah I dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	$IKK\ 2.1 = \left(\frac{a + b}{2} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.1: Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (T-2) b : Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah I dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan (T-1) T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.1.a	Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.1.a = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.1.a: Persentase Memorandum Program Wilayah I dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan a : Jumlah Memorandum Program Wilayah I yang disepakati menjadi Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil T-2) b : Jumlah Memorandum Program Wilayah I T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.1.b	Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah I dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.1.b = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.1.b: Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah I dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah I yang disepakati menjadi Rancangan Program Pembangunan Tahunan (Hasil Konsultasi Regional T-1) b : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah I T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan	Komposit dari Indikator sbb: 1. Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan 2. Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah II dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	$IKK\ 2.2 = \left(\frac{a + b}{2} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.2: Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (T-2) b : Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah II dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan (T-1) T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.2.a Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.2.a = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.2.a: Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan a : Jumlah Memorandum Program Wilayah II yang disepakati menjadi Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil T-2) b : Jumlah Memorandum Program Wilayah II T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.2.b Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah II dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.2.b = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.2.b: Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah II dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah II yang disepakati menjadi Rancangan Program Pembangunan Tahunan (Hasil Konsultasi Regional T-1) b : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah II T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan	Komposit dari Indikator sbb: 1. Persentase Memorandum Program Wilayah II dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan 2. Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah II dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	$IKK\ 2.3 = \left(\frac{a + b}{2} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.3: Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan - Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (T-2) b : Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah III dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan (T-1) T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.3.a Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.3.a = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.3.a: Persentase Memorandum Program Wilayah III dalam Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan a : Jumlah Memorandum Program Wilayah III yang disepakati menjadi Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil T-2) b : Jumlah Memorandum Program Wilayah III T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
			2.3.b Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah III dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan	Non Komposit	$IKK\ 2.3.b = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.3.b: Persentase Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan Wilayah III dalam Rancangan Program Pembangunan Tahunan a : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah III yang disepakati menjadi Rancangan Program Pembangunan Tahunan (Hasil Konsultasi Regional T-1) b : Jumlah Kesepakatan Program Keterpaduan Tahunan (Hasil Rakorbangwil) Wilayah III T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Persentase Rancangan Program Pembangunan Tahunan dalam Alokasi Anggaran	Non Komposit	$IKK\ 2.4 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 2.4: Persentase Rancangan Program Pembangunan Tahunan dalam Alokasi Anggaran a : Jumlah Rancangan Program Pembangunan Tahunan (Hasil Konsultasi Regional T-1) dalam Alokasi Anggaran (Hasil Litviu RKAKL) (T-1) b: Jumlah Rancangan Program Pembangunan Tahunan (Hasil Konsultasi Regional T-1) T: Tahun Pelaksanaan Program	Tahunan	Internal
SK 06.01.03	Meningkatnya Kinerja Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	IKK 01	Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah I dalam Memorandum Program	Non Komposit	$IKK\ 3.1 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 3.1: Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah I dalam Memorandum Program a : Jumlah Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah I yang ditindaklanjuti menjadi Memorandum Program (T) b : Jumlah infrastruktur PU yang dievaluasi kebermanfaatannya di Wilayah I (T) T: Tahun Berjalan	Tahunan	Internal
		IKK 02	Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah II dalam Memorandum Program	Non Komposit	$IKK\ 3.2 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 3.2: Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah II dalam Memorandum Program a : Jumlah Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah II yang ditindaklanjuti menjadi Memorandum Program (T) b : Jumlah infrastruktur PU yang dievaluasi kebermanfaatannya di Wilayah II (T) T: Tahun Berjalan	Tahunan	Internal
		IKK 03	Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah III dalam Memorandum Program	Non Komposit	$IKK\ 3.3 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 3.3: Persentase Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah III dalam Memorandum Program a : Jumlah Rekomendasi Peningkatan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah III yang ditindaklanjuti menjadi Memorandum Program (T) b : Jumlah infrastruktur PU yang dievaluasi kebermanfaatannya di Wilayah III (T) T: Tahun Berjalan	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU	Non Komposit	$IKK\ 3.4 = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$ Keterangan: IKK 3.4: Tingkat Kualitas Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU a : Jumlah Rekomendasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU yang dilaporkan b : Jumlah Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur PU yang dilakukan	Tahunan	Internal
7767 - Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
SK 06.01.01	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja	IKK 01	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat BPIW	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (10%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat Layanan Hukum (10%) 4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%) 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (10%) 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%) 7. Nilai SAKIP Unit Kerja (10%) 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%) 9. Transformasi Digital Unit Kerja (10%) 10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%)	Indikator 1 (10%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (10%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (10%): Tingkat layanan advokasi, pemberian pertimbangan dan penyusunan produk hukum Indikator 4 (10%): Tingkat layanan kepegawaian Unit Kerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator 5 (10%): Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja Indikator 6 (10%): Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 7 (10%): Nilai SAKIP Unit Kerja Indikator 8 (10%): Tingkat layanan publikasi dan kehumasan BPIW Indikator 9 (10%): Nilai Transformasi Digital Unit Kerja Indikator 10 (10%): Tingkat Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 02	Tingkat Dukungan Manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (12,5%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (12,5%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (12,5%) 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (12,5%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (12,5%) 6. Nilai SAKIP Unit Kerja (12,5%) 7.Transformasi Digital Unit Kerja (12,5%) 8.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (12,5%)	Indikator 1 (12,5%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (12,5%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (12,5%): Tingkat layanan kepegawaian Unit Kerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 (12,5%): Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja Indikator 5 (12,5%): Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 6 (12,5%): Nilai SAKIP Unit Kerja Indikator 7 (12,5%): Nilai Transformasi Digital Unit Kerja Indikator 8 (12,5%): Tingkat Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 03	Tingkat Dukungan Manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (12,5%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (12,5%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (12,5%) 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (12,5%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (12,5%) 6. Nilai SAKIP Unit Kerja (12,5%) 7.Transformasi Digital Unit Kerja (12,5%) 8.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (12,5%)	Indikator 1 (12,5%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (12,5%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (12,5%): Tingkat layanan kepegawaian Unit Kerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 (12,5%): Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja Indikator 5 (12,5%): Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 6 (12,5%): Nilai SAKIP Unit Kerja Indikator 7 (12,5%): Nilai Transformasi Digital Unit Kerja Indikator 8 (12,5%): Tingkat Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 04	Tingkat Dukungan Manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah II	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (12,5%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (12,5%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (12,5%) 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (12,5%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (12,5%) 6. Nilai SAKIP Unit Kerja (12,5%) 7.Transformasi Digital Unit Kerja (12,5%) 8.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (12,5%)	Indikator 1 (12,5%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (12,5%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (12,5%): Tingkat layanan kepegawaian Unit Kerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 (12,5%): Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja Indikator 5 (12,5%): Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 6 (12,5%): Nilai SAKIP Unit Kerja Indikator 7 (12,5%): Nilai Transformasi Digital Unit Kerja Indikator 8 (12,5%): Tingkat Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2	Tahunan	Internal dan Eksternal
		IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (12,5%) 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (12,5%) 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (12,5%) 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (12,5%) 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (12,5%) 6. Nilai SAKIP Unit Kerja (12,5%) 7.Transformasi Digital Unit Kerja (12,5%) 8.Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (12,5%)	Indikator 1 (12,5%): Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Indikator 2 (12,5%): 1. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 2. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku 3. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP 4. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku Indikator 3 (12,5%): Tingkat layanan kepegawaian Unit Kerja yang diselesaikan tepat waktu Indikator 4 (12,5%): Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja Indikator 5 (12,5%): Berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu Indikator 6 (12,5%): Nilai SAKIP Unit Kerja Indikator 7 (12,5%): Nilai Transformasi Digital Unit Kerja Indikator 8 (12,5%): Tingkat Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2	Tahunan	Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 06	Tingkat Kepatuhan Intern BPIW	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (30%) 2. Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (40%) 3. Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (30%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: 1. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern (30%) 2. Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern (40%) 3. Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern (30%)	Tahunan	Internal dan Eksternal
SS 07	Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan	IKSS 01	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB WM KBI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Anggota WM KBI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 02	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= $\text{Misi X} = \sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor WM KBI= $\%PPKt = \frac{PPKt}{\text{target PPKt}}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 03	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB WM KTI = $\frac{\sum(PDRB \text{ Kabupaten atau Kota Anggota WM KTI})}{\sum PDB \text{ Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKSS 04	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= $\text{Misi X} = \sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor WM KTI= $\text{IKB} = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M = Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 05	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB Non-WM KBI = $\frac{\sum(\text{PDRB Kabupaten atau Kota Non WM KBI})}{\sum \text{PDB Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 06	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non- Wilayah Metropolitan KBI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= $\text{Misi X} = \sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor Non-WM KBI= $\text{IKB} = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n}$ Keterangan: M = Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
		IKSS 07	Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	Non Komposit	Kontribusi PDRB Non-WM KTI = $\frac{\sum(\text{PDRB Kabupaten atau Kota Non WM KTI})}{\sum \text{PDB Nasional}} \times 100\%$	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKSS 08	Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non- Wilayah Metropolitan KTI	Komposit dari misi Indeks Kota Berkelanjutan (mengacu misi dalam Kebijakan Perkotaan Nasional 2045): Misi 1: Sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan Misi 2: Perkotaan layak huni, inklusif dan berbudaya Misi 3: Perkotaan yang maju dan menyejahterakan Misi 4: Perkotaan yang hijau dan tangguh Misi 5: Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu	Kalkulasi skor capaian misi= Misi X = $\sqrt[n]{I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n}$ Keterangan: Misi X= Misi 1/2/3/4/5 I= Indikator n = Banyaknya indikator Kalkulasi rerata skor Non-WM KTI= $IKB = \sqrt[n]{M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n}$ Keterangan: M= Misi n = Banyaknya misi	Non-kumulatif, dihitung setiap tahun	Kementerian PPN/Bappenas
PROGRAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN							
SP 07.01	Meningkatnya Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	IKP 01	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Nilai Komposit dari IKK	Rerata dari nilai indikator: 1. IKK 1: Tingkat Kualitas Dukungan Pelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah Nasional& 2. IKK 2: Tingkat Kualitas Dukungan Pelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah I 3. IKK 3: Tingkat Kualitas Dukungan Pelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah II 4. IKK 4: Tingkat Kualitas Dukungan Pelaksanaan Keterpaduan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah III&	Tahunan	Internal
		IKP 02	Rasio Kab/Kota yang Menerapkan Infrastruktur Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	Non Komposit	Persentase dari jumlah kumulatif Kab/Kota yang diintervensi infrastruktur PU tahan bencana tiap tahun, dengan perhitungan: (Jumlah kumulatif Kab/Kota yang diintervensi tiap tahun pada lokasi prioritas kebencanaan dalam RPJMN 2025-2029/Total Lokasi Kab/Kota prioritas kebencanaan (32 Kab/Kota)) x 100% Catatan: Infrastruktur berketahanan bencana yang diukur dalam perhitungan ini merupakan infrastruktur sektor Sumber Daya Air dan sektor Cipta Karya	Tahunan	Eksternal
KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN							
SK 07.01.01	Meningkatnya Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Non Metropolitan	IKK 01	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah Nasional	Non Komposit	Persentase penyelesaian produk perencanaan/pemrograman/evaluasi BPIW dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan dari target yang direncanakan di Wilayah Nasional	Tahunan	Internal
		IKK 02	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah I	Non Komposit	Persentase penyelesaian produk perencanaan/pemrograman/evaluasi BPIW dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan dari target yang direncanakan di Wilayah I	Tahunan	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK 03	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah II	Non Komposit	Persentase penyelesaian produk perencanaan/pemrograman/evaluasi BPIW dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan dari target yang direncanakan di Wilayah II	Tahunan	Internal
		IKK 04	Tingkat Keterpaduan Pemrograman dan Kebermanfaatan Infrastruktur PU Wilayah Metropolitan dan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Wilayah III	Non Komposit	Persentase penyelesaian produk perencanaan/pemrograman/evaluasi BPIW dalam mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur PU di Perkotaan dari target yang direncanakan di Wilayah III	Tahunan	Internal
		IKK 05	Tingkat Pelaksanaan Pemantauan Infrastruktur PU Berketahanan Bencana di Lokasi Prioritas Bencana	Non Komposit	Persentase penyelesaian pemantauan atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana Wilayah Nasional	Tahunan	Eksternal

MATRIKS METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 05	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	IKSS 02	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten dan Siap Kerja	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK : indikator BPSDM = 50% : 50% Indikator BPSDM dihitung secara komposit dari: 1. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional (Bobot=70%); dan 2. Persentase Serapan Lulusan Politeknik PU di Dunia Kerja (Bobot=30%).	1. Sub Indikator 1 Dihitung dari Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional dibagi Jumlah Mahasiswa yang Diproyeksikan Lulus Program Studi Vokasional (≥ Masa Studi). 2. Sub Indikator 2 Dihitung dari Jumlah Serapan Lulusan Politeknik PU di Dunia Kerja dibagi Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey dan Internal
145.DL - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI							
SP 05.01	Meningkatnya SDM Vokasional Pendidikan Bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten dan Siap Kerja	IKP 01	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi bidang Pekerjaan Umum	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional (Bobot=70%); dan 2. Persentase Serapan Lulusan Politeknik PU di Dunia Kerja (Bobot=30%).	1. Sub Indikator 1 Dihitung dari Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional dibagi Jumlah Mahasiswa yang Diproyeksikan Lulus Program Studi Vokasional (≥ Masa Studi). 2. Sub Indikator 2 Dihitung dari Jumlah Serapan Lulusan Politeknik PU di Dunia Kerja dibagi Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey dan Internal
7684 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum							
SK 05.01.01	Meningkatnya Mutu Kuantitas dan Kualitas SDM Vokasional Pendidikan bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten	IKK 01	Kecukupan Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Non Komposit	Dihitung dari Jumlah dosen tetap sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti pada seluruh program studi.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 02	Tingkat Penelitian dan PkM Dosen Tetap	Non Komposit	Dihitung dari perbandingan Jumlah Luaran Penelitian + Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) berupa Jurnal/ Proceeding/ HKI/ Buku Ber ISBN/ Produk dll terhadap Jumlah Dosen Tetap.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 03	Tingkat Kemitraan terkait Tridharma	Non Komposit	Jumlah <i>Implementation Agreement</i> (IA) yang dilaksanakan.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 04	Persentase Lulusan Pendidikan Politeknik PU yang Kompeten	Non Komposit	Dihitung dari Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional dibagi Jumlah Mahasiswa yang Diproyeksikan Lulus Program Studi Vokasional (≥ Masa Studi).	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 06	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKSS 06	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PU	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Persentase ASN Kompeten Melalui Pendidikan & Pelatihan (Bobot=45%); 2. Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (Bobot=15%); 3. Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN (Bobot=15%); dan 4. Tingkat Dampak Pengembangan Kompetensi terhadap Organisasi (Bobot=25%).	Sub Indikator 1 Dihitung dari komposit: A. Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pendidikan dibagi dengan Jumlah ASN yang diproyeksikan Lulus Pendidikan ($\geq$ Masa Studi). B. Komposit dari perhitungan: 1). Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning (Bobot=70%) Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning dibagi dengan Target Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning pada Tahun Berjalan; dan 2). E-Learning dan/atau Webinar (Bobot=30%) Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar dibagi dengan Target Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar pada Tahun Berjalan. Sub Indikator 2 Dihitung dari Jumlah Pejabat Struktural yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dibagi Jumlah Pejabat Struktural. Sub Indikator 3 Dihitung dari Persentase Jumlah ASN Kementerian PU yang Dikembangkan Kompetensinya. Sub Indikator 4 Dihitung dari rata-rata nilai hasil evaluasi pasca pelatihan (bidang pelatihan Sumber Daya Air, Cipta Karya, Prasarana Strategis, Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Manajemen Umum, Manajemen Konstruksi, Kepemimpinan dan Fungsional).	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey dan Internal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
145.WA – PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 15	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PU (BPSPDM)	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Persentase ASN Kompeten Melalui Pendidikan & Pelatihan (Bobot=45%); 2. Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (Bobot=15%); 3. Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN (Bobot=15%); dan 4. Tingkat Dampak Pengembangan Kompetensi terhadap Organisasi (Bobot=25%).	Sub Indikator 1 Dihitung dari komposit: A. Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pendidikan dibagi dengan Jumlah ASN yang diproyeksikan Lulus Pendidikan (≥ Masa Studi). B. Komposit dari perhitungan: 1). Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning (Bobot=70%) Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning dibagi dengan Target Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning pada Tahun Berjalan; dan 2). E-Learning dan/atau Webinar (Bobot=30%) Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar dibagi dengan Target Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar pada Tahun Berjalan. Sub Indikator 2 Dihitung dari Jumlah Pejabat Struktural yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dibagi Jumlah Pejabat Struktural. Sub Indikator 3 Dihitung dari Persentase Jumlah ASN Kementerian PU yang Dikembangkan Kompetensinya. Sub Indikator 4 Dihitung dari rata-rata nilai hasil evaluasi pasca pelatihan (bidang pelatihan Sumber Daya Air, Cipta Karya, Prasarana Strategis, Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Manajemen Umum, Manajemen Konstruksi, Kepemimpinan dan Fungsional).	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey dan Internal
7771 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Talenta							
SK 06.01.01	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal	IKK 01	Persentase Penempatan Talenta pada Jabatan Target Kementerian	Non Komposit	Jumlah Pejabat Struktural yang menempati Kotak 9 Matriks Talenta dibagi dengan jumlah seluruh jabatan struktural di Kementerian PU.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 02	Tingkat Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Tingkat Kesesuaian Validasi terhadap Tindak Lanjut Temuan (Bobot: 50%); 2. Tingkat Pendampingan terhadap UPR dalam rangka Pemenuhan Komponen Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (Bobot: 30%); dan 3. Survei Unit Kepatuhan Internal (Bobot: 20%).	Sub Indikator 1 Tingkat Kesesuaian Validasi terhadap Tindak Lanjut Temuan Sub Indikator 2 Tingkat Pendampingan terhadap UPR dalam rangka Pemenuhan Komponen Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Sub Indikator 3 Survei Unit Kepatuhan Internal	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey dan Internal
		IKK 03	Persentase Pemenuhan Profil Kompetensi	Non Komposit	Dihitung dari Jumlah PNS Kementerian PU yang sudah mengikuti Penilaian Potensi dan Kompetensi dibagi dengan Jumlah PNS dengan Batas Periode Pensiun ≥2 (dua) tahun.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 04	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Non Komposit	Diperoleh dari Hasil Kuesioner Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7769 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Pekerjaan Umum							
SK 06.01.01	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang Pekerjaan Umum	IKK 01	Persentase ASN Kompeten melalui Pendidikan	Non Komposit	Dihitung dari Jumlah ASN yang Lulus Pendidikan dibagi dengan Jumlah ASN yang Diproyeksikan Lulus Pendidikan ($\geq$ Masa Studi).	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 02	Persentase ASN Kompeten melalui Pelatihan	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Persentase ASN yang Lulus Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning (Bobot=70%); dan 2. Persentase ASN yang Lulus Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar (Bobot=30%).	Sub Indikator 1 Dihitung dari Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning dibagi dengan Target Pelatihan Pelatihan Klasikal dan/atau Blended Learning dan/atau Distance Learning pada Tahun Berjalan. Sub Indikator 2 Dihitung dari Jumlah ASN yang Kompeten melalui Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar dibagi dengan Target Pelatihan E-Learning dan/atau Webinar pada Tahun Berjalan.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 03	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Non Komposit	Dihitung dari Persentase Jumlah ASN Kementerian PU yang Dikembangkan Kompetensinya.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		IKK 04	Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	Non Komposit	Dihitung dari rata-rata nilai hasil evaluasi pasca pelatihan (bidang pelatihan Sumber Daya Air, Cipta Karya, Prasarana Strategis, Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Manajemen Umum, Manajemen Konstruksi, Kepemimpinan dan Fungsional).	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 06.01	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP 10	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (BPSDM)	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%); 2. Tingkat Pengelolaan BMN (10%); 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%); 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%); 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi (10%); 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%); 7. Nilai SAKIP Unit Organisasi (10%); 8. Tingkat Kualitas Layanan Komunikasi Publik (10%); 9. Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi (10%); dan 10. Tingkat Kepatuhan Intern Unit Organisasi (10%).	Sub Indikator 1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap aspek pengolahan, penyusutan, sarana dan prasarana) yang dinilai oleh Biro Umum – Sekretariat Jenderal. Sub Indikator 2 Dihitung dari Komposit: A. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. B. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. C. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP. D. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Sub Indikator 3 Dihitung dari komposit: A. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: Jumlah usulan produk hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100 % B. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% C. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% D. Tingkat efektivitas advokasi hukum : Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey, Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					Sub Indikator 4 Dihitung dari Hasil Survei Ketepatan Layanan Kepegawaian Sub Indikator 5 Berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Organisasi yang terdapat pada OMSPAN Sub Indikator 6 Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu. Sub Indikator 7 Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Unit Organisasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Sub Indikator 8 Dihitung dari hasil survey tingkat kepuasan pengguna layanan publik Sub Indikator 9 Berdasarkan Nilai Transformasi Digital Unit Organisasi yang dinilai oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi – Sekretariat Jenderal. Sub Indikator 10 Dihitung dari komposit : A. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern B. Persentase Pengendalian Kepatuhan Intern C. Persentase Pemantauan Kepatuhan Intern		

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7770 - Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia							
SK 06.01.01	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKK1	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Badan	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (10%); 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (10%); 3. Tingkat Layanan Hukum (10%); 4. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%); 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja (10%); 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (10%); 7. Nilai SAKIP Unit Kerja (10%); 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%); 9. Nilai Transformasi Digital Unit Kerja (10%); dan 10. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (10%).	Sub Indikator 1 Dihitung dari tingkat layanan pengelolaan kearsipan Sub Indikator 2 Dihitung dari Komposit: A. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. B. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. C. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP. D. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Sub Indikator 3 Dihitung dari tingkat layanan hukum Sub Indikator 4 Dihitung dari Hasil Survei Ketepatan Layanan Kepegawaian Sub Indikator 5 Berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja yang terdapat pada OMSPAN Sub Indikator 6 Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu. Sub Indikator 7 Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator SAKIP BPSDM Sub Indikator 8 Dihitung dari tingkat layanan komunikasi publik Sub Indikator 9 Berdasarkan Nilai Transformasi Digital Unit Kerja yang dinilai oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi – Sekretariat Jenderal. Sub Indikator 10 Berdasarkan hasil penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko tingkat T2 oleh Unit Kepatuhan Intern.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey, Internal dan Eksternal

KODE SASARAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		IKK2	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengelolaan Talenta	Indikator dihitung secara komposit dari: 1. Tingkat Layanan Pengelolaan Kearsipan (12,5%); 2. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (12,5%); 3. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (12,5%); 4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja (12,5%); 5. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (12,5%); 6. Nilai SAKIP Unit Kerja (12,5%); 7. Nilai Transformasi Digital Unit Kerja (12,5%); dan 8. Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko T2 (12,5%).	Sub Indikator 1 Dihitung dari tingkat layanan pengelolaan kearsipan Sub Indikator 2 Dihitung dari Komposit: A. Penatausahaan: ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. B. RKBMN: ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. C. Penggunaan: Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP. D. Wasdal BMN: ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Sub Indikator 3 Dihitung dari Hasil Survei Ketepatan Layanan Kepegawaian Sub Indikator 4 Berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja yang terdapat pada OMSPAN Sub Indikator 5 Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI secara tepat waktu. Sub Indikator 6 Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator SAKIP BPSDM Sub Indikator 7 Berdasarkan Nilai Transformasi Digital Unit Kerja yang dinilai oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi – Sekretariat Jenderal. Sub Indikator 8 Berdasarkan hasil penilaian efektivitas penerapan Manajemen Risiko tingkat T2 oleh Unit Kepatuhan Intern.	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Survey, Internal dan Eksternal
		IKK3	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis				
		IKK4	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah				
		IKK 5	Tingkat dukungan manajemen Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen				
		IKK6	Tingkat dukungan manajemen Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah				
		IKK7	Tingkat dukungan manajemen Balai Penilaian Kompetensi				
		IKK8	Tingkat dukungan manajemen Politeknik Pekerjaan Umum				

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN/PROYEK PRIORITAS

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penggunaan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penggunaan Unor	Sumber Pendanaan	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Prioritas																														
1	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	RPJMN 2025-2029					Ditjen CK		33,0	36,0	38,0	40,0	43,0	1.226.785	7.512.214	16.829.711	19.780.367	21.997.389	22.844.242	25.629.840	20.264.992	22.314.336	26.144.665	24.071.027	33.142.054	37.094.703	42.094.703	48.142.054	
2	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim berbasis CWIS	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	RPJMN 2025-2029					Ditjen CK		12,5	17,0	21,0	26,0	30,0	2.614.951	16.081.481	18.336.375	23.561.014	20.096.181	9.042.087	24.379.718	24.704.233	29.534.572	26.501.241	11.657.038	40.461.199	43.040.608	53.095.586	46.597.422	
3	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	RPJMN 2025-2029					Ditjen CK		24,0	28,0	31,0	34,0	38,0	623.794	12.705.173	19.836.680	21.953.383	26.562.780	50.213.206	38.131.827	31.000.320	28.883.617	24.274.221	50.837.000	50.837.000	50.837.000	50.837.000	50.837.001	
Proyek Prioritas																														
1	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Madrasah yang Berkualitas	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	RPJMN 2025-2029	Baru	on going	Nasional	Kemendikdas men (Koordinator)	Ditjen PS	RM						1.878.569	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000						1.878.569	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
2	Sekolah Rakyat	Pencegahan anak tidak sekolah	Inpres 08 Tahun 2025	Baru	on going	Nasional	Kemensos (Koordinator)	Ditjen PS	RM						10.074.086	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000						10.074.086	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	
3	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate	- Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian muhikomoditas - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	RPJMN 2025-2029	Baru		Kalimantan Tengah, Papua Selatan	Kementerian Pertanian, Swasta	Ditjen SDA	RM	728,25	12.095,00	111.768,36	105.065,20	110.226,22	70.000	854.929	15.101.574	11.597.960	11.509.292				4.976.251	4.966.251	70.000	854.929	15.101.574	16.574.211	16.475.543	Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua Selatan
4	Layanan Irigasi Lumbung Pangan Nasional	- Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian muhikomoditas - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	RPJMN 2025-2029	Baru		Nasional	KemenPU	Ditjen SDA	RM, PLN, SBSN	85.135,75	202.686,00	625.763,64	652.055,80	594.475,78	4.816.943	8.964.524	37.060.329	34.425.678	31.592.676				4.976.251	4.966.251	4.816.943	8.964.524	37.060.329	39.401.929	36.558.927	Seluruh kegiatan bangunan dan jaringan irigasi selain pada provinsi Kalimantan tengah dan Papua Selatan
5	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	RPJMN 2025-2029	Baru		DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah	KemenPU dan Pemprov DKI Jakarta	Ditjen SDA	RM, SBSN, KPBU	1	7,43				56.042	110.300							4.976.251	4.966.251	56.042	110.300	-	4.976.251	4.966.251	
6	Bendungan Way Apu	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Makuku	KemenPU	Ditjen SDA	RM			1			532.683	268.557	189.871							532.683	268.557	189.871	-	-		
7	Bendungan Jragung	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen SDA	RM		1				399.287	389.453								399.287	389.453	-	-	-		
8	Bendungan Mbay	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	NTT	KemenPU	Ditjen SDA	RM			1			372.890	119.483	10.992							372.890	119.483	10.992	-	-		

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugas an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
10	Berdungan Bulungo Ulu	Jumlah berdungan yang selesai dibangun	RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Gorontalo	KemenPU	Ditjen SDA	RM			1			119.700	410.216								119.700	410.216	-	-	-		
11	SPAM Regional Wosonulais		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen CK	PLN						177.160	67.766	-	-	-	-	-	-	-	177.160	67.766	-	-	-		
					Perencanaan			SBSN					-	156.980	-	-	-	-	-	-	-		156.980	-	-	-				
12	SPAM Regional Benteng – Kobena		RPJMN 2025-2029	Carry over	Perencanaan	Bengkulu	KemenPU	Ditjen CK	SBSN						-	25.343	-	-	-	-	-	-		25.343	-	-	-			
13	SPAM Karian Serpong				Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	DKI Jakarta	KemenPU dan Pemprov DKI Jakarta	Ditjen CK	APBN, KPB U					612.370		1.480.000		-	-		2.500.000	-			4.592.370		-		
14	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)																													
	a. Pembangunan bangunan Gedung dan Kawasan IKN		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	IKN	OIKN, KemenPU, BUMN, Swasta	Ditjen CK	RM						2.118.301	578.891	-	-	-	-	-	-	-	2.118.301	578.891	-	-	-		
	b. Pembangunan IPAL 1, 2, 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN)		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	IKN	OIKN, KemenPU, BUMN, Swasta	Ditjen CK	RM						9.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c. Pembangunan SPAM IKN		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	IKN	OIKN, KemenPU, BUMN, Swasta	Ditjen CK	RM						399.166	11.449	-	-	-	-	-	-	-	-	11.449	-	-	-		
15	Jalan Tol Serang – Panimbang		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Banten	KemenPU	Ditjen BM	LOAN, RMP , dan PDN						591.720	122.130				818.096	818.096									
16	Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Jawa Timur	BUJT	Ditjen BM	KPBU										2.877.134											
17	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban		RPJMN 2025-2029	Carry over	on going	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen BM	LOAN JICA						295.680	2.470				558.540	2.234.161	2.234.161								
18	Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo		RPJMN 2025-2029		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Tengah dan DIY	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU					-	-	-	-	-	2.372.130	4.061.583	11.638.608	2.413.505	-	2.372.130	4.061.583	11.638.608	2.413.505	-	
19	Jalan Tol Ancol Timur-Phiit Elevated (HBR 2)		RPJMN 2025-2029		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	DKI Jakarta	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU					-	-	-	-	-	-	-	15.851.042	-	-	-	15.851.042	-	-		
20	Jalan Tol Serpong-Balaraja		RPJMN 2025-2029		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Banten	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU					-	-	-	-	-	-	-	-	14.469.982	-	-	-	-	14.469.982	-	

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugas an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
21	Jalan Tol Kamal- Tehuknaga- Rajeg		RPJMN 2025 2029	Baru	on going	DKI Jakarta dan Banten	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	-	10.317.835	12.904.814	-	-	-	10.317.835	12.904.814	-	
22	Jalan Tol Kediri- Tuhungagung		Rancangan Renstra BM	Baru	on going	Jawa Timur	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	5.230.913	4.689.323	-	-	-	5.230.913	4.689.323	-	-	
23	Jalan Tol JORR Elevated (Cikunir- Uhjumi)		RPJMN 2025 2029	Baru	on going	DKI Jakarta dan Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	-	-	21.266.890	-	-	-	-	21.266.890	-	
24	Jalan Tol Semanan- Grogol (6 Ruas Tol DKI)		RPJMN 2025 2029		on going	DKI Jakarta	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	-	17.720.000	-	-	-	-	17.720.000	-	-	
25	Jalan Tol Gregol - Kelapa Gading (6 Ruas Tol DKI)		RPJMN 2025 2029		on going	DKI Jakarta	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Jalan Tol Sigli- Banda Aceh		Rancangan Renstra BM		on going	Aceh	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	4.565.058	-	-	-	-	4.565.058	-	-	-	-	
27	Jalan Tol Rengat- Pekanbaru Sekisi Junction- Bypass Pekanbaru		RPJMN 2025 2029		on going	Riau	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	7.805.000	-	-	-	-	7.805.000	-	-	-	
28	Jalan Tolertosono- Kediri		RPJMN 2025 2029		on going	Jawa Timur	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	-	1.704.334	2.027.515	-	-	-	1.704.334	2.027.515	-	
29	Jalan Tol Ciarwi - Sukabumi		RPJMN 2025 2029		on going	Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	2.004.333	-	1.909.237	-	-	2.004.333	-	1.909.237	-	
30	Jalan Tol Depok- Antasari		Rancangan Renstra BM		on going	Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	5.060.379	-	-	-	-	5.060.379	-	-	-	

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugas an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan	
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
31	Jalan Tol Kayu Agung- Palembang- Betung		Rancangan Renstra BM	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Selatan	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	9.704.209	-	-	-	-	9.704.209	-	-	-		
32	Jalan Tol Bogor Ring Road		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Barat	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	485.050	-	-	-	-	485.050	-	-	-		
33	Jalan Tol Pekanbaru- Padang		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Barat dan Riau	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	11.181.198	-	2.838.668	-	-	11.181.198	-	2.838.668	-	-	
34	Jalan Tol Betung (Sp Sekayu) - Tempino - Jambi		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Selatan dan Jambi	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	-	-	-	2.275.592	-	14.539.669	-	-	2.275.592	-	14.539.669	-	-	
35	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	DKI Jakarta dan Jawa Barat	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU dan APBN						-	-	-	1.594.500	1.594.500	-	12.972.784	-	1.717.857	-	-	12.972.784	-	3.312.357	1.594.500		
36	Jalan Tol Binjai- Langsa		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Utara dan Aceh	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU dan APBN						-	2.812.840	7.100.000	4.287.160	-	3.371.418	-	5.186.797	7.905.394	-	3.371.418	2.812.840	12.286.797	12.192.554	-		
37	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Tengah dan DIY	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU dan APBN						-	2.050.000	2.050.000	-	-	-	2.821.156	-	4.353.174	7.080.914	-	4.871.156	2.050.000	4.353.174	7.080.914		
38	Jalan Tol Semarang - Demak		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Tengah	KemenPU dan BUUT	Ditjen BM	KPBU dan APBN						-	473.370	281.400	-	-	-	-	2.335.601	-	-	-	473.370	2.617.001	-	-		

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penggunaan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Pengusan Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
39	Jalan Tol Belau- Cawang- Kp. Melayu		Rancangan Renstra BM	Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	DKI Jakarta dan Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	PHLN dan KPBU	-	-	-	-	-	-	-	2.527.176	2.498.077	3.615.121	-	-	2.527.176	2.498.077	3.615.121						
40	Jalan Tol Kuala Tanjung- Tebing Tinggi-Parapat		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Utara	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	2.117.894	-	4.233.333	4.233.333	8.935.586	2.117.894	-	4.233.333	4.233.333	8.935.586						
41	Jalan Tol Aleses IKN		RPJMN 2025 2029	Baru	on going	Kalimanta n Timur	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	APBN	-	-	-	-	-	-	25.336.270	-	-	-	-	25.336.270	-	-	-						
42	Jalan Tol Bogor Serpong (Via Parung) (JORR III)		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Jawa Barat dan Banten	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	-	-	12.352.000	-	-	-	-	12.352.000	-	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
43	Jalan Tol Sentul Sclatan - Karawang Barat		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.838.016	-	-	-	-	5.838.016	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
44	Jalan Tol Bandara Supadio - Pelabuhan Kijing		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	Kalimanta n Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.754.526	-	-	-	-	1.754.526	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
45	Jalan Tol Simpang Indralaya- Muara Enim		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Sumatera Selatan	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.184.000	-	-	-	-	19.184.000	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
46	Jalan Tol Gedebage- Tasikmalaya- Cilacap		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Jawa Barat dan Jawa Tengah	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.922.409	-	-	-	-	5.922.409	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
47	Jalan Tol Gilimanuk- Mengwi		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Bali	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU dan APBN	2.960.000	2.960.000				-	-	5.880.504	5.460.843	-	-	2.960.000	8.840.504	5.460.843	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					
48	Jalan Tol Dumai- Sp Sigampul- Rantau Prapat		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Sumatera Utara	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU						-	-	-	20.711.336	-	-	-	-	20.711.336	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM					

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penggunaan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Pengas an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
49	Jalan Tol Rengat-Pekanbaru Sekisi Rengat-Junction Pekanbaru		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permendo Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Riau	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	2.795.079	-	-	-	-	2.795.079	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
50	Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Sumatera Utara	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	10.408.014	-	-	-	-	10.408.014	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
51	Jalan Tol Jambi-Rengat		RPJMN 2025 2029	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permendo Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Jambi dan Riau	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU dan APBN						2.171.850			2.171.850		-	-	-	5.287.343	-	-	-	2.171.850	7.459.193	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
52	Jalan Tol Harbour Toll Road Semarang		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	Jawa Tengah dan DIY	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	8.741.071	-	-	-	-	8.741.071	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
53	Jalan Tol Cikunir-Karawaci (Elevated)		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	DKI Jakarta dan Banten	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	6.537.500	-	-	-	-	6.537.500	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
54	Jalan Tol Semanan-Balaraja		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	DKI Jakarta dan Banten	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	4.794.381	-	-	-	-	4.794.381	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
55	Jalan Tol Malang – Kepanjen		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	Jawa Timur	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	3.577.173	-	-	-	-	3.577.173	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
56	Jalan Tol Caringin - Dramaga – Sukabenda		Rancangan Renstra BM	Lanjutan PSN, Sudah Tercantumkan pada Permendo Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	Perencanaan	Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	2.149.483	-	-	-	-	2.149.483	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
57	Jalan Tol Pelabuhan panjang - Lematang		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Lampung	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	4.940.000	-	-	-	-	4.940.000	-	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
58	Jalan Tol Pejagan-Cilacap		Rancangan Renstra BM	Baru	Perencanaan	Jawa Tengah	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	6.507.723	-	-	-	-	6.507.723	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
59	Jalan Tol Tuban-Babat- Lamongan Gresik (Bunder-Manyar)		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Jawa Timur	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	3.541.699	-	-	-	-	3.541.699	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
60	Jalan Tol Sukabumi-Cranjang		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Jawa Barat	KemenPU dan BUJT	Ditjen BM	KPBU											-	-	-	-	5.166.254	-	-	-	-	5.166.254	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugas an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
61	Jalan Tol Cijulang-Pudalarang		RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Jawa Barat	KemenPU dan BUIT	Ditjen BM	KPBU															7.682.110	-	-	-	-	7.682.110	Perencanaan oleh DJPI dan konstruksi akan dilanjutkan oleh DJBM
62	Jakarta Sewerage System		RPJMN 2025 2029	Carry over	on going	DKI Jakarta	KemenPU dan Pemprov DKI Jakarta	Ditjen CK	PLN, APBD						775.169	1.391.787	2.226.633	47.565	3.204	424.318	-	-	-	-	1.199.487	1.391.787	2.226.633	47.565	3.204	
63	Pengembangan KEK dan KI		RPJMN 2025 2029	Carry over		Nasional	BUPP dan Swasta																							
64	Bendungan Budong Budong	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Sulawesi Barat	KemenPU	Ditjen SDA	RM						447.634	100.952	94.216							447.634	100.952	94.216	-	-		
65	Bendungan Manikin	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	NTT	KemenPU	Ditjen SDA	RM						915.330	102.659	148.688	137.050						915.330	102.659	148.688	137.050	-		
66	Bendungan Bagong	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Timur	KemenPU	Ditjen SDA	RM						679.618	104.991	180.490	157.826						679.618	104.991	180.490	157.826	-		
67	Bendungan Bener	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen SDA	RM						1.281.486	560.224	618.595	633.189	308.993						1.281.486	560.224	618.595	633.189	308.993	
68	Bendungan Tiga Dihaji	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Sumatera Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM						1.969.355	459.598	594.650	419.991	673.400						1.969.355	459.598	594.650	419.991	673.400	
69	Bangunan Pengarah Rukoh			Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Aceh	KemenPU	Ditjen SDA	RM						216.455	155.195	262.995							216.455	155.195	262.995	-	-		
70	Bendungan Karangnongko	Jumlah bendungan yang selesai dibangun		Lanjutan PSN, Sudah Tercantam pada Permenko Bidang Perekonomi n No. 12 Tahun 2024	on going	Jawa Timur	KemenPU	Ditjen SDA	RM						492.503	112.000	287.229	137.497						492.503	112.000	287.229	137.497	-		

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penggunaan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Pengusa an Unor	Sumber Pendanaa n	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan	
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
71	Bendungan Pamukkuhi	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	persiapan impounding	Sulawesi Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM						5.060										5.060	-	-	-	-		Konstruksi selesai, Pengadaan Tanah belum selesai
72	Bendungan Karian	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	persiapan impounding	Banten	KemenPU	Ditjen SDA	RM						90.000	35.000								90.000	35.000	-	-	-	-		Konstruksi selesai, Pengadaan Tanah dan Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan Belum Selesai
73	Bendungan Cipanas	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	persiapan impounding	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen SDA	RM						192.500	456.080								192.500	456.080	-	-	-	-		Konstruksi selesai, Pengadaan Tanah dan Pemenuhan Kewajiban Penggunaan Kawasan Hutan Belum Selesai
74	Bendungan Tapin	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	persiapan impounding	Kalimanta n Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM						1.700									1.700	-	-	-	-	-		Konstruksi selesai, Pengadaan Tanah Belum Selesai
75	Bendungan Pasceloreng	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola		Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	persiapan impounding	Sulawesi Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM						27.000									-	27.000	-	-	-	-		Konstruksi selesai, Pengadaan Tanah belum selesai
76	Air Baku Karian	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun		Usulan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomi a No. 12 Tahun 2024	on going	Banten	KemenPU	Ditjen SDA	PLN						366.287	509.930	1.999.178	453.333	453.333					366.287	509.930	1.999.178	453.333	453.333			
77	Bendungan Jenebata	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA- 01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	on going	Sulawesi Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM, PLN, RMP						686.664	1.070.193	970.059	221.207						686.664	1.070.193	970.059	221.207	-			

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugasan Unor	Sumber Pendanaan	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
78	Bendungan Cbeet	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	on going	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen SDA	RM						742.260	221.145	828.645	1.470.621	1.813.269						742.260	221.145	828.645	1.470.621	1.813.269	
79	Bendungan Cijurey	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	on going	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen SDA	RM						571.506	310.000	560.372	633.249	779.893						571.506	310.000	560.372	633.249	779.893	
80	Bendungan Riam Kiwa	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	on going	Kalimantan Selatan	KemenPU	Ditjen SDA	RM, PLN, RMP						18.280	280.389	361.497	529.997	661.610						18.280	280.389	361.497	529.997	661.610	
81	Bendungan Cabean	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	on going	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen SDA	RM						199.017	118.209	177.029							199.017	118.209	177.029	-	-		
82	Bendungan Pelosika	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	Penyiapan	Sulawesi Tenggara	KemenPU	Ditjen SDA	RM, PLN, RMP						100	1.371.422	1.812.730	1.812.730	2.653.325						100	1.371.422	1.812.730	1.812.730	2.653.325	
83	Bendungan Kedunglanggar	Jumlah bendungan yang selesai dibangun	Surat Menteri PU No SA-01/Mn 610 tentang Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru di Sektor Sumber Daya Air	Usulan PSN Baru	Penyiapan	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen SDA	RM										1.809.621						-	-	-	-	1.809.621	

No	Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penggunaan Indikator (Kegiatan Prioritas) pada RPJMN	Referensi	Status Proyek	Detail Progres Proyek 2025	Lokasi	Pelaksana	Penugasan Unor	Sumber Pendanaan	Target					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah)					Total					Keterangan						
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029							
84	Bandung Inter Urban Toll Road	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	Keptmen PUPR 2790/2024	Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	Penyiapan	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																			10.130.000*					10.130.000*	Indikasi Penyiapan Proyek KPBU oleh DJPI tahun 2025 dan target Financial Close >2029		
85	Jalan Tol Ciranjang - Padalarang	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	RPJMN 2025 2029 Keptmen PUPR 2790/2024	Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	Penyiapan	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								7.790.000*	Indikasi Penyiapan Proyek KPBU oleh DJPI tahun 2027 dan target Financial Close >2029		
86	Jalan Tol Demak - Tuban	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	RPJMN 2025 2029 Keptmen PUPR 2790/2024	carry over	Penyiapan	Jawa Tengah	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								49.610.000	Indikasi Penyiapan Proyek KPBU oleh DJPI tahun 2026 dan target Financial Close tahun 2029		
87	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	RPJMN 2025 2029 Keptmen PUPR 2790/2024	Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	Penyiapan	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								9.405.000*	Indikasi Penyiapan Proyek KPBU oleh DJPI tahun 2028 dan target Financial Close >2029		
88	Jalan Tol Makassar - Maros - Sugguminasa-Takalar	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan dan Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur Bina Marga	RPJMN 2025 2029 Keptmen PUPR 2790/2024	Baru	Penyiapan	Sulawesi Selatan	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								7.420.000*	Indikasi Penyiapan Proyek KPBU oleh DJPI tahun 2029 dan target Financial Close >2029		
89	SPAM Regional Djuanda	Jumlah Proyek Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Air Minum yang siap dikerjasamakan	RPJMN 2025 2029	Baru	Perencanaan	Jawa Barat	KemenPU	Ditjen PI	KPBU											-	-	-														
90	Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering		Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2024	Lanjutan PSN, sudah tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2024	Penyiapan	Sumatera Selatan	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								1.651.319	-		1.651.319
91	Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM		Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	Lanjutan PSN, Sudah Tercantum pada Permenko Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024	Penyiapan	Kepulauan Riau	KemenPU	Ditjen PI	KPBU																								14.400.000	-		14.400.000

Keterangan
(*) penyelesaian proyek diperkirakan berakhir

MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	RPP tentang Sumber Air	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Muatan RPP mencakup juga pengaturan tentang sungai, danau, rawa, dan sumber air lainnya.	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2026
2	RPP tentang Irigasi	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2026
3	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Menginstruksikan untuk mengambil langkah- langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing salah satunya untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2025
4	Rpermen Pedoman Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2026
5	Rpermen Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan	Merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2026

MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan	Menjalankan amanat UU No 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang menyatakan beberapa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
2	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengendalian Ruang di Sekitar Jalan	Menjalankan amanat Pasal 24 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Pedoman ini berisi setidaknya berkaitan dengan (a) pemberian patok batas ruang pengawasan jalan, dan (b) pemberian izin pembatasan jumlah jalan masuk, serta (c) ketentuan lainnya terkait penggunaan ruang di sekitar jalan dalam rangka menjaga agar penyediaan jalan tetap sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan Permen PUPR No 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
3	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pengambilalihan Pelaksanaan Urusan Pembangunan Jalan	Menjalankan amanat dalam Pasal 15, 16, 16A UU No 2 Tahun 2022. Dalam peraturan ini dimuat tatacara melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan provinsi, Jalan kabupaten, dan Jalan kota	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
4	Revisi Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	Menjalankan amanat pasal 9 UU No 2 Tahun 2022 (pasal 61 Ayat (4) dan pasal 62 Ayat (4) tentang PP Jalan). Khususnya terkait dengan penajaman pengaturan tentang tata cara perubahan status jalan dan konsekuensi administratif terkait perubahan status jalan (termasuk penanganan jalan non status)	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
5	Revisi Permen PU No 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan	Menjalankan amanat pasal 82 ayat (6) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, khususnya berkenaan dengan perubahan kelembagaan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara nasional dengan dibentuknya BRIN (Perpres No 78 Tahun 2021)	Direktorat Bina Teknik	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
6	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Program dan Anggaran Jalan	Menjalankan amanat Pasal 31-34 UU No 2 Tahun 2022 (pasal 84 ayat (4) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Dalam pedoman ini diatur tentang penetapan rencana tingkat kinerja, perkiraan biaya, dan prioritas penanganan jalan, berikut dengan mekanisme penganggarannya, termasuk dukungan pemerintah Pusat ke Daerah serta penerapan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2029
7	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Umum	Menjalankan amanat Pasal 35F UU No 2 Tahun 2022 (Pasal 113 Ayat (2) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Mengatur mengenai ketentuan mengenai penyelenggaraan SPM jalan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggaraan jalan	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
8	Revisi Permen PU No 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Menjalankan amanat Pasal 35G UU No 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Pasal 101 Ayat (3), Pasal 104, Pasal 106, PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Revisi ini akan menyempurnakan ketentuan teknis serta mekanisme pembiayaan dan pelaksanaan preservasi jalan	Direktorat Preservasi Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
9	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Ketentuan Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Menjalankan amanat Pasal 35F Ayat (2) UU No 2 Tahun 2022. Memberikan ketentuan tentang hukum pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan terhadap proses perencanaan, konstruksi, operasional jalan	Direktorat Bina Teknik	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027
10	Revisi Permen PU No: 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan	Menjalankan amanat Pasal 36 UU No 2 Tahun 2022 (pasal 111 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan tata cara, mekanisme, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan jalan. Termasuk di dalamnya pengendalian muatan berlebih	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027
11	Revisi Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan	Menjalankan amanat Pasal 61 A UU No 2 Tahun 2022 (pasal 117 Ayat (6) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Yang menambahkan pengaturan mengenai penyediaan sistem data dan informasi yang dikelola secara terintegrasi	Direktorat Bina Teknik	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
12	Revisi Permen PUPR No 01/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan	Menjalankan amanat Pasal 62 UU No 2 Tahun 2022 (Pasal 120 Ayat (2) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Mempertajam mekanisme dan manifestasi pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, khususnya dalam tahap penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan preservasi	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
13	Revisi Permen PUPR No 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus	Menjalankan amanat Pasal 57A-57F UU No 2 Tahun 2022 (pasal 121 Ayat (2) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). Mempertajam mengenai aspek teknis (pemenuhan persyaratan teknis jalan khusus) dan aspek administrasi (aset negara) dalam penyerahan dan pengambilalihan jalan khusus menjadi jalan umum	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
14	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelayanan, Pemberdayaan, serta Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan Tol	Melaksanakan amanat dari Pasal 22, 23, dan 24 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Permen PU ini mengatur tentang pemberian izin, sosialisasi, dan informasi, serta pemberdayaan, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan tol	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
15	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengembalian Investasi Penugasan Pengusahaan Jalan Tol	Melaksanakan amanat pasal 32 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Permen PU ini mengatur tentang kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027
16	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Perencanaan Teknis Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 53 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Permen PU ini mengatur tentang ketentuan teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perencanaan jalan tol, khususnya untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis akhir jalan tol	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
17	Revisi Permen PUPR No 16/PRT/M/2014 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 63 dan 64 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Revisi ini diperlukan untuk menambahkan pengaturan tentang pengenaan sanksi administratif SPM jalan tol	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
18	Revisi Permen PUPR No 18 Tahun 2020 tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 67 dan 106 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Revisi ini diperlukan untuk menambahkan ketentuan terkait teknologi dan pengelolaan sistem elektronik menggunakan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti, termasuk tata cara pengenaan denda administratif	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
19	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 70, 71, 72 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Peraturan Menteri ini akan mengatur tentang perizinan penggunaan jalan tol serta pemanfaatan bagian jalan tol, termasuk pemasangan iklan di jalan tol	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027
20	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian setelah Masa Konsesi Berakhir	Menjalankan amanat pasal 78 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Peraturan ini akan mengatur tentang tatacara evaluasi konsesi, penetapan pengusahaan jalan tol setelah masa konsesi berakhir, dan penetapan tarif tol baru setelah masa konsesi berakhir.	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
21	Revisi Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 80 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Revisi ini diperlukan untuk menambahkan pengaturan tentang pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026
22	Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penetapan Tarif Jalan Tol	Menjalankan amanat pasal 82 dan 86 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Peraturan Menteri ini akan mengatur mengenai tatacara penetapan pengoperasian jalan tol dan pemberlakuan tarif awal tol serta evaluasi dan penyesuaian tarif tol	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2027
23	Revisi Peraturan Menteri Keuangan No 30 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku Pada Sekretariat BPJT, Kementerian PUPR	Menjalankan amanat pasal 87 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Revisi Peraturan ini diperlukan untuk memasukkan pengaturan tentang PNBPN terkait kelebihan tingkat kelayakan finansial dan penurunan tingkat kelayakan finansial	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
24	Penetapan Keputusan Menteri PU pengganti Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)	Merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat (c.q. Kementerian PU) yang tertuang dalam Pasal 8 UU No 2 Tahun 2022 (Pasal 60 dan Pasal 61 Ayat (1) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). <i>Update</i> penetapan fungsi Jalan pada suatu ruas Jalan sebagai ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang menghubungkan simpul transportasi nasional lainnya dalam Sistem Jaringan Jalan primer dilakukan paling singkat setiap 5 (lima) tahun dengan keputusan Menteri.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
25	Penetapan Keputusan Menteri PU pengganti Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional	Merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat (c.q. Kementerian PU) yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No 2 Tahun 2022 (Pasal 62 Ayat (1) PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan). <i>Update</i> penetapan status Jalan pada suatu ruas Jalan sebagai Jalan nasional paling singkat setiap 5 (lima) tahun dengan keputusan Menteri.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
26	Reviu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040	Merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat (c.q. Kementerian PU) yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2), 18 Ayat (2) UU No 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Pasal 72 Ayat (2) PP No 34 Tahun 2006), di mana evaluasi rencana umum jangka panjang jaringan Jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
27	Penyusunan Permen Pekerjaan Umum tentang Badan Layanan Umum Jalan Tol	Pembentukan Badan Layanan Umum Jalan Tol diperlukan untuk mengelola PNBK kelebihan kelayakan finansial, pendapatan tol yang sudah diambilalih Pemerintah (melaksanakan ketentuan pasal 87 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol)	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	Direktorat Jenderal Bina Marga	2028
28	<i>Update</i> Permen PUPR No 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan	Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan parameter persyaratan teknis dan potongan melintang jalan dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim khususnya yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrim dan kenaikan temperatur (melaksanakan ketentuan pada pasal 24 PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan)	Direktorat Bina Teknik	Direktorat Jenderal Bina Marga	2029

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Peraturan Pemerintah tentang Rumah Negara	Kebutuhan pengaturan pada hal-hal yang belum diatur dalam PP no. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara	Direktorat Bina Penataan Bangunan	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2026
2	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung yang berpedoman pada PP 16/2021, di dalamnya terdapat beberapa pengaturan yang inkonsisten antara satu pasal dengan lainnya, serta terdapat pula beberapa substansi yang dinilai kurang tepat dalam implementasinya. Maka dari itu, keseluruhan isi dari PP 16/2021 perlu dikaji ulang dan dibahas bersama untuk merumuskan usulan perubahannya	Direktorat Bina Penataan Bangunan	1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Hukum 3. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2027
3	Perubahan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	- Perlu sinkronisasi pengaturan substansi dalam PP tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dengan peraturan lainnya, antara lain: 1. Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait penerapan praktik Arsitek Berlisensi dalam penerbitan PBG, 2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait proses penerbitan SKK, STRA, dan Lisensi Arsitek - Perlu pengaturan lebih lanjut agar seluruh pengaturan dalam PP dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan bangunan gedung	Direktorat Bina Penataan Bangunan	1. Kementerian Hukum 2. Sekretariat Kabinet 3. Ikatan Arsitektur Indonesia 4. Dewan Arsitek Indonesia 5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Penyelenggaraan BGN yang sebelumnya dilaksanakan sesuai ketentuan Permen PUPR No. 22/2018, saat ini mengacu pada ketentuan PP 16/2021 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam PP 16/2021 terdapat 23 amanah tugas Menteri terkait penyelenggaraan BGN, Dari 23 amanah dalam PP 16/2021, terdapat 19 amanah yang dibutuhkan pengaturan lebih lanjut (dalam bentuk Permen) sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan BGN. Pengaturan tersebut secara eksplisit mendelegasikan tugas Menteri kepada pejabat Eselon I dan Eselon II sehingga dapat dijadikan acuan operasional dalam penyelenggaraan BGN. Produk hukum yang ditetapkan dapat mencabut Permen PUPR No. 22/2018 yang sebagian besar muatannya telah diatur dalam PP 16/2021.	Direktorat Bina Penataan Bangunan	1. Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan BGN 2. Kementerian Keuangan	2026
5	Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Menindaklanjuti masukan terkait Sub Urusan Kawasan Strategis pada UU Nomor 23 Tahun 2014 (berdasarkan Surat Sesditjen Cipta Karya No. Hk0101- Cs/499 tanggal 10 Maret 2025), maka diperlukan regulasi sebagai acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kawasan strategis.	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	2026
6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Kawasan Strategis	1. Ruang Lingkup Kawasan Strategis: Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Prioritas Nasional, dan Kawasan Strategis Tertentu; 2. Merupakan atributif dari: - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda - UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN - PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN - Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 3. Jangkauan arah pengaturan: Lingkup Kawasan Strategis; Kebijakan dan Strategi; Perencanaan; Pembangunan dan Pengawasan; Pembinaan Kelembagaan.	Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	3. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya 4. Direktorat Bina Penataan Bangunan	2026
7	Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi Kawasan Strategis Tertentu	1. Sesuai kewenangan Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, penyelenggaraan keterpaduan infrastruktur dilaksanakan pada Kawasan Strategis Nasional dan Prioritas Nasional serta Kawasan Strategis Tertentu; 2. Sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu pada Kawasan Strategis Tertentu.	Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya dan Sesditjen Cipta Karya	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
8	Perubahan Permen PU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Menindaklanjuti masukan terkait Sub Urusan Kawasan Strategis pada UU Nomor 23 Tahun 2014 (berdasarkan Surat Sesditjen Cipta Karya No. Hk0101- Cs/499 tanggal 10 Maret 2025) terkait penggabungan Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan ke dalam Sub Urusan Kawasan Strategis.	Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis	1. Direktorat Bina Penataan Bangunan	2026
9	PP tentang Sistem Penyediaan Air minum	Amanat UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Air Minum	2. Direktorat Air Minum 3. Direktorat BTBP 4. Setditjen Cipta Karya	2026
10	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2025-2029	Amanat UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Air Minum	1. Direktorat Air Minum, Direktorat BTBGPL, Setditjen Cipta Karya 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dll	2025
11	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RISPAM Nasional	Amanat PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Berisi terkait dengan perencanaan pengembangan dan tata kelola yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan SPAM hingga tahun 2045	Direktorat Air Minum	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Dalam Negeri	2026
12	Peraturan Presiden tentang SPAM Jaringan Perpipaan sebagai Kewenangan Strategis Nasional	Perpres ini akan menjadi kewenangan strategis Pemerintah Pusat atas proyek- proyek SPAM Jaringan Perpipaan (sebagai amanat dari Pasal 10 (g) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Penetapan SPAM Jaringan Perpipaan menjadi Kewenangan Strategis Nasional adalah upaya untuk memperbaiki kinerja Penyelenggaraan SPAM dan sebagai upaya percepatan akses air minum JP	Direktorat Air Minum	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri	2027
13	Peraturan Menteri PU Pengembangan SPAM	Amanat PP No. 122 tahun 2015 tentang SPAM dan pengganti Permen PUPR 27/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
14	Peraturan Menteri PU Pengelolaan SPAM	Amanat PP No. 122 tahun 2015 tentang SPAM dan pengganti Permen PUPR 27/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2026
15	Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Verifikasi Sertifikat Standar KBLI 36001 - Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	Amanat PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 16 ayat (7)	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2027
16	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata cara perhitungan, pedoman pembentukan struktur tarif, pedoman pemberian subsidi dan tata cara penetapan tarif air minum	Permen PUPR ini diperlukan untuk memberikan pedoman perhitungan tarif, pedoman pembentukan struktur tarif, pedoman pemberian subsidi, dan tata cara penetapan tarif air minum secara nasional.	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2028
17	Peraturan Menteri PU tentang Ketentuan standar operasional prosedur Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM oleh Pelaksana Penyelenggaraan SPAM	Amanat PP No. 122 tahun 2015 tentang SPAM	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2028
18	Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri (BUKS)	Amanat PP No. 122 tahun 2015 tentang SPAM	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2028
19	Kepmen PU tentang Penetapan Tarif Air Minum	Kepmen ini diperlukan agar Menteri PU dapat menetapkan tarif air minum secara nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu layanan prima, efisiensi pemakaian air, keberlanjutan akses Air Minum, perlindungan Air Baku, transparansi dan akuntabilitas.	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2029
20	Kepmen PU tentang Pengalokasian Public Service Obligation (PSO);	Kepmen ini diperlukan sebagai dasar pengalokasian PSO kepada BUMN SPAM, dimana mekanisme PSO merupakan amanat dari Pasal 66 UU BUMN No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan UU NO. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Direktorat Air Minum	Kementerian PU	2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
21	Peraturan Presiden tentang Penugasan Lembaga Regulator Penyelenggaraan SPAM	Perpres ini mengatur pembentukan Badan Regulator Air Minum sesuai amanat RPJMN 2025-2029 untuk memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan advisory dalam transformasi penyelenggaraan SPAM dan menjamin penyelenggaraan SPAM secara nasional sudah sesuai dengan NSPK.	Direktorat Air Minum	1. Kementerian PU 2. Kementerian Keuangan 3. PERPAMSI 4. Kementerian PPN/Bappenas 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Kementerian Kesehatan 7. Kemenko IPK	2029
22	Penetapan konsepsi, naskah akademis dan materi teknis Undang-undang Air Minum (dan Sanitasi)	Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) mengamanatkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat". Dengan menimbang hal tersebut dan urgensi pencapaian target akses air minum, maka terkait cabang produksi yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pengaturan saat ini di tingkat peraturan pemerintah, yaitu dalam bentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak rakyat atas air minum.	Direktorat Air Minum	1. Direktorat Air Minum 2. Direktorat Sanitasi 3. Direktorat BTBGPL 4. Setditjen Cipta Karya 5. PERPAMSI 6. Kementerian PPN/Bappenas 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Kesehatan 9. Kemenko IPK	2029

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
23	PP Sanitasi (Naskah Akademis)	Landasan Yuridis: isu sanitasi telah menjadi isu global dan merupakan salah satu target SDG's. Selain itu RPJPN dan RPJMN juga menetapkan target sanitasi. Meskipun telah menjadi isu global dan nasional, sanitasi belum memiliki payung hukum setingkat UU atau PP (ada kekosongan hukum). Landasan Sosiologis: PP Sanitasi diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Penyusunan peraturan pemerintah tentang sanitasi merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan adanya peraturan yang komprehensif dan efektif, kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Landasan filosofis PP Sanitasi: a. Pasal 28H: Pasal ini menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang sehat tentu mencakup ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. b. Pasal 28D: Pasal ini menjamin hak atas hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk berhak atas perlindungan diri. Akses terhadap sanitasi yang baik merupakan bagian penting dari hak untuk hidup dan berkembang. c. Pasal 34: Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah penyediaan fasilitas umum yang memadai, seperti sanitasi.	Direktorat Sanitasi	1. Kementerian PU 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Lingkungan Hidup 4. Kementerian Kesehatan	2028
24	Perubahan Peraturan Menteri PU No 03 Tahun 2013 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu disesuaikan karena: 1) Peraturan Perundang-Undangan baru yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah dan kebijakan terkait pengelolaan sampah, 2) perkembangan teknologi pengolahan sampah, dan 3) telah berumur lebih dari 5 tahun.	Direktorat Sanitasi	1. Kementerian PU 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Lingkungan Hidup 4. Kementerian Kesehatan	2026
25	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Limbah Air Domestik	Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu disesuaikan karena: 1) Peraturan Perundang-Undangan baru yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah dan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik 2) perkembangan teknologi pengolahan air limbah domestik, dan 3) telah berumur lebih dari 5 tahun.	Direktorat Sanitasi	1. Kementerian PU 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Lingkungan Hidup 4. Kementerian Kesehatan	2026

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Perlu dilakukan pemutakhiran sebagai dampak dari adanya: 1. Perubahan nomenklatur K/L pengampu kegiatan 2. Perubahan kebijakan dan lingkup penanganan rehabilitasi/renovasi sekolah dan madrasah 3. Belum adanya tindak lanjut kepastian penanganan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan 4. Belum adanya tindak lanjut kepastian penanganan pasar	Bagian Hukum Sekretariat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Kementerian Perdagangan	2027
2	Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Perlu dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut kepastian penanganan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pasar, dan prasarana olahraga	Bagian Hukum Sekretariat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Pemuda dan Olahraga	2025
3	Penyusunan Permen Nomor XX tentang Prototipe Pasar	Saat ini sudah terdapat SE DJCK Nomor 41/SE/Dc/2024 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat dan direncanakan akan direviu dan dialihkan menjadi SE DJPS yang kemudian diusulkan menjadi Permen	Direktorat IDPPKOSB Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian PU 2. Kementerian Perdagangan	2026
4	Penyusunan Permen Nomor XX tentang Prototip Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) / Dapur MBG	Saat ini Kementerian PU diamanahkan untuk melaksanakan pendampingan penyusunan desain prototipe SPPG (berdasarkan MoU dan PKS), sesuai PP 16 Tahun 2021 desain prototipe SPPG harus disahkan oleh Menteri PU, sehingga DJPS sedang menunggu usulan penetapan desain prototipe dari BGN yang kemudian dapat diproses menjadi Permen/Kepmen	Direktorat IDPPKOSB Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	1. Kementerian PU 2. Badan Gizi Nasional	2026

Matriks Kerangka Regulasi
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Revisi Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Perbaiki proses bisnis pelaksanaan KPBU pada Tahap Perencanaan, Penyiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan Perjanjian KPBU sebagai upaya percepatan pelaksanaan dan/atau delivery project dengan skema KPBU	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PSSPP)	Semua Unor di Kementerian PU <u>Keterkaitan dengan Tusi KemenPU:</u> - Amanat Perpres No. 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Pasal 46 ayat (2) Menteri dapat mengatur tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing. - Sesuai dengan tugas DJPI berdasarkan Pasal 740 poin a, Permen PU Nomor 1 Tahun 2024: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 739, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan dibidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
2	Keputusan Menteri tentang Rencana Umum KPBU dan Pembiayaan Kreatif Sektor Pekerjaan Umum Tahun 2025-2045	Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 huruf b Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, bahwa dalam hal proses identifikasi dan usulan penetapan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada tahap perencanaan perlu menyusun rencana umum proyek	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PSSPP)	Semua Unor di Kementerian PU Keterkaitan dengan Tusi KemenPU: Pasal 761 poin b, Permen PU Nomor 1 Tahun 2024: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 760, Subdirektorat Sistem dan Kemitraan Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana umum proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pembiayaan kreatif bidang pekerjaan umum (Penyusunan Rencum KPBU sektor Jalan Tol menjadi satu kesatuan dengan Rencum KPBU Sektor Selain Jalan Tol)	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
3	Revisi terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha	<u>Urgensi Revisi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2017:</u> - Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol - Menindaklanjuti rekomendasi KPK melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Nomor B/3896/LIT.05/10-15/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 hal Penyampaian Dokumen Rencana Aksi Hasil Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol serta menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Nomor B/5001/LIT.05/10-15/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Kemanjuan Rencana Aksi Menindaklanjuti Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaran Jalan Tol <u>Urgensi Revisi Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2021:</u> - Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol - Pengaturan batas waktu Izin Prakarsa Jalan Tol untuk memberikan kepastian investasi dan kelayakan jalan tol	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PPIBM)	- Kementerian PU - Kementerian Hukum - Kementerian Keuangan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS - LKPP <u>Keterkaitan dengan Tusi KemenPU:</u> Sesuai dengan Permen PUPR No 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang DJBM, DJPI, dan BPJT, dan berdasarkan Permen PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang BPJT, kewenangan penyusunan pedoman dan standar teknis dalam aspek pembiayaan berada di DJPI	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4	Perpres terkait Dana Abadi untuk Pengelolaan Sumber Daya Air	Dana abadi ini akan menjamin ketersediaan dana secara kontinyu tanpa bergantung APBN, memperkuat tata kelola sektor air, mendukung pemenuhan hak atas air, dan meningkatkan ketahanan nasional melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan untuk mengantisipasi krisis air di masa depan.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PSSPP)	- Kementerian PU - Kementerian Keuangan - Kementerian PPN/BAPPENAS Keterkaitan dengan Tusi Kemen PU: - Merupakan tindak lanjut (rencana aksi) dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10 untuk mendukung keberlanjutan dan upaya konservasi sumber daya air - Sesuai dengan fungsi Kementerian PU, yang salah satunya yakni menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sumber daya air. - Sesuai dengan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yakni penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
5	Peraturan Menteri terkait Kriteria dan Tata Cara Pengembalian Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penugasan yang Bersumber dari Dana Pemerintah Pusat dan Pengalihan Hak Pengelolaan Kepada Pihak Lain	Amanat turunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PPIBM)	- Kementerian PU - Kementerian Hukum - Kementerian Keuangan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS - Kementerian BUMN <u>Keterkaitan dengan Tusi KemenPU:</u> Pasal 32 ayat 5, PP Nomor 23 Tahun 2024: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
6	Perpres terkait Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif untuk Penyediaan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berkelanjutan	- Peraturan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif untuk Penyediaan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berkelanjutan mengatur pemanfaatan aset wakaf untuk infrastruktur PU yang mencakup tata kelola, pengembangan, standar layanan, dan perlindungan hukum para pihak. - Regulasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan layanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui instrumen wakaf produktif. - Model Pemanfaatan Aset Wakaf dalam Infrastruktur PU: a) Aset wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, terminal, atau pasar rakyat. b) Aset tersebut bisa dikembangkan oleh nadzir bekerja sama dengan investor atau badan usaha melalui skema kerjasama (misalnya BOT – Build Operate Transfer, atau sewa jangka panjang). c) Keuntungan dari pemanfaatan tersebut digunakan untuk membiayai operasional fasilitas atau mendanai proyek wakaf lainnya.	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Unit Kerja: PSSPP)	- Kementerian PU - Kementerian Agama - Badan Wakaf Indonesia - KNEKS <u>Keterkaitan dengan Tusi KemenPU:</u> - Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan 43 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aset wakaf dapat dikembangkan atau dimanfaatkan selama tidak menyimpang dari tujuan awal dan dikelola oleh Nadzir, dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan sesuai prinsip syariah. - Sesuai PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 56 s.d Pasal 61) membuka ruang bagi pengembangan wakaf secara produktif, termasuk pembiayaan infrastruktur, selama sesuai tujuan wakaf dan prinsip syariah. - Sesuai dengan fungsi Kementerian PU Pasal 5 huruf a Permen PU No 1 Tahun 2024 yakni melaksanakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.	2029

MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian PU Tahun 2025-2029	Pelaksanaan amanat pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (on going)	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2025
2	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan pemutakhiran sesuai struktur organisasi (on going)	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2025
3	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Komite Keselamatan Konstruksi	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2025
4	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Engineering Services periode 2025-2028	Implementasi kesepakatan perjanjian Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Service, berkala setiap 3 tahun	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2025
5	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Architectural Services periode 2025-2028	Implementasi kesepakatan perjanjian Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Service, berkala setiap 3 tahun	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2025
6	Revisi Keputusan Menteri PUPR Nomor 713 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	1. Merupakan pelaksanaan dari Diktum 22 Kepmen No 713/2022 “Keputusan Menteri ini dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan inflasi pada tahun berjalan.” 2. Adanya masukan dari asosiasi dan LSP P1 adanya biaya yang belum dimasukkan dalam 713, dan kesesuaian biaya di lapangan	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
7	Revisi PP No. 14 Tahun 2021	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 masukan masyarakat jasa konstruksi	1. Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi; 2. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi 3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi 4. Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi 5. Direktorat Kepatuhan Internal	Ditjen Bina Konstruksi	2026
8	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kementerian Pekerjaan Umum	Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri pada sektor jasa konstruksi	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2026
9	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi dan Lembaga Penilaian Keseuaian	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 masukan masyarakat jasa konstruksi	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
10	Revisi Permen PUPR No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi	1. Diperlukan pembaruan melihat dasar hukum yang digunakan masih Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 2. Amanat Pasal 69 UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. 3. Amanat pasal 5 ayat 4 huruf f bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengawasan sistem pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi. 4. Perlu diatur ketentuan terkait pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di bidang konstruksi agar LPK yang nantinya diberikan hak untuk membentuk LSP merupakan LPK yang memiliki standarisasi pelatihan dan mutu yang sama. 5. Diperlukan adanya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2026
11	Peraturan Menteri tentang Forum Jasa Konstruksi	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2020	Dit. Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2027
12	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman SMK	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2028
13	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyelenggaraan KB	Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2022	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2028
14	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Engineering Services periode 2028-2031	Implementasi kesepakatan perjanjian Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Service, berkala setiap 3 tahun	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2028
15	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Indonesia Monitoring Committee (IMC) on Architectural Services periode 2028-2031	Implementasi kesepakatan perjanjian Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Service, berkala setiap 3 tahun	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	2028

MATRIKS KERANGKA REGULASI
SEKRETARIAT JENDERAL

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
1	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung dari Luar Negeri kepada Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PUPR	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2025
2	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Nomenklatur Organisasi dan Jabatan Kementerian PUPR dalam Bahasa Inggris	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Permen PU nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2025
3	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas PDLN di Kementerian PUPR	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2025
4	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Kerja Sama Indonesia dengan Belanda dalam Bidang Keairan periode 2023-2027	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2026
5	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen PUPR Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian PUPR	Penyesuaian lingkup peraturan dan Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
6	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi (TPE) Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2025
7	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Untuk mewujudkan pemerintahan yang tertib administrasi dalam tata naskah dinas, memperlancar komunikasi tertulis yang efektif dan efisien, serta menciptakan keseragaman dalam penerapan tata naskah dinas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan sebuah landasan kerja berupa produk hukum yang mengatur teknik dan prosedur Pedoman Tata Naskah Dinas yang jelas, baku, dan standar. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan.	Biro Umum	ANRI, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2025
8	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum	1. Sebagai dasar hukum untuk tertib pengelolaan barang milik negara 2. Perbaikan Nomenklatur	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
9	Rancangan Permen PU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2025
10	Konsep Revisi Kepmen PUPR Nomor 1176 Tahun 2019 Tentang Satgas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Perubahan Metode Alur Data.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2025
11	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum	1. Perlunya pedoman dan standarisasi guna memberikan keseragaman bentuk dokumen kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum 2. Penyesuaian nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Hukum	Kementerian Hukum, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026
12	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Layanan Advokasi Hukum	1. Perlunya pedoman pelayanan advokasi hukum bagi UPT, Pejabat, Pegawai ASN, dan/atau Purnabakti di Kementerian PU 2. Penyesuaian nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Hukum	Kementerian Hukum, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
13	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum	1. Penyesuaian nomenklatur Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Perlunya pedoman Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan perkembangan teknik dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan dalam: a) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahan-perubahannya; b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Biro Hukum	Kementerian Hukum, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2025
14	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum	1. Untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan memenuhi standar pengelolaan JDIH dalam Permen Kumham NO 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen hukum diperlukan pedoman penyelenggaraan JDIH di Kementerian PU. 2. Perlu dilakukan penggantian peraturan menteri sebelumnya menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU	Biro Hukum	Kementerian Hukum, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
15	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	Penyesuaian Nomenklatur Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian PUPR	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PU	2025
16	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum	Penyesuaian Nomenklatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PU	2026
17	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	1. Penyesuaian nomenklatur Kementerian PU pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Informasi Publik. 2. Revisi substansi untuk disesuaikan dengan kondisi eksisting. 3. Peraturan ini nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.	Biro Komunikasi Publik	Komisi Informasi Pusat, Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum	2026
18	Rancangan Keputusan Menteri PU Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum	1. Peyesuaian nomenklatur Kementerian PU pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 987/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Rancangan Keputusan Menteri ini merupakan dasar penunjukan pejabat/petugas, dan kewenangan serta tanggung jawab dalam tugas pelayanan informasi publik di semua tingkatan PPID di Kementerian Pekerjaan Umum.	Biro Komunikasi Publik	Komisi Informasi Pusat, Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
19	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	Sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib, dalam hal ini terkait Air Minum dan Air Limbah, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal melalui penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan standar mutu kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal.	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah	Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS	2026
20	Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Penilaian Usulan Rencana Kegiatan serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pekerjaan Umum	Menjadi pedoman bagi Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR; Mewujudkan tata kelola penilaian dan persetujuan usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur daerah dan berdampak nasional	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah	Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/BAPPENAS	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
21	Rancangan Surat Edaran Menteri PU tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Kementerian Pekerjaan Umum	Untuk memberikan pedoman yang jelas dan terperinci dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari raya dan Gaji ketiga Belas Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan umum sehingga proses pembayaran dapat dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta untuk mencegah ketidaksesuaian dalam proses administrasi dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran belanja pegawai pada saat pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Kementerian Pekerjaan Umum. Rancangan ini disusun berdasarkan: 1. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun Berkenaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dna Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, PEnsiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun Berkenaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2025 s.d 2029
22	Rancangan keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Road Map PUG Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	Penyesuaian lingkup peraturan dan Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
23	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis	Sebagai dasar hukum untuk tertib pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, pendanaan, dan pembinaan sumber daya kearsipan. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tahun Kearsipan. 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Biro Umum	ANRI, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026
24	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jadwal Retensi Arsip	Sebagai dasar hukum untuk tertib penyusutan arsip baik dalam bentuk pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip sesuai aturan. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tahun Kearsipan. 3. Peraturan Presiden 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Biro Umum	ANRI, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
25	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Klasifikasi Arsip	Sebagai dasar hukum untuk tertib administrasi dalam pemberian nomor dan klasifikasi surat serta sebagai identitas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna melindungi dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tahun Kearsipan. 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Biro Umum	ANRI, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
26	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Sebagai dasar hukum untuk tertib pengolahan arsip khususnya dalam pemberian sifat surat, klasifikasi pemberian akses atas arsip, serta penanganan arsip sesuai dengan akses arsipnya guna melindungi dari penggunaan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah. Rancangan Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tahun Kearsipan. 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Biro Umum	ANRI, Unit Kerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Unit Organisasi di Kementerian PU	2026
27	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum	1. Sebagai dasar hukum untuk tertib pemindahtanganan barang milik negara 2. Perbaikan Nomenklatur 3. Upaya penyelesaian temuan berulang terkait proses pemindahtanganan yang berlarut-larut.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2026
28	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengamanan Barang Milik Negara	1. Perbaikan Nomenklatur 2. Penguatan kegiatan pengamanan melalui penambahan fitur <i>geo-tagging</i>	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
29	Konsep Revisi Keputusan Menteri Nomor 240/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Big Data	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik	2026
30	Konsep Revisi Keputusan Menteri Nomor 584 Tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Penyesuaian nomenklatur terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
31	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penatausahaan Pejabat Perbendaharaan	Untuk menjamin pelaksanaan anggaran dilakukan secara profesional akuntabel diperlukan pengaturan tentang tugas dan tanggung jawab, syarat dan kompetensi serta penetapan pejabat perbendaharaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mencabut regulasi tentang perbendaharaan di Kementerian Pekerjaan umum yang telah diatur secara teknis oleh regulasi yang lebih tinggi Rancangan ini disusun berdasarkan: 1. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan kerja Pengelola APBN. 4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. 5. Peraturan Menteri Keuangan terkait Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	Target Penyelesaian
32	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PU	Untuk menjamin terselenggaranya tata kelola organisasi dan manajemen risiko yang baik diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang komprehensif dan memadai. Dengan perubahan tugas dan fungsi, serta perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian PU, diperlukan adanya pemutakhiran terhadap pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang ada agar dapat menjamin pengendalian yang lebih efektif sehingga dapat menjaga akuntabilitas organisasi. Rancangan ini disusun berdasarkan: 1. PP 60 Tahun 2008 2. Permen PU 1 Tahun 2024 3. Permen PUPR 20 Tahun 2018	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2028

MATRIKS KERANGKA REGULASI
INSPEKTORAT JENDERAL

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Perubahan dan Penggabungan dari 1. Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 Tentang Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian PUPR	Inspektorat Jenderal	Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2026
2	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Pedoman Pengawasan Intern	Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2022 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern	Inspektorat Jenderal	Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2027
3	Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Kepatuhan Intern	Perubahan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 01/SE/M/2024 Tentang Tugas dan Wewenang UKI	Inspektorat Jenderal	Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU	2028

MATRIKS KERANGKA REGULASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Reviu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	Reviu relevansi substansi terhadap dinamika perubahan Nomenklatur Kementerian dan Nama Jabatan	1. Sekretariat BPSDM 2. Pusat Pengelolaan Talenta	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	2027
2	Reviu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Reviu relevansi substansi terhadap dinamika perubahan Nomenklatur Kementerian dan Perkembangan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	1. Sekretariat BPSDM 2. Pusat Pengembangan Kompetensi	Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	2026

MATRIKS KERANGKA REGULASI
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT /INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Keputusan Menteri PU tentang RPIW	Penetapan pemutakhiran RPIW	Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, III	BPIW	2025
2	Peraturan Menteri PU tentang Rencana Strategis Kementerian PU 2025-2029	Acuan perencanaan jangka menengah Kementerian PU	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PU	2025
3	Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR	1. Pemutakhiran peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan di atasnya 2. Penyesuaian peraturan sesuai dengan penyelenggaraan SAKIP yang telah berjalan di Kementerian PU	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PU	2025
4	Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Proses pemrograman dan penganggaran yang lebih rinci dan mengatur pembagian peran keterlibatan Unit Organisasi	Seluruh Unit Kerja di BPIW	Sekretariat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis	2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DODY HANGGODO